



Katalog: 2302004
ISSN 2088-5679



INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA INDONESIA FEBRUARI 2026

Volume 17, Nomor 1, 2026



BADAN PUSAT STATISTIK

Katalog: 2302004
ISSN 2088-5679

<https://www.bps.go.id>

INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA INDONESIA FEBRUARI 2026

Volume 17, Nomor 1, 2026



BADAN PUSAT STATISTIK

Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Februari 2026

Volume 17, Nomor 1, 2026

Katalog: 2302004

ISSN: 2088-5679

Nomor Publikasi: 04100.26024

Ukuran Buku: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman: xxvi+190 halaman

Penyusun Naskah:

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Penyunting:

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Pembuat Kover:

Direktorat Diseminasi, Pemberdayaan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi:

freepik.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Tim Penyusun
Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia
Februari 2026
Volume 17, Nomor 1, 2026

Pelindung

Amalia Adininggar Widyasanti
Sonny Harry Budiutomo Harmadi

Pengarah

M. Nashrul Wajdi

Penanggung Jawab

Teguh Sugiyarto

Penyunting

Sri Isnawati • Kurniati Bachrun • Neny Aditina • Putricia Synthesa
Monica Windi Triasturi • Adilla Khoirunnisa • Nurhalimah

Penulis Naskah

Kurniati Bachrun • Neny Aditina • Putricia Synthesa
Monica Windi Triasturi • Adilla Khoirunnisa

Pengolah Data

Eko Sriyanto • Daniel Bastian Lubis

Penata Letak

Nurhalimah

KATA PENGANTAR

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik, mencakup 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sakernas merupakan survei yang dirancang khusus untuk menghasilkan gambaran kondisi dan dinamika ketenagakerjaan di Indonesia secara berkesinambungan. Sakernas periode Februari menghasilkan estimasi indikator ketenagakerjaan hingga tingkat provinsi, sedangkan Sakernas periode Agustus dapat menyajikan estimasi indikator ketenagakerjaan pokok hingga tingkat kabupaten/kota.

Publikasi Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Februari 2026 memuat berbagai indikator pasar tenaga kerja yang mengacu pada konsep *Key Indicators of the Labour Market* (KILM) edisi ke-9 tahun 2015 yang direkomendasikan oleh *International Labour Organization* (ILO). Publikasi ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memahami kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Data yang disajikan dalam publikasi ini bersumber dari hasil Sakernas Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.

Penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak, antara lain petugas lapangan, Tim Sakernas BPS Pusat dan Daerah, yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan Sakernas Februari 2026 dan penyusunan publikasi ini, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan atas dukungan dan telaah yang diberikan. Kritik dan saran dari para pengguna data sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi pada edisi berikutnya. Semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan informasi ketenagakerjaan bagi pemerintah, kalangan akademisi, maupun masyarakat umum.

Jakarta, 24 Juni 2026

Kepala Badan Pusat Statistik,

Amalia Adininggar Widayanti

RINGKASAN EKSEKUTIF

Jumlah angkatan kerja di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hasil Sakernas Februari 2026 mencatat jumlah angkatan kerja mencapai 154,91 juta orang, meningkat dibandingkan Februari 2025 dan Agustus 2025. Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan Februari 2025 dan Agustus 2025. Pada Februari 2026, TPAK tercatat sebesar 70,56 persen. Artinya dari setiap 100 penduduk usia kerja terdapat 71 orang yang termasuk angkatan kerja.

Sejalan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja, rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja atau *Employment to Population Ratio* (EPR) juga meningkat. Pada Februari 2026, EPR tercatat sebesar 67,26 persen, lebih tinggi dibandingkan Februari dan Agustus 2025. Hal ini dapat diartikan bahwa dari setiap 100 penduduk usia kerja terdapat sekitar 67 orang yang bekerja.

Ditinjau dari status pekerjaan utama, pada Februari 2026 menunjukkan bahwa penduduk bekerja dengan status berusaha merupakan kategori terbesar, yaitu mencapai 40,13 persen. Persentase tersebut merupakan gabungan dari berusaha sendiri sebesar 20,57 persen, berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 15,97 persen, dan berusaha dibantu buruh tetap sebesar 3,60 persen. Sementara itu, penduduk berstatus buruh/karyawan/pegawai tercatat sebesar 36,99 persen, pekerja keluarga/tanpa dibayar sebesar 13,67 persen, dan pekerja bebas sebesar 9,21 persen. Pola ini sedikit berbeda jika dibandingkan Agustus 2025, yang mana persentase terbesar penduduk bekerja pada status buruh/karyawan/pegawai.

Dari status pekerjaan sebelumnya dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Pekerja formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya termasuk pekerja informal.

Data Sakernas Februari 2026 menunjukkan bahwa pekerja informal masih mendominasi pasar kerja di Indonesia sebesar 59,42 persen (87,74 juta orang). Angka ini meningkat dibandingkan Februari 2025 dan Agustus 2025, yang mengindikasikan bahwa peran sektor informal dalam menyerap tenaga kerja masih cukup besar. Sementara itu, proporsi pekerja formal tercatat sebesar 40,58 persen atau sekitar 59,93 juta orang.

Dari sisi lapangan usaha, struktur ketenagakerjaan masih didominasi tiga kategori utama, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran; serta Industri. Persentase penduduk bekerja ketiga sektor ini berturut-turut sebesar 28,78 persen, 17,95 persen, dan 13,57 persen.

Berdasarkan jenis pekerjaan utama, penduduk bekerja pada Februari 2026 masih menunjukkan pola yang sama antara Februari 2025 dan Agustus 2025. Pada Februari 2026 jenis pekerjaan utama didominasi oleh Tenaga Produksi, Operator Alat-Alat Angkutan, dan Pekerja Kasar sebesar 29,25 persen. Selanjutnya Tenaga Usaha Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan, dan Perburuan sebesar 28,14 persen, serta Tenaga Usaha Penjualan sebesar 21,11 persen.

Ditinjau dari jam kerja, mayoritas pekerja merupakan pekerja penuh waktu (35 jam atau lebih per minggu) yaitu sebesar 65,52 persen dan 34,48 persen lainnya merupakan pekerja tidak penuh. Pekerja tidak penuh dibedakan menjadi dua kategori, yaitu setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Tingkat pekerja paruh waktu pada Februari 2026 sebesar 25,97 persen. Artinya, dari setiap 100 penduduk bekerja, sekitar 26 orang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan tidak memiliki keinginan menambah jam kerja. Sementara itu, proporsi pekerja dengan jam kerja berlebih (*excessive hours of work*), yakni 49 jam atau lebih per minggu, mencapai 26,06 persen.

Pada Februari 2026, jumlah penduduk setengah penganggur sebanyak 10,73 juta orang. Jika dibandingkan Februari dan Agustus 2025, jumlah setengah pengangguran mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,94 juta orang dan 0,87 juta orang. Penduduk bekerja yang dikategorikan sebagai setengah penganggur adalah yang jam kerjanya di bawah 35 jam dalam seminggu, dan masih mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha atau bersedia menerima pekerjaan tambahan/lain.

Hasil Sakernas Februari 2026 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,68 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia, terdapat sekitar 5 orang penganggur. TPT Februari 2026 mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi Februari 2025 dan Agustus 2025 secara berturut-turut sebesar 0,08 persen poin dan 0,17 persen poin.

Dibandingkan dengan kondisi Agustus 2025, TPT pada Februari 2026 menunjukkan penurunan pada tingkat pendidikan tidak pernah sekolah dan pendidikan menengah. Sedangkan TPT pendidikan dasar dan tinggi justru meningkat dibanding Agustus 2025. Pada kelompok tidak pernah sekolah, TPT menurun 1,72 persen poin menjadi 1,31 persen. Sedangkan pada pendidikan menengah, TPT menurun 0,76 persen poin menjadi 6,82 persen. Sementara itu, pada pendidikan dasar, TPT meningkat 0,19 persen poin menjadi 2,99 persen. Kemudian, TPT pendidikan tinggi meningkat 0,68 persen poin menjadi 5,89 persen.

Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) penduduk usia muda (15–24 tahun) mencapai 16,36 persen, yang berarti sekitar 16 dari 100 angkatan kerja muda berstatus menganggur. Angka TPT usia muda tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,20 persen poin jika dibandingkan dengan kondisi Februari 2025 dan mengalami penurunan sebesar 0,53 persen dibandingkan Agustus 2025.

Tingkat ketidakaktifan merupakan persentase penduduk yang termasuk kategori bukan angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. Tingkat ketidakaktifan sebesar 29,44 persen pada Februari 2026 yang berarti bahwa terdapat sekitar 29 orang dari setiap 100 penduduk usia kerja berada di luar pasar kerja (bukan angkatan kerja).

Indikator KILM 14 (Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf) berdasarkan variabel yang tersedia dalam Sakernas diproksikan menggunakan tingkat pendidikan formal, karena Sakernas tidak mengumpulkan data kemampuan baca tulis/tingkat literasi. Berdasarkan tingkat pendidikan, pada Februari 2026, angkatan kerja didominasi mereka yang berpendidikan dasar ke bawah sebesar 50,75 persen, lalu berpendidikan menengah sebesar 34,52 persen, dan berpendidikan tinggi sebesar 13,30 persen.

Indikator KILM 15 (Upah dan Biaya Kompensasi) berdasarkan hasil Sakernas terbatas pada indikator rata-rata upah atau gaji bersih sebulan dari penduduk bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai karena Sakernas tidak menyediakan data mengenai biaya kompensasi. Rata-rata upah/gaji bersih sebulan buruh/karyawan/pegawai pada Februari 2026 mencapai 3,29 juta rupiah. Dibandingkan Februari 2025, indikator rata-rata upah/gaji bersih sebulan mengalami peningkatan, namun mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2025.

DAFTAR ISI

INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA INDONESIA FEBRUARI 2026

Volume 17, Nomor 1, 2026

KATA PENGANTAR.....	V
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	VII
DAFTAR ISI	XI
DAFTAR TABEL.....	XIII
DAFTAR GAMBAR	XV
DAFTAR LAMPIRAN	XIX
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (AKRONIM)	XXV
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Sakernas dan Analisis Ketenagakerjaan	1
1.2 Sakernas dan KILM	3
1.3 Peran KILM di Bidang Ketenagakerjaan	5
1.4 Analisis Pasar Tenaga Kerja Menggunakan KILM.....	9
BAB 2 PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DAN INDIKATOR KETENAGAKERJAAN	13
2.1 KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	13
2.2 KILM 2. Rasio Penduduk Bekerja terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (<i>Employment to Population Ratio - EPR</i>)	19
2.3 KILM 3. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama.....	25
2.4 KILM 4. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama	27
2.5 KILM 5. Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama	29
2.6 KILM 6. Pekerja Paruh Waktu	34
2.7 KILM 7. Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja.....	42
2.8 KILM 8. Penduduk Bekerja di Kegiatan Informal	50

BAB 3 INDIKATOR PENGANGGURAN	57
3.1 KILM 9. Pengangguran.....	57
3.2 KILM 10. Pengangguran pada Kelompok Umur Muda	70
3.3 KILM 12. Setengah Pengangguran (<i>Underemployment</i>).....	78
BAB 4 INDIKATOR BUKAN ANGKATAN KERJA.....	87
4.1 KILM 13. Tingkat Ketidaktifan	87
BAB 5 INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF	91
5.1 KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf.....	91
BAB 6 INDIKATOR UPAH DAN BIAYA TENAGA KERJA.....	99
6.1 KILM 15. Upah dan Biaya Kompensasi.....	99
BAB 7 PENJELASAN TEKNIS	103
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN	131

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026	25
Tabel 2	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (17 Kategori), Februari 2026.....	27
Tabel 3	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama, Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026	31
Tabel 4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin dan Daerah tempat Tinggal (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	57
Tabel 5	Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026	62
Tabel 6	Distribusi Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen),	65
Tabel 7	Rasio Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Umur Muda terhadap TPT Umur Dewasa Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026	74
Tabel 8	Jumlah Penduduk Bekerja yang Termasuk Setengah Penganggur Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (juta orang), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026	78
Tabel 9	Indikator Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026	80
Tabel 10	Distribusi Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026 ..	84

Tabel 11	Indikator Ketidakaktifan Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	87
Tabel 12	Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal, Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026	92
Tabel 13	Rata-Rata Upah/Gaji Selama Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (juta rupiah), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026	100

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Jumlah Angkatan Kerja dan TPAK, Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	13
Gambar 2	TPAK Menurut Jenis Kelamin (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	15
Gambar 3	TPAK Menurut Kelompok Umur (persen), Agustus 2025 dan Februari 2026.....	16
Gambar 4	TPAK Menurut Provinsi (persen), Agustus 2025 dan Februari 2026.....	18
Gambar 5	<i>Employment to Population Ratio</i> (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	19
Gambar 6	<i>Employment to Population Ratio</i> Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	20
Gambar 7	<i>Employment to Population Ratio</i> Menurut Kelompok Umur Muda dan Dewasa (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	21
Gambar 8	<i>Employment to Population Ratio</i> Menurut Kelompok Umur (persen), Agustus 2025 dan Februari 2026	22
Gambar 9	<i>Employment to Population Ratio</i> Menurut Provinsi (persen), Agustus 2025 dan Februari 2026	24
Gambar 10	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2026.....	28
Gambar 11	Persentase Penduduk Bekerja.....	32
Gambar 12	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Daerah Tempat Tinggal, Februari 2026	33
Gambar 13	Tingkat Pekerja Paruh Waktu (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	34

Gambar 14	Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026	35
Gambar 15	Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Daerah Tempat Tinggal (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026	36
Gambar 16	Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi (persen), Agustus 2025 dan Februari 2026	38
Gambar 17	Kontribusi Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026	39
Gambar 18	Kontribusi Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu (persen), Agustus 2025 dan Februari 2026	41
Gambar 19	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026	42
Gambar 20	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja dan Jenis Kelamin, Februari 2026.....	44
Gambar 21	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja dan Daerah Tempat Tinggal, Februari 2026	46
Gambar 22	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, Februari 2026.....	49
Gambar 23	Persentase Penduduk Bekerja pada Kegiatan Formal/Informal, Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026	51
Gambar 24	Persentase Penduduk Bekerja	52
Gambar 25	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal/Informal dan Daerah Tempat Tinggal, Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	54
Gambar 26	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal/Informal dan Provinsi, Februari 2026.....	56
Gambar 27	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi (persen), Agustus 2025 dan Februari 2026	59

Gambar 28	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	61
Gambar 29	Distribusi Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Provinsi (persen), Februari 2026.....	68
Gambar 30	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Umur Muda (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	71
Gambar 31	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Umur Muda Menurut Jenis Kelamin (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	72
Gambar 32	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Umur Muda Menurut Daerah Tempat Tinggal (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	73
Gambar 33	<i>Share</i> Penganggur Umur Muda terhadap Total Penganggur dan terhadap Total Penduduk Umur Muda (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026	76
Gambar 34	Distribusi Setengah Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	82
Gambar 35	Tingkat Ketidaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (persen), Februari 2026.....	89
Gambar 36	Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur, Agustus 2025 dan Februari 2026.....	95
Gambar 37	Distribusi Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, Februari 2026.....	97
Gambar 38	Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Selama Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi (juta rupiah), Agustus 2025 dan Februari 2026.....	102
Gambar 39	Konsep Dasar Angkatan Kerja.....	103

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (orang), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	133
Lampiran 2	Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal (orang), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	135
Lampiran 3	Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (orang), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	136
Lampiran 4	Penduduk Bekerja Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal (orang), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	138
Lampiran 5	Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal (orang), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	139
Lampiran 6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	140
Lampiran 7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	141
Lampiran 8	Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (orang), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	142
Lampiran 9	Rasio Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja terhadap Jumlah Penduduk (<i>Employment to Population Ratio-EPR</i>) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	144
Lampiran 10	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	145
Lampiran 11.a	Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin (orang), Februari 2025 dan Agustus 2025.....	147

Lampiran 11.b	Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin (orang), Februari 2026.....	149
Lampiran 12	Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal (orang), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	151
Lampiran 13	Indikator Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	152
Lampiran 14	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal, dan Jumlah Jam Kerja, Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	153
Lampiran 15	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	154
Lampiran 16	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Kegiatan Formal/Informal (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	156
Lampiran 17	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	157
Lampiran 18	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	158
Lampiran 19	Persentase Pengangguran Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	159
Lampiran 20	Persentase Setengah Pengangguran Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	160
Lampiran 21	Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja Menurut Provinsi (orang), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	161
Lampiran 22	Tingkat Ketidakaktifan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	162

Lampiran 23	Persentase Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	163
Lampiran 24	Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (rupiah), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	164
Lampiran 25	Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal (rupiah), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026.....	165
Lampiran 26	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, Februari 2026.....	166
Lampiran 27	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur, Februari 2026.....	167
Lampiran 28	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Provinsi, Februari 2026	168
Lampiran 29	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Penduduk yang Bekerja Menurut Kelompok Umur, Februari 2026.....	169
Lampiran 30	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur, Februari 2026	169
Lampiran 31	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur (persen), Februari 2026	170
Lampiran 32	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi (persen), Februari 2026.....	171
Lampiran 33	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi, Februari 2026	172
Lampiran 34	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Rasio Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Provinsi, Februari 2026.....	173
Lampiran 35	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Februari 2026	174

Lampiran 36	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> -RSE) Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, Februari 2026.....	175
Lampiran 37	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> -RSE) Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan, Februari 2026.....	176
Lampiran 38	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> -RSE) Indikator Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, Februari 2026.....	177
Lampiran 39	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> -RSE) Indikator Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi (persen), Februari 2026	178
Lampiran 40	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> -RSE) Indikator Kontribusi (<i>Share</i>) Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi (persen), Februari 2026.....	179
Lampiran 41	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> -RSE) Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, Februari 2026.....	180
Lampiran 42	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> -RSE) Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Kegiatan Formal, Februari 2026.....	181
Lampiran 43	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> -RSE) Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Kegiatan Informal, Februari 2026.....	182
Lampiran 44	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> -RSE) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi (persen), Februari 2026	183
Lampiran 45	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> -RSE) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan (persen), Februari 2026	184
Lampiran 46	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> -RSE) Persentase Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan, Februari 2026.....	184
Lampiran 47	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> -RSE) Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, Februari 2026.....	185

Lampiran 48	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja Menurut Provinsi, Februari 2026	186
Lampiran 49	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Tingkat Ketidakaktifan Menurut Provinsi (persen), Februari 2026.....	187
Lampiran 50	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, Februari 2026.....	188
Lampiran 51	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Selama Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha (rupiah), Februari 2026	189
Lampiran 52	Kesalahan Baku Relatif (<i>Relative Standard Error</i> –RSE) Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi (rupiah), Februari 2026	190

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (AKRONIM)

AK	Angkatan Kerja
BAK	Bukan Angkatan Kerja
BPS	Badan Pusat Statistik
EPR	<i>Employment-to-Population Ratio</i>
ICLS	<i>International Conference of Labour Statisticians</i>
ILO	<i>International Labour Organization</i>
ISCED	<i>International Standard Classification of Education</i>
ISIC	<i>International Standard Industrial Classification</i>
ISCO	<i>International Standard Classification of Occupations</i>
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KBJI	Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia
KILM	<i>Key Indicators of the Labour Market</i>
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-Operation and Development</i>
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SP	Sensus Penduduk
STP	Setengah Penganggur
SUSENAS	Survei Sosial Ekonomi Nasional
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

BAB 1 PENDAHULUAN

Data ketenagakerjaan merupakan aspek penting dalam menggambarkan indikator pasar tenaga kerja di Indonesia. Salah satu sumber penyajian indikator ini berasal dari pendataan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sakernas bertujuan untuk memantau dinamika ketenagakerjaan sehingga dapat menjadi dasar perumusan dan evaluasi kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Sejak triwulan I tahun 2011, BPS menyusun publikasi yang mengacu pada publikasi Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization*-ILO), yaitu Indikator Pasar Tenaga Kerja (*Key Indicators of the Labour Market*-KILM). KILM pertama kali diluncurkan oleh ILO pada tahun 1999 untuk melengkapi program pengumpulan data rutin, serta untuk memperluas diseminasi data mengenai indikator utama pasar tenaga kerja global. Pada periode 2011–2016, publikasi KILM Indonesia mengacu pada KILM edisi ke-6. Selanjutnya sejak tahun 2017, publikasi KILM Indonesia merujuk pada KILM edisi ke-9 yang diterbitkan oleh ILO pada tahun 2015.

1.1 Sakernas dan Analisis Ketenagakerjaan

Data ketenagakerjaan dikumpulkan oleh BPS melalui berbagai kegiatan sensus dan survei, antara lain Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Di antara berbagai survei tersebut, Sakernas dirancang khusus untuk menyediakan data yang menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antarperiode pendataan. Hasil Sakernas digunakan untuk menghitung indikator ketenagakerjaan resmi (*official statistics*) yang dipublikasikan BPS.

Secara umum, Sakernas bertujuan menyediakan data pokok ketenagakerjaan yang berkesinambungan, dan dapat dibandingkan antarwaktu. Secara khusus, Sakernas menghasilkan estimasi jumlah penduduk bekerja, pengangguran, dan berbagai indikator lain yang menggambarkan dinamika ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Pengumpulan data Sakernas 2025 dilaksanakan tiga kali setahun, yaitu pada bulan Februari, Agustus, dan November 2025. Sakernas Mei 2025 tidak dilaksanakan karena pertimbangan teknis dan operasional. Sementara itu, pengumpulan data Sakernas 2026 akan dilaksanakan secara triwulanan, yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November 2026.

Pendataan Sakernas dilaksanakan di seluruh Indonesia yang mencakup 38 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota. Jumlah sampel Sakernas Februari 2025 dan Februari 2026 sebanyak 76.800 rumah tangga dan 77.400 rumah tangga, untuk menghasilkan estimasi indikator ketenagakerjaan yang representatif hingga level provinsi. Terdapat tambahan sampel sekitar 600 rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan estimasi wilayah Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, jumlah sampel Sakernas Agustus 2025 sebanyak 302.260 rumah tangga, untuk menghasilkan estimasi indikator ketenagakerjaan representatif hingga level kabupaten/kota.

Sejak Sakernas Februari 2024, pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan moda *Computer-Assisted Personal Interviewing* (CAPI) yaitu dengan aplikasi *Flexible Authentic Survey Instrument Harmony* (FASIH), kecuali sebagian wilayah di Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan yang masih menggunakan moda *Paper and Pencils Interviewing* (PAPI). Namun, sejak pendataan Sakernas Agustus 2024 hingga saat ini, semua wilayah telah melakukan pengumpulan data dengan moda CAPI.

Pada pelaksanaan Sakernas Agustus 2025 dilakukan perubahan metodologi karena adanya penyesuaian terhadap kegiatan SUPAS 2025. Perubahan utama terkait dengan wilayah pendataan (*enumeration area*) semula Blok Sensus (BS) diubah menjadi Satuan Lingkungan Setempat (SLS) sebagai wilayah pendataan (*enumeration area*), menggantikan Blok Sensus (BS) yang digunakan pada periode sebelumnya.

Data yang dikumpulkan pada Sakernas untuk setiap rumah tangga terpilih antara lain meliputi keterangan mengenai keadaan umum setiap anggota rumah tangga (nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, Nomor Induk Kependudukan (NIK), bulan dan tahun lahir, serta umur). Pada anggota rumah tangga yang berumur 5 tahun ke atas, dikumpulkan informasi status perkawinan, pendidikan dan pelatihan, migrasi, disabilitas, teknologi, informasi dan komunikasi (TIK), kegiatan bekerja seminggu terakhir, sementara tidak bekerja, pekerjaan utama, jam kerja seluruh pekerjaan dan situasi pekerjaan, serta kegiatan lain. Sedangkan untuk anggota rumah tangga yang berumur 15 tahun ke atas, juga dikumpulkan informasi terkait kegiatan mencari pekerjaan, kesiapan bekerja, dan pengalaman kerja.

1.2 Sakernas dan KILM

Sakernas mengumpulkan berbagai variabel ketenagakerjaan yang memungkinkan penyusunan indikator pasar tenaga kerja (*Key Indicators of the Labour Market/KILM*) sebagaimana direkomendasikan oleh *International Labour Organization*. Dalam penggunaannya, hasil Sakernas perlu diinterpretasikan secara hati-hati apabila dibandingkan dengan sumber data lain, seperti Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), karena adanya perbedaan tujuan, metodologi, dan karakteristik survei.

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam analisis data ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Survei

Sakernas dirancang khusus untuk menghasilkan data ketenagakerjaan. Sedangkan SP, SUPAS, dan Susenas memiliki cakupan yang lebih luas, seperti demografi, pendidikan, kesehatan, konsumsi, dan perumahan. Perbedaan tujuan survei memengaruhi cakupan serta kualitas informasi ketenagakerjaan yang dihasilkan.

2. Ukuran Sampel

Perbedaan ukuran sampel antar-survei memengaruhi tingkat kesalahan sampling (*sampling error*). Semakin kecil ukuran sampel, semakin besar potensi *sampling error* yang dihasilkan.

3. Petugas Lapangan

Pelaksanaan Sakernas Februari 2026 melibatkan Petugas Pendataan Lapangan (PPL) dan Petugas Pemeriksa Lapangan (PML). PML diutamakan berasal dari pegawai organik BPS yang berpengalaman, sedangkan PPL dapat berasal dari pegawai organik maupun mitra statistik BPS. Setiap PPL bertugas pada dua hingga tiga SLS, sementara setiap PML mengawasi dua hingga tiga PPL.

4. Perencanaan Kuesioner

Desain kuesioner memengaruhi kualitas data yang dihasilkan, termasuk aspek redaksi pertanyaan, alur pertanyaan, dan jenis informasi yang dikumpulkan. Sakernas dirancang agar konsisten antarperiode sehingga data tetap dapat dibandingkan dari waktu ke waktu.

Mulai 2025, rancangan kuesioner Sakernas mengadopsi konsep ketenagakerjaan berdasarkan ICLS ke-19, ke-20, dan ke-21 sebagai standar terbaru *International Labour Organization*, namun tetap mempertahankan konsep ketenagakerjaan berdasarkan ICLS-13 untuk menjaga kesinambungan data runtun waktu (*time series*).

5. Waktu Pendataan

Perbedaan waktu pelaksanaan Sakernas, Susenas, SP, dan SUPAS dapat menimbulkan variasi hasil akibat pengaruh musiman.

Penyusunan indikator pasar tenaga kerja (*Key Indicators of the Labour Market/KILM*) bertujuan untuk:

1. Menyajikan indikator inti pasar tenaga kerja; dan
2. Meningkatkan ketersediaan indikator ketenagakerjaan guna memantau perkembangan pasar kerja terkini.

Pengembangan konsep KILM ini merupakan hasil kolaborasi internasional antara *International Labour Organization* (ILO) bersama *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), serta melibatkan berbagai kementerian tenaga kerja dan kantor statistik nasional (*National Statistical Offices - NSO*) dari berbagai negara di dunia.

1.3 Peran KILM di Bidang Ketenagakerjaan

Identifikasi dan kuantifikasi inefisiensi pasar tenaga kerja, seperti kurangnya pemanfaatan tenaga kerja (*labour underutilization*) dan defisit pekerjaan layak (*decent work deficit*), merupakan langkah awal dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kompleksitas permasalahan ketenagakerjaan menuntut tersedianya data dan informasi pasar tenaga kerja yang lengkap, terstruktur, dan dapat dianalisis secara komprehensif. Dalam konteks tersebut, indikator *Key Indicators of the Labour Market* (KILM) berperan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi berbagai aspek pasar tenaga kerja.

KILM dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam perumusan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan ketenagakerjaan. Berbagai indikator yang tersedia memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan mengidentifikasi kondisi pasar kerja, mengukur kualitas kesempatan kerja, serta merumuskan intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Beberapa peran KILM dalam analisis pasar tenaga kerja yaitu:

1. Mempromosikan Agenda ILO: Pekerjaan yang Layak (*Decent Work*)

Salah satu agenda utama ILO adalah mendorong terciptanya pekerjaan layak (*decent work*), yaitu tersedianya kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan produktif dalam kondisi kebebasan, kesetaraan, keamanan, dan martabat manusia. Konsep pekerjaan layak memiliki dimensi yang luas dan dapat ditafsirkan berbeda antarindividu maupun antarwilayah. Sebagai contoh, standar mengenai upah layak atau jam kerja yang wajar dapat bervariasi sesuai kondisi sosial dan ekonomi masing-masing.

Kualitas pekerjaan, tantangan utama pasar tenaga kerja adalah keterbatasan kesempatan kerja. Kondisi tersebut dapat diidentifikasi melalui indikator pengangguran (KILM 9, KILM 10, dan KILM 12), maupun melalui tingkat ketidakaktifan/penduduk bukan angkatan kerja (KILM 13). Sementara itu, kualitas pekerjaan dapat dianalisis melalui beberapa indikator, antara lain: status pekerjaan utama, lapangan usaha, dan jenis pekerjaan utama (KILM 3, KILM 4,

dan KILM 5); jam kerja berlebih (*excessive working hours*) pada indikator jumlah jam kerja (KILM 7); pekerja pada kegiatan informal (KILM 8); dan setengah pengangguran (KILM 12).

Melalui indikator-indikator tersebut, KILM dapat digunakan untuk menilai kondisi pekerjaan, mengidentifikasi kelompok rentan, serta mendukung penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang berorientasi pada penciptaan pekerjaan layak yang lebih inklusif dan berorientasi pada penciptaan pekerjaan layak.

2. Pemantauan Pencapaian Tujuan Agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Merupakan agenda pembangunan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai kelanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada 2015. **Dalam konteks ketenagakerjaan, khususnya pada Tujuan ke-8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)** Data Sakernas diharapkan mampu menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan berkesinambungan guna mendukung pemantauan capaian pembangunan berkelanjutan, khususnya pada aspek ketenagakerjaan dan pasar kerja.

Beberapa indikator SDGs yang dapat dihasilkan dari Sakernas antara lain:

- a. Proporsi perempuan yang menduduki jabatan manajerial;
- b. Proporsi pekerja informal menurut sektor dan jenis kelamin;
- c. Rata-rata pendapatan per jam pekerja menurut jenis kelamin, pekerjaan, kelompok umur, dan status disabilitas;
- d. Tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
- e. Tingkat setengah pengangguran;

- f. Persentase penduduk usia muda (15–24 tahun) yang tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak mengikuti pelatihan (*Not in Employment, Education, or Training*/NEET);
- g. Persentase dan jumlah anak usia 5–17 tahun yang terlibat dalam pekerja anak menurut jenis kelamin dan kelompok umur; serta
- h. Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.

Melalui indikator-indikator tersebut, Sakernas berperan penting dalam mendukung evaluasi capaian SDGs serta penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Indikator SDG's pada poin b, d, dan e dapat disajikan pada publikasi ini.

3. Memantau Kesenjangan Gender di Pasar Tenaga Kerja

Perempuan masih menghadapi berbagai tantangan dalam memperoleh pekerjaan layak, baik dari sisi akses terhadap pekerjaan, kualitas pekerjaan, maupun perlindungan kerja. Oleh karena itu, sebagian besar indikator *Key Indicators of the Labour Market* (KILM) disajikan menurut jenis kelamin agar dapat digunakan untuk menganalisis kesetaraan gender di pasar tenaga kerja.

Disagregasi data berdasarkan jenis kelamin memungkinkan identifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, seperti perbedaan tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran, status pekerjaan, pendapatan, dan akses terhadap pekerjaan formal. Informasi tersebut menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan yang mendukung peningkatan partisipasi dan perlindungan perempuan di dunia kerja.

4. Memantau Transformasi Pasar Kerja dan Perubahan Pola Pekerjaan

Perkembangan teknologi digital, otomatisasi, dan *platform* ekonomi telah mengubah struktur dan pola pasar tenaga kerja. Perubahan tersebut memunculkan jenis pekerjaan baru, meningkatkan fleksibilitas kerja, sekaligus menghadirkan tantangan terkait perlindungan pekerja, kepastian pendapatan, dan kualitas pekerjaan.

Dalam konteks ini, indikator *Key Indicators of the Labour Market* (KILM) dapat digunakan untuk memantau perubahan struktur ketenagakerjaan, seperti pergeseran lapangan usaha, peningkatan pekerja informal, perubahan jam kerja, serta dinamika pengangguran dan setengah pengangguran.

Informasi tersebut penting untuk mendukung penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif terhadap transformasi ekonomi dan teknologi, termasuk pengembangan keterampilan tenaga kerja (*reskilling dan upskilling*), perluasan perlindungan sosial, serta penciptaan pekerjaan yang produktif dan berkelanjutan.

1.4 Analisis Pasar Tenaga Kerja Menggunakan KILM

Jumlah negara yang mengumpulkan statistik ketenagakerjaan, khususnya tingkat pengangguran, terus meningkat. Meskipun indikator pengangguran relatif mudah dikumpulkan dan dibandingkan antarwilayah, pengguna data perlu berhati-hati dalam menginterpretasikan angka tersebut. Tingkat pengangguran hanya menggambarkan salah satu aspek pasar tenaga kerja sehingga analisis yang komprehensif tetap memerlukan indikator ketenagakerjaan lainnya.

Analisis pasar tenaga kerja diawali dengan pengelompokan penduduk menjadi penduduk usia kerja dan bukan usia kerja sesuai standar *International Labour Organization* dan praktik Sakernas. Di Indonesia, penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas. Kelompok ini selanjutnya dibedakan menjadi penduduk yang aktif secara ekonomi atau angkatan kerja (KILM 1) dan penduduk yang tidak aktif secara ekonomi atau bukan angkatan kerja (KILM 13). Angkatan kerja terdiri atas penduduk bekerja (KILM 2) dan pengangguran (KILM 9). Selain itu, kualitas angkatan kerja juga dapat ditinjau dari tingkat pendidikan yang ditamatkan (KILM 14).

Tingginya proporsi pengangguran maupun bukan angkatan kerja mencerminkan adanya potensi *labour underutilization* atau kurang termanfaatkannya tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah perlu memahami faktor-faktor yang menyebabkan penduduk tidak aktif di pasar kerja agar kebijakan yang dirumuskan lebih tepat sasaran.

Sebagai contoh, apabila sebagian besar bukan angkatan kerja adalah perempuan yang memiliki tanggung jawab domestik, maka kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan di pasar kerja menjadi penting, seperti penyediaan fasilitas penitipan anak maupun pengaturan kerja yang lebih fleksibel. Sementara itu, bagi penduduk dengan keterbatasan fungsional (disabilitas), dukungan kebijakan dapat berupa peningkatan aksesibilitas tempat kerja serta perluasan kesempatan kerja yang inklusif.

Tantangan lain adalah mendorong kembali *discouraged workers*, yaitu penduduk yang berhenti mencari pekerjaan karena merasa tidak tersedia pekerjaan yang sesuai atau tidak memiliki informasi dan keterampilan yang memadai. Dalam kondisi tersebut, pelatihan kerja, peningkatan keterampilan (*reskilling dan upskilling*), serta penguatan layanan informasi pasar kerja menjadi langkah yang penting.

Analisis pengangguran juga perlu mempertimbangkan karakteristik demografis dan sosial-ekonomi, seperti jenis kelamin, wilayah tempat tinggal, tingkat pendidikan (KILM 9), dan kelompok umur muda (KILM 10). Pendekatan ini membantu menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai karakteristik pengangguran sehingga kebijakan ketenagakerjaan dapat dirancang secara lebih efektif.

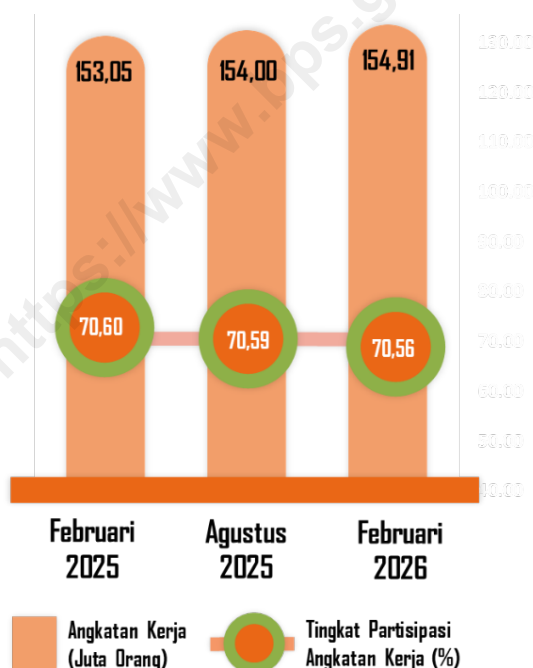
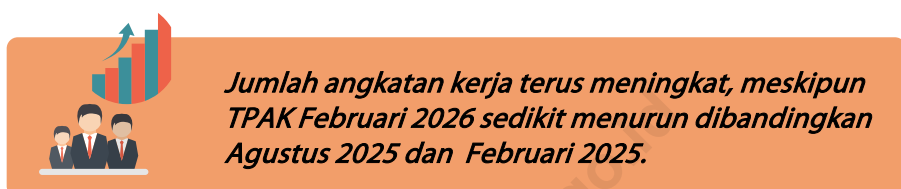
Selain itu, tingkat pengangguran yang rendah tidak selalu mencerminkan kondisi pasar kerja yang baik. Di banyak negara berkembang, keterbatasan perlindungan sosial menyebabkan sebagian penduduk tidak memiliki pilihan selain bekerja dalam kondisi apa pun untuk memenuhi kebutuhan hidup. Fenomena ini dikenal dengan istilah *too poor to be unemployed*, yaitu kondisi ketika seseorang terlalu miskin untuk menganggur.

Oleh sebab itu, analisis pasar tenaga kerja tidak cukup hanya melihat jumlah penduduk yang bekerja, tetapi juga perlu menilai kualitas pekerjaan yang dimiliki. Konsep pekerjaan layak (*decent work*) mengacu pada pekerjaan yang dilakukan secara sukarela, memberikan pendapatan yang memadai, serta menjamin keamanan dan martabat pekerja.

Kelayakan pekerjaan dapat dianalisis melalui berbagai indikator KILM, antara lain status pekerjaan (KILM 3), lapangan pekerjaan utama (KILM 4), jenis pekerjaan/jabatan (KILM 5), pekerja paruh waktu (KILM 6), jumlah jam kerja (KILM 7), kegiatan informal (KILM 8), dan setengah pengangguran (KILM 12). Sementara itu, tingkat kesejahteraan pekerja dapat dianalisis melalui indikator upah atau pendapatan pekerja (KILM 15).

BAB 2 PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DAN INDIKATOR KETENAGAKERJAAN

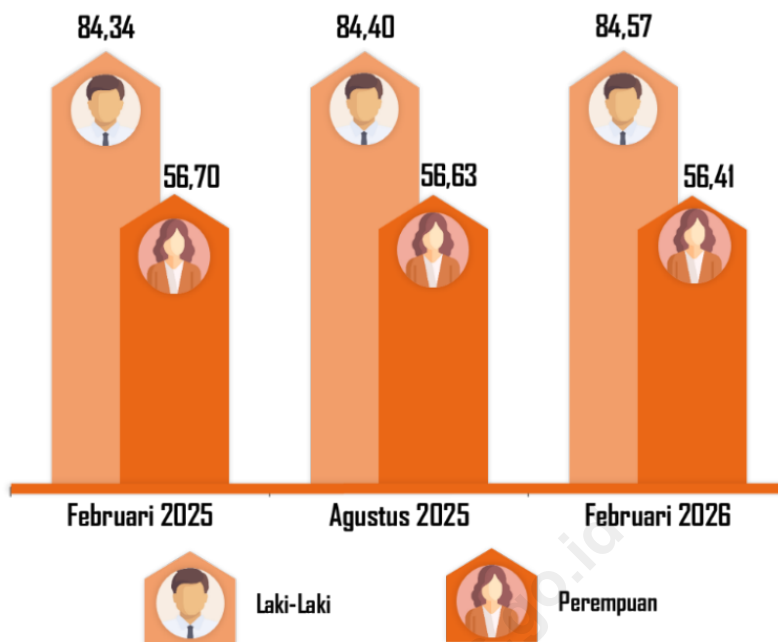
2.1 KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Gambar 1 Jumlah Angkatan Kerja dan TPAK, Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Jumlah angkatan kerja di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hasil Sakernas Februari 2026 mencatat jumlah angkatan kerja mencapai 154,91 juta orang, naik 1,86 juta orang dibandingkan Februari 2025, dan bertambah 0,91 juta orang dibandingkan Agustus 2025. Sebaliknya, TPAK menunjukkan kecenderungan menurun. Pada Februari 2026, TPAK tercatat sebesar 70,56 persen, artinya dari setiap 100 penduduk usia kerja terdapat sekitar 71 orang yang termasuk angkatan kerja. TPAK Februari 2026 sedikit menurun dibandingkan Agustus 2025 (70,59 persen), begitu pula jika dibandingkan Februari 2025 (70,60 persen) (Gambar 1). Peningkatan TPAK antar periode dapat mencerminkan meningkatnya partisipasi masyarakat di pasar kerja, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, bertambahnya kesempatan kerja, atau peningkatan kesadaran akan pentingnya bekerja (ILO, 2013). Sebaliknya, penurunan TPAK meskipun relatif kecil tetap perlu dicermati, karena hal tersebut bisa disebabkan oleh faktor musiman, struktural, atau pilihan individu untuk tidak bekerja sementara waktu (ILOSTAT, n.d.-e).



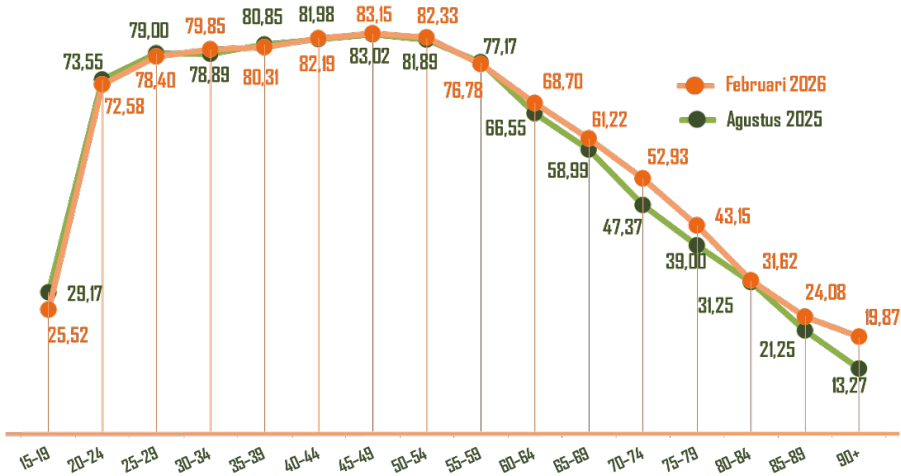
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

**Gambar 2 TPAK Menurut Jenis Kelamin (persen),
Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026**

Secara umum, TPAK laki-laki konsisten lebih tinggi dibandingkan perempuan dalam tiga periode terakhir, yaitu Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026. Pada Februari 2026, TPAK laki-laki tercatat sebesar 84,57 persen, sementara TPAK perempuan sebesar 56,41 persen. Artinya, dari setiap 100 penduduk usia kerja laki-laki, sekitar 85 orang tergolong angkatan kerja. Sementara itu, dari 100 perempuan usia kerja, terdapat sekitar 56 orang yang tergolong angkatan kerja. Kesenjangan TPAK laki-laki dan perempuan masih cukup tinggi, hal ini ditunjukkan dengan nilai TPAK laki-laki yang berkisar 1,5 kali lebih tinggi dari nilai TPAK perempuan.



Kesenjangan partisipasi laki-laki dan perempuan di pasar kerja masih lebar, seiring dengan TPAK perempuan yang terus mengalami penurunan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025, dan Februari 2026

Gambar 3 TPAK Menurut Kelompok Umur (persen), Agustus 2025 dan Februari 2026

TPAK menurut kelompok umur menunjukkan pola menyerupai huruf “U” terbalik, seperti terlihat pada Gambar 3. Pada Februari 2026, kelompok umur 15–19 tahun mencatat TPAK sebesar 25,52 persen, menurun dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar 29,17 persen. Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk pada kelompok umur tersebut masih bersekolah dan belum memasuki pasar kerja. Seiring bertambahnya usia, TPAK meningkat hingga mencapai puncaknya pada kelompok umur 45–49 tahun, yaitu sebesar 83,15 persen. Tingkat partisipasi mulai menurun pada kelompok umur berikutnya hingga usia lanjut. Pola penurunan ini menggambarkan bahwa setelah melewati usia 49 tahun, partisipasi angkatan kerja cenderung menurun seiring bertambahnya usia.



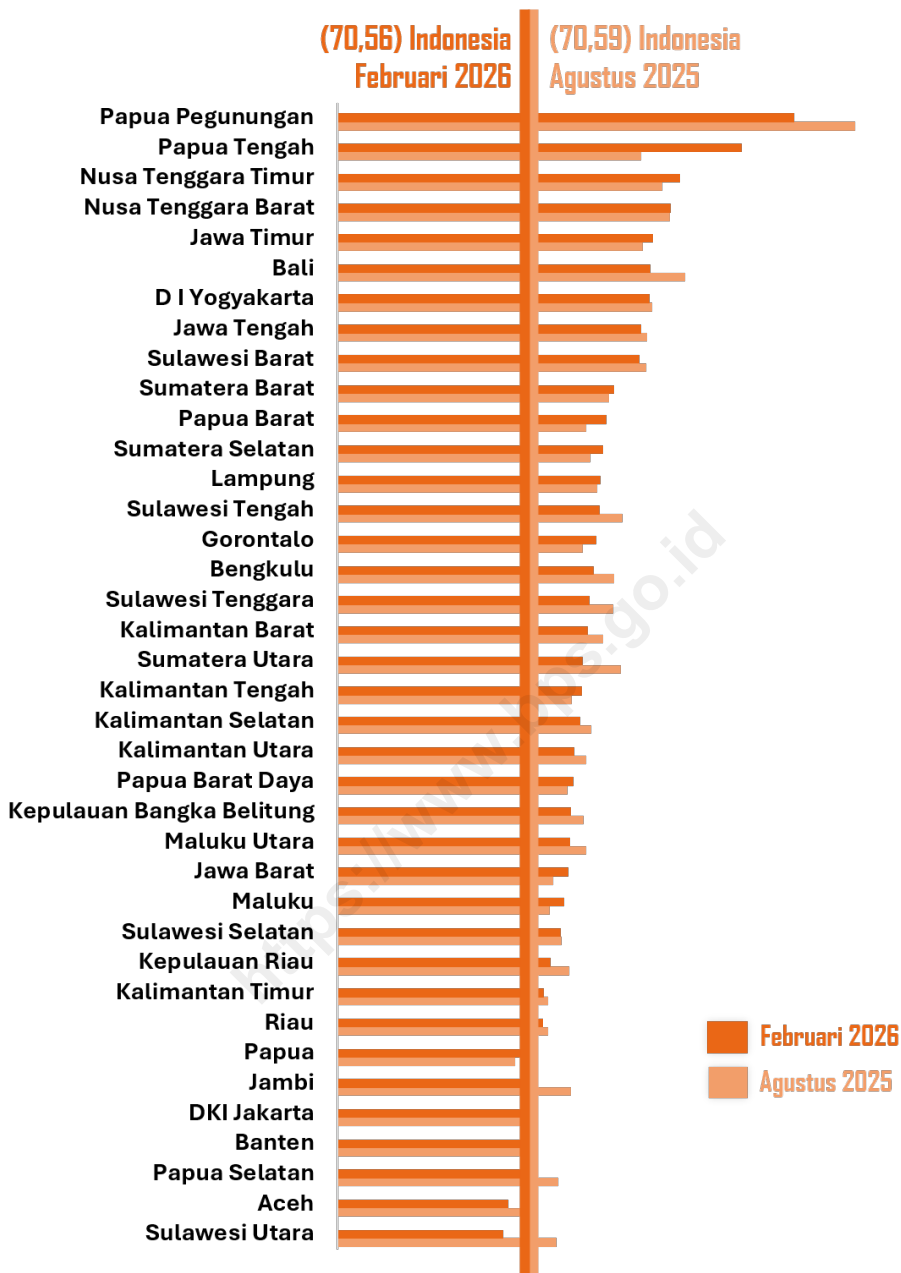
Puncak TPAK terdapat pada kelompok umur 45–49 tahun, konsisten terlihat pada Agustus 2025 maupun Februari 2026.



Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan TPAK tertinggi pada Februari 2026, diikuti oleh Papua Tengah dan Nusa Tenggara Timur.

Pada Februari 2026, TPAK nasional tercatat sebesar 70,56 persen. Dari 38 provinsi, terdapat 14 provinsi yang memiliki TPAK lebih tinggi dibandingkan angka nasional tersebut. Tiga provinsi dengan TPAK tertinggi pada periode ini adalah Papua Pegunungan (85,87 persen), Papua Tengah (81,74 persen), dan Nusa Tenggara Timur (76,94 persen). Sebagai perbandingan, pada Agustus 2025, TPAK nasional sedikit lebih tinggi, yaitu 70,59 persen, dengan 15 provinsi yang memiliki TPAK di atas angka nasional. Tiga provinsi dengan TPAK tertinggi pada Agustus 2025 adalah Papua Pegunungan (90,66 persen), Bali (77,31 persen), dan Nusa Tenggara Barat (76,11 persen). Data ini menunjukkan bahwa Papua Pegunungan konsisten menjadi provinsi dengan TPAK tertinggi di Indonesia sejak Agustus 2025.

Sementara itu, provinsi dengan TPAK terendah pada Februari 2026 adalah Sulawesi Utara (63,03 persen), Aceh (63,44 persen), dan Papua Selatan (64,83 persen). Adapun pada Agustus 2025, provinsi dengan TPAK terendah adalah Papua (63,98 persen), Banten (64,66 persen), dan DKI Jakarta (64,75 persen). Informasi lebih lengkap dapat dilihat pada Gambar 4 dan Lampiran 7.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025, dan Februari 2026

**Gambar 4 TPAK Menurut Provinsi (persen),
Agustus 2025 dan Februari 2026**

2.2 KILM 2. Rasio Penduduk Bekerja terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (*Employment to Population Ratio - EPR*)



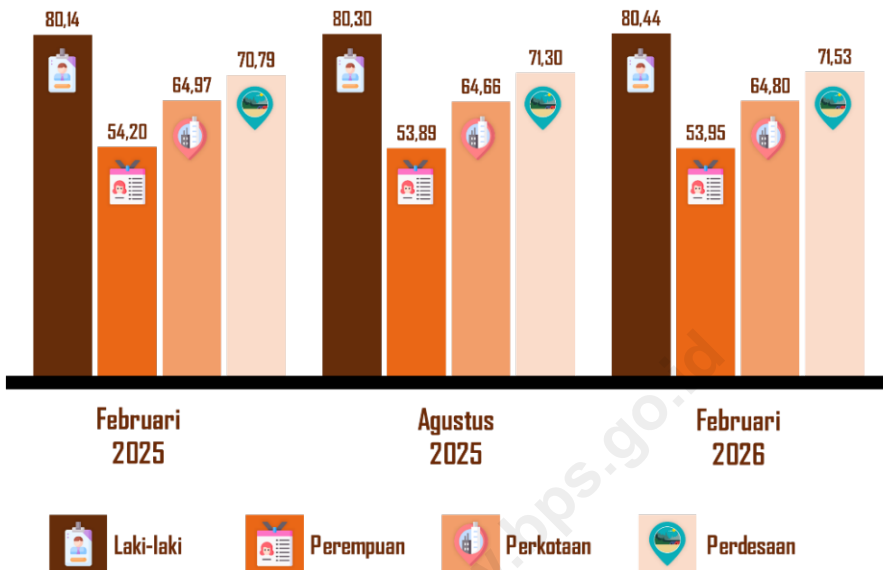
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Gambar 5 *Employment to Population Ratio* (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Pada Februari 2026, rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (EPR) tercatat sebesar 67,26 persen. Artinya, dari setiap 100 orang penduduk usia kerja, terdapat sekitar 67 orang yang bekerja. Angka ini menunjukkan peningkatan penyerapan tenaga kerja dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar 67,17 persen, serta peningkatan tipis dibandingkan Februari 2025 yang sebesar 67,24 persen. Menurut ILO (2013), EPR merupakan indikator penting untuk mengukur sejauh mana pasar tenaga kerja dapat menyediakan kesempatan kerja bagi penduduk usia kerja, serta mencerminkan dinamika antara permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam perekonomian. Peningkatan EPR biasanya mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi dan pertumbuhan lapangan kerja yang inklusif (ILOSTAT, n.d.-d).



EPR laki-laki lebih tinggi dibandingkan EPR perempuan, dan EPR di perdesaan lebih tinggi dibandingkan EPR di perkotaan.

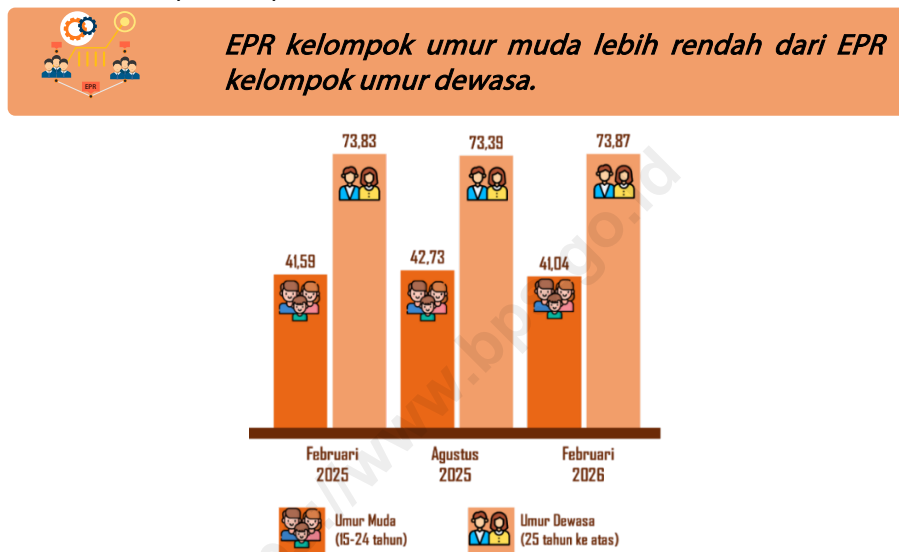


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Gambar 6 *Employment to Population Ratio* Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Gambar 6 menyajikan EPR menurut jenis kelamin dan daerah tempat tinggal dari Februari 2025 hingga Februari 2026. Jika dilihat menurut jenis kelamin, EPR laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada Februari 2026, EPR laki-laki tercatat sebesar 80,44 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan yang hanya 53,95 persen. Artinya, dari setiap 100 laki-laki usia kerja, terdapat sekitar 80 orang yang bekerja, sedangkan dari setiap 100 perempuan, hanya sekitar 54 orang yang bekerja. Selisih antara keduanya mencapai 26,49 persen poin, sedikit lebih tinggi dibandingkan selisih pada Agustus 2025 yang sebesar 26,41 persen poin dan Februari 2025 sebesar 25,94 persen poin.

Sementara itu, berdasarkan daerah tempat tinggal, penduduk perdesaan cenderung lebih banyak yang bekerja dibandingkan penduduk perkotaan. Pada Februari 2026, EPR di perdesaan tercatat sebesar 71,53 persen, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 64,80 persen. Selisih antara perdesaan dan perkotaan tercatat sebesar 6,73 persen poin, meningkat dibandingkan selisih pada Agustus 2025 yang sebesar 6,64 persen poin dan Februari 2025 sebesar 5,82 persen poin.

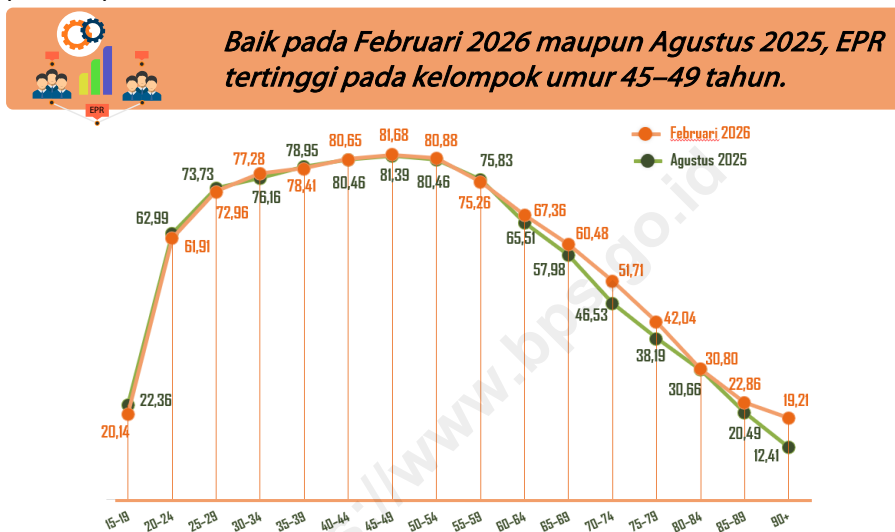


Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Gambar 7 *Employment to Population Ratio*
Menurut Kelompok Umur Muda dan Dewasa (persen),
Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

EPR kelompok umur muda (15–24 tahun) lebih rendah dibandingkan kelompok umur dewasa (25 tahun ke atas). Pada Februari 2026, EPR kelompok umur dewasa tercatat sebesar 73,87 persen, jauh lebih tinggi dibanding kelompok umur muda yang hanya mencapai 41,04 persen. Artinya, dari setiap 100 penduduk dewasa, sekitar 74 orang yang bekerja, sedangkan dari setiap 100 penduduk muda, baru sekitar 41 orang yang bekerja. Selisih EPR antara kedua kelompok ini mencapai 32,83 persen poin.

Secara tren, EPR kelompok umur muda cenderung fluktuatif selama periode Februari 2025 hingga Februari 2026. Angka EPR kelompok muda mengalami peningkatan pada Agustus 2025, menjadi 42,73 persen, namun kembali menurun pada Februari 2026 menjadi 41,04 persen. Pola sebaliknya terjadi pada EPR kelompok dewasa yang menunjukkan penurunan dari 73,83 persen pada Februari 2025 menjadi 73,39 persen pada Agustus 2025, dan meningkat hingga 73,87 persen pada Februari 2026.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025, dan Februari 2026

Gambar 8 *Employment to Population Ratio* Menurut Kelompok Umur (persen), Agustus 2025 dan Februari 2026

Pola EPR menurut kelompok umur pada Agustus 2025 dan Februari 2026 menunjukkan kurva berbentuk huruf “U” terbalik, serupa dengan pola TPAK pada Gambar 3. Pada Februari 2026, EPR kelompok umur 15–19 tahun cenderung rendah, yaitu sebesar 20,14 persen. EPR kemudian meningkat tajam pada kelompok umur 20–24 tahun dan mencapai puncaknya pada kelompok umur 45–49 tahun, yaitu sebesar 81,68 persen. Setelah itu, EPR menurun secara bertahap seiring bertambahnya usia, dengan EPR terendah tercatat pada kelompok umur 90 tahun ke atas, yaitu sebesar 19,21 persen.

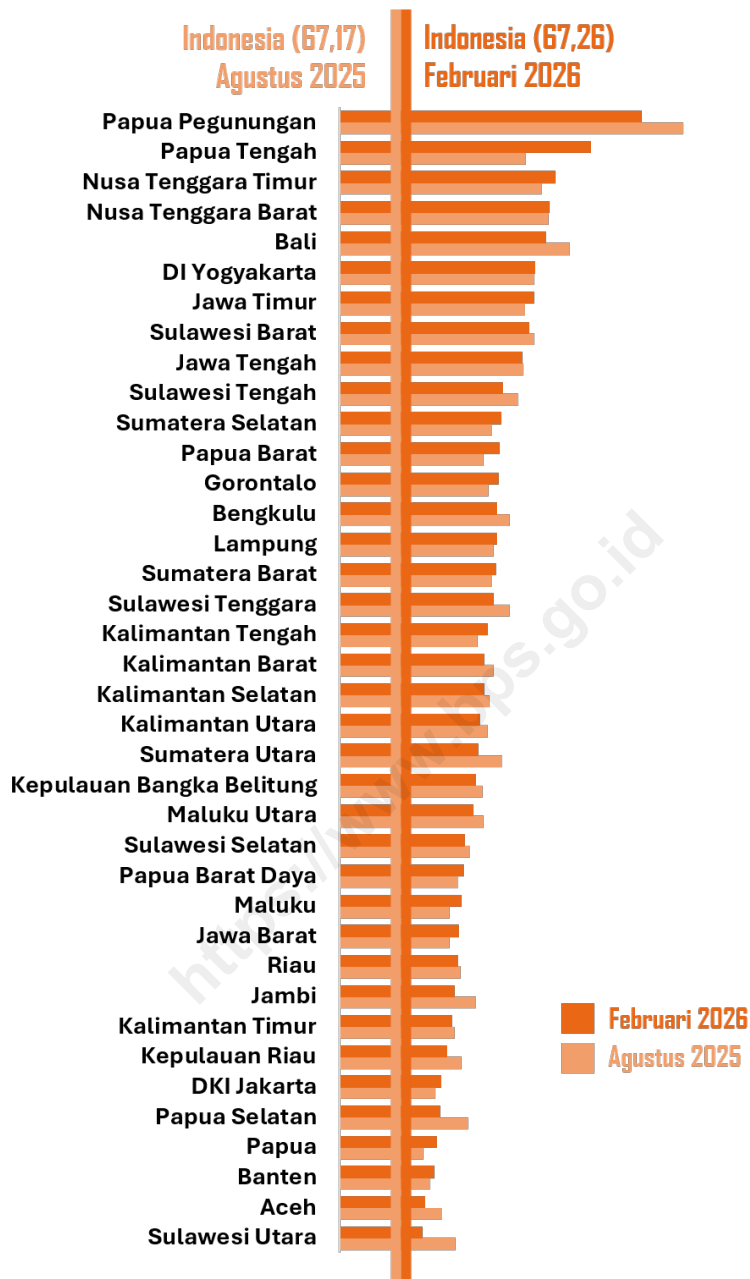
Dibandingkan Agustus 2025, sebagian besar kelompok umur mengalami penurunan EPR pada Februari 2026. Kelompok umur yang mengalami kenaikan EPR tertinggi adalah 90 tahun ke atas (naik 6,79 persen poin), diikuti oleh 70–74 tahun (naik 5,18 persen poin), dan 75–79 tahun (naik 3,85 persen poin). Sementara itu, kelompok umur yang mengalami penurunan terbesar adalah umur 15–19 tahun, yaitu turun 2,22 persen poin, diikuti oleh kelompok umur 20–24 tahun (turun 1,08 persen poin), dan 25–29 tahun (turun 0,77 persen poin).



Februari 2026: EPR tertinggi berada di Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.

Hasil Sakernas Sakernas Februari 2026 menunjukkan bahwa tiga provinsi dengan EPR tertinggi adalah Papua Pegunungan (84,41 persen), Papua Tengah (78,61 persen), dan Nusa Tenggara Timur (74,51 persen). Sebanyak 17 provinsi mencatatkan EPR di atas rata-rata nasional yang sebesar 67,26 persen. Sebaliknya, provinsi dengan EPR terendah tercatat di Sulawesi Utara (59,41 persen), Aceh (59,71 persen), dan Banten (60,73 persen).

Papua Pegunungan konsisten menempati posisi sebagai provinsi dengan EPR tertinggi sejak Agustus 2025. Pada periode tersebut, Papua Pegunungan mencatat EPR tertinggi sebesar 89,14 persen, diikuti oleh Bali (76,16 persen) dan Nusa Tenggara Barat (73,78 persen). Sebanyak 17 provinsi mencatatkan EPR di atas rata-rata nasional yang saat itu sebesar 67,17 persen. Sementara itu, tiga provinsi dengan EPR terendah adalah Papua (59,53 persen), Banten (60,34 persen), dan DKI Jakarta (60,83 persen). Perbandingan ini menunjukkan adanya dinamika EPR di tingkat provinsi dari waktu ke waktu. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 9 dan Lampiran 9.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025, dan Februari 2026

Gambar 9 *Employment to Population Ratio*
Menurut Provinsi (persen), Agustus 2025 dan Februari 2026

2.3 KILM 3. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama



Pada Februari 2026, penduduk bekerja di Indonesia dengan status berusaha merupakan kategori terbesar.

Tabel 1 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Status Pekerjaan Utama	2025		2026
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Buruh/Karyawan/Pegawai Berusaha	37,08	38,74	36,99
Berusaha Dibantu Buruh Tetap dan Dibayar	40,14	38,72	40,13
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/ Pekerja Tidak Dibayar	3,52	3,46	3,60
Berusaha Sendiri	16,04	13,86	15,97
Pekerja Bebas	8,95	9,58	9,21
Pekerja Keluarga	13,83	12,96	13,67
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Distribusi penduduk bekerja jika dirinci berdasarkan status pekerjaan utama, pada Februari 2026 sedikit berbeda jika dibandingkan dengan periode Agustus 2025. Pada Februari 2026, penduduk bekerja didominasi oleh mereka yang berstatus berusaha (40,13 persen). Persentase terbesar berikutnya yaitu status buruh/karyawan/pegawai (36,99 persen), pekerja keluarga (13,67 persen), dan pada urutan terakhir yaitu pekerja bebas (9,21 persen). Pada Agustus 2025, persentase terbesar adalah penduduk bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai.

Selama setahun terakhir (Februari 2025 – Februari 2026), terjadi peningkatan persentase pada status pekerja bebas sebesar 0,26 persen poin. Sedangkan status lainnya mengalami penurunan persentase berturut-turut 0,16 persen poin pada pekerja keluarga, 0,09 persen poin pada status buruh/karyawan/pegawai, dan 0,01 persen poin pada berusaha (Tabel 1). Perubahan komposisi ini menggambarkan adanya pergeseran struktur pekerjaan di Indonesia, yang berpotensi dipengaruhi oleh dinamika ekonomi makro, peningkatan fleksibilitas pasar tenaga kerja, serta preferensi individu terhadap bentuk pekerjaan yang lebih mandiri atau berbasis usaha kecil (ILO, 2018; ILOSTAT, n.d.-b).

Pada periode Agustus 2025–Februari 2026, peningkatan persentase terjadi pada status berusaha dan pekerja keluarga berturut-turut sebesar 1,41 persen poin dan 0,71 persen poin. Sedangkan status buruh/karyawan/pegawai dan pekerja bebas mengalami penurunan sebesar 1,75 persen poin dan 0,37 persen poin.

Pembahasan mengenai penduduk yang bekerja dengan status berusaha dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu berusaha dibantu buruh tetap, berusaha dibantu buruh tidak tetap, dan berusaha sendiri. Pada Februari 2026, persentase penduduk bekerja yang berusaha dibantu buruh tetap mencapai 3,60 persen, sedangkan berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 15,97 persen, dan berusaha sendiri sebesar 20,57 persen.

Secara umum, jumlah penduduk yang bekerja dengan status berusaha mengalami penurunan dibandingkan Februari 2025, sedangkan dibandingkan Agustus 2025 mengalami peningkatan. Pekerja dengan status berusaha sendiri dibandingkan Agustus 2025 mengalami penurunan sebesar 0,83 persen poin. Sementara itu, status berusaha dibantu buruh tetap dan berusaha dibantu buruh tidak tetap menunjukkan peningkatan dibandingkan Agustus 2025 sebesar 0,14 persen poin dan 2,11 persen poin.

2.4 KILM 4. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

 *Persentase terbesar penduduk bekerja di kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.*

Tabel 2 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (17 Kategori), Februari 2026

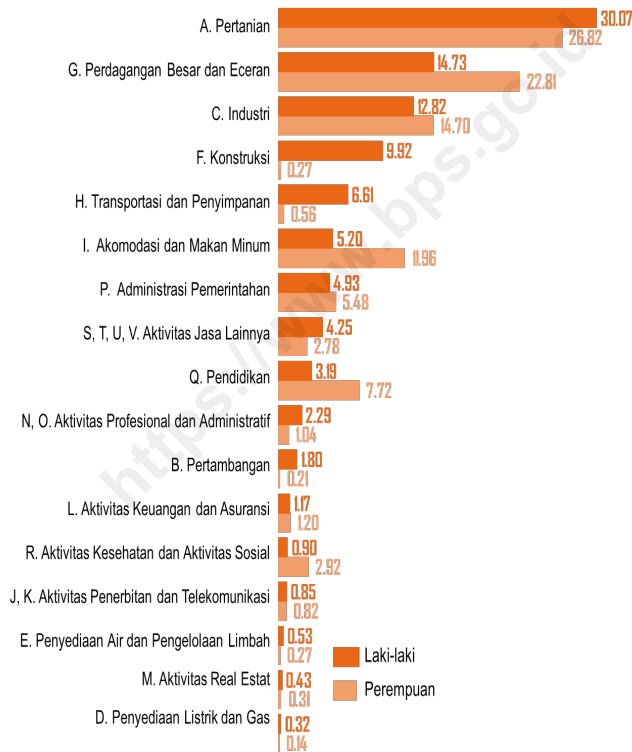
Lapangan Pekerjaan Utama		2026
		Februari
(1)		(2)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,78
B.	Pertambangan dan Penggalian	1,17
C.	Industri	13,57
D.	Penyediaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin	0,24
E.	Penyediaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Penanganan Limbah, dan Remediasi	0,43
F.	Konstruksi	6,07
G.	Perdagangan Besar dan Eceran	17,95
H.	Transportasi dan Penyimpanan	4,20
I.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	7,90
J, K.	Aktivitas Penerbitan dan Telekomunikasi	0,84
L.	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	1,18
M.	Aktivitas Real Estat	0,38
N, O.	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis dan Aktivitas Administratif dan Penunjang Usaha	1,79
P.	Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib	3,66
Q.	Pendidikan	5,00
R.	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	1,71
S, T, U, V.	Kesenian, Aktivitas Jasa Lainnya, Aktivitas Rumah Tangga, dan Aktivitas Badan Internasional	5,15

Catatan: Kategori Lapangan Usaha pada Februari 2026 menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026

Struktur lapangan pekerjaan utama pada Februari 2026 didominasi oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mencapai 28,78 persen. Persentase terbesar berikutnya adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 17,95 persen dan kategori Industri Pengolahan sebesar 13,57 persen (Tabel 2).

Pada Februari 2026, kesenjangan pada proporsi penduduk bekerja laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan perempuan terdapat pada kategori Konstruksi, sedangkan kesenjangan terbesar pada proporsi penduduk bekerja perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki berada di kategori Perdagangan Besar dan Eceran.



Catatan: Kategori Lapangan Usaha pada Februari 2026 menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026

Gambar 10 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2026

Pada Februari 2026, terlihat adanya segregasi lapangan pekerjaan berdasarkan jenis kelamin dalam komposisi penduduk yang bekerja. Terdapat 10 dari 17 kategori lapangan pekerjaan yang didominasi oleh laki-laki. Tiga lapangan pekerjaan dengan gap terbesar, yang menunjukkan proporsi pekerja laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan, berada pada kategori Konstruksi (9,65 persen poin), Transportasi dan Penyimpanan (6,05 persen poin), serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (3,25 persen poin).

Sementara itu, pada tujuh kategori lapangan pekerjaan lainnya proporsi pekerja perempuan tercatat lebih tinggi daripada laki-laki. Tiga lapangan pekerjaan dengan gap terbesar yang menunjukkan dominasi pekerja perempuan terdapat pada Perdagangan Besar dan Eceran (8,08 persen poin), Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (6,76 persen poin), dan Pendidikan (4,54 persen poin).

2.5 KILM 5. Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama

Indikator jenis pekerjaan (*occupation*) memegang peranan penting dalam memahami struktur dan dinamika pasar tenaga kerja. Klasifikasi pekerjaan berdasarkan jenis pekerjaan memberikan gambaran tentang persebaran tenaga kerja menurut tugas dan fungsi pekerjaan yang dilakukan, seperti profesional, teknisi, operator mesin, hingga pekerja kasar. Informasi ini tidak hanya mencerminkan perkembangan sektor ekonomi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia dan kebutuhan keterampilan di pasar kerja.

Menurut ILO *"Occupational classification provides a framework for collecting and presenting data about the jobs people do, to support planning, employment policy, and vocational training"* (ILO, 2012). Dengan kata lain, indikator ini sangat krusial dalam merancang kebijakan pendidikan, pelatihan keterampilan (*upskilling/reskilling*), dan strategi ketenagakerjaan nasional.

Selain itu, analisis jenis pekerjaan juga memungkinkan identifikasi kesenjangan kerja berdasarkan gender, wilayah, dan tingkat pendidikan. Misalnya, sebagian besar pekerjaan di bidang teknis atau sains masih didominasi laki-laki, sementara pekerjaan pelayanan cenderung ditempati perempuan. Data semacam ini penting untuk mendorong kesetaraan dan inklusi di dunia kerja.



“Paling banyak penduduk bekerja sebagai tenaga Produksi, Operator Alat-Alat Angkutan, dan Pekerja Kasar.”

Jenis pekerjaan utama penduduk yang bekerja di Indonesia pada Februari 2026 masih menunjukkan pola yang sama antara Februari 2025 dan Agustus 2025. Sebagai gambaran, pada Februari 2026 penduduk bekerja paling banyak sebagai Tenaga Produksi, Operator Alat-Alat Angkutan, dan Pekerja Kasar yang mencapai 29,25 persen dari total penduduk bekerja. Persentase tertinggi berikutnya adalah penduduk bekerja dengan jenis pekerjaan Tenaga Usaha Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan, dan Perburuan, serta Tenaga Usaha Penjualan, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3. Komposisi ini mencerminkan struktur pasar tenaga kerja Indonesia yang masih didominasi oleh sektor industri dan pertanian, dengan kontribusi signifikan dari sektor perdagangan, sesuai dengan karakteristik negara berkembang (ILO, 2018; ILOSTAT, n.d.-a).

Tabel 3 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama, Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

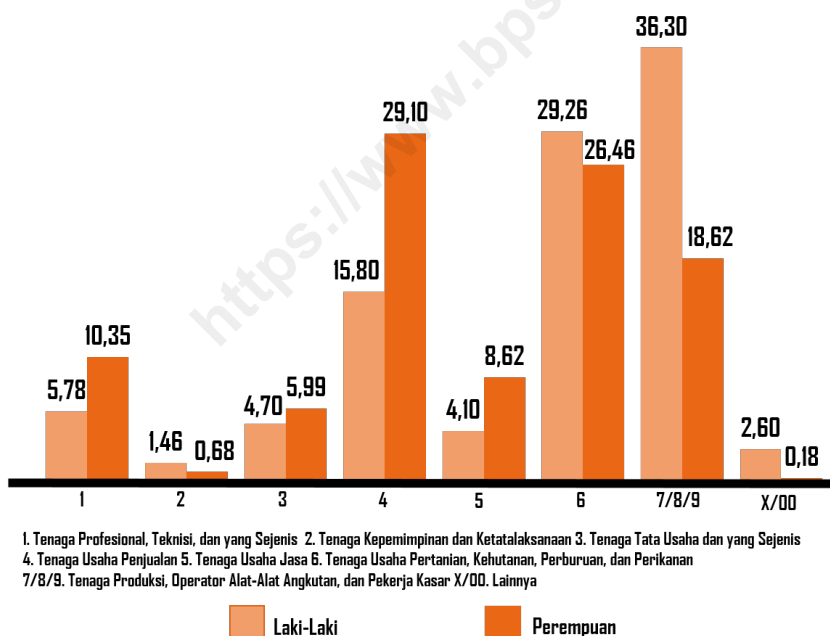
Jenis Pekerjaan Utama	2025		2026
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tenaga Profesional, Teknisi dan yang Sejenis	7,35	7,50	7,60
2. Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	1,17	1,19	1,15
3. Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis	5,65	5,30	5,22
4. Tenaga Usaha Penjualan	21,13	20,63	21,11
5. Tenaga Usaha Jasa	5,64	6,44	5,90
6. Tenaga Usaha Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan, dan Perburuan	27,86	27,19	28,14
7/8/9. Tenaga Produksi, Operator Alat-Alat Angkutan dan Pekerja Kasar	29,53	30,05	29,25
X/00. Lainnya	1,68	1,70	1,63
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026



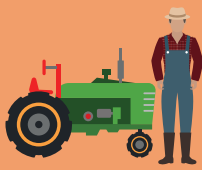
Pada Februari 2026, laki-laki paling banyak bekerja sebagai Tenaga Produksi, Operator Alat-Alat Angkutan, dan Pekerja Kasar; sedangkan perempuan paling banyak bekerja sebagai Tenaga Usaha Penjualan.

Ditinjau menurut jenis kelamin, pada Sakernas Februari 2026, persentase tertinggi penduduk laki-laki bekerja adalah pada jenis pekerjaan Tenaga Produksi, Operator Alat-Alat Angkutan, dan Pekerja Kasar sebesar 36,30 persen. Sementara itu, persentase tertinggi perempuan bekerja pada jenis pekerjaan Tenaga Usaha Penjualan sebesar 29,10 persen (Gambar 11). Perbedaan ini mencerminkan pola pembagian kerja yang masih dipengaruhi oleh faktor gender di pasar tenaga kerja Indonesia, laki-laki lebih banyak bekerja di sektor-sektor yang bersifat fisik dan teknis sedangkan perempuan lebih dominan di sektor jasa dan perdagangan (ILO, 2018; ILOSTAT, n.d.-b).



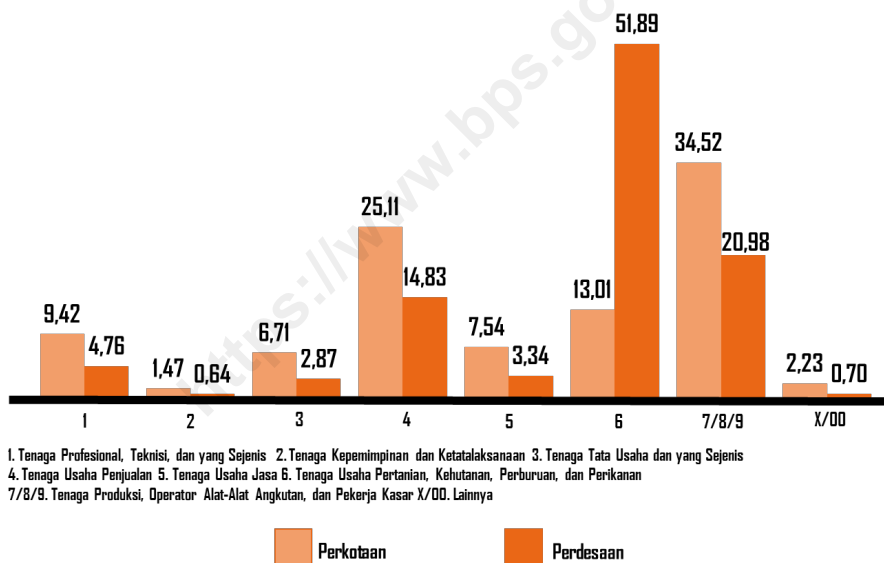
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026

Gambar 11 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, Februari 2026



Pada Februari 2026, mayoritas penduduk perdesaan bekerja sebagai Tenaga Usaha Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan, dan Perburuan; sedangkan penduduk perkotaan paling banyak bekerja sebagai Tenaga Produksi, Operator Alat-Alat Angkutan, dan Pekerja Kasar

Berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase tertinggi jenis pekerjaan pada Februari 2026 di daerah perdesaan adalah Tenaga Usaha Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan, dan Perburuan yaitu sebesar 51,89 persen. Sementara penduduk di daerah perkotaan paling banyak bekerja sebagai Tenaga Produksi, Operator Alat-Alat Angkutan, dan Pekerja Kasar sebesar 34,52 persen (Gambar 12).



1. Tenaga Profesional, Teknisi, dan yang Sejenis 2. Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan 3. Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis
4. Tenaga Usaha Penjualan 5. Tenaga Usaha Jasa 6. Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
7/8/9. Tenaga Produksi, Operator Alat-Alat Angkutan, dan Pekerja Kasar X/00. Lainnya

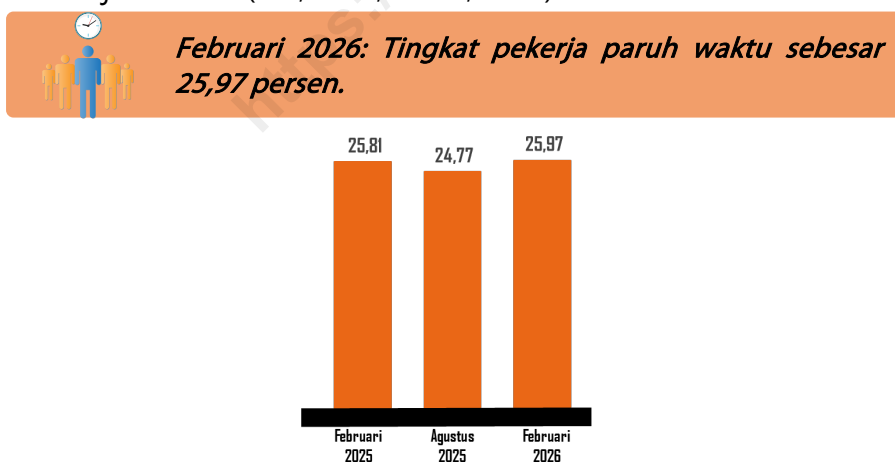
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026

Gambar 12 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama dan Daerah Tempat Tinggal, Februari 2026

2.6 KILM 6. Pekerja Paruh Waktu

Salah satu indikator yang digunakan dalam ukuran ini adalah pekerja paruh waktu, indikator ini berfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Dalam pengukurannya, indikator ini merupakan proporsi dari total penduduk bekerja. Walaupun jam kerjanya kurang dari 35 jam seminggu, namun mereka tidak sedang mencari dan mempersiapkan usaha. Selain itu, pekerja paruh waktu juga tidak bersedia jika ada yang menawarkan pekerjaan lain. Hal ini mengindikasikan bahwa pekerja paruh waktu belum tentu termasuk golongan dari pekerja yang tidak layak.

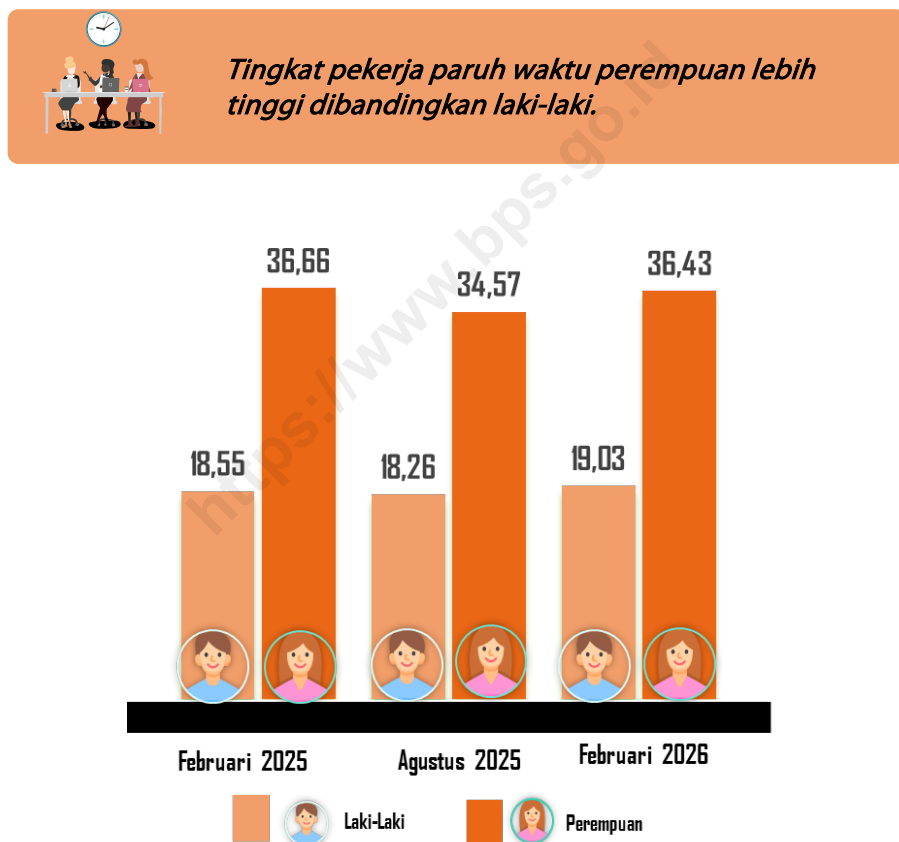
Indikator ini penting dalam memahami kondisi kerja yang mungkin mencerminkan ketidakseimbangan antara kebutuhan tenaga kerja dan preferensi atau keterbatasan pekerja, termasuk isu-isu seperti pekerjaan tidak sukarela, perlindungan sosial, serta kualitas dan stabilitas pekerjaan. Selain itu, informasi ini mendukung perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perubahan dalam pola kerja modern, seperti *gig economy* (sistem kerja berbasis proyek jangka pendek atau lepas, seringkali melalui *platform* digital) dan kerja fleksibel (ILO, 2018; OECD, 2020).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Gambar 13 Tingkat Pekerja Paruh Waktu (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

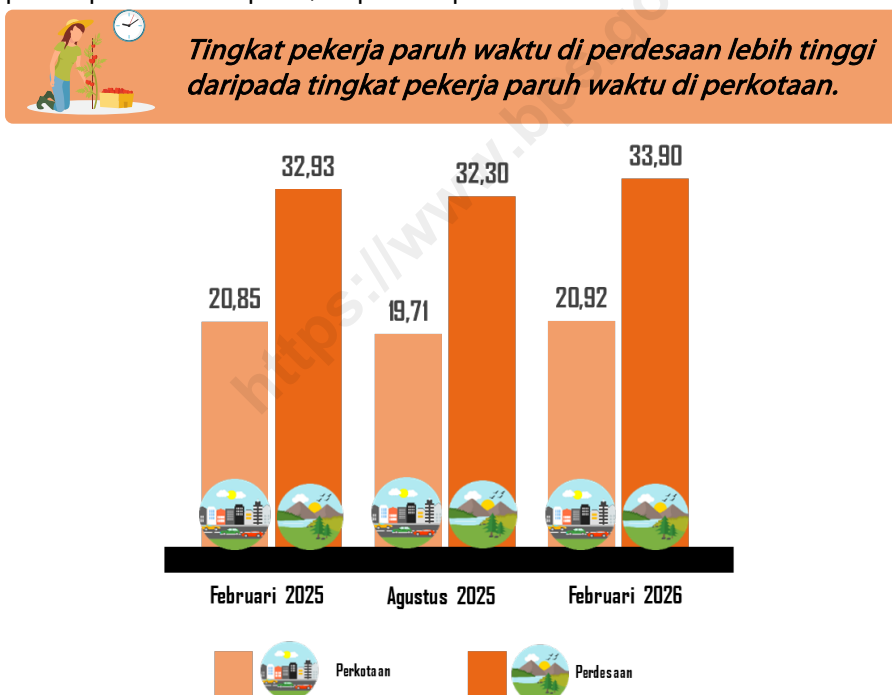
Pada Februari 2025, tingkat pekerja paruh waktu tercatat sebesar 25,81 persen, kemudian mengalami penurunan menjadi 24,77 persen pada Agustus 2025. Namun, pada Februari 2026 angka tersebut kembali meningkat menjadi 25,97 persen. Tingkat pekerja paruh waktu sebesar 25,97 persen berarti dari setiap 100 orang yang bekerja, sekitar 26 di antaranya bekerja kurang dari 35 jam per minggu tanpa keinginan untuk menambah jam kerja. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja yang dipengaruhi oleh faktor musiman, kondisi ekonomi, dan preferensi pekerja terhadap jam kerja (ILO, 2018; ILOSTAT, n.d.-f).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Gambar 14 Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Hasil Sakernas Februari 2026 menunjukkan bahwa tingkat pekerja paruh waktu perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki, masing-masing sebesar 36,43 persen dan 19,03 persen. Informasi ini mengindikasikan bahwa lebih banyak perempuan yang bekerja dengan jam kerja di bawah normal tanpa keinginan untuk menambah jam kerja. Jika dibandingkan dengan Februari 2025, tingkat pekerja paruh waktu laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,48 persen poin. Sebaliknya, pada periode yang sama, tingkat pekerja paruh waktu perempuan justru mengalami penurunan sebesar 0,23 persen poin. Namun, jika dibandingkan dengan Agustus 2025, terjadi peningkatan tingkat pekerja paruh waktu pada kedua jenis kelamin. Pada laki-laki, peningkatan tercatat sebesar 0,77 persen poin, sementara pada perempuan mencapai 1,86 persen poin.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Gambar 15 Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Daerah Tempat Tinggal (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

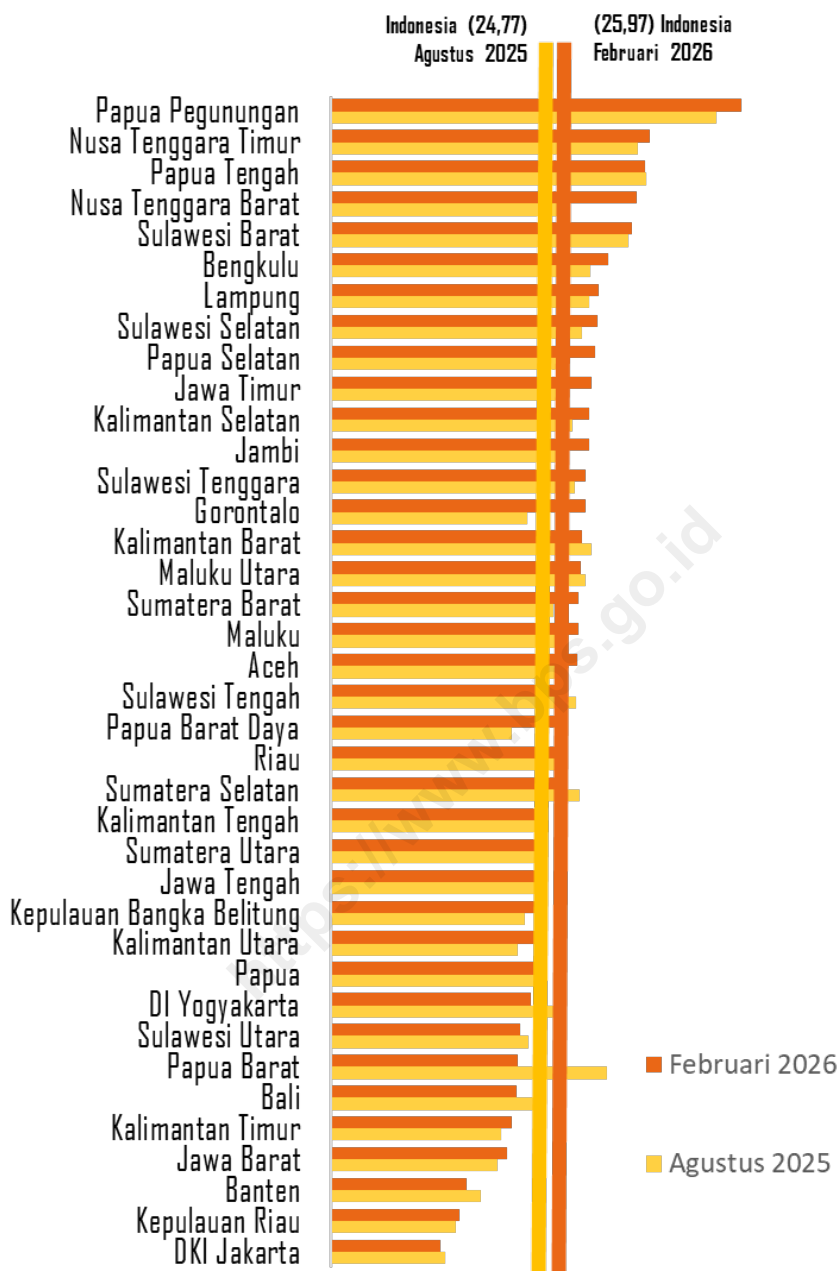
Berdasarkan Gambar 15, tingkat pekerja paruh waktu menurut daerah tempat tinggal menunjukkan pola yang konsisten, di mana tingkat pekerja paruh waktu di perdesaan selalu lebih tinggi dibandingkan di perkotaan selama periode 2025 dan 2026. Sebagai gambaran, pada Februari 2026, tingkat pekerja paruh waktu di perdesaan mencapai 33,90 persen, sementara di perkotaan hanya sebesar 20,92 persen. Jika dibandingkan dengan Februari 2025 maupun Agustus 2025, tingkat pekerja paruh waktu baik di wilayah perkotaan dan perdesaan mengalami peningkatan.



Februari 2026: Provinsi Papua Pegunungan merupakan provinsi dengan tingkat pekerja paruh waktu tertinggi.

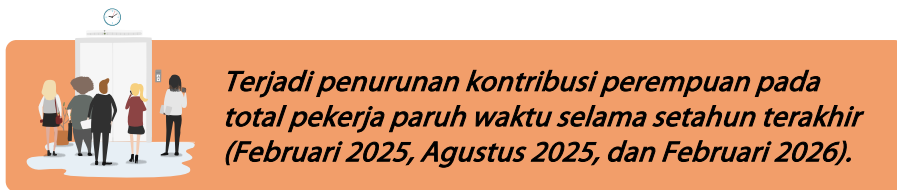
Berdasarkan Gambar 16 dan Lampiran 13, tiga provinsi dengan tingkat pekerja paruh waktu tertinggi pada Februari 2026 adalah Papua Pegunungan (48,11 persen), Nusa Tenggara Timur (37,37 persen), dan Papua Tengah (36,87 persen). Ketiga provinsi ini mencatat persentase pekerja paruh waktu yang jauh lebih tinggi dibandingkan angka nasional, yang sebesar 25,97 persen. Hal yang mirip juga terlihat jika dibandingkan dengan Agustus 2025, di mana ketiga provinsi tersebut memiliki persentase pekerja paruh waktu tertinggi, namun dengan urutan yang sedikit berbeda. Posisi tertinggi adalah Papua Pegunungan, posisi berikutnya adalah Papua Tengah dan disusul Nusa Tenggara Timur. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pekerja paruh waktu di provinsi-provinsi tersebut secara konsisten tetap berada di atas rata-rata nasional.

Sebaliknya pada Februari 2026, tiga provinsi dengan tingkat pekerja paruh waktu terendah adalah DKI Jakarta (12,79 persen), Kepulauan Riau (15,09 persen), dan Banten (15,85 persen). Sementara itu, pada Agustus 2025, ketiga provinsi ini memiliki urutan provinsi dengan tingkat pekerja paruh waktu terendah yang sama, yaitu DKI Jakarta (13,34 persen), Kepulauan Riau (14,70 persen), dan Banten (17,59 persen).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025, dan Februari 2026

Gambar 16 Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi (persen), Agustus 2025 dan Februari 2026



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Gambar 17 Kontribusi Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

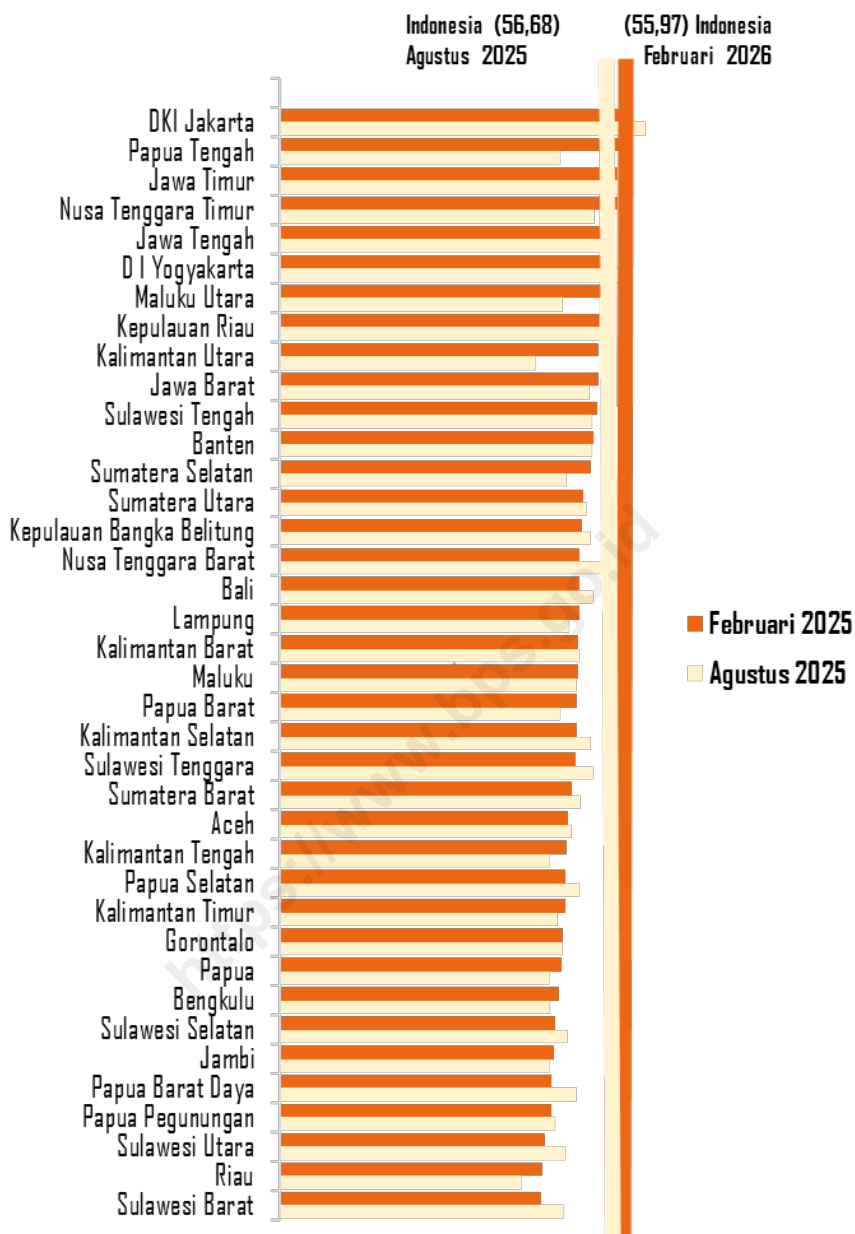
Kontribusi perempuan terhadap total pekerja paruh waktu diukur melalui proporsi perempuan yang termasuk dalam kategori pekerja paruh waktu dibandingkan dengan keseluruhan pekerja paruh waktu. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2026, kontribusi perempuan tercatat sebesar 55,97 persen. Artinya, dari setiap 100 pekerja paruh waktu, sekitar 56 di antaranya adalah perempuan. Jika dibandingkan kondisi setahun terakhir (Februari 2025) kontribusi perempuan pada pekerja paruh waktu mengalami penurunan yaitu sebesar 0,95 persen poin. Namun jika dibandingkan Agustus 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,29 persen poin.



Pada Februari 2026, provinsi dengan kontribusi perempuan terhadap pekerja paruh waktu tertinggi adalah DKI Jakarta.

Berdasarkan data, provinsi dengan kontribusi perempuan terhadap pekerja paruh waktu tertinggi adalah DKI Jakarta dengan kontribusi sebesar 62,23 persen. Dua provinsi lainnya dengan kontribusi tertinggi adalah Papua Tengah (61,85 persen) dan Jawa Timur (60,19 persen). Sementara pada Agustus 2025, provinsi dengan kontribusi perempuan terhadap pekerja paruh waktu tertinggi adalah DKI Jakarta (71,42 persen), DI Yogyakarta (60,47 persen) dan Jawa Timur (60,26 persen).

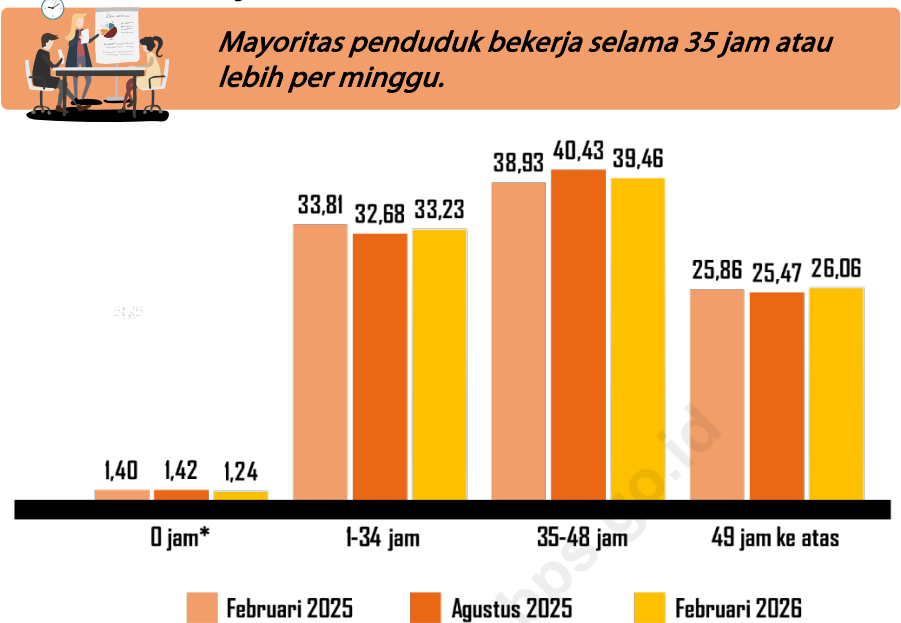
Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan kontribusi tertinggi pada periode Agustus 2025 maupun Februari 2025, namun persentasenya mengalami penurunan (9,18 persen poin). Sementara itu, tiga provinsi dengan kontribusi perempuan terhadap pekerja paruh waktu yang terendah pada Februari 2026 adalah Sulawesi Barat (46,62 persen), Riau (46,85 persen) dan Sulawesi Utara (47,20 persen). Pada Agustus 2025 diduduki oleh Riau (43,18 persen), Kalimantan Utara (45,55 persen) dan Kalimantan Tengah (48,08 persen).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2025, dan Februari 2026

Gambar 18 Kontribusi Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu (persen), Agustus 2025 dan Februari 2026

2.7 KILM 7. Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

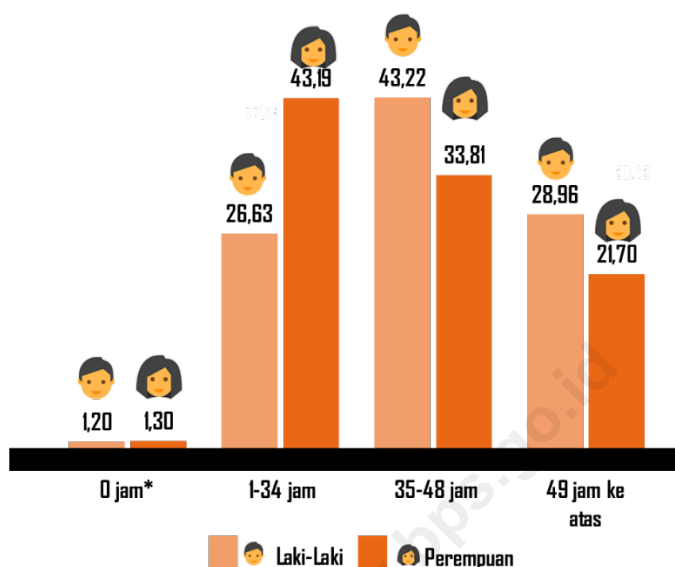
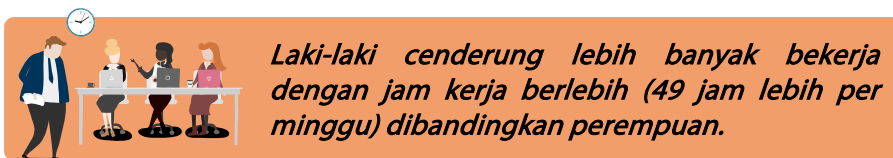
Gambar 19 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Hasil Sakernas Februari 2026 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia yang bekerja, yaitu sebesar 65,52 persen, memiliki jam kerja 35 jam atau lebih per minggu. Angka ini menunjukkan tren yang serupa dengan dua periode sebelumnya, yaitu Februari 2025 (64,79 persen) dan Agustus 2025 (65,90 persen). Jika dibandingkan dengan Februari 2025, terjadi peningkatan sebesar 0,73 persen poin, namun jika dibandingkan Agustus 2025 mengalami penurunan sebesar 0,38 persen poin. Kategori jam kerja 35 jam ke atas ini lazim digunakan untuk mengidentifikasi pekerja dengan *full-time employment*, dan mencerminkan stabilitas struktur kerja dalam konteks nasional.

Namun demikian, terdapat pula proporsi signifikan penduduk yang bekerja dengan jam kerja sangat panjang, yakni 49 jam atau lebih per minggu, sebesar 26,06 persen. Persentase ini meningkat jika dibandingkan kondisi Februari 2025 maupun Agustus 2025. Berdasarkan KILM 7 dari ILO, kategori 49 jam ke atas tergolong dalam kelompok pekerja dengan waktu kerja berlebih (*excessive hours of work*), yang dapat berimplikasi pada isu ketenagakerjaan yang tidak layak, terutama apabila jam kerja yang panjang tidak disertai kompensasi memadai atau bersifat *involuntary* (ILO, 2008; ILO, 2018).

KILM menjelaskan bahwa jam kerja yang terlalu panjang dapat terjadi karena beberapa kondisi, seperti upah yang tidak memadai sehingga pekerja terpaksa menambah jam kerja, atau karena kewajiban pekerjaan yang tidak fleksibel. Kondisi ini dikenal juga sebagai *inadequate employment related to excessive hours* atau *over-employment*, yang menurut definisi ILO merupakan situasi ketika pekerja ingin atau mencoba bekerja lebih sedikit dengan pengurangan pendapatan yang sepadan, namun tidak dapat melakukannya (ILO, 1998).

Lebih lanjut, KILM juga menekankan bahwa pengukuran waktu kerja tidak hanya penting untuk memahami beban kerja individu, tetapi juga berpengaruh pada dimensi makroekonomi, seperti produktivitas tenaga kerja dan biaya tenaga kerja bagi perusahaan. Dalam banyak kasus, jam kerja yang terlalu panjang justru dapat berdampak negatif terhadap produktivitas, kesehatan pekerja, serta kualitas hubungan sosial di luar pekerjaan (Spurgeon, 2003; Messenger, 2004). Oleh karena itu, pemantauan tren jam kerja di berbagai kelompok penduduk bekerja menjadi penting sebagai bagian dari upaya menuju kondisi kerja yang layak (*decent work*), sebagaimana ditargetkan dalam SDGs 8.



* Termasuk sementara tidak bekerja

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026

Gambar 20 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja dan Jenis Kelamin, Februari 2026

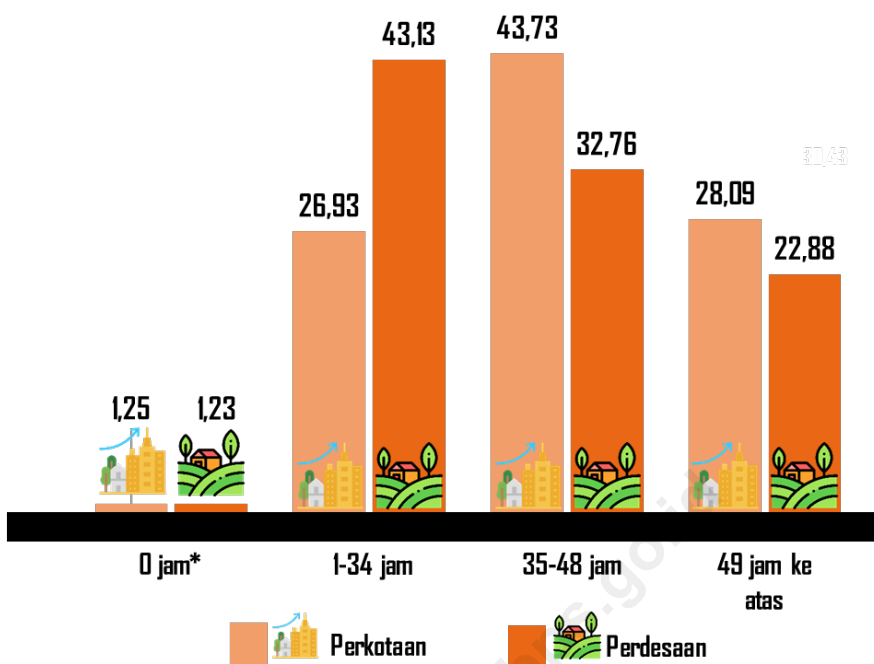
Data dari Gambar 20 menunjukkan bahwa pada Februari 2026 terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara laki-laki dan perempuan dalam hal jumlah jam kerja per minggu. Persentase penduduk laki-laki yang bekerja 35 jam atau lebih per minggu mencapai 72,18 persen, yang mencakup 43,22 persen untuk kategori 35–48 jam dan 28,96 persen untuk kategori 49 jam ke atas. Sementara itu, hanya sekitar 55,51 persen perempuan yang bekerja dalam dua kategori tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa laki-laki lebih banyak bekerja dalam pola kerja penuh waktu atau bahkan dalam kategori jam kerja berlebih, sedangkan perempuan cenderung lebih banyak ditemukan dalam kategori jam kerja pendek (1–34 jam per minggu).

Perempuan mendominasi pada kategori jam kerja 1–34 jam per minggu dengan persentase mencapai 43,19 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang hanya sebesar 26,63 persen. Ketimpangan ini mengindikasikan adanya perbedaan signifikan dalam distribusi beban kerja antara jenis kelamin, yang sangat mungkin dipengaruhi oleh peran domestik yang masih melekat kuat pada perempuan. Studi ILO (2007) menunjukkan bahwa beban ganda antara pekerjaan produktif dan kerja perawatan yang tidak dibayar cenderung membatasi jam kerja perempuan di pasar tenaga kerja formal.

Selain itu, persentase pekerja perempuan yang masuk dalam kategori jam kerja 49 jam ke atas per minggu lebih rendah dibanding laki-laki, yaitu 21,70 persen berbanding 28,96 persen. Padahal, menurut definisi ILO dalam KILM 7, kelompok jam kerja 49 jam ke atas sudah masuk dalam kategori *excessive hours* dan dapat berimplikasi negatif terhadap kesehatan dan produktivitas. Walaupun lebih rendah, hal ini tidak serta-merta menunjukkan kondisi yang lebih baik bagi perempuan, karena sebagian besar perempuan justru berada pada pekerjaan dengan jam kerja pendek dan kondisi kerja yang tidak stabil, termasuk pekerjaan informal yang minim perlindungan.



Lebih dari seperempat penduduk perkotaan bekerja dengan jam kerja berlebih.



* Termasuk sementara tidak bekerja

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026

Gambar 21 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja dan Daerah Tempat Tinggal, Februari 2026

Distribusi jam kerja pada Februari 2026 menurut wilayah tempat tinggal menunjukkan variasi struktural yang jelas antara perkotaan dan perdesaan. Dalam kategori jam kerja 35–48 jam per minggu, sebanyak 43,73 persen penduduk bekerja di perkotaan berada dalam rentang ini, lebih tinggi dibandingkan di wilayah perdesaan yang hanya sebesar 32,76 persen. Jam kerja dalam rentang ini sesuai dengan apa yang dalam kerangka KILM 7 disebut sebagai *normal working hours*, yang sering digunakan sebagai *baseline* untuk menilai kestabilan keterlibatan dalam pekerjaan penuh waktu di banyak negara.

Dalam kategori 49 jam ke atas per minggu, sebanyak 28,09 persen penduduk perkotaan tercatat bekerja dalam kategori *excessive working hours* yang lebih tinggi dibandingkan di perdesaan (22,88 persen). Angka ini sering digunakan sebagai indikator tidak langsung untuk mendeteksi potensi *over-employment*, yaitu kondisi ketika pekerja ingin atau mencoba mengurangi jam kerja mereka namun tidak bisa melakukannya. Meski data ini tidak menyatakan keinginan tersebut secara eksplisit, proporsi tinggi dalam kategori ini tetap relevan untuk pemantauan kondisi kerja intensif (ILO, 2018).

Di sisi lain, wilayah perdesaan menunjukkan konsentrasi yang tinggi pada kategori jam kerja pendek, dengan persentase sebesar 43,13 persen, jauh di atas angka perkotaan (26,93 persen). Pola distribusi tersebut memberikan gambaran kuantitatif adanya dominasi pekerjaan dengan jam kerja rendah di perdesaan. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam analisis ketenagakerjaan karena dapat mengindikasikan keterbatasan kesempatan kerja, rendahnya produktivitas, atau tingginya proporsi pekerja yang hanya memperoleh pekerjaan tidak penuh waktu di perdesaan.

Selanjutnya, perbedaan antara wilayah dalam kategori jam kerja nol selama minggu referensi relatif tidak signifikan. Kategori ini, yang dalam KILM diartikan sebagai tidak adanya waktu kerja aktual karena alasan apa pun yang tidak termasuk dalam pengukuran *actual hours worked*. Persentase kategori ini kecil dan hampir setara yaitu 1,25 persen di perkotaan dan 1,23 persen di perdesaan, yang menunjukkan bahwa perbedaan utama dalam distribusi waktu kerja lebih terletak pada intensitas jam kerja, bukan partisipasi kerja secara keseluruhan.



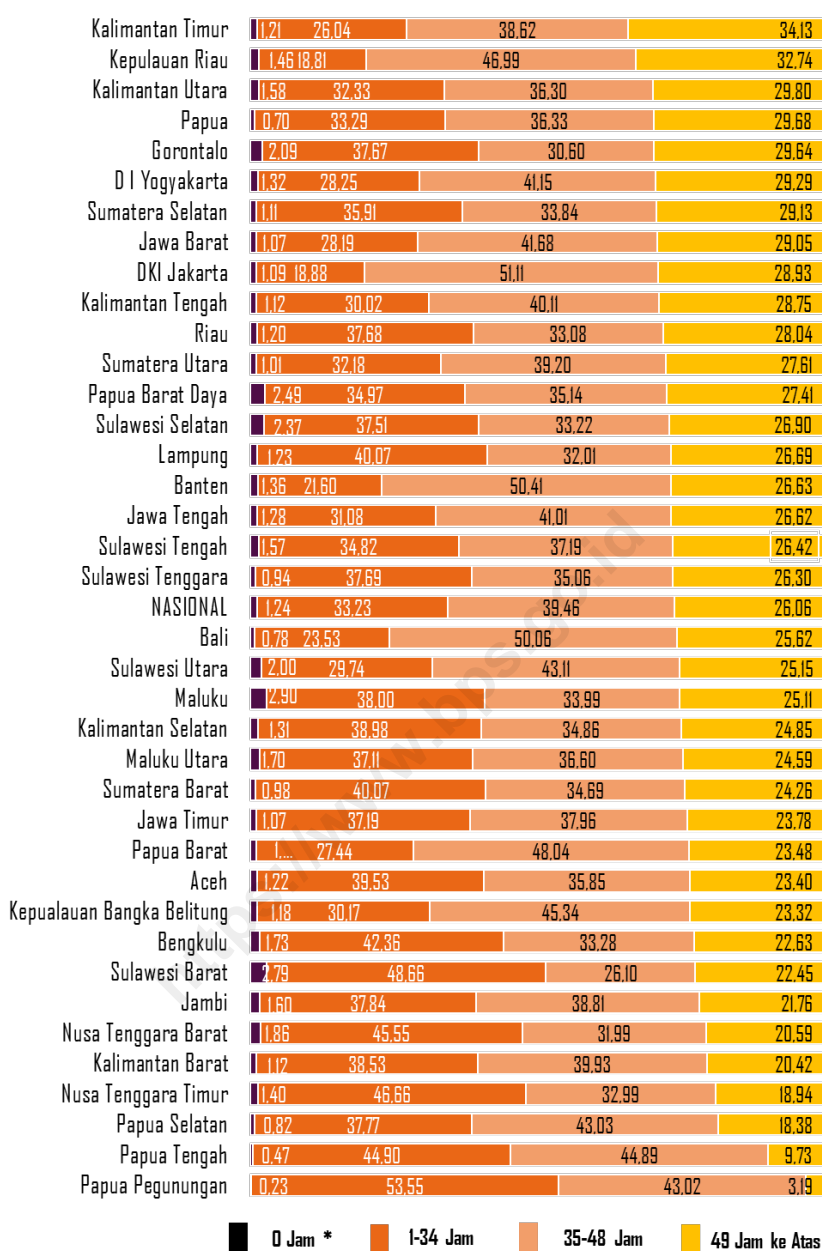
Pada Februari 2026, provinsi dengan persentase penduduk yang bekerja dengan jam kerja berlebih paling tinggi berada di Provinsi Kalimantan Timur.

Secara nasional dominasi pekerja menurut jam kerja terdapat pada kategori 35-48 jam seminggu. Jika dilihat menurut sebarannya, tiga provinsi dengan dominasi penduduk bekerja dalam kategori jam kerja penuh waktu (35-48 jam) tertinggi adalah DKI Jakarta, Banten, dan Bali. DKI Jakarta mencatat proporsi tertinggi sebesar 51,11 persen, sementara Banten dan Bali masing-masing 50,41 persen dan 50,06 persen.

Sementara itu, pada kategori jam kerja tidak penuh (1 sampai 34 jam), tiga provinsi dengan persentase tertinggi diantaranya Papua Pegunungan (53,55 persen), Sulawesi Barat (48,66 persen) dan Nusa Tenggara Timur (46,66 persen). Jam kerja tidak penuh menunjukkan bahwa sebagian pekerja belum memperoleh pemanfaatan kerja secara optimal sehingga masih mencari pekerjaan lain (setengah pengangguran), meskipun pada beberapa kasus lainnya jam kerja tidak penuh juga dapat terjadi karena sukarela (paruh waktu).

Kalimantan Timur, Kepulauan Riau dan Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan proporsi tertinggi pekerja dalam kategori jam kerja 49 jam ke atas, masing-masing sebesar 34,13 persen, 32,74 persen, dan 29,80 persen. Nilai ini secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata nasional. Dalam kerangka KILM 7, indikator ini penting untuk memantau dinamika beban kerja mingguan yang melebihi norma waktu kerja umum di banyak negara.

Di sisi lain, penduduk yang sementara tidak bekerja selama minggu referensi juga tercatat lebih tinggi dari rata-rata nasional di beberapa provinsi, seperti Maluku (2,90 persen), Sulawesi Barat (2,79 persen) dan Papua Barat Daya (2,49 persen). KILM 7 mencatat bahwa jam kerja nol biasanya mengindikasikan ketidakhadiran karena alasan yang termasuk dalam definisi jam kerja aktual (*actual hours worked*), seperti cuti pribadi/melahirkan, gangguan cuaca, atau sakit. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 22 dan Lampiran 15.



* Termasuk sementara tidak bekerja

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026

Gambar 22 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, Februari 2026

2.8 KILM 8. Penduduk Bekerja di Kegiatan Informal

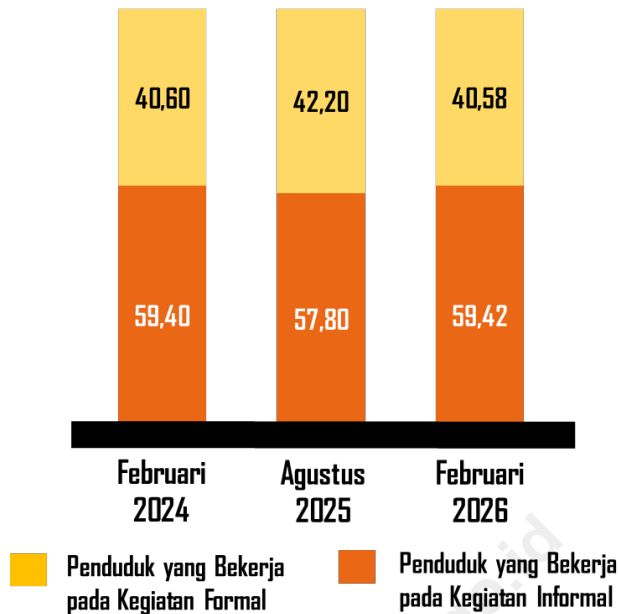
Sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan utama. Penduduk bekerja di kegiatan formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya termasuk penduduk bekerja di kegiatan informal.



Mayoritas penduduk di Indonesia bekerja di kegiatan informal yaitu sebesar 59,42 persen pada Februari 2026.

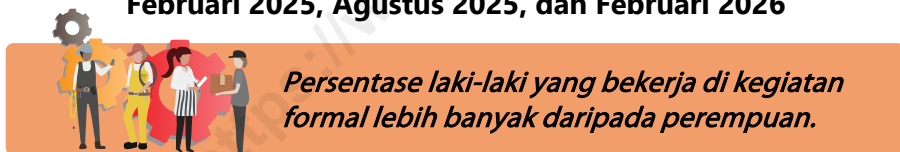
Data Sakernas Februari 2026 menunjukkan bahwa sebanyak 59,42 persen dari total 147,67 juta penduduk bekerja berada dalam kegiatan informal. Angka ini setara dengan 87,74 juta orang, dan menunjukkan peningkatan dibandingkan dua periode sebelumnya, yaitu Februari 2025 dan Agustus 2025. Dengan kata lain, mayoritas penduduk bekerja masih bergantung pada pekerjaan yang tidak berada dalam cakupan sistem perlindungan ketenagakerjaan nasional. Sementara itu, proporsi pekerja di kegiatan formal tercatat sebesar 40,58 persen atau setara dengan 59,93 juta orang.

Tingginya penduduk bekerja pada pekerjaan informal ini memperlihatkan bahwa indikator seperti tingkat pengangguran atau jumlah jam kerja saja belum cukup untuk menggambarkan kondisi pasar tenaga kerja secara utuh. Fenomena ini juga disebutkan dalam KILM 8, "*informal employment offers a necessary survival strategy*" terutama di negara-negara yang belum memiliki sistem perlindungan sosial yang komprehensif. Dalam konteks ini, pekerjaan informal menjadi strategi bertahan hidup bagi banyak kelompok, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap pekerjaan tetap.



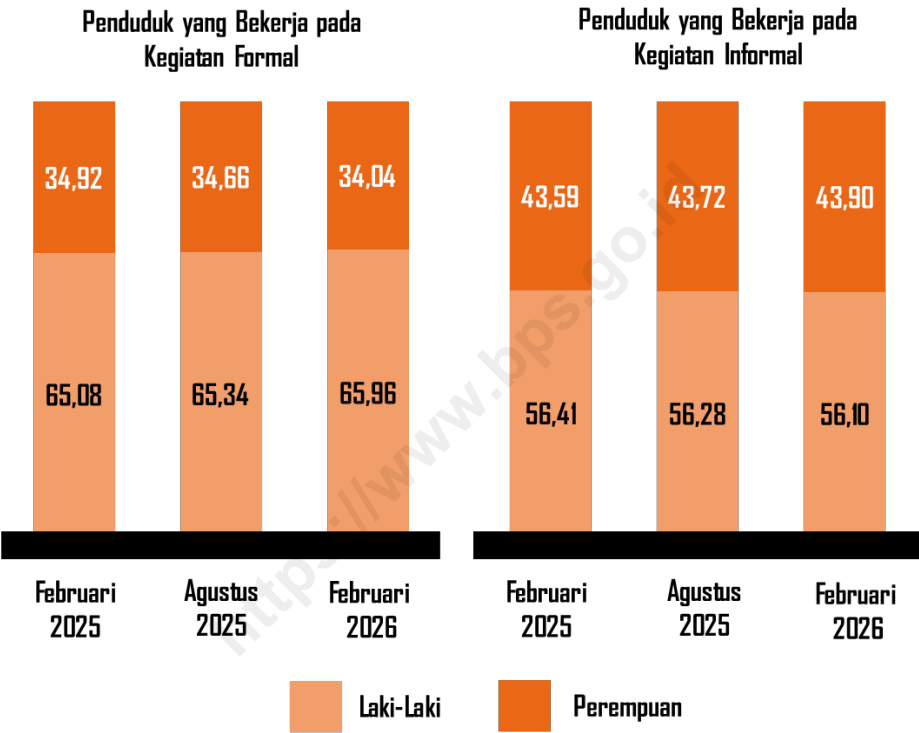
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Gambar 23 Persentase Penduduk Bekerja pada Kegiatan Formal/Informal, Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026



Gambar 24 menunjukkan distribusi penduduk yang bekerja menurut status kegiatan (formal dan informal) serta jenis kelamin selama tiga periode, yakni Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026. Secara konsisten, laki-laki mendominasi baik di kegiatan formal maupun informal. Proporsi penduduk bekerja laki-laki di kegiatan formal lebih tinggi daripada kegiatan informal, sedangkan pola sebaliknya terjadi pada perempuan. Pada Februari 2026, sebanyak 65,96 persen penduduk bekerja pada kegiatan formal adalah laki-laki, sementara perempuan hanya sekitar 34,04 persen. Di sisi lain, pada kegiatan informal, proporsi laki-laki tercatat sebesar 56,10 persen, sedangkan perempuan mencapai 43,90 persen.

Tingginya proporsi perempuan dalam kegiatan informal dapat dikaitkan dengan karakteristik pekerjaan informal yang lebih fleksibel secara waktu namun cenderung minim perlindungan. KILM 8 bahkan mencatat bahwa sektor informal sering kali menjadi "*fallback position*" bagi perempuan yang mengalami keterbatasan dalam mengakses pekerjaan formal karena hambatan struktural, kultural, atau tanggung jawab rumah tangga.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Gambar 24 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal/Informal dan Jenis Kelamin, Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

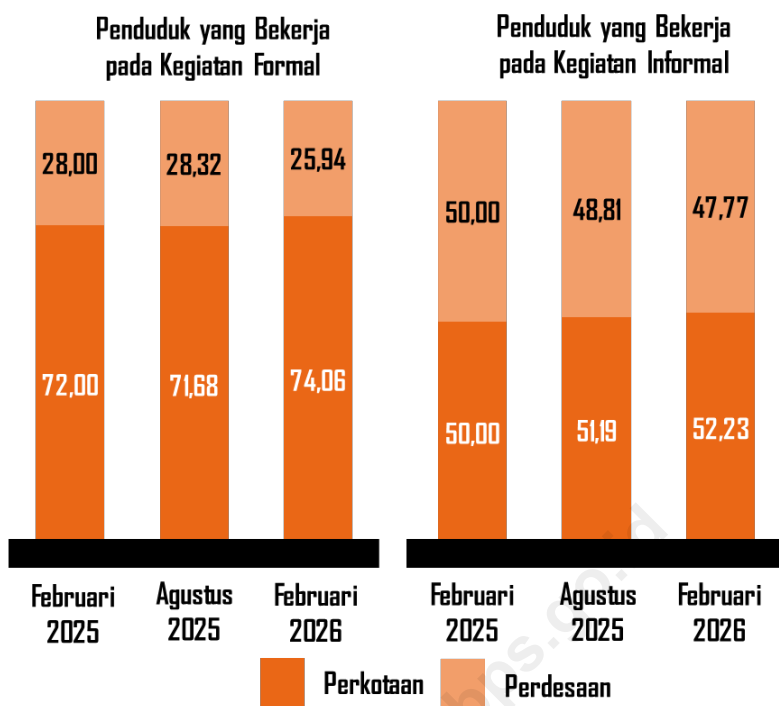
Gambar 25 menunjukkan bahwa pada kelompok penduduk yang bekerja di kegiatan formal, mayoritas berasal dari wilayah perkotaan, pada Februari 2026, sebesar 74,06 persen. Sedangkan di wilayah perdesaan hanya sekitar 25,94 persen. Dominasi kegiatan formal di wilayah perkotaan terlihat konsisten pada periode 2025 dan 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah perkotaan memiliki kapasitas yang lebih besar dalam menyediakan pekerjaan formal, yang umumnya berkaitan dengan unit usaha terdaftar, skala usaha yang lebih modern, serta hubungan kerja yang lebih terlindungi dalam sistem ketenagakerjaan formal sebagaimana didefinisikan dalam KILM 8 dan ICLS ke-17.

Sementara itu, proporsi penduduk yang bekerja pada kegiatan informal cenderung berimbang baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada periode Sakernas Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026, kegiatan informal di perkotaan berkisar 50-52 persen, sedangkan kegiatan informal di perdesaan berkisar 48-50 persen. Jika dilihat trennya, penduduk bekerja di kegiatan informal perkotaan cenderung meningkat, sebaliknya di perdesaan cenderung menurun.

Fenomena ini mencerminkan bahwa pekerjaan informal tidak hanya terbatas di wilayah perdesaan, tetapi juga berkembang di wilayah perkotaan, sejalan dengan penekanan dalam KILM 8 bahwa *"the informal sector tends to absorb most of the expanding labour force in urban areas"*, terutama dalam konteks urbanisasi dan pertumbuhan penduduk. Peningkatan informalitas di perkotaan juga dapat dikaitkan dengan perubahan struktur produksi dan praktik subkontrak, yang mendorong unit usaha formal untuk menggunakan bentuk hubungan kerja non-standar, yang sering kali tidak tercakup dalam perlindungan ketenagakerjaan formal (Bacchetta et al., 2009).

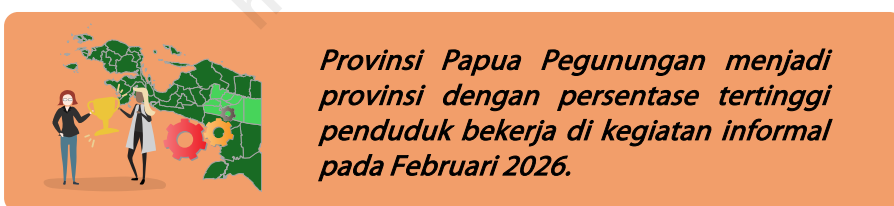


Pada Februari 2026, penduduk bekerja di kegiatan informal sedikit lebih banyak tinggal di daerah perkotaan



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Gambar 25 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal/Informal dan Daerah Tempat Tinggal, Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

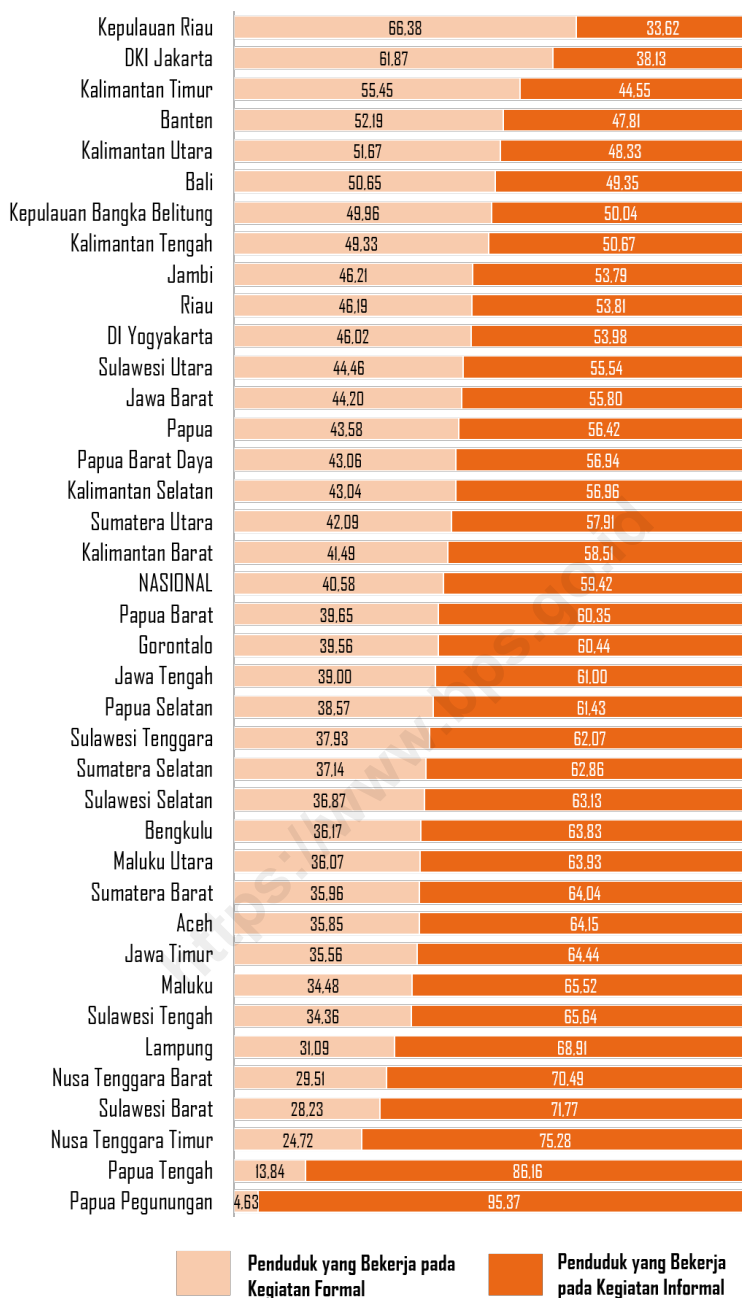


Gambar 26 menunjukkan bahwa persentase penduduk bekerja di kegiatan informal di Indonesia masih sangat tinggi dan menunjukkan variasi yang cukup mencolok antarprovinsi. Dari 38 provinsi, separuh diantaranya memiliki proporsi penduduk bekerja di kegiatan informal yang melebihi 60 persen, menandakan dominasi kegiatan ekonomi di luar jangkauan sistem ketenagakerjaan formal.

Provinsi dengan persentase penduduk bekerja di kegiatan informal tertinggi tercatat di Papua Pegunungan (95,37 persen), Papua Tengah (86,16 persen), dan Nusa Tenggara Timur (75,28 persen). Angka-angka ini jauh di atas rata-rata nasional dan mengindikasikan ketergantungan sangat tinggi terhadap kegiatan ekonomi nonformal di wilayah-wilayah tersebut. Beberapa provinsi lain dengan persentase penduduk bekerja di kegiatan informal di atas 65 persen antara lain Sulawesi Barat (71,77 persen), Nusa Tenggara Barat (70,49 persen), Lampung (68,91 persen), Sulawesi tengah (65,64 persen), dan Maluku (65,52 persen). Hal ini memperkuat temuan ILO bahwa di wilayah dengan keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal menjadikan pekerjaan informal sering kali berfungsi sebagai "*necessary survival strategy*", terutama ketika jaminan sosial, pendapatan minimum, atau perlindungan ketenagakerjaan belum merata.

Sebaliknya, provinsi-provinsi dengan persentase pekerja informal terendah ditemukan di wilayah yang secara ekonomi lebih maju dan didukung struktur ekonomi yang lebih modern, seperti Kepulauan Riau (33,62 persen), DKI Jakarta (38,13 persen), dan Kalimantan Timur (44,55 persen). Rendahnya angka ini mencerminkan struktur ekonomi yang lebih beragam dengan dominasi sektor formal, terutama industri dan jasa modern, serta dukungan regulasi ketenagakerjaan yang lebih baik. Kondisi ini sejalan dengan konsep dalam KILM 8 yang menyebutkan bahwa perkembangan sektor formal dan kuatnya sistem regulasi ketenagakerjaan berperan dalam menurunkan proporsi pekerja informal.

Di Pulau Jawa, variasi formal/informal juga terlihat. Jawa Timur memiliki persentase pekerja informal sebesar 64,44 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan Banten (47,81 persen), D.I. Yogyakarta (53,98 persen), atau Jawa Barat (55,80 persen), dan Jawa Tengah (61,00 persen). Perbedaan ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan struktur ekonomi lokal, karakteristik pasar kerja, serta kapasitas pelaksanaan regulasi dalam menginterpretasi angka informalitas.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026

Gambar 26 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan Formal/Informal dan Provinsi, Februari 2026

BAB 3 INDIKATOR PENGANGGURAN

3.1 KILM 9. Pengangguran

Hasil Sakernas Februari 2026 menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,68 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia, terdapat sekitar 5 orang penganggur. TPT Februari 2026 mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi Februari 2025 dan Agustus 2025 secara berturut-turut sebesar 0,08 persen poin dan 0,17 persen poin.



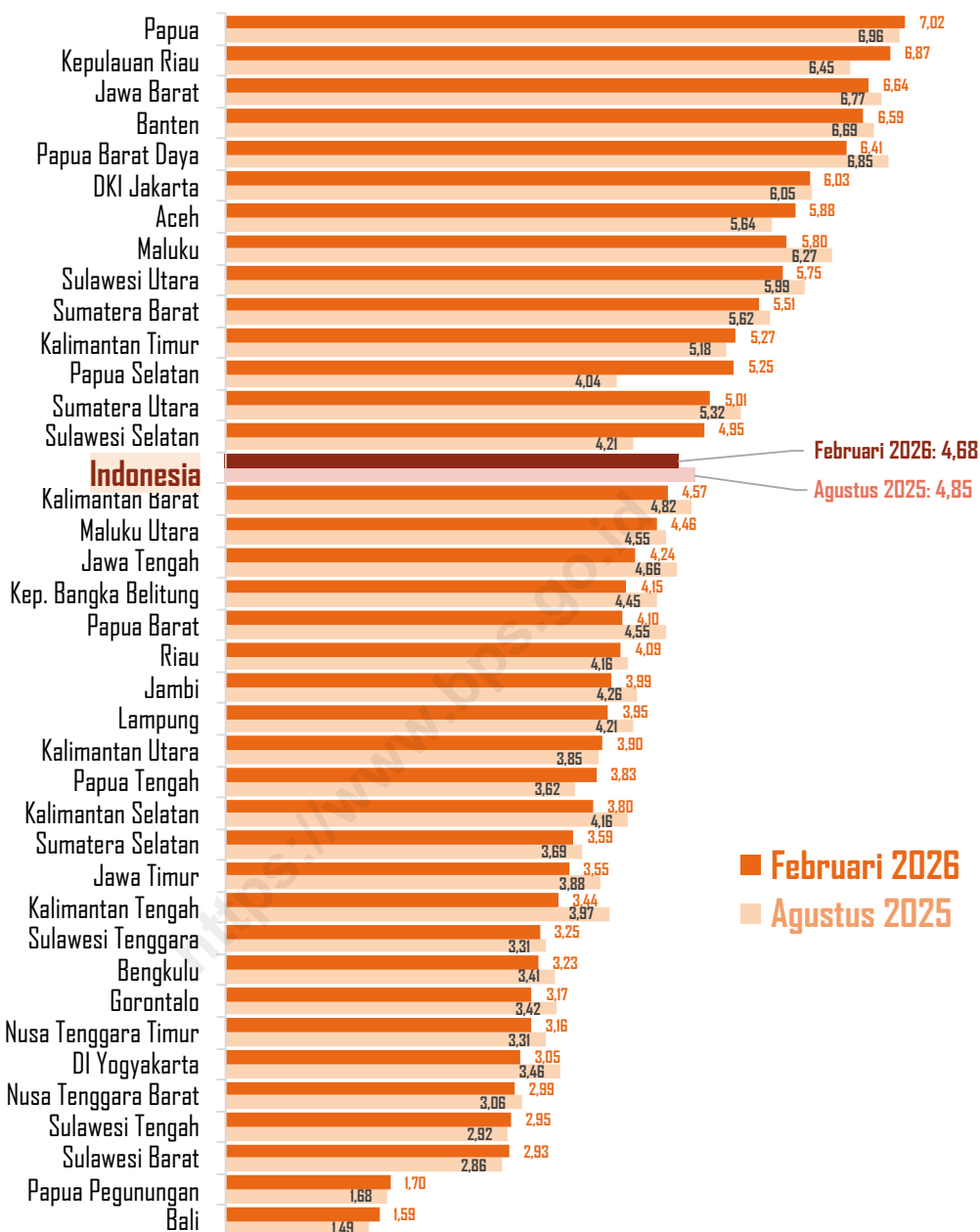
Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin dan Daerah tempat Tinggal (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2025		2026
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	4,98	4,85	4,88
Perempuan	4,41	4,84	4,36
Daerah Tempat Tingga			
Perkotaan	5,73	5,75	5,60
Perdesaan	3,33	3,47	3,20
Total	4,76	4,85	4,68

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perempuan menunjukkan penurunan yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Selama periode Februari 2025 hingga Februari 2026, TPT perempuan secara konsisten lebih rendah dibanding TPT laki-laki. Pada Februari 2026, TPT perempuan sebesar 4,36 persen, mengalami penurunan dibandingkan dengan Februari 2025 (0,05 persen poin) maupun Agustus 2025 (0,48 persen poin). Di sisi lain, TPT laki-laki pada Februari 2026 mencapai 4,88 persen, mengalami penurunan 0,10 persen poin dibandingkan Februari 2025, namun meningkat sebesar 0,03 persen poin jika dibandingkan Agustus 2025. Adapun, TPT sering berbeda menurut jenis kelamin karena perbedaan partisipasi di pasar tenaga kerja, segregasi pekerjaan, dan norma sosial (ILO, 2019).

Mencermati TPT berdasarkan daerah tempat tinggal menunjukkan bahwa TPT di daerah perkotaan secara konsisten lebih tinggi dibanding di perdesaan. Pada Februari 2026, selisih TPT antara perkotaan dan perdesaan tercatat sebesar 2,40 persen poin. Tingkat Pengangguran Terbuka di perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan dibandingkan Februari 2025.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, dan Februari 2026

Gambar 27 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi (persen), Agustus 2025 dan Februari 2026



Pada Februari 2026: TPT tertinggi terdapat pada Provinsi Papua, Kepulauan Riau, dan Jawa Barat.

Pada Februari 2026, terdapat 14 provinsi yang angka penganggurannya lebih tinggi dari TPT nasional, mulai dari Sulawesi Selatan hingga yang tertinggi Papua. Tiga provinsi dengan TPT tertinggi tercatat di Provinsi Papua (7,02 persen), diikuti oleh Kepulauan Riau (6,87 persen) dan Jawa Barat (6,64 persen). Hal serupa terjadi pada Februari 2025, TPT tertinggi menurut provinsi juga ditempati oleh Provinsi Papua (6,92 persen), Kepulauan Riau (6,89 persen) dan Jawa Barat (6,74 persen).

Sementara itu, mayoritas provinsi di Indonesia memiliki TPT lebih rendah dari TPT nasional yaitu sebanyak 24 provinsi. Provinsi dengan TPT terendah pada Februari 2026 ditempati oleh Provinsi Bali (1,59 persen), Papua Pegunungan (1,70 persen), dan Sulawesi Barat (2,93 persen). Sementara itu, pada Februari 2025, tiga provinsi dengan TPT terendah terdapat di Bali (1,58 persen), Papua Pegunungan (1,68 persen), lalu Sulawesi Tengah (3,02 persen). Informasi TPT menurut provinsi dapat dilihat pada Gambar 27 dan Lampiran 17.

Pada periode Februari 2025-Februari 2026, dari 28 Provinsi yang mengalami penurunan TPT, Provinsi Jambi menunjukkan penurunan tertinggi dari 4,48 persen menjadi 3,99 persen



Bila dibandingkan Agustus 2025, sebanyak 26 Provinsi berhasil menurunkan TPT dan 12 provinsi mengalami kenaikan TPT. Penurunan TPT yang terjadi pada mayoritas provinsi tersebut secara agregat mendorong penurunan TPT nasional sebesar 0,18 persen poin, yaitu dari 4,85 persen menjadi 4,68 persen.

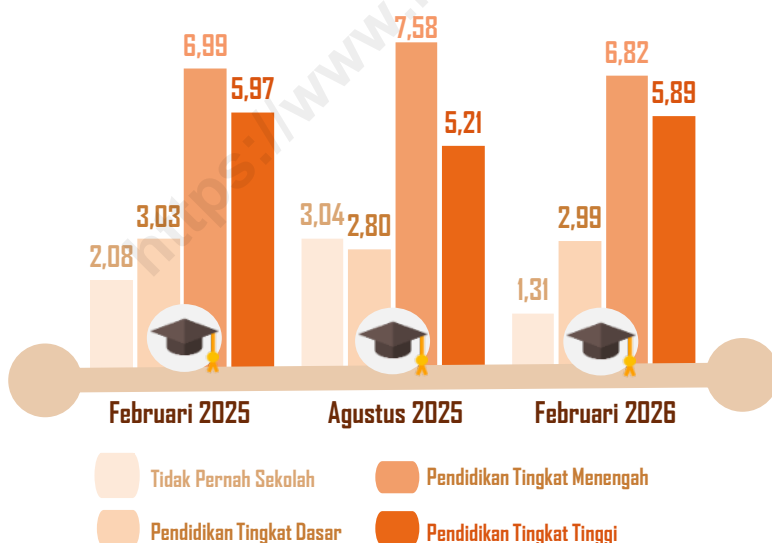
Pengangguran dan Pendidikan

Fenomena pengangguran terdidik masih cukup tinggi, tecermin dari tingginya TPT pada kelompok penduduk lulusan jenjang pendidikan menengah dan tinggi.



Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan, TPT pendidikan tingkat menengah (SMA Umum dan Kejuruan) secara konsisten menempati posisi tertinggi pada tiga periode terakhir meskipun mengalami penurunan baik dibandingkan Agustus 2025 maupun Februari 2025. Kondisi ini mengindikasikan adanya penawaran tenaga kerja yang belum terserap secara optimal pada lulusan pendidikan tingkat menengah.

Peringkat TPT tertinggi berikutnya ditempati oleh kelompok lulusan pendidikan tinggi (Diploma I/II/III/Akademi/Universitas). Sementara itu, TPT pada kelompok penduduk berpendidikan rendah (Pendidikan Dasar dan tidak/belum pernah sekolah) tercatat paling rendah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

**Gambar 28 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
(persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026**

Tabel 5 Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2025		2026
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah	2,08	3,04	1,31
Laki-Laki	2,19	3,34	1,62
Perempuan	1,98	2,80	1,04
Perkotaan	2,48	3,14	2,75
Perdesaan	1,98	3,00	0,90
Tingkat Dasar	3,03	2,80	2,99
Laki-Laki	3,37	2,99	3,31
Perempuan	2,53	2,51	2,52
Perkotaan	3,79	3,62	3,80
Perdesaan	2,26	1,98	2,12
Tingkat Menengah	6,99	7,58	6,82
Laki-Laki	6,92	7,19	6,73
Perempuan	7,12	8,31	7,00
Perkotaan	7,62	7,98	7,30
Perdesaan	5,61	6,68	5,64
Tingkat Tinggi	5,97	5,21	5,89
Laki-Laki	6,15	4,94	6,13
Perempuan	5,80	5,46	5,65
Perkotaan	6,35	5,54	6,20
Perdesaan	4,74	4,08	4,74
Indonesia	4,76	4,85	4,68

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Pada Februari 2026, TPT tingkat pendidikan tidak pernah sekolah dan pendidikan menengah mengalami penurunan, sedangkan pada tingkat pendidikan dasar dan pendidikan tinggi mengalami peningkatan dibandingkan Agustus 2025.



Dibandingkan dengan kondisi Agustus 2025, TPT pada Februari 2026 menunjukkan penurunan pada mereka yang tidak pernah sekolah dan lulusan pendidikan menengah. Sedangkan TPT pendidikan dasar dan tinggi justru meningkat dibanding Agustus 2025. Pada kelompok tidak pernah sekolah, TPT menurun 1,72 persen poin menjadi 1,31 persen. Sedangkan pada pendidikan menengah, TPT menurun 0,76 persen poin menjadi 6,82 persen. Sementara itu, pada pendidikan dasar, TPT meningkat 0,19 persen poin menjadi 2,99 persen. Kemudian, TPT pendidikan tinggi meningkat 0,68 persen poin menjadi 5,89 persen.



TPT perempuan berpendidikan rendah dan tinggi lebih rendah dibandingkan TPT laki-laki. Sedangkan pada pendidikan menengah, TPT perempuan lebih tinggi daripada TPT laki-laki.

Ditinjau menurut jenis kelamin, pada Februari 2026, TPT perempuan cenderung lebih rendah dibanding laki-laki hampir di semua jenjang pendidikan kecuali pada pendidikan menengah. Dibandingkan dengan Agustus 2025, perubahan TPT menunjukkan tren bervariasi antarjenjang pendidikan dan antarjenis kelamin. Pada Februari 2026, pada kelompok berpendidikan rendah (tidak pernah sekolah dan pendidikan dasar), TPT laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tenaga kerja perempuan pada pendidikan rendah memiliki fleksibilitas lebih tinggi dalam memasuki pasar kerja. Sebaliknya, pada jenjang pendidikan menengah, TPT perempuan tercatat lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada jenjang pendidikan tinggi (Diploma I/II/III/Akademi/Universitas), TPT perempuan lebih rendah dibanding TPT laki-laki.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada Februari 2026, TPT di daerah perkotaan selalu lebih tinggi daripada perdesaan pada semua jenjang pendidikan. Pada kelompok tidak pernah sekolah, TPT perkotaan sebesar 2,75 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan TPT perdesaan yang sebesar 0,90 persen. Rendahnya angka pengangguran di perdesaan ini dipengaruhi oleh karakteristik pasar kerja setempat yang didominasi oleh sektor informal dan pertanian, sehingga mendorong penduduk untuk bekerja apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup. TPT pada pendidikan menengah di perkotaan sebesar 7,30 persen lebih tinggi dibanding di perdesaan (5,64 persen). Pola yang sama terjadi pada pendidikan tinggi, di mana TPT perkotaan mencapai 6,20 persen berbanding 4,74 persen di perdesaan. Kesenjangan angka pengangguran tertinggi antara perkotaan dan perdesaan terjadi pada kelompok penduduk yang tidak pernah sekolah, dengan selisih 1,85 persen poin.



Pada periode Februari 2025 hingga Februari 2026:

- ***TPT terbesar secara konsisten terdapat pada pendidikan tingkat menengah.***
- ***TPT perkotaan secara konsisten lebih tinggi dibandingkan perdesaan.***

Jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2025, TPT di perkotaan dan perdesaan tercatat menurun pada kelompok penduduk yang tidak/belum pernah sekolah dan lulusan pendidikan menengah. Sebaliknya, TPT perkotaan dan perdesaan pada jenjang pendidikan dasar serta pendidikan tinggi mengalami kenaikan.

Tabel 6 Distribusi Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	2025		2026
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah	0,65	0,55	0,40
Laki-Laki	0,52	0,45	0,37
Perempuan	0,88	0,71	0,46
Perkotaan	0,21	0,19	0,25
Perdesaan	1,77	1,47	0,82
Tingkat Dasar	32,64	28,85	32,50
Laki-Laki	34,27	30,59	34,23
Perempuan	29,87	26,21	29,57
Perkotaan	28,67	26,02	29,00
Perdesaan	42,70	36,00	42,38
Tingkat Menengah	50,39	56,52	50,35
Laki-Laki	52,05	58,16	51,71
Perempuan	47,57	54,05	48,05
Perkotaan	52,65	57,66	51,96
Perdesaan	44,67	53,64	45,80
Tingkat Tinggi	16,32	14,08	16,75
Laki-Laki	13,16	10,80	13,69
Perempuan	21,69	19,03	21,92
Perkotaan	18,47	16,13	18,78
Perdesaan	10,87	8,89	11,00
Indonesia	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Mencermati distribusi penganggur menurut pendidikan, lulusan pendidikan menengah merupakan penyumbang terbesar dan mendominasi lebih dari separuh total pengangguran. Proporsi kelompok ini relatif stabil dibanding Februari 2025, meski sempat naik pada Agustus 2025. Selanjutnya, lulusan pendidikan dasar menempati posisi kedua terbesar dalam struktur pengangguran. Proporsi penganggur dari lulusan pendidikan tinggi justru menunjukkan tren yang meningkat, baik dibandingkan Agustus 2025 maupun Februari 2025. Sementara, kelompok penduduk yang tidak/belum pernah sekolah memberi kontribusi paling rendah terhadap struktur pengangguran nasional dengan proporsi di bawah 1,00 persen. Dibandingkan dengan Agustus 2025, proporsi penganggur yang tidak pernah sekolah dan berpendidikan menengah mengalami penurunan, sedangkan proporsi penganggur berpendidikan dasar dan tinggi meningkat.



Struktur pengangguran Indonesia pada Februari 2026 masih didominasi oleh penduduk berpendidikan menengah dengan persentase sebesar 50,35 persen.

Merujuk pada Tabel 6, kondisi Februari 2026, penganggur laki-laki lulusan pendidikan dasar dan menengah lebih banyak dibanding perempuan. Sebaliknya, penganggur perempuan memiliki profil pendidikan yang cenderung lebih tinggi, di mana persentase lulusan diploma/sarjana (pendidikan tinggi) yang menganggur mencapai 21,92 persen, lebih tinggi dibanding laki-laki sebesar 13,69 persen, atau terdapat selisih sebesar 8,23 persen poin. Di sisi lain, penganggur perempuan yang tidak pernah sekolah juga lebih banyak dibanding laki-laki.

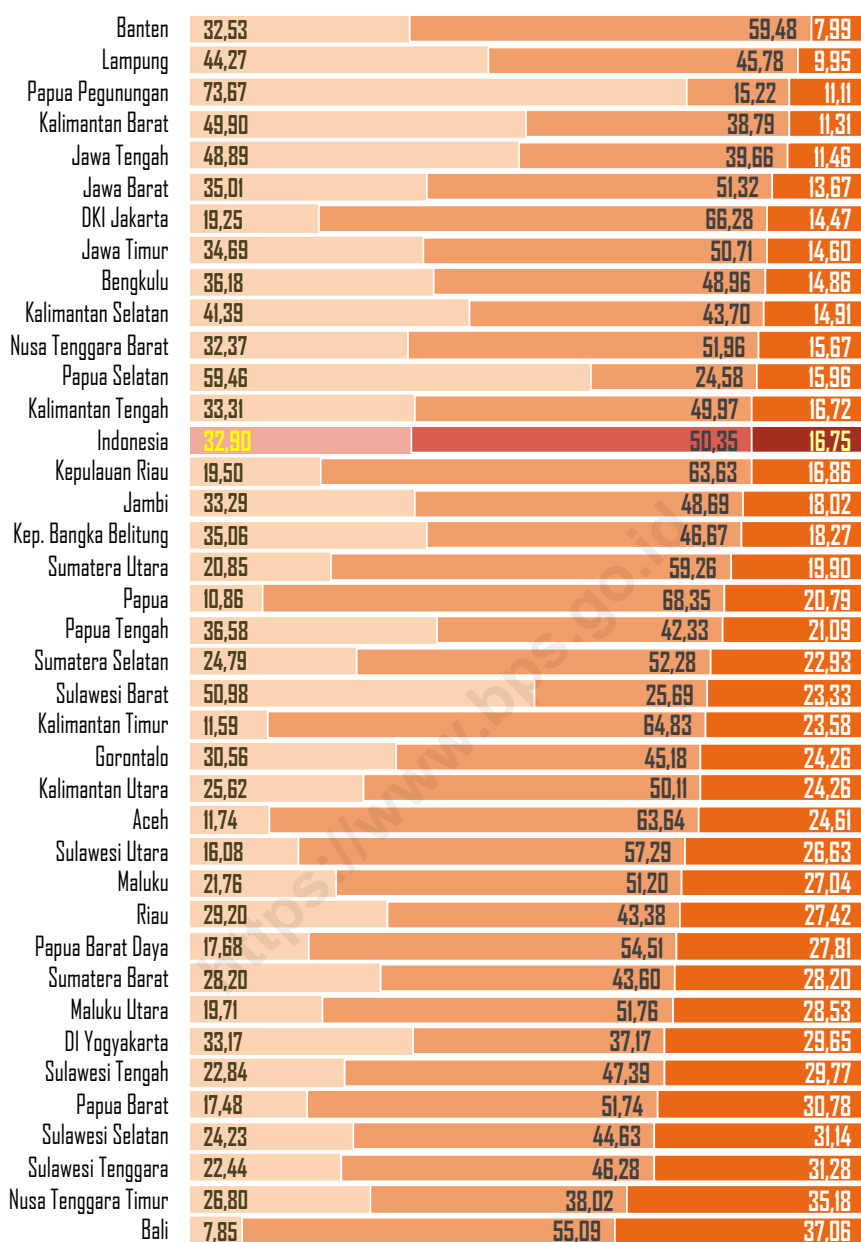
Februari 2026: Persentase penganggur berpendidikan dasar dan menengah pada laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Sementara itu, persentase penganggur berpendidikan tinggi pada perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase penganggur lulusan pendidikan dasar di perdesaan mencapai 42,38 persen, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 29,00 persen, dengan selisih 13,38 persen poin. Selisih ini lebih besar dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar 9,98 persen poin. Kecenderungan serupa terjadi pada penganggur yang tidak pernah sekolah, dengan selisih 0,57 persen poin, di mana proporsi penganggur di perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan. Selisih tersebut menurun dibanding Agustus 2025, yang didorong peningkatan proporsi penganggur di perkotaan.

Proporsi penganggur pendidikan dasar lebih tinggi di desa dibandingkan di kota. Sebaliknya, proporsi penganggur berpendidikan menengah dan tinggi lebih tinggi di perkotaan dibandingkan perdesaan.



Sebaliknya, pada pendidikan menengah dan tinggi, proporsi penganggur di kota lebih besar dibanding di desa. TPT pendidikan menengah di kota (51,96 persen) dan di desa (45,80 persen), dengan selisih 6,16 persen poin. Kesenjangan ini melebar dibanding Agustus 2025 (4,02 persen poin). Pada pendidikan tinggi, penganggur di kota mencapai 18,78 persen, lebih tinggi dibanding di desa (11,00 persen), dengan selisih 7,78 persen poin. Kesenjangan ini lebih tinggi dibanding Agustus 2025 dengan selisih 7,25 persen poin. Proporsi penganggur di perkotaan Februari 2026 meningkat di hampir semua jenjang pendidikan, kecuali pada pendidikan menengah. Sementara itu, di perdesaan, proporsi yang tidak pernah sekolah dan berpendidikan menengah menurun, namun proporsi penganggur berpendidikan dasar dan tinggi meningkat.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026

Gambar 29 Distribusi Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Provinsi (persen), Februari 2026



Februari 2026: Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tenggara adalah tiga provinsi dengan persentase penganggur berpendidikan tinggi paling tinggi.

Pada Februari 2026, lulusan pendidikan menengah (SMA/SMK sederajat) masih mendominasi struktur pengangguran nasional dengan proporsi 50,35 persen. Dominasi kelompok ini juga terlihat di sebagian besar provinsi. Proporsi tertinggi tercatat di Provinsi Papua (68,35 persen), sedangkan yang terendah berada di Provinsi Papua Pegunungan (15,22 persen). Di sisi lain, Papua Pegunungan memiliki proporsi penganggur lulusan pendidikan dasar ke bawah yang paling tinggi di Indonesia, yaitu 73,67 persen. Secara keseluruhan, proporsi penganggur berpendidikan dasar ke bawah bervariasi cukup lebar antarprovinsi, berkisar antara 7,85 persen hingga 73,67 persen.

Proporsi penganggur lulusan pendidikan tinggi (Diploma/Sarjana) antarprovinsi juga menunjukkan variasi yang cukup besar, dengan rentang nilai terendah sebesar 7,99 persen hingga nilai tertinggi mencapai 37,06 persen. Sebagaimana disajikan pada Gambar 29 dan Lampiran 19, terdapat 25 provinsi dengan proporsi penganggur berpendidikan tinggi berada di atas rata-rata nasional (lebih dari 16,75 persen). Provinsi dengan persentase penganggur berpendidikan tinggi paling besar pada Februari 2026 adalah Provinsi Bali (37,06 persen), disusul Nusa Tenggara Timur (35,18 persen), dan Sulawesi Tenggara (31,28 persen). Sebaliknya, tiga provinsi dengan persentase penganggur berpendidikan tinggi paling rendah secara berturut-turut yaitu Provinsi Banten (7,99 persen), Lampung (9,95 persen), dan Papua Pegunungan (11,11 persen).

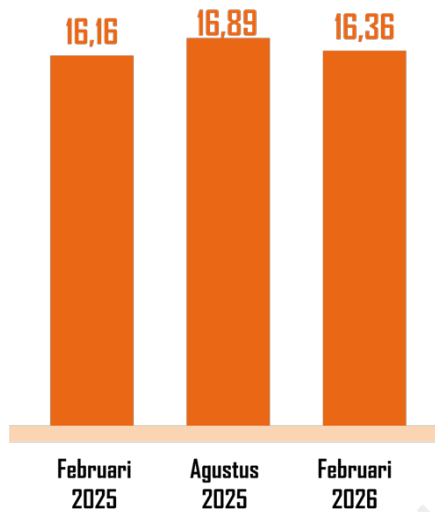
3.2 KILM 10. Pengangguran pada Kelompok Umur Muda

Pengangguran usia muda (*youth unemployment*) merupakan salah satu indikator krusial dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan standar internasional, kelompok "penduduk usia muda" mencakup penduduk berusia 15–24 tahun, sedangkan kelompok "penduduk dewasa" didefinisikan sebagai mereka yang berusia 25 tahun ke atas.

Analisis indikator pengangguran usia muda diukur melalui empat metrik utama:

1. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Usia Muda:** Persentase penganggur usia muda terhadap total angkatan kerja usia muda.
2. **Rasio TPT Usia Muda terhadap TPT Dewasa:** Perbandingan untuk melihat seberapa besar risiko pemuda menjadi penganggur dibanding kelompok dewasa.
3. **Proporsi (*Share*) Penganggur Usia Muda terhadap Total Penganggur:** Kontribusi kelompok umur muda dalam membentuk struktur pengangguran nasional.
4. **Rasio Penganggur Usia Muda terhadap Jumlah Penduduk Usia Muda:** Ukuran untuk melihat seberapa besar bagian dari populasi pemuda yang tidak terserap di pasar kerja.

*Umur muda atau kaum muda adalah orang berumur 15 – 24 tahun.
Kaum dewasa merupakan orang yang berumur 25 tahun ke atas*



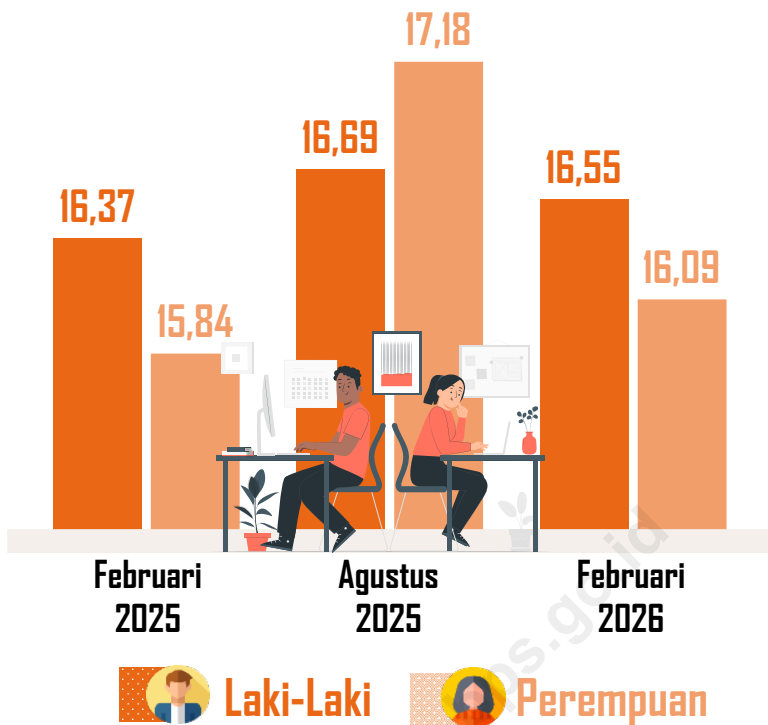
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Gambar 30 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Umur Muda (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026



TPT penduduk umur muda pada Februari 2026 meningkat dibandingkan Februari 2025, namun menurun dibandingkan Agustus 2025.

Meskipun secara makro, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan tren pemulihan yang positif dengan turun menjadi 4,68 persen pada Februari 2026, kondisi sebaliknya justru terjadi pada TPT kelompok penduduk umur muda (15–24 Tahun) yang justru mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2026 (Gambar 30), TPT penduduk kelompok umur muda mencapai 16,36 persen, yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 15–24 tahun yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 16 orang yang menganggur. Angka TPT usia muda tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,20 persen poin jika dibandingkan dengan kondisi Februari 2025. Namun demikian, dibandingkan Agustus 2025 (16,89 persen), TPT usia muda pada Februari 2026 menunjukkan penurunan sebesar 0,53 persen poin.



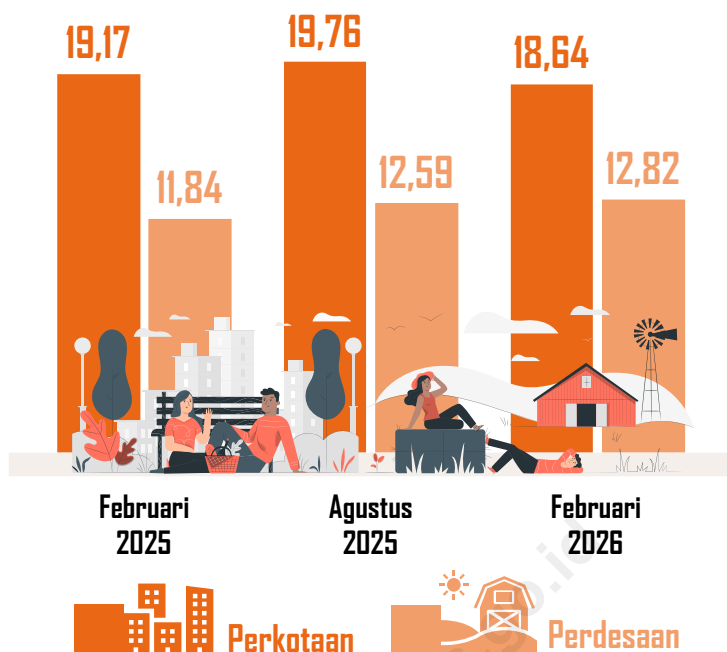
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Gambar 31 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Umur Muda Menurut Jenis Kelamin (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026



Februari 2026: TPT kelompok umur muda pada perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Pada Februari 2026 TPT penduduk usia muda mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2025 baik pada laki-laki maupun perempuan, masing-masing sebesar 0,14 persen poin dan 1,09 persen poin. Pada Agustus 2025, TPT penduduk usia muda perempuan (17,18 persen) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (16,69 persen). Namun, kondisi sebaliknya terjadi pada Februari 2026, di mana TPT penduduk usia muda perempuan (16,09 persen) lebih rendah dari TPT laki-laki muda (16,55 persen).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

**Gambar 32 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Penduduk Umur Muda Menurut Daerah Tempat Tinggal
(persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026**

TPT kelompok umur muda lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan dengan perdesaan



Ditinjau menurut daerah tempat tinggal, dibandingkan dengan kondisi Agustus 2025 yang sebesar 19,76 persen, TPT penduduk usia muda di perkotaan pada Februari 2026 berkurang sebesar 1,12 persen poin. Sebaliknya, kondisi berbeda terjadi di daerah perdesaan, TPT penduduk usia muda meningkat sebesar 0,23 persen poin, yaitu dari 12,59 persen pada Agustus 2025 menjadi 12,82 persen pada Februari 2026. Pada Februari 2026, meskipun TPT penduduk usia muda di perkotaan menurun dan di perdesaan meningkat, angka TPT usia muda di perkotaan (18,64 persen) tetap lebih tinggi dibanding angka TPT usia muda di perdesaan (12,82 persen).

Tabel 7 Rasio Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Umur Muda terhadap TPT Umur Dewasa Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Rasio TPT Umur Muda terhadap TPT Umur Dewasa	2025		2026
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	5,28	5,89	5,54
Perempuan	6,45	6,52	6,58
Daerah Tempat Tinggal			
Perkotaan	5,48	5,91	5,32
Perdesaan	6,32	6,77	8,06
Total	5,68	6,13	5,90

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Indikator rasio TPT penduduk usia muda terhadap TPT penduduk usia dewasa digunakan untuk mengukur besarnya tingkat persaingan pasar kerja yang dialami oleh kelompok umur muda (15–24 tahun) relatif terhadap kelompok umur dewasa (25 tahun ke atas). Pada Februari 2026, rasio ini tercatat sebesar 5,90, artinya tingkat pengangguran usia muda hampir enam kali lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran usia dewasa. Jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2025 yang rasionya sempat mencapai 6,13, kondisi pada Februari 2026 ini menunjukkan adanya penurunan.



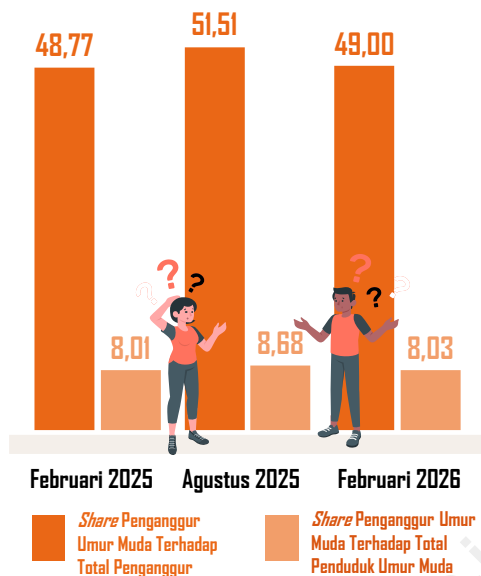
Februari 2026: Rasio TPT umur muda sebesar 5,90, atau hampir enam kali lebih tinggi dibandingkan TPT dewasa. Rasio TPT ini menurun dibandingkan Agustus 2025 (6,13).

Jika diteliti menurut jenis kelamin, tingkat kesulitan mencari kerja pertama bagi *fresh graduates* menunjukkan pola yang berbeda. Secara umum, rasio TPT umur muda dibanding TPT dewasa pada perempuan secara konsisten selalu lebih tinggi daripada laki-laki, yang menunjukkan perempuan muda memiliki potensi menganggur yang lebih besar relatif terhadap kelompok dewasa perempuan. Rasio pada kelompok perempuan terus mengalami kenaikan berturut-turut dalam tiga periode survei, yaitu sebesar 6,45 pada Februari 2025, meningkat menjadi 6,52 pada Agustus 2025, dan mencapai 6,58 pada Februari 2026. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk usia muda perempuan menghadapi tingkat kesulitan mencari kerja tertinggi dibandingkan kelompok umur dewasa perempuan. Sementara itu, Rasio pada kelompok laki-laki sebesar 5,54 pada Februari 2026. Angka ini meningkat dibanding Februari 2025 (5,28), namun tercatat menurun pada Agustus 2025 yang sebesar 5,89.

Dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, di daerah perdesaan, rasio tersebut mencatatkan peningkatan dari 6,77 pada Agustus 2025 menjadi 8,06 pada Februari 2026. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa di tengah rendahnya tingkat pengangguran penduduk usia dewasa di perdesaan, angkatan kerja muda di wilayah tersebut menghadapi kesulitan masuk ke pasar kerja lokal yang semakin besar. Sebaliknya, rasio TPT usia muda terhadap dewasa di perkotaan menurun dari 5,91 pada Agustus 2025 menjadi 5,32 pada Februari 2026.



Rasio TPT penduduk usia muda terhadap dewasa di perdesaan meningkat hingga mencapai angka 8,06 pada Februari 2026. Capaian ini menunjukkan bahwa penduduk usia muda di perdesaan menghadapi potensi menganggur hingga delapan kali lebih besar relatif terhadap penduduk usia dewasa.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Gambar 33 *Share* Penganggur Umur Muda terhadap Total Penganggur dan terhadap Total Penduduk Umur Muda (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026



*Februari 2026: *Share* penduduk usia muda terhadap total penganggur sebesar 49,00 persen, sementara *share* penganggur usia muda terhadap total penduduk usia muda sebesar 8,03 persen.*

Kedua indikator tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Februari 2025, namun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Agustus 2025.

Share penduduk usia muda terhadap total penganggur digunakan untuk mengukur besarnya proporsi kelompok umur muda di dalam total pengangguran nasional. Pada kondisi Februari 2026, kontribusi tersebut mencapai 49,00 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa dari seluruh penganggur di Indonesia, hampir setengahnya merupakan penduduk usia muda berumur 15–24 tahun. Angka kontribusi ini mengalami peningkatan sebesar 0,23 persen poin

dibandingkan dengan Februari 2025, namun tercatat masih lebih rendah jika dibandingkan Agustus 2025.

Sementara itu, *share* penganggur usia muda terhadap total penduduk usia muda digunakan untuk mengukur besarnya beban pengangguran terhadap seluruh populasi penduduk usia muda (baik yang termasuk angkatan kerja maupun yang bukan angkatan kerja seperti bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya). Pada Februari 2026, indikator ini mencapai 8,03 persen. Dengan demikian, dari setiap 100 penduduk usia muda, terdapat sekitar 8 orang yang berstatus sebagai penganggur. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan Februari 2025, namun menunjukkan penurunan jika dibandingkan Agustus 2025.

3.3 KILM 12. Setengah Pengangguran (Underemployment)

Penduduk yang dikategorikan sebagai setengah penganggur adalah mereka yang jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (kurang dari 35 jam dalam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan tambahan/lain.



Jumlah setengah pengangguran Februari 2026 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Februari 2025 dan Agustus 2025.

Tabel 8 Jumlah Penduduk Bekerja yang Termasuk Setengah Penganggur Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (juta orang), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Setengah Penganggur	2025		2026
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	7,31	7,31	6,74
Perempuan	4,36	4,29	3,98
Daerah Tempat Tinggal			
Perkotaan	5,56	5,59	5,42
Perdesaan	6,11	6,01	5,30
Indonesia	11,67	11,60	10,73

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Jumlah setengah pengangguran di Indonesia berdasarkan hasil Sakernas Februari 2026 sebanyak 10,73 juta orang, yang terdiri dari 6,74 juta orang laki-laki dan 3,98 juta orang perempuan. Apabila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah setengah pengangguran di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan. Pada Februari 2026, jumlah setengah pengangguran di daerah perkotaan sebanyak 5,42 juta orang, sementara di perdesaan sebanyak 5,30 juta orang.

Apabila dibandingkan dengan kondisi setahun terakhir, secara nasional terjadi penurunan jumlah setengah pengangguran sebanyak 0,94 juta orang selama periode Februari 2025–Februari 2026. Adapun penurunan tersebut terjadi di perkotaan sebesar 0,14 juta orang dan di perdesaan sebesar 0,81 juta orang. Jika ditinjau menurut jenis kelamin, pada periode yang sama, jumlah setengah pengangguran laki-laki menurun sebesar 0,57 juta orang dan pada perempuan menurun sebesar 0,38 juta orang. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan dinamika ketenagakerjaan yang terjadi antara wilayah dan jenis kelamin.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2025, secara nasional terjadi penurunan jumlah setengah pengangguran sebanyak 0,87 juta orang. Penurunan jumlah setengah pengangguran tersebut lebih banyak terjadi di perdesaan, dengan penurunan sebesar 0,71 juta orang. Sedangkan jumlah setengah pengangguran di perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,17 juta orang. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah setengah pengangguran laki-laki dan perempuan juga mengalami penurunan secara berturut-turut sebesar 0,57 juta orang dan 0,31 juta orang pada periode yang sama.



Pada Februari 2026, share setengah pengangguran terhadap total angkatan kerja dan tingkat setengah pengangguran mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Februari 2025.

Tabel 9 Indikator Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Setengah Penganggur	2025		2026
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(3)	(4)	(5)
Share Setengah Pengangguran terhadap Total Angkatan Kerja	7,62	7,53	6,93
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	7,95	7,90	7,23
Perempuan	7,14	6,98	6,47
Daerah Tempat Tinggal			
Perkotaan	6,10	6,00	5,68
Perdesaan	9,87	9,86	8,94
Tingkat Setengah Pengangguran	8,00	7,91	7,27
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	8,36	8,30	7,60
Perempuan	7,47	7,33	6,76
Daerah Tempat Tinggal			
Perkotaan	6,47	6,37	6,01
Perdesaan	10,20	10,22	9,23

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Tingkat setengah pengangguran merupakan proporsi jumlah setengah penganggur terhadap total penduduk yang bekerja. Selain itu indikator lain yang bisa dilihat dari setengah penganggur adalah *share* setengah pengangguran terhadap total angkatan kerja.

Share setengah pengangguran terhadap total angkatan kerja pada Februari 2026 sebesar 6,93 persen (Tabel 9), yang berarti dari 100 orang penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terdapat sekitar tujuh orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan lain.

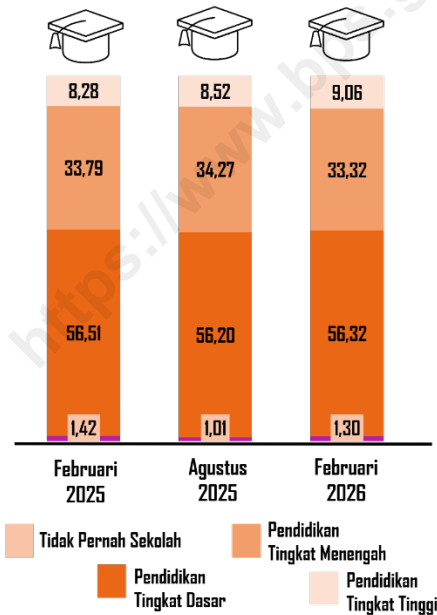
Perkembangan dari *share* setengah pengangguran terhadap total angkatan kerja selama periode Februari 2025 sampai dengan Februari 2026 cenderung menurun. Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 9, *share* setengah pengangguran terhadap total angkatan kerja dari sebesar 7,62 persen pada Februari 2025, turun menjadi 7,53 persen pada Agustus 2025, kemudian turun menjadi sebesar 6,93 persen pada Februari 2026.

Tingkat setengah pengangguran juga memiliki pola yang sama dengan *share* setengah pengangguran. Pada Februari 2025, dari total penduduk bekerja sekitar 8,00 persen diantaranya merupakan setengah penganggur. Kemudian pada Agustus 2025 menurun menjadi sebesar 7,91 persen, dan terus menurun menjadi sebesar 7,27 persen pada Februari 2026.

Pola tingkat setengah pengangguran menurut jenis kelamin menunjukkan pola yang sama antara perempuan dengan laki-laki. Apabila dibandingkan dengan Februari 2025, tingkat setengah pengangguran laki-laki dan perempuan mengalami penurunan. Sebagai gambaran, jika dibandingkan dengan Februari 2025, laki-laki turun sebesar 0,76 persen poin, sedangkan perempuan turun sebesar 0,71 persen poin.

Pola tingkat setengah pengangguran menurut daerah tempat tinggal juga memiliki pola yang sama dengan nasional. Berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal, tingkat setengah pengangguran di perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,46 persen poin, sedangkan di perdesaan terjadi penurunan sebesar 0,97 persen poin, jika dibandingkan dengan Februari 2025.

Selama setahun terakhir (Februari 2025-Februari 2026), persentase setengah pengangguran yang tidak pernah bersekolah, berpendidikan tingkat dasar, dan menengah mengalami penurunan. Sementara itu, distribusi setengah pengangguran pada pendidikan tingkat tinggi mengalami peningkatan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Gambar 34 Distribusi Setengah Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Apabila ditinjau berdasarkan tingkat pendidikan, selama periode Februari 2025 hingga Februari 2026, distribusi setengah pengangguran masih didominasi oleh mereka dengan tingkat pendidikan dasar. Sebagai gambaran, pada Februari 2026 angka ini mencapai 56,32 persen, yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang setengah penganggur sekitar 56 orang diantaranya memiliki pendidikan pada tingkat dasar.

Pada Februari 2026, distribusi setengah pengangguran pada mereka dengan pendidikan tingkat dasar dan pendidikan tingkat menengah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kondisi Februari 2025. Sedangkan distribusi setengah pengangguran pada mereka yang tidak pernah sekolah mengalami penurunan sebesar 0,12 persen poin.

Apabila dibandingkan dengan Agustus 2025, peningkatan distribusi setengah pengangguran terdapat pada setengah penganggur yang tidak pernah sekolah, pendidikan tingkat dasar, dan pendidikan tingkat tinggi dengan kenaikan masing-masing sebesar 0,29 persen poin, 0,12 persen poin dan 0,54 persen poin. Sedangkan distribusi setengah pengangguran pada mereka pendidikan tingkat menengah mengalami penurunan sebesar 0,95 persen poin (Gambar 34).



Selama periode Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026, persentase setengah pengangguran yang tidak pernah sekolah dan pendidikan tinggi pada perempuan selalu lebih tinggi dibanding laki-laki.

Tabel 10 Distribusi Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Tingkat Pendidikan	2025		2026
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(3)	(4)	(5)
Tidak Pernah Sekolah	1,42	1,01	1,30
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	1,25	0,70	1,00
Perempuan	1,71	1,53	1,80
Daerah Tempat Tinggal			
Perkotaan	0,71	0,45	0,55
Perdesaan	2,06	1,52	2,07
Tingkat Dasar	56,51	56,20	56,32
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	56,76	57,03	56,27
Perempuan	56,10	54,80	56,41
Daerah Tempat Tinggal			
Perkotaan	52,02	50,75	50,78
Perdesaan	60,60	61,27	61,98
Tingkat Menengah	33,79	34,27	33,32
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	35,53	36,21	35,92
Perempuan	30,86	30,95	28,93
Daerah Tempat Tinggal			
Perkotaan	37,05	37,87	36,99
Perdesaan	30,82	30,92	29,58
Tingkat Tinggi	8,28	8,52	9,06
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	6,46	6,06	6,81
Perempuan	11,33	12,72	12,86
Daerah Tempat Tinggal			
Perkotaan	10,22	10,93	11,68
Perdesaan	6,52	6,29	6,38

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Apabila diamati lebih lanjut berdasarkan jenis kelamin (Tabel 10), kondisi Februari 2026 menunjukkan bahwa perbandingan distribusi setengah pengangguran pada perempuan yang tidak pernah sekolah dan pendidikan tinggi lebih dominan dibanding laki-laki. Sementara itu, pada pendidikan tingkat menengah, distribusi setengah pengangguran pada laki-laki lebih dominan dibanding pada perempuan.

Ditinjau berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal, distribusi setengah pengangguran pada mereka yang tidak pernah bersekolah dan pendidikan tingkat dasar selalu lebih tinggi di perdesaan baik pada Februari 2025, Agustus 2025 maupun Februari 2026. Sementara pada pendidikan tingkat menengah dan tingkat tinggi, distribusi setengah pengangguran di perkotaan selalu lebih tinggi dibanding daerah perdesaan.

Apabila dibandingkan dengan Februari 2025, penurunan distribusi terbesar menurut jenis kelamin dan tingkat pendidikan terdapat pada setengah penganggur laki-laki dengan tingkat pendidikan dasar (sebesar 0,49 persen poin), sedangkan peningkatan tertinggi pada perempuan dengan tingkat pendidikan tinggi sebesar 1,53 persen. Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan dan daerah tempat tinggalnya, penurunan distribusi terbesar terjadi pada setengah penganggur di perkotaan pada kelompok pendidikan tingkat dasar dan pendidikan tingkat menengah yang sama-sama menurun sebesar 1,24 persen poin.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin selama periode Agustus 2025 dan Februari 2026, penurunan terbesar distribusi setengah pengangguran terdapat pada perempuan di kategori pendidikan tingkat menengah (2,02 persen poin). Berdasarkan tingkat pendidikan dan daerah tempat tinggal, penurunan distribusi setengah pengangguran paling besar terdapat di perdesaan dengan jenjang pendidikan tingkat menengah (1,34 persen poin).

BAB 4 INDIKATOR BUKAN ANGKATAN KERJA

4.1 KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan



Tingkat ketidakaktifan Februari 2026 mencapai 29,44 persen.

Tabel 11 Indikator Ketidakaktifan Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Tingkat Ketidakaktifan	2025		2026
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	15,66	15,60	15,43
Perempuan	43,30	43,37	43,59
Daerah Tempat Tinggal			
Perkotaan	31,08	31,40	31,36
Perdesaan	26,77	26,14	26,11
Indonesia	29,40	29,41	29,44

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Tingkat ketidakaktifan merupakan persentase penduduk yang termasuk kategori bukan angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2026, tingkat ketidakaktifan di Indonesia mencapai 29,44 persen, hal ini dapat diartikan bahwa dari

100 orang penduduk usia kerja di Indonesia, yang tidak aktif dalam pasar kerja (bukan angkatan kerja) terdapat sekitar 29 orang.

Tingkat ketidakaktifan selama setahun terakhir cenderung meningkat, yaitu tingkat ketidakaktifan pada Februari 2026 mengalami peningkatan dibandingkan Februari 2025 sebesar 0,04 persen poin dan sebesar 0,03 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2025.

Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, terdapat kesenjangan yang cukup besar dalam tingkat ketidakaktifan di pasar kerja. Hasil Sakernas Februari 2026 menunjukkan bahwa dari setiap 100 orang penduduk usia kerja laki-laki, sekitar 15 orang tidak aktif dalam pasar kerja, sedangkan pada kelompok perempuan angkanya mencapai sekitar 44 orang. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa faktor struktural dan norma sosial, seperti tanggung jawab domestik dan akses terhadap pekerjaan yang setara, masih menjadi tantangan utama bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pasar kerja (World Bank, 2012; ILO, 2020).

Dibandingkan Februari 2025, tingkat ketidakaktifan pada laki-laki menurun sebesar 0,23 persen poin, sebaliknya pada perempuan mengalami peningkatan sebesar 0,29 persen poin. Pola tersebut berbeda jika dibandingkan dengan Agustus 2025, pada laki-laki terjadi penurunan sebesar 0,17 persen poin dan pada perempuan terjadi kenaikan 0,22 persen poin.

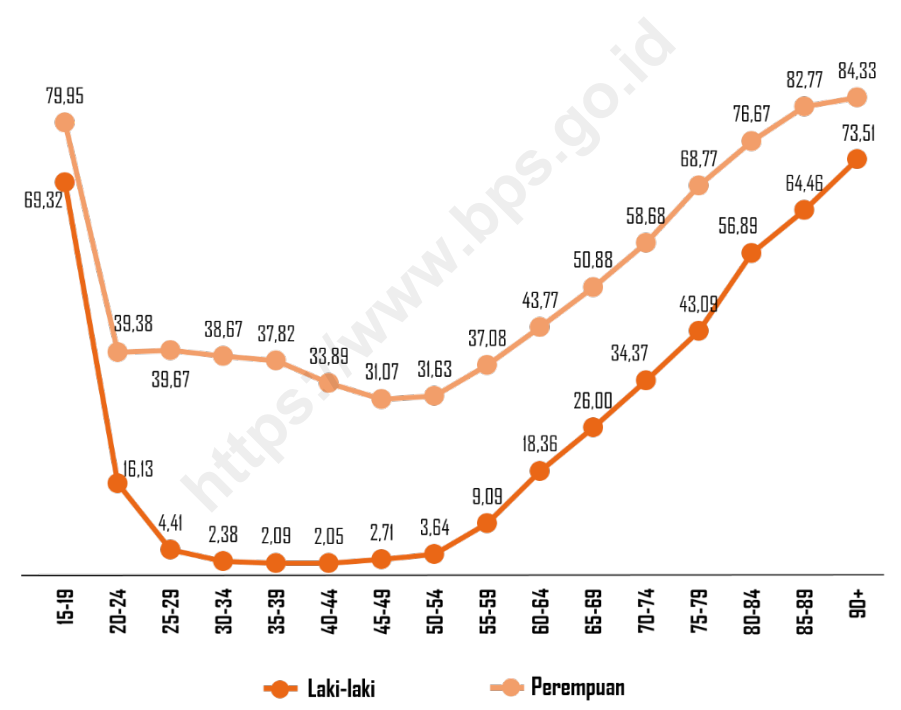
Sementara itu, jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, tingkat ketidakaktifan terlihat lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan di perdesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa peluang bekerja di perdesaan lebih besar dibandingkan perkotaan sesuai dengan lebih tingginya EPR di daerah perdesaan dibanding daerah perkotaan. Pada Februari 2026, tingkat ketidakaktifan di daerah perkotaan mencapai 31,36 persen, sedangkan di daerah perdesaan hanya sebesar 26,11 persen. Tingkat ketidakaktifan di daerah perkotaan mengalami peningkatan dibanding Februari 2025 dan penurunan di Agustus 2025. Berbeda dengan daerah perdesaan,

tingkat ketidakaktifan mengalami penurunan dibanding Februari 2025 dan Agustus 2025 (Tabel 11).



Pola tingkat ketidakaktifan berbeda antara laki-laki dan perempuan menurut kelompok umur. Tingkat ketidakaktifan laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan di semua kelompok umur.

Pola tingkat ketidakaktifan seperti yang terlihat pada Gambar 35 mengindikasikan tingginya tingkat ketidakaktifan pada penduduk umur muda, lalu turun pada umur produktif dan kembali meningkat pada umur tua.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026

Gambar 35 Tingkat Ketidakaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (persen), Februari 2026

Gambar 35 menunjukkan bahwa tingkat ketidakaktifan perempuan pada semua kelompok umur lebih tinggi daripada laki-laki. Pada Februari 2026, titik terendah ketidakaktifan laki-laki berada pada kelompok umur 40–44 tahun sebesar 2,05 persen, sedangkan perempuan berada pada kelompok umur 45–49 tahun yaitu sebesar 31,07 persen.

Berdasarkan Gambar 35, pada Februari 2026, terlihat bahwa tingkat ketidakaktifan laki-laki pada kelompok umur 15–19 tahun mencapai 69,32 persen kemudian mengalami penurunan hingga mencapai 2,05 persen pada kelompok umur 40–44 tahun dan meningkat kembali mulai dari kelompok umur 45–49 tahun menjadi 2,71 persen dan meningkat terus hingga kelompok umur 90 tahun ke atas yang mencapai 73,51 persen. Sementara itu, tingkat ketidakaktifan pada perempuan mencapai 79,95 persen pada kelompok umur 15–19 tahun, mengalami penurunan menjadi 31,07 persen pada kelompok umur 45–49 tahun, kemudian pola peningkatan tingkat ketidakaktifan perempuan terus terjadi hingga kelompok umur 90 tahun ke atas yang mencapai 84,33 persen.

BAB 5 INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

5.1 KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi utama selain sumber daya alam, modal, dan kewirausahaan. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, semakin meningkat pula efisiensi dan produktivitas yang berkontribusi pada kemajuan ekonomi suatu negara. Teori *human capital* menjelaskan bahwa pendidikan merupakan investasi yang memberikan manfaat ekonomi penting, antara lain peningkatan produktivitas, akses terhadap pekerjaan yang lebih baik, peningkatan kesejahteraan, serta peluang memperoleh pendapatan yang lebih tinggi (Becker, 1993; Psacharopoulos & Patrinos, 2018). Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai konsumsi, tetapi juga instrumen strategis dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Informasi mengenai tingkat pencapaian pendidikan adalah indikator terbaik yang tersedia untuk menggambarkan tingkat keahlian tenaga kerja. Keahlian ini menjadi salah satu faktor penentu kemampuan suatu negara untuk bersaing secara global dan memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal.

Indikator KILM 14 menyajikan komposisi angkatan kerja menurut tingkat pendidikan yang disesuaikan dengan *International Standard Classification of Education* (ISCED) berdasarkan variabel yang tersedia di Sakernas. Namun demikian, Sakernas tidak mendata kemampuan baca tulis, sehingga tingkat literasi diproksikan menggunakan tingkat pendidikan formal.



Pada Februari 2026 mayoritas angkatan kerja berpendidikan tingkat dasar sebesar 50,75 persen.

Tabel 12 Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal, Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Tingkat Pendidikan	2025		2026
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah	1,49	0,88	1,43
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	1,17	0,65	1,11
Perempuan	1,96	1,23	1,91
Daerah Tempat Tinggal			
Perkotaan	0,49	0,35	0,51
Perdesaan	2,96	1,70	2,90
Pendidikan Tingkat Dasar	51,23	49,89	50,75
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	50,69	49,54	50,45
Perempuan	52,05	50,43	51,21
Daerah Tempat Tinggal			
Perkotaan	43,29	41,37	42,69
Perdesaan	62,93	62,90	63,73
Pendidikan Tingkat Menengah	34,28	36,12	34,52
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	37,47	39,21	37,53
Perempuan	29,48	31,46	29,96
Daerah Tempat Tinggal			
Perkotaan	39,57	41,54	39,85
Perdesaan	26,49	27,84	25,94
Pendidikan Tingkat Tinggi	13,00	13,11	13,30
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	10,67	10,60	10,91
Perempuan	16,51	16,88	16,91
Daerah Tempat Tinggal			
Perkotaan	16,65	16,74	16,95
Perdesaan	7,62	7,56	7,42

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

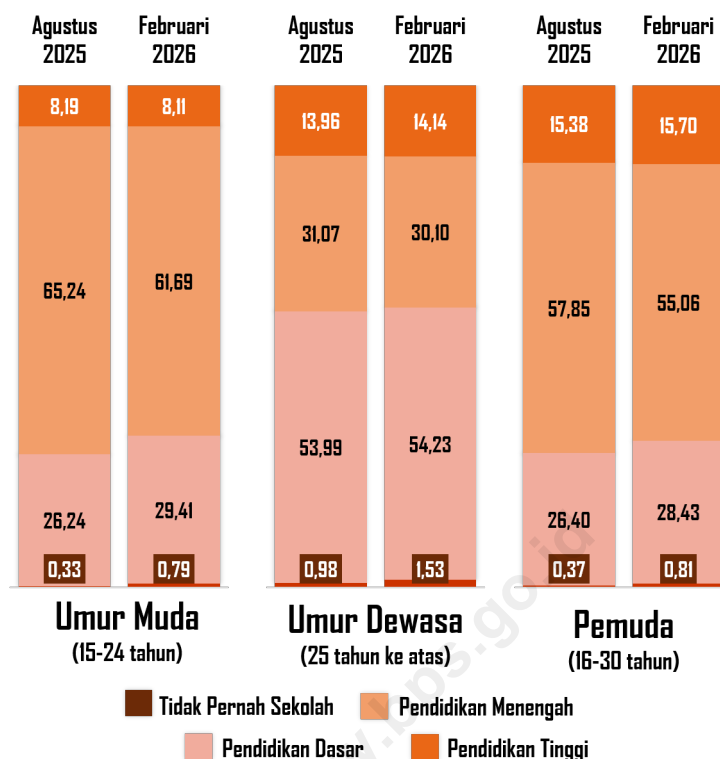
Komposisi angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan yang ditampilkan pada Tabel 12 menunjukkan bahwa pada Februari 2026 mayoritas angkatan kerja masih berasal dari kelompok berpendidikan tingkat dasar, yaitu sebesar 50,75 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan Agustus 2025 yang bernilai 49,89 persen dan penurunan pada Februari 2025 yang bernilai 51,23 persen. Sebaliknya, terjadi penurunan pada kelompok berpendidikan menengah yang sebesar 34,52 persen pada Februari 2026, lebih rendah daripada Agustus 2025 (36,12 persen) sedangkan meningkat daripada Februari 2025 (34,28 persen). Persentase angkatan kerja berpendidikan tinggi juga mengalami peningkatan meskipun relatif kecil, dari 13,11 persen pada Agustus 2025 menjadi 13,30 persen pada Februari 2026. Sementara itu, proporsi angkatan kerja yang tidak pernah sekolah meningkat dari 0,88 persen pada Agustus 2025 menjadi 1,43 persen. Secara keseluruhan, perkembangan tersebut mengindikasikan adanya pergeseran struktur pendidikan angkatan kerja menuju jenjang menengah dan tinggi pada periode Agustus 2025 dan Februari 2026.

Jika dianalisis menurut jenis kelamin, Tabel 12 menunjukkan bahwa komposisi pendidikan angkatan kerja perempuan dan laki-laki memperlihatkan perbedaan yang cukup mencolok. Pada Februari 2026, angkatan kerja perempuan lebih banyak memiliki pendidikan tinggi yaitu sebesar 16,91 persen, sedangkan laki-laki sebesar 10,91 persen. Sebaliknya, laki-laki lebih dominan pada jenjang pendidikan menengah dibanding perempuan. Pada jenjang tidak pernah sekolah dan pendidikan dasar, persentase perempuan juga lebih tinggi dibandingkan laki-laki, konsisten dengan pola yang muncul pada periode sebelumnya. Temuan ini menggambarkan bahwa capaian perempuan di pasar tenaga kerja relatif lebih baik dibanding laki-laki pada pendidikan dasar ke bawah dan pendidikan tinggi, namun sebagian perempuan masih menghadapi hambatan pada pendidikan menengah.

Perbedaan komposisi pendidikan berdasarkan daerah tempat tinggal juga terlihat jelas pada Tabel 12. Di perdesaan, proporsi angkatan kerja dengan pendidikan tingkat dasar masih sangat tinggi, yaitu mencapai 63,73 persen pada Februari 2026. Selain itu, persentase tidak pernah sekolah di perdesaan (2,90 persen) lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Sebaliknya, angkatan kerja di wilayah perkotaan lebih dominan dibanding perdesaan pada pendidikan tingkat menengah (39,85 persen) dan pendidikan tinggi (16,95 persen). Pola ini konsisten dengan kondisi Februari 2025 dan Agustus 2025, menunjukkan bahwa kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antara perkotaan dan perdesaan masih berlanjut. Kesenjangan pendidikan ini berimplikasi pada kualitas dan produktivitas angkatan kerja serta kesenjangan pendapatan di pasar tenaga kerja (OECD, 2019).



Masih terdapat kurang dari satu persen angkatan kerja kelompok umur muda dan pemuda yang tidak pernah sekolah.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Gambar 36 Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur, Agustus 2025 dan Februari 2026

Gambar 36 menyajikan perubahan komposisi tingkat pendidikan angkatan kerja menurut kelompok umur pada Agustus 2025 dan Februari 2026. Untuk kelompok umur muda (15–24 tahun), terjadi penurunan yang cukup signifikan pada pendidikan tingkat menengah dari 65,24 persen pada Agustus 2025 menjadi 61,69 persen pada Februari 2026. Pada saat yang sama, pendidikan dasar meningkat dari 26,24 persen menjadi 29,41 persen, sedangkan pendidikan tinggi sedikit menurun dari 8,19 persen menjadi 8,11 persen. Kelompok umur muda yang tidak pernah sekolah naik dari 0,33 persen menjadi 0,79 persen.

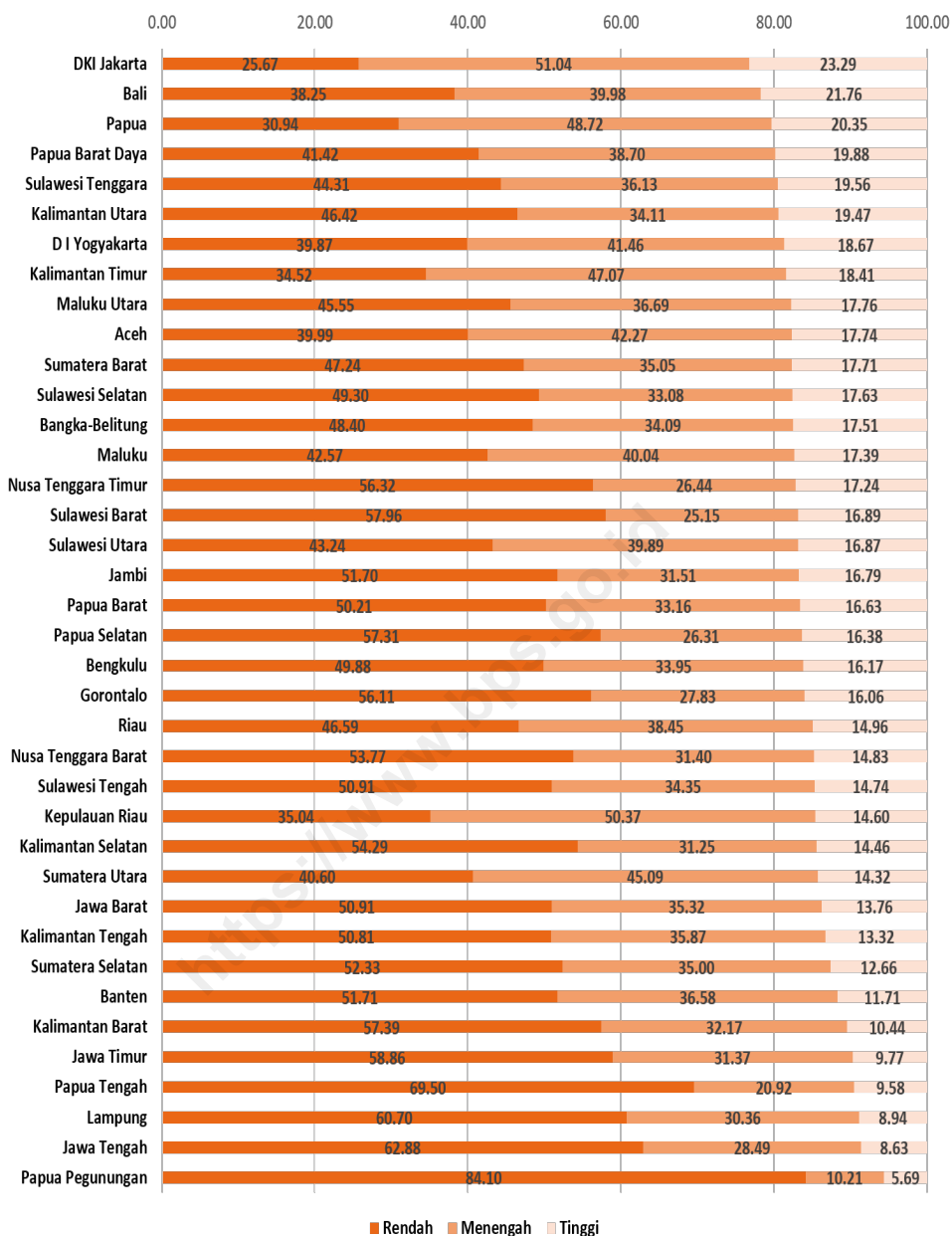
Pada kelompok umur dewasa (25 tahun ke atas), pendidikan dasar masih menjadi kelompok terbesar, yaitu 54,23 persen pada Februari 2026. Persentase tersebut sedikit menurun dibanding Agustus 2025 (53,99 persen). Pendidikan menengah menurun dari 31,07 persen menjadi 30,10 persen, sementara pendidikan tinggi naik dari 13,96 persen menjadi 14,14 persen. Kelompok tidak pernah sekolah naik dari 0,98 persen menjadi 1,53 persen. Meskipun pendidikan dasar tetap mendominasi, peningkatan pada pendidikan menengah dan tinggi mencerminkan perbaikan bertahap struktur pendidikan angkatan kerja dewasa.

Pada kelompok pemuda (16–30 tahun), pendidikan menengah mendominasi angkatan kerja sebesar 55,06 persen pada Februari 2026, menurun dari 57,85 persen pada Agustus 2025. Pendidikan dasar naik dari 26,40 persen menjadi 28,43 persen, sementara pendidikan tinggi relatif stabil pada kisaran 15 persen. Kelompok tidak pernah sekolah naik dari 0,37 persen menjadi 0,81 persen.



Pada Februari 2026, Papua Pegunungan mencatat proporsi tertinggi angkatan kerja berpendidikan rendah yaitu mencapai 84,10 persen.

Berdasarkan distribusi angkatan kerja menurut jenjang pendidikan, terlihat bahwa Papua Pegunungan mencatat proporsi tertinggi angkatan kerja berpendidikan rendah sebesar 84,10 persen. Persentase yang tinggi juga tampak di Papua Tengah sebesar 69,50 persen. Di wilayah barat Indonesia, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan proporsi pendidikan rendah terbesar, yaitu 62,88 persen. Sementara itu, beberapa provinsi menunjukkan struktur pendidikan angkatan kerja berimbang atau mulai bergeser ke dominasi pendidikan menengah. DKI Jakarta dan Kepulauan Riau memiliki proporsi tertinggi angkatan kerja berpendidikan menengah dengan proporsi masing-masing sebesar 51,04 persen dan 50,37 persen. Secara keseluruhan, sebaran pada Gambar 37 menegaskan bahwa komposisi pendidikan angkatan kerja belum merata.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026

Gambar 37 Distribusi Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, Februari 2026

BAB 6 INDIKATOR UPAH DAN BIAYA TENAGA KERJA

6.1 KILM 15. Upah dan Biaya Kompensasi

Salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan penduduk bekerja adalah besaran upah atau pendapatan yang diterima. Pada publikasi ini, informasi yang disajikan terbatas pada rata-rata upah atau gaji bersih sebulan dari penduduk bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai. Sakernas tidak menyediakan data mengenai biaya kompensasi, sehingga indikator tersebut tidak dapat dimasukkan dalam publikasi KILM.

Pada Februari 2026, rata-rata upah/gaji bersih sebulan buruh/karyawan/pegawai berdasarkan hasil Sakernas mencapai 3,29 juta rupiah, menurun dibandingkan Agustus 2025 yang berada pada angka 3,33 juta rupiah. Sedangkan bila di bandingkan dengan Februari 2025 terjadi peningkatan yang nominalnya sebesar 3,09 juta rupiah. Informasi lengkap mengenai perkembangan rata-rata upah menurut jenis kelamin dan daerah tempat tinggal dapat dilihat pada Tabel 13.

Dilihat menurut jenis kelamin, rata-rata upah/gaji bersih sebulan buruh/karyawan/pegawai laki-laki pada Februari 2026 mencapai 3,55 juta rupiah, sementara perempuan menerima rata-rata 2,80 juta rupiah. Kedua kelompok mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2025, masing-masing menurun sebesar 0,04 juta rupiah dan 0,06 juta rupiah. Laki-laki secara konsisten memperoleh rata-rata upah yang lebih tinggi, mencerminkan perbedaan struktur pekerjaan, pengalaman kerja, serta sektor tempat bekerja sebagaimana sering diidentifikasi dalam kajian ketenagakerjaan internasional.

Jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, rata-rata upah/gaji bersih sebulan buruh/karyawan/pegawai di wilayah perkotaan pada Februari 2026 tercatat sebesar 3,53 juta rupiah, sedangkan di perdesaan sebesar 2,57 juta rupiah. Baik wilayah perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2025, namun kesenjangan antara keduanya tetap signifikan. Upah di perkotaan secara konsisten lebih tinggi, sejalan dengan karakteristik pasar kerja yang umumnya menawarkan jenis pekerjaan dengan produktivitas dan tingkat upah lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan wilayah perdesaan.

**Tabel 13 Rata-Rata Upah/Gaji Selama Sebulan
Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Daerah
Tempat Tinggal (juta rupiah), Februari 2025, Agustus 2025, dan
Februari 2026**

Rata Rata Upah	2025		2026
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin			
Laki-Laki	3,37	3,59	3,55
Perempuan	2,61	2,86	2,80
Daerah Tempat Tinggal			
Perkotaan	3,32	3,62	3,53
Perdesaan	2,51	2,58	2,57
Indonesia	3,09	3,33	3,29

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

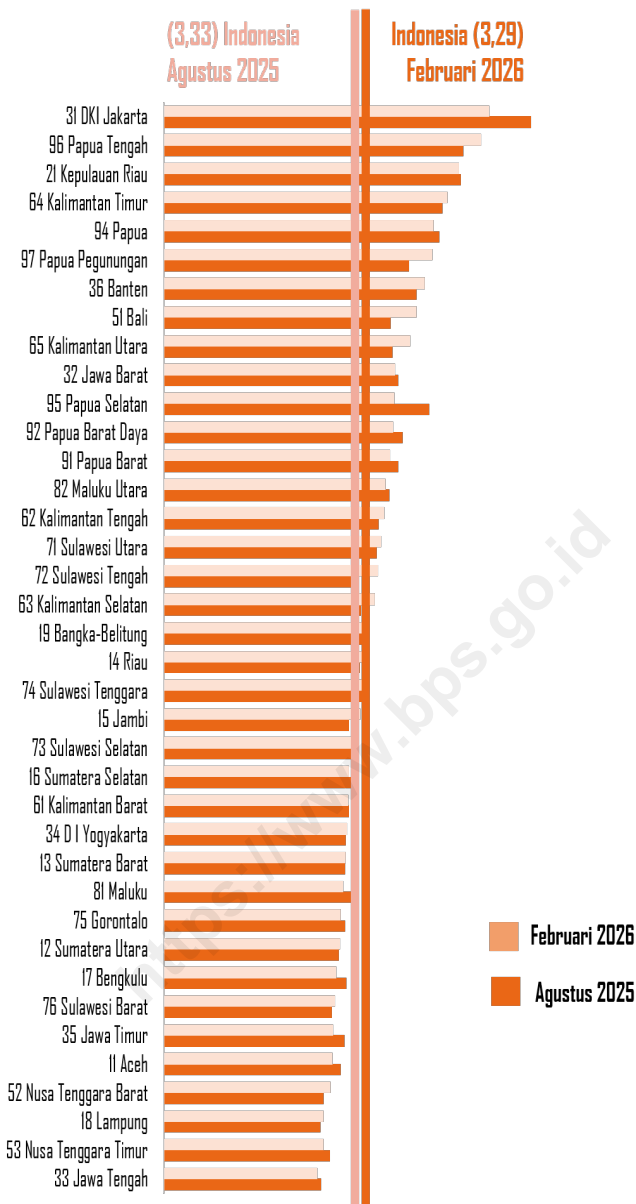


Februari 2026:
Rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai tertinggi terdapat pada Provinsi DKI Jakarta, Papua Tengah, dan Kepulauan Riau.

Rata-rata upah/gaji bersih sebulan buruh/karyawan/pegawai menurut provinsi yang disajikan pada Gambar 38 menunjukkan bahwa pada Februari 2026 provinsi dengan rata-rata upah tertinggi secara berturut-turut adalah DKI Jakarta, Papua Tengah, dan Kepulauan Riau. Ketiga provinsi tersebut secara konsisten menempati posisi teratas sejak periode sebelumnya. Struktur sektor ekonomi yang kuat, tingkat urbanisasi yang tinggi, dan dominasi pekerjaan dengan nilai tambah besar menjadi faktor yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat upah di provinsi-provinsi tersebut.

Sebaliknya, upah terendah umumnya berada pada provinsi-provinsi dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor primer, antara lain pertanian, kehutanan, dan perikanan. Meskipun terdapat peningkatan upah di sebagian provinsi tersebut, jarak terhadap provinsi berupah tinggi dan provinsi berupah rendah masih cukup lebar, memperlihatkan adanya ketimpangan regional yang persisten. Informasi lebih rinci mengenai perbandingan upah per provinsi dapat dilihat pada Gambar 38 serta Lampiran 24.

Secara keseluruhan, perkembangan upah/gaji buruh/karyawan/pegawai pada Februari 2026 menunjukkan tren peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, baik berdasarkan jenis kelamin maupun daerah tempat tinggal. Namun demikian, kesenjangan upah antarjenis kelamin dan antarwilayah masih cukup nyata. Kenaikan upah pada periode ini juga mengindikasikan adanya perbaikan dalam kondisi pasar kerja, meskipun disparitas struktural antarprovinsi, antarwilayah, dan antarjenis kelamin masih menjadi tantangan dalam pembangunan ketenagakerjaan. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 38, Lampiran 24, dan Lampiran 25.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Agustus 2025 dan Februari 2026

**Gambar 38 Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Selama Sebulan
Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi (juta rupiah),
Agustus 2025 dan Februari 2026**

BAB 7 PENJELASAN TEKNIS

Konsep dan definisi ketenagakerjaan yang digunakan BPS merujuk pada rekomendasi Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization*–ILO), sebagaimana tercantum dalam buku "*Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Underemployment: An ILO Manual on Concepts and Methods*" yang diterbitkan oleh ILO pada tahun 1992. Penggunaan definisi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan karakteristik ketenagakerjaan yang khas di Indonesia.

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) didasarkan pada Konsep Dasar Angkatan Kerja (*Standard Labour Force Concept*), sebagaimana ditunjukkan pada diagram di bawah ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Gambar 39 Konsep Dasar Angkatan Kerja

Beberapa konsep umum yang digunakan dalam Sakernas yang juga diadopsi untuk penyusunan *Key Indicators of the Labour Market* (KILM), meliputi konsep dan definisi mengenai penduduk, umur kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, periode referensi, dan kriteria satu jam dalam konsep bekerja. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama satu tahun dan atau mereka yang berdomisili kurang dari satu tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan konsep dasar ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja dibedakan atas dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pengukuran angkatan kerja dan bukan angkatan kerja tersebut didasarkan pada periode rujukan (*time reference*), yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu terakhir, yaitu tujuh hari sampai sehari sebelum pendataan.

Umur atau usia kerja adalah batas umur yang ditetapkan untuk pengelompokan penduduk yang aktif secara ekonomi. Indonesia menggunakan batas bawah umur kerja 15 tahun (meskipun dalam Sakernas dikumpulkan informasi mulai dari umur 5 tahun) dan tidak menetapkan batas atas usia kerja. Di negara lain, penentuan batas bawah dan batas atas umur kerja bervariasi sesuai dengan kebutuhan/situasi masing-masing negara, baik didasarkan pada batas usia pensiun legal (untuk batas atas) maupun regulasi ketenagakerjaan dan pemantauan isu pekerja anak (untuk batas bawah). Beberapa negara yang menggunakan batas atas usia kerja, seperti Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia (74 tahun), Mesir, Malaysia, dan Mexico (65 tahun). Sementara itu, banyak negara seperti Indonesia menggunakan batas bawah usia kerja, antara lain Mesir (6 tahun), USA (16 tahun), Kanada (15 tahun), dan India (5 tahun). Standar internasional ILO (Konvensi No. 138 mengenai Usia Minimum) menetapkan batas bawah usia kerja umumnya tidak boleh kurang dari 15 tahun. Namun, ILO memberikan fleksibilitas bagi negara

berkembang untuk menetapkan batas bawah 14 tahun, atau bahkan lebih rendah jika survei bertujuan memantau pekerja anak.

Angkatan kerja terdiri dari penduduk bekerja (termasuk yang punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja) dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai pekerjaan/melakukan aktivitas ekonomi atau tidak termasuk angkatan kerja karena sekolah, mengurus rumah tangga, atau lainnya (olahraga, kursus, piknik, serta kegiatan sosial seperti berorganisasi, dan kerja bakti).

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Kegiatan bekerja ini mencakup penduduk yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja selama seminggu terakhir, misalnya karena sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja, tugas belajar, atau alasan sejenis lainnya.

Konsep bekerja paling sedikit satu jam selama seminggu terakhir juga digunakan oleh berbagai negara, antara lain Pakistan, Filipina, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Rumania, dan Federasi Rusia. Penghasilan atau keuntungan yang dimaksud mencakup upah/gaji/pendapatan, termasuk seluruh tunjangan tetap dan hasil usaha berupa sewa, bunga, atau keuntungan usaha bagi pengusaha. Penghasilan atau keuntungan tersebut dapat berupa uang/barang.

Dalam Sakernas, pengangguran adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk angkatan kerja, dan memenuhi salah satu kondisi berikut:

1. Tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan;
2. Tidak punya pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha baru;
3. Tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa); atau
4. Sudah punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau sudah mempunyai usaha tetapi belum mulai berusaha.

Mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada suatu periode rujukan. Mempersiapkan usaha baru adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang 'baru' (bukan merupakan perluasan atau pengembangan dari usaha yang sudah ada), yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas risiko sendiri, baik dengan atau tanpa memperkerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud berupa 'tindakan nyata', seperti mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat izin usaha, dan sebagainya, baik telah maupun sedang dilakukan.

Merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa) adalah alasan bagi mereka yang telah berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan, sehingga ia merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan yang diinginkan, atau mereka yang merasa karena keadaan situasi/kondisi/iklim/musim menyebabkan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja atau sudah mempunyai usaha tetapi belum mulai berusaha adalah alasan bagi mereka tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha karena sudah diterima bekerja/mempunyai usaha, tapi pada saat pendataan belum mulai bekerja/berusaha.

Periode referensi atau periode rujukan adalah periode waktu yang digunakan untuk membatasi keterangan yang diberikan responden. Dalam survei rumah tangga maupun survei individu, penggunaan periode referensi yang singkat (*a short recent reference period*) bertujuan untuk meminimalkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall error*) serta mengurangi permasalahan statistik yang timbul akibat perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan, dan karakteristik penduduk lainnya. Standar internasional untuk periode referensi yang umum digunakan adalah satu hari atau satu minggu. Periode referensi satu minggu terakhir merupakan

periode yang paling banyak diterapkan dalam survei angkatan kerja nasional di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Selain periode referensi seminggu terakhir, Sakernas juga menerapkan kriteria satu jam (*the one hour criterion*) yaitu bekerja paling sedikit satu jam dalam seminggu terakhir. Kegiatan bekerja selama satu jam tersebut dapat dilakukan secara terus menerus maupun secara kumulatif satu jam dalam seminggu terakhir. Penggunaan kriteria satu jam dimaksudkan untuk mencakup seluruh jenis pekerjaan yang terdapat dalam suatu negara, termasuk pekerjaan berdurasi singkat (*short-time work*), pekerja bebas, pekerjaan siaga (*stand-by work*), serta berbagai bentuk pekerjaan tidak tetap lainnya. Kriteria ini juga berkaitan erat dengan definisi bekerja dan pengangguran yang digunakan dalam statistik ketenagakerjaan.

Pengangguran didefinisikan sebagai kondisi tidak memiliki pekerjaan sama sekali (*lack of work*). Apabila batas minimum jam kerja dinaikkan, maka definisi pengangguran tidak lagi menggambarkan kondisi tanpa pekerjaan secara total. Selain itu, penggunaan kriteria satu jam bertujuan untuk memastikan bahwa pada tingkat agregasi tertentu, total input tenaga kerja berkaitan langsung dengan total produksi. Hal ini penting terutama dalam analisis terpadu antara statistik ketenagakerjaan dan statistik produksi.

Berdasarkan pertimbangan teknis, ILO merekomendasikan untuk memperhatikan *the one hour criterion*, yaitu penerapan konsep atau definisi bekerja paling sedikit satu jam dalam periode referensi tertentu untuk menentukan status bekerja (*employed*) seseorang. BPS menggunakan konsep "bekerja paling sedikit satu jam dalam seminggu terakhir" untuk mengkategorikan seseorang sebagai bekerja, tanpa melihat lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan/jabatan, maupun status pekerjaannya.

Indikator Pasar Tenaga Kerja

ILO meluncurkan publikasi *Key Indicators of Labour Market* (KILM) edisi ke-9 pada tahun 2015 untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin serta meningkatkan diseminasi data mengenai elemen-elemen utama pasar tenaga kerja dunia. Dalam edisi tersebut, KILM terdiri atas 17 (tujuh belas) indikator yang dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) kelompok indikator. Adapun pengelompokan indikator KILM adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi di dunia kerja
 - KILM 1: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
2. Indikator penduduk yang bekerja
 - KILM 2: Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (*Employment to Population Ratio-EPR*)
 - KILM 3: Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan
 - KILM 4: Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan
 - KILM 5: Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan
 - KILM 6: Pekerja Paruh Waktu
 - KILM 7: Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja
 - KILM 8: Penduduk Bekerja pada Kegiatan Informal
3. Indikator pengangguran dan setengah pengangguran
 - KILM 9: Pengangguran
 - KILM 10: Pengangguran pada Kelompok Umur Muda
 - KILM 11: Pengangguran Jangka Panjang
 - KILM 12: Setengah Pengangguran (*Underemployment*)
4. Indikator bukan angkatan kerja (ketidakaktifan)
 - KILM 13: Tingkat Ketidakaktifan
5. Indikator pendidikan dan melek huruf
 - KILM 14: Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf
6. Indikator upah dan biaya tenaga kerja
 - KILM 15: Upah dan Biaya Kompensasi
7. Produktivitas tenaga kerja
 - KILM 16: Produktivitas Tenaga Kerja

8. Indikator kemiskinan

- KILM 17: Indikator Kemiskinan, distribusi pendapatan, penduduk bekerja menurut kelas ekonomi, dan penduduk bekerja yang miskin.

Dari keseluruhan indikator tersebut, sebanyak 14 (empat belas) indikator KILM dapat dihasilkan dan disajikan berdasarkan data Sakernas.

KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator yang menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif di pasar tenaga kerja, baik bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Indikator ini memberikan gambaran mengenai besarnya pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara atau wilayah. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur dapat memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, TPAK digunakan untuk menunjukkan proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi, sekaligus menggambarkan besarnya pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia dalam perekonomian. TPAK dihitung sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.

Tabel publikasi standar yang diterbitkan ILO menyajikan estimasi TPAK menurut jenis kelamin dan kelompok umur dengan standar berikut: 15–24, 15–64, 25–34, 25–54, 35–54, 55–64, dan 65 tahun ke atas. Penggunaan kelompok umur tersebut telah digunakan secara konsisten di lebih dari 190 negara sejak tahun 1980.

KILM 2. Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (*Employment to Population Ratio – EPR*)

Rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (*Employment to Population Ratio – EPR*) adalah indikator yang menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang bekerja terhadap total penduduk usia kerja di suatu negara atau wilayah. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja di suatu negara memiliki pekerjaan. Sebaliknya, rasio yang rendah mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja belum terlibat langsung dalam kegiatan yang berkaitan dengan pasar tenaga kerja, baik karena sedang menganggur maupun termasuk dalam bukan angkatan kerja (BAK).

Indikator ini memberikan informasi penting mengenai kemampuan suatu perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Di banyak negara, indikator ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dalam melengkapi analisis indikator tingkat pengangguran, karena dapat mencerminkan sejauh mana penduduk usia kerja terserap dalam kegiatan ekonomi.

Meskipun secara umum nilai EPR yang tinggi menunjukkan kondisi yang relatif baik, indikator ini belum dapat menggambarkan kualitas maupun kelayakan pekerjaan yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan indikator tambahan untuk menilai aspek ketenagakerjaan lainnya, seperti tingkat upah/gaji, jumlah jam kerja, pekerjaan informal, setengah pengangguran, dan kondisi kerja secara umum.

Selain itu, nilai EPR yang tinggi tidak selalu mencerminkan kondisi pasar kerja yang positif. Sebagai contoh, keterbatasan akses pendidikan dapat mendorong penduduk usia muda untuk bekerja lebih awal guna memenuhi kebutuhan hidup atau membiayai pendidikan, dibandingkan melanjutkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, analisis EPR perlu dilakukan secara terpadu bersama indikator ketenagakerjaan lainnya dalam evaluasi kondisi pasar tenaga kerja di suatu negara atau wilayah.

KILM 3. Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan

Klasifikasi penduduk bekerja menurut status pekerjaan dapat digunakan untuk memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat perkembangan ekonomi suatu negara. Seiring dengan perkembangan ekonomi, struktur ketenagakerjaan umumnya mengalami pergeseran dari sektor pertanian menuju sektor industri dan jasa. Pergeseran tersebut biasanya ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk bekerja yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai, serta menurunnya proporsi pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar yang umumnya terkonsentrasi di sektor pertanian.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam unit usaha atau kegiatan ekonomi pada pekerjaan utamanya. Klasifikasi status pekerjaan utama dalam Sakernas terdiri atas:

1. Berusaha sendiri;
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar;
3. Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar;
4. Buruh/karyawan/pegawai;
5. Pekerja bebas di pertanian;
6. Pekerja bebas di nonpertanian; dan
7. Pekerja keluarga/tidak dibayar.

Dalam publikasi ini, status pekerjaan utama dikelompokkan ke dalam empat kategori utama, yaitu:

1. Buruh/karyawan/pegawai;
2. Berusaha, yang mencakup:
 - a. Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar;
 - b. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar;
 - c. Berusaha sendiri;
3. Pekerja bebas, terdiri dari:
 - a. Pekerja bebas di pertanian
 - b. Pekerja bebas di nonpertanian;
4. Pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar.

KILM 4. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan

Informasi ketenagakerjaan menurut lapangan usaha dapat digunakan untuk mengidentifikasi pergeseran struktur ketenagakerjaan serta tingkat perkembangan ekonomi di suatu negara atau wilayah. Dalam proses pembangunan ekonomi, struktur ketenagakerjaan umumnya bergeser dari dominasi sektor pertanian dan kegiatan padat karya menuju sektor industri, kemudian berkembang ke sektor jasa. Pergeseran tersebut biasanya diikuti oleh meningkatnya mobilitas tenaga kerja dari wilayah perdesaan ke wilayah perkotaan. Selain itu, indikator ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang menjadi penggerak pertumbuhan kesempatan kerja. Perubahan komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha dapat memberikan gambaran mengenai transformasi struktural dalam perekonomian, potensi peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta sektor-sektor yang perlu menjadi prioritas dalam kebijakan ketenagakerjaan.

Klasifikasi lapangan usaha yang digunakan dalam Sakernas Februari dan Agustus 2025 mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020. Dalam publikasi ini, lapangan usaha atau sektor ekonomi dikelompokkan ke dalam 17 kategori, yaitu:

- A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
- B. Pertambangan dan Penggalan;
- C. Industri Pengolahan;
- D. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin;
- E. *Treatment* Air, *Treatment* Air Limbah, *Treatment* dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi;
- F. Konstruksi;
- G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
- H. Pengangkutan dan Pergudangan;
- I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum;
- J. Informasi dan Komunikasi;
- K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi;

- L. Real Estat;
- M,N. Aktivitas Profesional dan Perusahaan;
- O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib;
- P. Pendidikan;
- Q. Aktivitas Kesehatan dan Kegiatan Sosial;
- R,S,T,U. Aktivitas Jasa Lainnya

Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025, BPS melakukan penyesuaian dengan mengganti KBLI 2020 secara bertahap menjadi KBLI 2025 pada seluruh kegiatan statistik tahun 2026. Dengan demikian, klasifikasi lapangan usaha dalam Sakernas Februari 2026 menggunakan KBLI 2025. Dalam publikasi ini, lapangan usaha atau sektor ekonomi dikelompokkan ke dalam 17 kategori, sebagai berikut:

- A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- B. Pertambangan dan Penggalan
- C. Industri
- D. Penyediaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin
- E. Penyediaan Air; Pengelolaan Air Limbah, Penanganan Limbah, dan Remediasi
- F. Konstruksi
- G. Perdagangan Besar dan Eceran
- H. Transportasi dan Penyimpanan
- I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- J, K. Aktivitas Penerbitan dan Telekomunikasi
- L. Aktivitas Keuangan dan Asuransi
- M. Aktivitas Real Estat
- N, O. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis dan Aktivitas Administratif dan Penunjang Usaha
- P. Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib
- Q. Pendidikan
- R. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial
- S,T,U,V. Kesenian, Aktivitas Jasa Lainnya, Aktivitas Rumah Tangga, dan Aktivitas Badan Internasional

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan sistem klasifikasi aktivitas ekonomi yang digunakan dalam kegiatan statistik. KBLI mengacu pada *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities* (ISIC) yang ditetapkan oleh *United Nations Statistical Commission* (UNSC). Pada 11 Maret 2024, ISIC diperbarui menjadi Revisi 5 sebagai standar internasional terbaru.

Sebagai tindak lanjut, Indonesia melakukan penyesuaian melalui penerbitan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2025 tentang KBLI 2025, yang menggantikan KBLI 2020. Dengan demikian, seluruh kegiatan statistik, termasuk Sakernas, yang sebelumnya mengacu pada KBLI 2020 secara bertahap beralih menggunakan KBLI 2025. KBLI 2025 tidak hanya merupakan pembaruan dari KBLI 2020, tetapi juga penyempurnaan yang dirancang untuk menangkap dinamika ekonomi terkini, termasuk transformasi digital, munculnya model bisnis baru, serta penguatan aspek keberlanjutan dan hilirisasi industri. Dengan demikian, klasifikasi ini menjadi lebih adaptif, akurat, dan sejalan dengan standar internasional.

Sejalan dengan penyesuaian ini, perubahan dalam KBLI 2025 menyebabkan penambahan jumlah kategori lapangan usaha dari 21 kategori pada KBLI 2020 menjadi 22 kategori. Pada kategori A–I, secara umum hanya terjadi penyesuaian nomenklatur pada beberapa kategori. Salah satu penyesuaian penting adalah perpindahan lapangan usaha Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, yang pada KBLI 2020 termasuk dalam Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor), menjadi bagian dari Kategori T (Aktivitas Jasa Lainnya) pada KBLI 2025. Perubahan utama lainnya pada kategori J (Informasi dan Komunikasi) pada KBLI 2020 yang dipecah menjadi dua kategori pada KBLI 2025, seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, yaitu:
J : Aktivitas Penerbitan, Penyiaran, serta Produksi dan Distribusi Konten
K: Aktivitas Telekomunikasi, Pemrograman Komputer, Konsultasi, Infrastruktur Komputasi, dan Jasa Informasi Lainnya.

Selain itu, jasa intermediasi (*Portal Web* dan/atau *Platform Digital* dengan Tujuan Komersial) yang pada KBLI 2020 termasuk Kategori J (Informasi dan Komunikasi), pada KBLI 2025 diklasifikasikan sesuai dengan aktivitas yang menjadi objek intermediasi. Sebagai contoh, *platform digital* penyedia jasa konsultasi kesehatan diklasifikasikan ke dalam Kategori R (Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial), sedangkan *platform digital* perdagangan barang diklasifikasikan ke dalam Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran). Selanjutnya, kategori K–U pada KBLI 2020 mengalami penyesuaian berupa pengodean ulang (*recoding*) serta perubahan *nomenklatur* pada KBLI 2025.

Secara keseluruhan, pembaruan KBLI 2025 dilakukan di hampir seluruh kategori dengan tujuan memperjelas fungsi ekonomi setiap aktivitas, mengurangi tumpang tindih antarkode, serta mengakomodasi aktivitas ekonomi baru yang sebelumnya belum terklasifikasikan secara memadai. Perubahan tersebut juga berdampak pada penambahan kode baru, penggabungan beberapa kode, serta perpindahan kode antarkategori dibandingkan dengan KBLI 2020.

KILM 5. Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan

Klasifikasi penduduk bekerja menurut jenis pekerjaan bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik pekerjaan utama yang dilakukan oleh penduduk bekerja berdasarkan keterampilan dan jenis tugas yang melekat pada pekerjaan tersebut. Indikator ini penting untuk memberikan gambaran mengenai struktur pasar kerja dan dinamika permintaan tenaga kerja menurut kelompok jabatan.

Sejak Sakernas tahun 2016, klasifikasi jenis pekerjaan mengacu pada Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI) 2014, yang disusun berdasarkan *International Standard Classification of Occupations* (ISCO) 2008. KBJI 2014 menyediakan klasifikasi jenis pekerjaan yang lebih rinci dan komprehensif sesuai dengan perkembangan struktur pasar kerja. Namun demikian, untuk menjaga keterbandingan data antarwaktu, penyajian jenis pekerjaan dalam publikasi ini disesuaikan

dan dikonversikan ke dalam format Klasifikasi Jabatan Indonesia (KJI) 1982. Adapun kategori jenis pekerjaan yang digunakan dalam publikasi ini adalah sebagai berikut:

- 0/1. Tenaga Profesional, Teknisi, dan yang Sejenis;
- 2. Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan;
- 3. Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis;
- 4. Tenaga Usaha Penjualan;
- 5. Tenaga Usaha Jasa;
- 6. Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan;
- 7/8/9. Tenaga Produksi, Operator Alat-Alat Angkutan, dan Pekerja Kasar;
- X/00. Lainnya

KILM 6. Pekerja Paruh Waktu

Indikator pekerja paruh waktu bermanfaat untuk mengidentifikasi fleksibilitas dan keterbatasan dalam pasar tenaga kerja, serta menggambarkan akses penduduk bekerja terhadap pekerjaan yang layak. Indikator ini menunjukkan proporsi penduduk bekerja dengan jumlah jam kerja di bawah standar pekerjaan penuh waktu (*full-time employment*) terhadap total penduduk bekerja.

Secara internasional, belum terdapat definisi baku mengenai batas minimum jumlah jam kerja per minggu yang dianggap sebagai pekerjaan penuh waktu. Untuk keperluan statistik, ILO merekomendasikan agar setiap negara menggunakan definisi nasional yang konsisten dalam menentukan batas jam kerja penuh waktu. Beberapa negara menetapkan batas 35 jam per minggu sebagai acuan pekerjaan penuh waktu, seperti Republik Korea, Amerika Serikat, dan El Salvador. Dalam konteks Indonesia, BPS mendefinisikan pekerja paruh waktu sebagai penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu, tetapi tidak sedang mencari pekerjaan, tidak sedang mempersiapkan usaha, serta tidak bersedia menerima pekerjaan tambahan.

KILM 7. Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja

Jumlah jam kerja memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan, kesejahteraan, dan keseimbangan kehidupan kerja pada penduduk bekerja, serta terhadap tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja yang harus ditanggung oleh perusahaan. Oleh karena itu, pengukuran tingkat dan tren jumlah jam kerja pada berbagai kelompok penduduk bekerja maupun secara individu, menjadi penting dalam pemantauan kondisi kerja, evaluasi kualitas pekerjaan, serta dalam analisis perkembangan ekonomi suatu negara.

Indikator ini menyajikan distribusi penduduk bekerja menurut jumlah jam kerja per minggu, baik berdasarkan jam kerja biasanya maupun jam kerja aktual. Dalam publikasi ini, ategori pengelompokan jam kerja yang digunakan meliputi: 0 jam (sementara tidak bekerja), 1–34 jam (pekerja paruh waktu), 35–48 jam (pekerja penuh waktu/jam kerja normal), dan 49 jam ke atas (pekerja dengan jam kerja panjang/berlebih atau *excessive hours*). Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi kelebihan beban kerja (*overwork*), kekurangan kesempatan kerja (*underemployment*), serta tingkat pemanfaatan tenaga kerja dalam sistem ekonomi secara menyeluruh.

KILM 8. Penduduk Bekerja pada Kegiatan Informal

Indikator Indikator penduduk bekerja pada kegiatan informal menunjukkan proporsi penduduk bekerja pada kegiatan informal terhadap total penduduk bekerja. Kegiatan informal merupakan bagian penting dari perekonomian, terutama di negara berkembang dan negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Indikator ini penting untuk menggambarkan kualitas pekerjaan, cakupan perlindungan sosial, dan sebagai dasar penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kondisi pasar kerja.

Dalam publikasi ini, BPS menentukan penduduk bekerja pada kegiatan formal dan informal berdasarkan status pekerjaan utama. Dalam publikasi ini, BPS menentukan kategori formal dan informal berdasarkan pendekatan status pekerjaan utama. Penduduk yang bekerja pada **kegiatan formal** mencakup:

1. Buruh/karyawan/pegawai; dan
2. Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar.

Sementara itu, **kegiatan informal** mencakup lima kelompok status pekerjaan lainnya, yaitu:

1. Berusaha sendiri;
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar;
3. Pekerja bebas di pertanian;
4. Pekerja bebas di nonpertanian; serta
5. Pekerja keluarga/tidak dibayar.

KILM 9. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang menunjukkan proporsi jumlah penganggur terhadap total angkatan kerja. TPT digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang belum terserap oleh pasar kerja, sekaligus menggambarkan kinerja pasar tenaga kerja dan perekonomian secara keseluruhan.

Namun demikian, tingkat pengangguran tidak selalu dapat diartikan secara langsung sebagai indikator kesulitan ekonomi atau tingkat kemiskinan. Hubungan antara pengangguran dan kemiskinan tidak selalu positif. Dalam beberapa kasus, TPT justru relatif rendah pada kelompok penduduk miskin. Hal ini terjadi karena mereka cenderung tidak memiliki jaring pengaman sosial sehingga terpaksa tetap bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, meskipun pada pekerjaan informal yang bergaji rendah dan berkualitas kurang layak.

Dalam Sakernas, penganggur terbuka didefinisikan sebagai penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja dan termasuk dalam salah satu dari empat kategori berikut:

1. Tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan;
2. Tidak punya pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha baru;
3. Tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa); atau
4. Sudah punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/mempunyai usaha, tetapi belum mulai berusaha.

Tingkat pengangguran digunakan oleh banyak negara sebagai indikator untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang belum terserap dalam pasar kerja. Jika bekerja dipandang sebagai kondisi yang diinginkan bagi penduduk yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja), maka pengangguran pada umumnya dipandang sebagai kondisi yang tidak diinginkan.

Namun demikian, dalam kondisi tertentu pengangguran jangka pendek dapat menjadi bagian dari proses penyesuaian pasar kerja terhadap perubahan ekonomi. Perubahan struktur perekonomian, seperti pergeseran dari sektor manufaktur ke sektor jasa atau penerapan teknologi baru, dapat menyebabkan sebagian tenaga kerja kehilangan pekerjaan untuk sementara waktu. Dalam masa transisi tersebut, pengangguran jangka pendek memungkinkan tenaga kerja mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan kebutuhan keterampilan di pasar kerja. Dalam konteks ini, pengangguran dapat berperan sebagai mekanisme dalam mencapai keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja secara lebih efisien. Tanpa adanya masa transisi tersebut, mobilitas tenaga kerja dan efisiensi pasar kerja dapat terhambat.

Tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menggambarkan kondisi umum dan kinerja pasar tenaga kerja dan perekonomian secara keseluruhan. Namun demikian, indikator ini tidak selalu mencerminkan tingkat kesulitan ekonomi atau tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan standar internasional, tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan, bersedia bekerja, dan secara aktif mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha baru. Oleh karena itu, indikator ini lebih tepat digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan tenaga kerja serta menggambarkan kegagalan angkatan kerja dalam memperoleh pekerjaan. Untuk mengevaluasi tingkat kesulitan ekonomi secara lebih komprehensif, diperlukan indikator lain yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk indikator pendapatan.

Secara matematis, tingkat pengangguran didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja, baik pada tingkat nasional maupun kelompok penduduk tertentu. Dalam penghitungan ini, penyebut (*denominator*) yang digunakan adalah jumlah angkatan kerja atau penduduk yang aktif secara ekonomi, bukan jumlah total penduduk. Perbedaan tersebut penting untuk dipahami karena istilah “angkatan kerja” dan “penduduk bekerja” sering kali digunakan secara tidak tepat dan saling dipertukarkan. Sebagai contoh, tingkat pengangguran sebesar 6,11 persen berarti bahwa 6,11 persen dari total angkatan kerja tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan usaha baru, atau bersedia untuk bekerja. Dapat dikatakan bahwa terdapat sekitar 6 orang yang menganggur dari setiap 100 orang yang berada di kelompok angkatan kerja (bukan dari setiap 100 orang penduduk).

KILM 10. Pengangguran pada Kelompok Umur Muda

Tingkat pengangguran pada penduduk umur muda menggambarkan proporsi angkatan kerja usia muda yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha baru, serta bersedia untuk bekerja. Pengangguran pada penduduk usia muda merupakan salah satu permasalahan ketenagakerjaan yang memerlukan perhatian dan penanganan kebijakan khusus di banyak negara, terlepas dari tingkat pembangunan ekonominya. Dalam indikator ini, penduduk usia muda didefinisikan sebagai penduduk

berumur 15–24 tahun, sedangkan penduduk dewasa adalah penduduk berumur 25 tahun ke atas.

KILM 11. Pengangguran Jangka Panjang

Pengangguran jangka panjang menggambarkan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja dalam jangka waktu tertentu, meskipun masih aktif mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Kondisi ini mencerminkan tenaga kerja yang belum dapat terserap dalam pasar kerja untuk periode yang relatif panjang.

Informasi mengenai pengangguran jangka panjang umumnya hanya dikumpulkan untuk pengangguran yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, sehingga belum mencakup seluruh kategori pengangguran. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

KILM 12. Setengah Pengangguran (*Underemployment*)

Penduduk yang dikategorikan dalam setengah penganggur adalah penduduk bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam per minggu, dan memenuhi salah satu kondisi berikut:

1. Secara sukarela mencari pekerjaan tambahan, meliputi:
 - a. menginginkan pekerjaan lain untuk menambah jam kerja dari pekerjaan yang sekarang;
 - b. menginginkan untuk mengganti pekerjaan saat ini dengan pekerjaan lain yang mempunyai jam kerja lebih banyak.
2. Bersedia menerima pekerjaan tambahan atau pekerjaan lain.

KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan

Tingkat ketidakaktifan adalah indikator yang menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang tidak aktif dalam pasar tenaga kerja, yaitu tidak bekerja dan tidak sedang mencari pekerjaan. Kelompok penduduk tersebut dikenal sebagai bukan angkatan kerja (BAK). Tingkat ketidakaktifan merupakan kebalikan dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Oleh karena itu, jika tingkat ketidakaktifan dijumlahkan dengan TPAK, hasilnya sama dengan 100 persen. Dengan kata lain, tingkat ketidakaktifan dapat dinyatakan sebagai 100 persen dikurangi TPAK.

Dalam kondisi tertentu, tingkat ketidakaktifan yang tinggi pada kelompok penduduk tertentu tidak selalu mencerminkan kondisi yang kurang baik. Sebagai contoh, tingkat ketidakaktifan yang relatif tinggi pada perempuan usia 25–34 tahun dapat berkaitan dengan peran domestik, seperti mengurus rumah tangga, melahirkan, dan mengasuh anak. Melalui indikator KILM 13, pengguna data dapat mengidentifikasi keterkaitan antara peran ibu bekerja dan pola partisipasi tenaga kerja perempuan.

Selain faktor jenis kelamin, struktur dan karakteristik ketahanan ekonomi rumah tangga juga memengaruhi tingkat partisipasi penduduk di pasar kerja. Sebagai contoh, kepala rumah tangga perempuan cenderung memiliki tingkat ketidakaktifan ekonomi yang rendah akibat tuntutan pemenuhan kebutuhan pokok keluarga. Sebaliknya, apabila kepala rumah tangga laki-laki tidak aktif secara ekonomi, baik karena masih menempuh jenjang pendidikan maupun karena keterbatasan fisik/kesehatan. Kondisi tersebut cenderung mendorong perempuan atau istri untuk bertransisi menjadi pencari nafkah utama demi menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga.

KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf

Informasi mengenai tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kualitas dan tingkat keterampilan tenaga kerja. Pendidikan menjadi faktor penting dalam menilai kemampuan suatu negara untuk bersaing di pasar global serta dalam mendukung pemanfaatan perkembangan teknologi secara lebih efisien. Informasi terkait tingkat melek huruf tidak dapat disajikan dalam publikasi ini, karena variabel tersebut tidak dicakup dalam pengumpulan data Sakernas. Oleh karena itu, analisis dalam publikasi ini dibatasi pada indikator pencapaian pendidikan, yang didekati melalui variabel tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja.

Tabel KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja dalam lima kategori tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Namun, dalam publikasi ini, kategori tersebut disesuaikan menjadi empat tingkat pendidikan, yaitu: tidak pernah bersekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Kategori pendidikan yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual mengacu pada *International Standard Classification of Education* 1997 (ISCED-97). Dalam Sakernas pengelompokan tingkat pendidikan berdasarkan ISCED-97 yang telah disesuaikan terdiri atas:

1. Tidak pernah bersekolah, yaitu penduduk yang tidak atau belum pernah bersekolah sama sekali pada jenjang pendidikan formal;
2. Pendidikan tingkat dasar, yaitu penduduk yang tidak atau belum tamat SD, dan mereka yang berpendidikan tamat SD/MI, Paket A, SMP/MTs, SMP Kejuruan, dan Paket B;
3. Pendidikan tingkat menengah, yaitu penduduk dengan pendidikan SMA/MA, SMK, dan Paket C;
4. Pendidikan tingkat tinggi, yaitu penduduk dengan pendidikan tertinggi Diploma I/II/III, Diploma IV/Strata 1 (S1), serta Strata 2/Strata 3 (S2/S3).

Selain itu, pencapaian pendidikan angkatan kerja juga disajikan menurut kelompok umur, yaitu usia muda (15–24 tahun), pemuda (16–30 tahun), dan dewasa (25 tahun ke atas).

KILM 15. Indikator Upah dan Biaya Tenaga Kerja

Indikator upah memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk bekerja dari sisi pendapatan materi yang diterima. Indikator upah yang disajikan dari hasil Sakernas pada publikasi ini terbatas pada rata-rata upah/gaji sebulan terakhir bagi penduduk yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai. Sementara itu, data terkait biaya kompensasi tenaga kerja secara menyeluruh (*wages and compensation costs*) belum dapat disajikan pada publikasi ini karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

KILM 16. Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur peran tenaga kerja dalam proses produksi. Indikator ini menggambarkan besarnya *output* yang dihasilkan oleh setiap unit tenaga kerja. Semakin besar *output* yang dihasilkan, maka semakin tinggi tingkat produktivitas tenaga kerja, demikian pula sebaliknya. Indikator ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor dengan produktivitas tenaga kerja yang tinggi maupun rendah, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik sektor padat karya (*labour intensive*) dan sektor padat modal (*capital intensive*). Namun demikian, karena penghitungan produktivitas memerlukan variabel makro lain di luar tenaga kerja (seperti data Produk Domestik Bruto/PDRB), indikator produktivitas tenaga kerja belum dapat disajikan dalam publikasi ini.

KILM 17. Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan

Sebagaimana indikator produktivitas tenaga kerja, indikator kemiskinan, penduduk bekerja miskin, dan distribusi pendapatan memerlukan variabel tambahan yang tidak dikumpulkan dalam Sakernas. Selain itu, analisis indikator tersebut juga memerlukan dukungan data lintas sektor untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, indikator-indikator tersebut belum dapat disajikan dalam publikasi ini karena keterbatasan variabel yang tersedia pada Sakernas

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank (ADB). (2021). *Employment and labor markets in developing Asia*. ADB.
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education* (3rd ed.). Chicago: University of Chicago Press.
- Husmanns, R., Mehran, F., & Verma, V. (1990). *Surveys of economically active population, employment, unemployment and underemployment: An ILO manual in concepts and methods*. International Labour Office.
- International Labour Organization (ILO). (2012). *International standard classification of occupations: ISCO-08*. ILO.
- International Labour Organization (ILO). (2013). *Resolution concerning statistics of work, employment and labour underutilization*. ILO.
- International Labour Organization (ILO). (2018). *Global Wage Report 2018/19: What Lies Behind Gender Pay Gaps*. ILO.
- International Labour Organization (ILO). (2018). *Women and men in the informal economy: A statistical picture* (3rd ed.). ILO.
- International Labour Organization (ILO). (2019). *Quick guide on interpreting the unemployment rate*. ILO.
- International Labour Organization (ILO). (2020). *Global employment trends for youth 2020: Technology and the future of jobs*. ILO.
- International Labour Organization (ILO). (2020). *Women at Work: Trends 2016-2020*. ILO.
- ILOSTAT. (n.d.-a). *Employment by industry - ILO definition and interpretation*. Retrieved from <https://ilostat.ilo.org>

ILOSTAT. (n.d.-b). Employment by occupation and sex - ILO definition and interpretation. Retrieved from <https://ilostat.ilo.org>

ILOSTAT. (n.d.-c). Employment by status in employment - ILO definition and interpretation. Retrieved from <https://ilostat.ilo.org>

ILOSTAT. (n.d.-d). Employment-to-population ratio - ILO definition and interpretation. International Labour Organization. Retrieved from <https://ilostat.ilo.org>

ILOSTAT. (n.d.-e). Labour force participation rate - ILO definition and interpretation. International Labour Organization. Retrieved from <https://ilostat.ilo.org>

ILOSTAT. (n.d.-f). Part-time employment - ILO definition and interpretation. Retrieved from <https://ilostat.ilo.org>

ILOSTAT. (n.d.-g). Time-related underemployment rate - ILO definition and interpretation. Retrieved from <https://ilostat.ilo.org>

ILOSTAT. (n.d.-h). Youth unemployment rate. International Labour Organization. Retrieved from <https://ilostat.ilo.org>

Lewis, W. A. (1954). *Economic development with unlimited supplies of labour*. The Manchester School, 22(2), 139–191.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2019). *Education at a Glance 2019: OECD Indicators*. OECD Publishing.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2019). *Future of work: Employment outlook 2019*. OECD Publishing.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). *Part-time and temporary employment: Realities and challenges*. OECD Publishing.

- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). *How's Life? 2020: Measuring Well-being*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9870c393-en>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). *Getting Skills Right: Assessing and Anticipating Labour Market Needs*. <https://doi.org/10.1787/1a1f4094-en>
- Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2018). Returns to Investment in Education: A Decennial Review of the Global Literature. *The World Bank Economic Review*, 32(3), 676–699. <https://doi.org/10.1093/wber/lhy002>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson Education.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148*.
- World Bank. (2012). *World Development Report 2012: Gender Equality and Development*. Washington, DC: World Bank.
- World Health Organization (WHO) & International Labour Organization (ILO). (2021). Long working hours increasing deaths from heart disease and stroke: WHO, ILO. <https://www.who.int/news/item/17-05-2021-long-working-hours-increasing-deaths-from-heart-disease-and-stroke-who-ilo>
- World Bank. (2021). Gender and Education. Retrieved from <https://www.worldbank.org>
- World Bank. (2022). Gender Equality and Labor Market Outcomes. Retrieved from <https://www.worldbank.org>

LAMPIRAN

<https://www.bps.go.id>

**Lampiran 1 Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi
dan Jenis Kelamin (orang), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026**

Provinsi	Februari 2025			Agustus 2025		
	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	2.056.173	2.064.684	4.120.857	2.074.225	2.081.719	4.155.944
Sumatera Utara	5.763.325	5.797.831	11.561.156	5.810.933	5.842.427	11.653.360
Sumatera Barat	2.231.572	2.219.607	4.451.179	2.248.262	2.234.780	4.483.042
Riau	2.544.486	2.441.601	4.986.087	2.567.441	2.466.654	5.034.095
Jambi	1.425.322	1.382.654	2.807.976	1.435.174	1.393.826	2.829.000
Sumatera Selatan	3.365.776	3.258.752	6.624.528	3.390.473	3.285.286	6.675.759
Bengkulu	815.221	781.967	1.597.188	820.815	787.923	1.608.738
Lampung	3.645.541	3.501.457	7.146.998	3.666.213	3.526.324	7.192.537
Kep. Bangka Belitung	604.035	572.551	1.176.586	608.039	577.108	1.185.147
Kepulauan Riau	827.359	805.951	1.633.310	834.196	814.021	1.648.217
DKI Jakarta	4.185.074	4.188.382	8.373.456	4.200.256	4.230.367	8.430.623
Jawa Barat	19.625.984	19.267.918	38.893.902	19.789.443	19.447.942	39.237.385
Jawa Tengah	14.939.329	14.951.367	29.890.696	15.011.396	15.025.691	30.037.087
DI Yogyakarta	1.490.866	1.547.091	3.037.957	1.496.152	1.552.974	3.049.126
Jawa Timur	16.515.044	16.831.353	33.346.397	16.575.843	16.896.577	33.472.420
Banten	4.788.998	4.652.298	9.441.296	4.836.321	4.703.503	9.539.824
Bali	1.762.161	1.774.033	3.536.194	1.766.970	1.780.549	3.547.519
Nusa Tenggara Barat	2.081.127	2.089.736	4.170.863	2.103.266	2.107.316	4.210.582
Nusa Tenggara Timur	2.013.459	2.043.752	4.057.211	2.031.043	2.060.895	4.091.938
Kalimantan Barat	2.213.027	2.096.062	4.309.089	2.229.070	2.112.991	4.342.061
Kalimantan Tengah	1.109.421	1.034.020	2.143.441	1.116.181	1.042.070	2.158.251
Kalimantan Selatan	1.604.563	1.581.499	3.186.062	1.617.579	1.594.887	3.212.466
Kalimantan Timur	1.658.698	1.538.595	3.197.293	1.619.367	1.500.745	3.120.112
Kalimantan Utara	298.928	265.806	564.734	300.948	268.178	569.126
Sulawesi Utara	1.076.327	1.033.924	2.110.251	1.080.761	1.039.134	2.119.895
Sulawesi Tengah	1.197.616	1.135.450	2.333.066	1.206.518	1.144.952	2.351.470
Sulawesi Selatan	3.594.136	3.704.050	7.298.186	3.617.498	3.725.992	7.343.490
Sulawesi Tenggara	1.037.501	1.011.807	2.049.308	1.047.726	1.021.658	2.069.384
Gorontalo	472.565	467.872	940.437	475.468	470.831	946.299
Sulawesi Barat	557.101	542.500	1.099.601	562.250	547.513	1.109.763
Maluku	738.829	727.399	1.466.228	743.846	732.583	1.476.429
Maluku Utara	518.759	485.954	1.004.713	524.238	489.988	1.014.226
Papua Barat	228.805	202.471	431.276	230.224	204.115	434.339
Papua Barat Daya	247.937	224.910	472.847	249.237	226.648	475.885
Papua	383.694	341.603	725.297	385.519	343.553	729.072
Papua Selatan	175.982	158.588	334.570	177.054	159.664	336.718
Papua Tengah	594.636	509.335	1.103.971	597.223	512.495	1.109.718
Papua Pegunungan	625.508	536.282	1.161.790	627.501	539.266	1.166.767
Indonesia	109.014.885	107.771.112	216.785.997	109.674.669	108.493.145	218.167.814

Lanjutan Lampiran 1

Provinsi	Februari 2026		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(8)	(9)	(10)
Aceh	2.089.887	2.097.621	4.187.508
Sumatera Utara	5.854.742	5.886.617	11.741.359
Sumatera Barat	2.266.062	2.252.770	4.518.832
Riau	2.585.018	2.485.502	5.070.520
Jambi	1.444.662	1.404.304	2.848.966
Sumatera Selatan	3.411.053	3.307.259	6.718.312
Bengkulu	826.496	793.941	1.620.437
Lampung	3.689.178	3.551.847	7.241.025
Kep. Bangka Belitung	612.246	581.669	1.193.915
Kepulauan Riau	840.470	820.777	1.661.247
DKI Jakarta	4.205.715	4.244.783	8.450.498
Jawa Barat	19.899.131	19.571.640	39.470.771
Jawa Tengah	15.095.664	15.115.575	30.211.239
DI Yogyakarta	1.502.204	1.560.042	3.062.246
Jawa Timur	16.648.802	16.977.732	33.626.534
Banten	4.862.597	4.733.155	9.595.752
Bali	1.774.104	1.789.332	3.563.436
Nusa Tenggara Barat	2.123.001	2.124.559	4.247.560
Nusa Tenggara Timur	2.049.342	2.079.442	4.128.784
Kalimantan Barat	2.244.657	2.129.088	4.373.745
Kalimantan Tengah	1.123.522	1.050.617	2.174.139
Kalimantan Selatan	1.628.527	1.606.504	3.235.031
Kalimantan Timur	1.649.456	1.529.689	3.179.145
Kalimantan Utara	303.027	270.381	573.408
Sulawesi Utara	1.085.716	1.044.707	2.130.423
Sulawesi Tengah	1.214.293	1.153.006	2.367.299
Sulawesi Selatan	3.641.030	3.750.248	7.391.278
Sulawesi Tenggara	1.056.962	1.030.924	2.087.886
Gorontalo	478.735	474.261	952.996
Sulawesi Barat	566.924	552.283	1.119.207
Maluku	749.374	738.164	1.487.538
Maluku Utara	528.321	493.811	1.022.132
Papua Barat	232.359	206.319	438.678
Papua Barat Daya	250.878	228.431	479.309
Papua	390.199	348.680	738.879
Papua Selatan	179.766	162.810	342.576
Papua Tengah	600.791	516.362	1.117.153
Papua Pegunungan	628.407	540.458	1.168.865
Indonesia	110.333.318	109.205.310	219.538.628

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

**Lampiran 2 Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut
Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal (orang),
Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026**

Karakteristik	2025		2026
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
15 Tahun ke Atas	216.785.997	218.167.814	219.538.628
Laki-Laki	109.014.885	109.674.669	110.333.318
Perempuan	107.771.112	108.493.145	109.205.310
Perkotaan	132.228.778	135.617.318	139.208.268
Perdesaan	84.557.219	82.550.496	80.330.360
15–64 Tahun	195.571.859	196.487.524	197.202.500
Laki-Laki	99.018.308	99.474.683	99.832.954
Perempuan	96.553.551	97.012.841	97.369.546
Perkotaan	119.485.314	122.280.302	125.192.366
Perdesaan	76.086.545	74.207.222	72.010.134
15–24 Tahun	44.294.146	44.259.960	44.199.765
Laki-Laki	22.810.238	22.798.944	22.752.417
Perempuan	21.483.908	21.461.016	21.447.348
Perkotaan	26.673.673	27.159.184	27.698.239
Perdesaan	17.620.473	17.100.776	16.501.526
25+ Tahun	172.491.851	173.907.854	175.338.863
Laki-Laki	86.204.647	86.875.725	87.580.901
Perempuan	86.287.204	87.032.129	87.757.962
Perkotaan	105.555.105	108.458.134	111.510.029
Perdesaan	66.936.746	65.449.720	63.828.834
25–54 Tahun	124.025.331	124.479.666	124.925.490
Laki-Laki	62.746.008	62.979.522	63.235.131
Perempuan	61.279.323	61.500.144	61.690.359
Perkotaan	76.059.084	77.758.128	79.529.691
Perdesaan	47.966.247	46.721.538	45.395.799
25–34 Tahun	44.695.014	44.692.203	44.713.413
Laki-Laki	22.842.797	22.842.841	22.868.469
Perempuan	21.852.217	21.849.362	21.844.944
Perkotaan	27.113.548	27.621.580	28.151.554
Perdesaan	17.581.466	17.070.623	16.561.859
35–54 Tahun	79.330.317	79.787.463	80.212.077
Laki-Laki	39.903.211	40.136.681	40.366.662
Perempuan	39.427.106	39.650.782	39.845.415
Perkotaan	48.945.536	50.136.548	51.378.137
Perdesaan	30.384.781	29.650.915	28.833.940
55–64 Tahun	27.252.382	27.747.898	28.077.245
Laki-Laki	13.462.062	13.696.217	13.845.406
Perempuan	13.790.320	14.051.681	14.231.839
Perkotaan	16.752.557	17.362.990	17.964.436
Perdesaan	10.499.825	10.384.908	10.112.809
65 Tahun ke Atas	21.214.138	21.680.290	22.336.128
Laki-Laki	9.996.577	10.199.986	10.500.364
Perempuan	11.217.561	11.480.304	11.835.764
Perkotaan	12.743.464	13.337.016	14.015.902
Perdesaan	8.470.674	8.343.274	8.320.226

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

**Lampiran 3 Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk
Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (orang),
Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026**

Provinsi	Februari 2025			Agustus 2025		
	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	1.671.375	1.033.246	2.704.621	1.673.470	1.041.048	2.714.518
Sumatera Utara	4.828.423	3.279.915	8.108.338	4.930.807	3.493.718	8.424.525
Sumatera Barat	1.831.132	1.326.780	3.157.912	1.870.762	1.327.454	3.198.216
Riau	2.155.769	1.069.040	3.224.809	2.174.017	1.176.120	3.350.137
Jambi	1.217.640	666.695	1.884.335	1.228.576	705.635	1.934.211
Sumatera Selatan	2.855.930	1.818.129	4.674.059	2.875.677	1.789.258	4.664.935
Bengkulu	688.492	453.546	1.142.038	696.363	458.335	1.154.698
Lampung	3.185.369	1.900.496	5.085.865	3.167.483	1.899.067	5.066.550
Kep. Bangka Belitung	519.354	276.852	796.206	522.081	300.230	822.311
Kepulauan Riau	680.620	411.134	1.091.754	700.239	424.295	1.124.534
DKI Jakarta	3.284.395	2.191.601	5.475.996	3.345.953	2.112.846	5.458.799
Jawa Barat	16.695.307	10.106.490	26.801.797	16.704.553	9.581.921	26.286.474
Jawa Tengah	12.695.340	9.175.870	21.871.210	12.814.060	9.522.138	22.336.198
DI Yogyakarta	1.235.455	1.004.300	2.239.755	1.255.297	1.023.517	2.278.814
Jawa Timur	14.187.375	10.571.820	24.759.195	14.237.001	10.524.733	24.761.734
Banten	4.027.823	2.186.136	6.213.959	3.963.911	2.204.371	6.168.282
Bali	1.470.599	1.266.556	2.737.155	1.481.466	1.261.254	2.742.720
Nusa Tenggara Barat	1.798.298	1.392.444	3.190.742	1.820.314	1.384.347	3.204.661
Nusa Tenggara Timur	1.639.454	1.436.178	3.075.632	1.676.025	1.415.493	3.091.518
Kalimantan Barat	1.837.840	1.076.911	2.914.751	1.901.767	1.176.918	3.078.685
Kalimantan Tengah	952.895	545.293	1.498.188	951.687	524.608	1.476.295
Kalimantan Selatan	1.363.115	880.331	2.243.446	1.366.533	880.015	2.246.548
Kalimantan Timur	1.374.764	748.392	2.123.156	1.346.308	731.105	2.077.413
Kalimantan Utara	244.296	146.449	390.745	255.651	140.152	395.803
Sulawesi Utara	884.694	493.356	1.378.050	899.788	524.913	1.424.701
Sulawesi Tengah	1.025.783	619.334	1.645.117	1.037.900	664.651	1.702.551
Sulawesi Selatan	2.937.871	1.878.514	4.816.385	2.995.112	1.972.915	4.968.027
Sulawesi Tenggara	863.129	566.682	1.429.811	875.441	607.756	1.483.197
Gorontalo	390.634	244.353	634.987	405.555	250.126	655.681
Sulawesi Barat	477.694	311.940	789.634	491.784	332.252	824.036
Maluku	569.443	421.191	990.634	576.102	408.139	984.241
Maluku Utara	432.014	261.129	693.143	439.576	266.002	705.578
Papua Barat	181.336	126.790	308.126	184.240	117.838	302.078
Papua Barat Daya	205.026	117.191	322.217	200.259	123.812	324.071
Papua	312.303	198.131	510.434	292.872	173.619	466.491
Papua Selatan	141.001	86.995	227.996	138.520	88.322	226.842
Papua Tengah	511.384	360.396	871.780	481.264	338.696	819.960
Papua Pegunungan	569.137	456.372	1.025.509	582.769	474.969	1.057.738
Indonesia	91.942.509	61.106.978	153.049.487	92.561.183	61.442.588	154.003.771

Lanjutan Lampiran 3

Provinsi	Februari 2026		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1.702.301	954.409	2.656.710
Sumatera Utara	4.915.633	3.219.199	8.134.832
Sumatera Barat	1.890.330	1.352.281	3.242.611
Riau	2.183.811	1.171.604	3.355.415
Jambi	1.230.941	640.455	1.871.396
Sumatera Selatan	2.931.628	1.830.714	4.762.342
Bengkulu	698.531	438.567	1.137.098
Lampung	3.213.769	1.902.135	5.115.904
Kep. Bangka Belitung	511.061	304.892	815.953
Kepulauan Riau	716.250	392.894	1.109.144
DKI Jakarta	3.315.282	2.218.357	5.533.639
Jawa Barat	16.851.620	10.039.585	26.891.205
Jawa Tengah	12.916.370	9.409.384	22.325.754
DI Yogyakarta	1.256.380	1.025.741	2.282.121
Jawa Timur	14.410.150	10.735.236	25.145.386
Banten	4.055.874	2.182.631	6.238.505
Bali	1.419.244	1.240.055	2.659.299
Nusa Tenggara Barat	1.826.380	1.409.594	3.235.974
Nusa Tenggara Timur	1.692.016	1.484.765	3.176.781
Kalimantan Barat	1.898.969	1.147.420	3.046.389
Kalimantan Tengah	969.823	534.698	1.504.521
Kalimantan Selatan	1.374.580	859.979	2.234.559
Kalimantan Timur	1.389.718	716.588	2.106.306
Kalimantan Utara	252.250	141.295	393.545
Sulawesi Utara	878.785	464.041	1.342.826
Sulawesi Tengah	1.042.461	629.864	1.672.325
Sulawesi Selatan	3.032.027	1.963.584	4.995.611
Sulawesi Tenggara	884.058	573.167	1.457.225
Gorontalo	416.119	254.123	670.242
Sulawesi Barat	489.226	336.202	825.428
Maluku	590.605	418.505	1.009.110
Maluku Utara	433.744	264.161	697.905
Papua Barat	186.786	125.201	311.987
Papua Barat Daya	202.320	126.374	328.694
Papua	308.601	176.833	485.434
Papua Selatan	139.368	82.735	222.103
Papua Tengah	527.865	385.342	913.207
Papua Pegunungan	549.627	454.122	1.003.749
Indonesia	93.304.503	61.606.732	154.911.235

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

**Lampiran 4 Penduduk Bekerja Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin,
dan Daerah Tempat Tinggal (orang), Februari 2025, Agustus 2025, dan
Februari 2026**

Karakteristik	2025		2026
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja	145.771.180	146.542.264	147.667.630
Laki-Laki	87.361.944	88.072.304	88.748.279
Perempuan	58.409.236	58.469.960	58.919.351
Perkotaan	85.909.158	87.684.420	90.207.895
Perdesaan	59.862.022	58.857.844	57.459.735
Umur Muda (15–24 tahun) yang Bekerja	18.421.906	18.913.205	18.141.261
Laki-Laki	10.893.357	11.210.706	10.878.366
Perempuan	7.528.549	7.702.499	7.262.895
Perkotaan	10.463.942	10.944.966	10.741.860
Perdesaan	7.957.964	7.968.239	7.399.401
Umur Dewasa (25+ Tahun) yang Bekerja	127.349.274	127.629.059	129.526.369
Laki-Laki	76.468.587	76.861.598	77.869.913
Perempuan	50.880.687	50.767.461	51.656.456
Perkotaan	75.445.216	76.739.454	79.466.035
Perdesaan	51.904.058	50.889.605	50.060.334

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Lampiran 5 Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal (orang), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Karakteristik	2025		2026
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
15 Tahun ke Atas	153.049.487	154.003.771	154.911.235
Laki-Laki	91.942.509	92.561.183	93.304.503
Perempuan	61.106.978	61.442.588	61.606.732
Perkotaan	91.127.875	93.032.510	95.554.712
Perdesaan	61.921.612	60.971.261	59.356.523
15–64 Tahun	142.627.557	143.475.756	143.333.880
Laki-Laki	85.716.576	86.284.464	86.465.881
Perempuan	56.910.981	57.191.292	56.867.999
Perkotaan	85.576.236	87.435.856	89.109.460
Perdesaan	57.051.321	56.039.900	54.224.420
15–24 Tahun	21.971.834	22.756.772	21.690.568
Laki-Laki	13.026.136	13.456.558	13.035.126
Perempuan	8.945.698	9.300.214	8.655.442
Perkotaan	12.945.534	13.640.433	13.203.217
Perdesaan	9.026.300	9.116.339	8.487.351
25–54 Tahun	100.533.167	100.634.856	101.107.825
Laki-Laki	60.963.582	61.060.046	61.419.067
Perempuan	39.569.585	39.574.810	39.688.758
Perkotaan	60.914.191	62.033.617	63.614.106
Perdesaan	39.618.976	38.601.239	37.493.719
25–34 Tahun	35.123.186	35.281.859	35.377.836
Laki-Laki	22.035.792	22.022.625	22.089.834
Perempuan	13.087.394	13.259.234	13.288.002
Perkotaan	21.275.474	21.820.883	22.391.741
Perdesaan	13.847.712	13.460.976	12.986.095
35–54 Tahun	65.409.981	65.352.997	65.729.989
Laki-Laki	38.927.790	39.037.421	39.329.233
Perempuan	26.482.191	26.315.576	26.400.756
Perkotaan	39.638.717	40.212.734	41.222.365
Perdesaan	25.771.264	25.140.263	24.507.624
55–64 tahun	20.122.556	20.084.128	20.535.487
Laki-Laki	11.726.858	11.767.860	12.011.688
Perempuan	8.395.698	8.316.268	8.523.799
Perkotaan	11.716.511	11.761.806	12.292.137
Perdesaan	8.406.045	8.322.322	8.243.350
65 Tahun ke Atas	10.421.930	10.528.015	11.577.355
Laki-Laki	6.225.933	6.276.719	6.838.622
Perempuan	4.195.997	4.251.296	4.738.733
Perkotaan	5.551.639	5.596.654	6.445.252
Perdesaan	4.870.291	4.931.361	5.132.103

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

**Lampiran 6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut
Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal (persen),
Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026**

Karakteristik	2025		2026
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
15 Tahun ke Atas	70,60	70,59	70,56
Laki-Laki	84,34	84,40	84,57
Perempuan	56,70	56,63	56,41
Perkotaan	68,92	68,60	68,64
Perdesaan	73,23	73,86	73,89
15–64 Tahun	72,93	73,02	72,68
Laki-Laki	86,57	86,74	86,61
Perempuan	58,94	58,95	58,40
Perkotaan	71,62	71,50	71,18
Perdesaan	74,98	75,52	75,30
15–24 Tahun	49,60	51,42	49,07
Laki-Laki	57,11	59,02	57,29
Perempuan	41,64	43,34	40,36
Perkotaan	48,53	50,22	47,67
Perdesaan	51,23	53,31	51,43
25–54 Tahun	81,06	80,84	80,93
Laki-Laki	97,16	96,95	97,13
Perempuan	64,57	64,35	64,34
Perkotaan	80,09	79,78	79,99
Perdesaan	82,60	82,62	82,59
25–34 Tahun	78,58	78,94	79,12
Laki-Laki	96,47	96,41	96,60
Perempuan	59,89	60,68	60,83
Perkotaan	78,47	79,00	79,54
Perdesaan	78,76	78,85	78,41
35–54 Tahun	82,45	81,91	81,95
Laki-Laki	97,56	97,26	97,43
Perempuan	67,17	66,37	66,26
Perkotaan	80,99	80,21	80,23
Perdesaan	84,82	84,79	85,00
55–64 Tahun	73,84	72,38	73,14
Laki-Laki	87,11	85,92	86,76
Perempuan	60,88	59,18	59,89
Perkotaan	69,94	67,74	68,42
Perdesaan	80,06	80,14	81,51
65 Tahun ke Atas	49,13	48,56	51,83
Laki-Laki	62,28	61,54	65,13
Perempuan	37,41	37,03	40,04
Perkotaan	43,56	41,96	45,99
Perdesaan	57,50	59,11	61,68

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

**Lampiran 7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen),
Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026**

Provinsi	Februari 2025			Agustus 2025			Februari 2026		
	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	81,29	50,04	65,63	80,68	50,01	65,32	81,45	45,50	63,44
Sumatera Utara	83,78	56,57	70,13	84,85	59,80	72,29	83,96	54,69	69,28
Sumatera Barat	82,06	59,78	70,95	83,21	59,40	71,34	83,42	60,03	71,76
Riau	84,72	43,78	64,68	84,68	47,68	66,55	84,48	47,14	66,17
Jambi	85,43	48,22	67,11	85,60	50,63	68,37	85,21	45,61	65,69
Sumatera Selatan	84,85	55,79	70,56	84,82	54,46	69,88	85,94	55,35	70,89
Bengkulu	84,45	58,00	71,50	84,84	58,17	71,78	84,52	55,24	70,17
Lampung	87,38	54,28	71,16	86,40	53,85	70,44	87,11	53,55	70,65
Kep. Bangka Belitung	85,98	48,35	67,67	85,86	52,02	69,38	83,47	52,42	68,34
Kepulauan Riau	82,26	51,01	66,84	83,94	52,12	68,23	85,22	47,87	66,77
DKI Jakarta	78,48	52,33	65,40	79,66	49,94	64,75	78,83	52,26	65,48
Jawa Barat	85,07	52,45	68,91	84,41	49,27	66,99	84,69	51,30	68,13
Jawa Tengah	84,98	61,37	73,17	85,36	63,37	74,36	85,56	62,25	73,90
DI Yogyakarta	82,87	64,92	73,73	83,90	65,91	74,74	83,64	65,75	74,52
Jawa Timur	85,91	62,81	74,25	85,89	62,29	73,98	86,55	63,23	74,78
Banten	84,11	46,99	65,82	81,96	46,87	64,66	83,41	46,11	65,01
Bali	83,45	71,39	77,40	83,84	70,84	77,31	80,00	69,30	74,63
Nusa Tenggara Barat	86,41	66,63	76,50	86,55	65,69	76,11	86,03	66,35	76,18
Nusa Tenggara Timur	81,42	70,27	75,81	82,52	68,68	75,55	82,56	71,40	76,94
Kalimantan Barat	83,05	51,38	67,64	85,32	55,70	70,90	84,60	53,89	69,65
Kalimantan Tengah	85,89	52,74	69,90	85,26	50,34	68,40	86,32	50,89	69,20
Kalimantan Selatan	84,95	55,66	70,41	84,48	55,18	69,93	84,41	53,53	69,07
Kalimantan Timur	82,88	48,64	66,40	83,14	48,72	66,58	84,25	46,85	66,25
Kalimantan Utara	81,72	55,10	69,19	84,95	52,26	69,55	83,24	52,26	68,63
Sulawesi Utara	82,20	47,72	65,30	83,26	50,51	67,21	80,94	44,42	63,03
Sulawesi Tengah	85,65	54,55	70,51	86,02	58,05	72,40	85,85	54,63	70,64
Sulawesi Selatan	81,74	50,72	65,99	82,80	52,95	67,65	83,27	52,36	67,59
Sulawesi Tenggara	83,19	56,01	69,77	83,56	59,49	71,67	83,64	55,60	69,79
Gorontalo	82,66	52,23	67,52	85,30	53,12	69,29	86,92	53,58	70,33
Sulawesi Barat	85,75	57,50	71,81	87,47	60,68	74,25	86,29	60,87	73,75
Maluku	77,07	57,90	67,56	77,45	55,71	66,66	78,81	56,70	67,84
Maluku Utara	83,28	53,74	68,99	83,85	54,29	69,57	82,10	53,49	68,28
Papua Barat	79,25	62,62	71,45	80,03	57,73	69,55	80,39	60,68	71,12
Papua Barat Daya	82,69	52,11	68,14	80,35	54,63	68,10	80,64	55,32	68,58
Papua	81,39	58,00	70,38	75,97	50,54	63,98	79,09	50,71	65,70
Papua Selatan	80,12	54,86	68,15	78,24	55,32	67,37	77,53	50,82	64,83
Papua Tengah	86,00	70,76	78,97	80,58	66,09	73,89	87,86	74,63	81,74
Papua Pegunungan	90,99	85,10	88,27	92,87	88,08	90,66	87,46	84,03	85,87
Indonesia	84,34	56,70	70,60	84,40	56,63	70,59	84,57	56,41	70,56

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Lampiran 8 Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (orang), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Provinsi	Februari 2025			Agustus 2025		
	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	1.562.969	992.849	2.555.818	1.598.571	962.758	2.561.329
Sumatera Utara	4.593.651	3.105.457	7.699.108	4.681.696	3.294.577	7.976.273
Sumatera Barat	1.727.611	1.250.576	2.978.187	1.773.910	1.244.672	3.018.582
Riau	2.072.590	1.019.250	3.091.840	2.091.215	1.119.714	3.210.929
Jambi	1.157.019	642.841	1.799.860	1.178.883	672.981	1.851.864
Sumatera Selatan	2.743.786	1.748.541	4.492.327	2.773.238	1.719.336	4.492.574
Bengkulu	666.365	438.681	1.105.046	675.424	439.910	1.115.334
Lampung	3.074.940	1.804.121	4.879.061	3.049.783	1.803.594	4.853.377
Kep. Bangka Belitung	501.267	261.715	762.982	502.532	283.191	785.723
Kepulauan Riau	637.063	379.477	1.016.540	655.426	396.549	1.051.975
DKI Jakarta	3.061.989	2.075.613	5.137.602	3.138.026	1.990.438	5.128.464
Jawa Barat	15.508.191	9.486.395	24.994.586	15.549.049	8.957.803	24.506.852
Jawa Tengah	12.103.214	8.820.748	20.923.962	12.195.848	9.099.949	21.295.797
DI Yogyakarta	1.197.795	970.768	2.168.563	1.206.607	993.464	2.200.071
Jawa Timur	13.612.701	10.251.999	23.864.700	13.682.118	10.118.916	23.801.034
Banten	3.759.960	2.041.286	5.801.246	3.708.425	2.047.501	5.755.926
Bali	1.445.067	1.248.957	2.694.024	1.459.076	1.242.650	2.701.726
Nusa Tenggara Barat	1.737.778	1.350.335	3.088.113	1.760.006	1.346.723	3.106.729
Nusa Tenggara Timur	1.579.073	1.397.287	2.976.360	1.622.174	1.366.916	2.989.090
Kalimantan Barat	1.753.240	1.038.137	2.791.377	1.806.281	1.124.151	2.930.432
Kalimantan Tengah	919.829	526.310	1.446.139	916.341	501.342	1.417.683
Kalimantan Selatan	1.308.150	846.797	2.154.947	1.305.821	847.318	2.153.139
Kalimantan Timur	1.307.740	702.250	2.009.990	1.276.104	693.635	1.969.739
Kalimantan Utara	232.377	143.136	375.513	246.600	133.972	380.572
Sulawesi Utara	839.462	455.458	1.294.920	852.765	486.568	1.339.333
Sulawesi Tengah	1.001.820	593.692	1.595.512	1.010.030	642.816	1.652.846
Sulawesi Selatan	2.779.126	1.798.462	4.577.588	2.863.568	1.895.509	4.759.077
Sulawesi Tenggara	838.877	544.218	1.383.095	850.472	583.561	1.434.033
Gorontalo	379.211	235.959	615.170	392.164	241.099	633.263
Sulawesi Barat	467.431	297.182	764.613	479.997	320.436	800.433
Maluku	538.011	393.656	931.667	542.103	380.383	922.486
Maluku Utara	415.620	247.991	663.611	421.157	252.299	673.456
Papua Barat	173.760	121.401	295.161	175.147	113.176	288.323
Papua Barat Daya	191.564	109.364	300.928	188.503	113.359	301.862
Papua	289.434	185.684	475.118	273.795	160.221	434.016
Papua Selatan	134.969	81.851	216.820	132.159	85.523	217.682
Papua Tengah	490.199	350.618	840.817	463.526	326.713	790.239
Papua Pegunungan	558.095	450.174	1.008.269	573.764	466.237	1.040.001
Indonesia	87.361.944	58.409.236	145.771.180	88.072.304	58.469.960	146.542.264

Lanjutan Lampiran 8

Provinsi	Februari 2026		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1.598.694	901.783	2.500.477
Sumatera Utara	4.676.357	3.050.829	7.727.186
Sumatera Barat	1.787.425	1.276.509	3.063.934
Riau	2.100.260	1.118.040	3.218.300
Jambi	1.178.734	618.045	1.796.779
Sumatera Selatan	2.820.075	1.771.235	4.591.310
Bengkulu	676.265	424.085	1.100.350
Lampung	3.102.592	1.810.995	4.913.587
Kep. Bangka Belitung	491.544	290.568	782.112
Kepulauan Riau	668.831	364.158	1.032.989
DKI Jakarta	3.098.514	2.101.269	5.199.783
Jawa Barat	15.675.946	9.428.834	25.104.780
Jawa Tengah	12.320.788	9.058.803	21.379.591
DI Yogyakarta	1.218.832	993.751	2.212.583
Jawa Timur	13.865.009	10.387.732	24.252.741
Banten	3.799.348	2.027.922	5.827.270
Bali	1.391.498	1.225.482	2.616.980
Nusa Tenggara Barat	1.764.878	1.374.433	3.139.311
Nusa Tenggara Timur	1.631.616	1.444.796	3.076.412
Kalimantan Barat	1.809.947	1.097.271	2.907.218
Kalimantan Tengah	937.029	515.787	1.452.816
Kalimantan Selatan	1.316.516	833.192	2.149.708
Kalimantan Timur	1.311.964	683.250	1.995.214
Kalimantan Utara	240.621	137.575	378.196
Sulawesi Utara	836.728	428.900	1.265.628
Sulawesi Tengah	1.018.545	604.401	1.622.946
Sulawesi Selatan	2.863.817	1.884.675	4.748.492
Sulawesi Tenggara	857.688	552.177	1.409.865
Gorontalo	404.692	244.314	649.006
Sulawesi Barat	474.938	326.288	801.226
Maluku	558.860	391.692	950.552
Maluku Utara	414.950	251.863	666.813
Papua Barat	178.684	120.503	299.187
Papua Barat Daya	190.812	116.815	307.627
Papua	287.475	163.881	451.356
Papua Selatan	132.398	78.037	210.435
Papua Tengah	505.697	372.520	878.217
Papua Pegunungan	539.712	446.941	986.653
Indonesia	88.748.279	58.919.351	147.667.630

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

**Lampiran 9 Rasio Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
terhadap Jumlah Penduduk (*Employment to Population Ratio*-EPR)
Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), Februari 2025, Agustus
2025, dan Februari 2026**

Provinsi	Februari 2025			Agustus 2025			Februari 2026		
	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	76,01	48,09	62,02	77,07	46,25	61,63	76,50	42,99	59,71
Sumatera Utara	79,70	53,56	66,59	80,57	56,39	68,45	79,87	51,83	65,81
Sumatera Barat	77,42	56,34	66,91	78,90	55,70	67,33	78,88	56,66	67,80
Riau	81,45	41,75	62,01	81,45	45,39	63,78	81,25	44,98	63,47
Jambi	81,18	46,49	64,10	82,14	48,28	65,46	81,59	44,01	63,07
Sumatera Selatan	81,52	53,66	67,81	81,80	52,33	67,30	82,67	53,56	68,34
Bengkulu	81,74	56,10	69,19	82,29	55,83	69,33	81,82	53,42	67,90
Lampung	84,35	51,52	68,27	83,19	51,15	67,48	84,10	50,99	67,86
Kep. Bangka Belitung	82,99	45,71	64,85	82,65	49,07	66,30	80,29	49,95	65,51
Kepulauan Riau	77,00	47,08	62,24	78,57	48,71	63,83	79,58	44,37	62,18
DKI Jakarta	73,16	49,56	61,36	74,71	47,05	60,83	73,67	49,50	61,53
Jawa Barat	79,02	49,23	64,26	78,57	46,06	62,46	78,78	48,18	63,60
Jawa Tengah	81,02	59,00	70,00	81,24	60,56	70,90	81,62	59,93	70,77
DI Yogyakarta	80,34	62,75	71,38	80,65	63,97	72,15	81,14	63,70	72,25
Jawa Timur	82,43	60,91	71,57	82,54	59,89	71,11	83,28	61,18	72,12
Banten	78,51	43,88	61,45	76,68	43,53	60,34	78,13	42,85	60,73
Bali	82,01	70,40	76,18	82,58	69,79	76,16	78,43	68,49	73,44
Nusa Tenggara Barat	83,50	64,62	74,04	83,68	63,91	73,78	83,13	64,69	73,91
Nusa Tenggara Timur	78,43	68,37	73,36	79,87	66,33	73,05	79,62	69,48	74,51
Kalimantan Barat	79,22	49,53	64,78	81,03	53,20	67,49	80,63	51,54	66,47
Kalimantan Tengah	82,91	50,90	67,47	82,10	48,11	65,69	83,40	49,09	66,82
Kalimantan Selatan	81,53	53,54	67,64	80,73	53,13	67,02	80,84	51,86	66,45
Kalimantan Timur	78,84	45,64	62,87	78,80	46,22	63,13	79,54	44,67	62,76
Kalimantan Utara	77,74	53,85	66,49	81,94	49,96	66,87	79,41	50,88	65,96
Sulawesi Utara	77,99	44,05	61,36	78,90	46,82	63,18	77,07	41,05	59,41
Sulawesi Tengah	83,65	52,29	68,39	83,71	56,14	70,29	83,88	52,42	68,56
Sulawesi Selatan	77,32	48,55	62,72	79,16	50,87	64,81	78,65	50,25	64,24
Sulawesi Tenggara	80,86	53,79	67,49	81,17	57,12	69,30	81,15	53,56	67,53
Gorontalo	80,25	50,43	65,41	82,48	51,21	66,92	84,53	51,51	68,10
Sulawesi Barat	83,90	54,78	69,54	85,37	58,53	72,13	83,77	59,08	71,59
Maluku	72,82	54,12	63,54	72,88	51,92	62,48	74,58	53,06	63,90
Maluku Utara	80,12	51,03	66,05	80,34	51,49	66,40	78,54	51,00	65,24
Papua Barat	75,94	59,96	68,44	76,08	55,45	66,38	76,90	58,41	68,20
Papua Barat Daya	77,26	48,63	63,64	75,63	50,02	63,43	76,06	51,14	64,18
Papua	75,43	54,36	65,51	71,02	46,64	59,53	73,67	47,00	61,09
Papua Selatan	76,69	51,61	64,81	74,64	53,56	64,65	73,65	47,93	61,43
Papua Tengah	82,44	68,84	76,16	77,61	63,75	71,21	84,17	72,14	78,61
Papua Pegunungan	89,22	83,94	86,79	91,44	86,46	89,14	85,89	82,70	84,41
Indonesia	80,14	54,20	67,24	80,30	53,89	67,17	80,44	53,95	67,26

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

**Lampiran 10 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang
Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama (persen),
Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026**

Provinsi	Buruh/Karyawan/ Pegawai			Berusaha Dibantu Buruh Tetap			Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap		
	Februari	Agustus	Februari	Februari	Agustus	Februari	Februari	Agustus	Februari
	2025	2025	2026	2025	2025	2026	2025	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	30,73	31,64	31,44	4,96	4,45	4,41	16,08	14,38	19,18
Sumatera Utara	37,71	38,42	37,76	4,22	4,33	4,32	16,98	13,59	16,60
Sumatera Barat	31,21	31,64	31,30	4,65	4,02	4,66	18,93	17,34	16,42
Riau	41,58	41,26	40,12	5,63	6,75	6,07	10,91	8,96	10,96
Jambi	38,31	36,14	38,67	7,11	6,58	7,54	13,91	13,59	13,91
Sumatera Selatan	33,20	33,87	33,54	3,54	3,00	3,59	18,10	16,02	18,36
Bengkulu	31,64	30,27	30,91	5,57	4,56	5,25	17,73	18,02	18,48
Lampung	26,92	31,47	28,23	2,48	3,81	2,86	20,38	16,68	16,99
Kep. Bangka Belitung	41,80	43,69	43,65	5,65	5,03	6,31	11,45	8,74	10,61
Kepulauan Riau	63,94	61,87	62,03	3,60	3,89	4,35	6,02	8,12	7,30
DKI Jakarta	58,30	60,12	57,91	3,75	3,25	3,95	6,56	5,86	6,50
Jawa Barat	40,58	42,02	40,67	3,53	3,03	3,53	11,66	11,09	11,63
Jawa Tengah	36,40	37,75	35,84	3,16	3,46	3,16	16,49	14,40	16,70
DI Yogyakarta	42,21	42,52	41,22	4,91	3,51	4,80	16,42	15,68	17,36
Jawa Timur	32,54	34,67	32,05	3,54	3,60	3,51	18,98	15,48	19,49
Banten	50,54	52,37	49,03	2,83	2,51	3,16	10,51	9,57	10,53
Bali	46,09	46,03	46,97	3,48	3,50	3,67	14,16	11,12	12,29
Nusa Tenggara Barat	26,66	28,92	27,77	1,54	2,65	1,73	23,61	17,13	21,61
Nusa Tenggara Timur	24,05	30,00	23,17	1,52	1,56	1,55	25,58	20,69	26,49
Kalimantan Barat	38,09	39,73	37,60	4,47	3,87	3,89	14,87	13,92	15,52
Kalimantan Tengah	44,46	45,84	45,07	3,65	4,01	4,26	14,56	11,39	13,80
Kalimantan Selatan	36,90	42,97	38,72	4,00	3,55	4,32	16,34	12,17	14,99
Kalimantan Timur	49,16	52,84	51,30	3,92	3,95	4,15	10,94	9,72	9,70
Kalimantan Utara	47,20	47,55	47,17	4,34	4,01	4,51	10,62	12,74	13,73
Sulawesi Utara	41,11	42,21	40,82	3,01	3,23	3,64	12,39	11,37	13,34
Sulawesi Tengah	29,45	31,81	30,23	3,90	3,62	4,13	21,53	18,89	20,50
Sulawesi Selatan	33,72	36,12	33,13	3,65	3,42	3,74	19,34	16,61	19,16
Sulawesi Tenggara	33,76	36,19	34,77	3,28	2,68	3,17	18,63	16,75	18,95
Gorontalo	35,14	36,35	36,86	1,91	2,51	2,71	17,86	15,86	16,20
Sulawesi Barat	24,06	26,55	24,69	4,11	2,81	3,54	23,92	20,60	24,02
Maluku	29,67	32,62	31,89	1,92	1,32	2,59	17,13	15,73	19,52
Maluku Utara	36,80	32,92	33,27	2,12	2,57	2,80	19,43	17,21	17,77
Papua Barat	33,17	35,39	37,14	1,64	1,42	2,51	19,42	17,00	21,26
Papua Barat Daya	39,44	42,89	40,85	1,40	1,45	2,21	17,68	15,66	20,09
Papua	36,48	45,08	41,61	1,81	2,04	1,97	17,37	12,55	15,95
Papua Selatan	29,75	32,45	36,77	1,45	1,67	1,79	19,87	19,02	20,63
Papua Tengah	10,78	14,53	13,41	0,71	0,74	0,44	28,82	23,13	30,25
Papua Pegunungan	5,00	4,10	4,21	0,29	0,60	0,41	34,92	31,25	30,67
Indonesia	37,09	38,74	36,99	3,52	3,46	3,60	16,05	13,86	15,97

Lanjutan Lampiran 10

Provinsi	Berusaha Sendiri			Pekerja Bebas			Pekerja Keluarga		
	Februari	Agustus	Februari	Februari	Agustus	Februari	Februari	Agustus	Februari
	2025	2025	2026	2025	2025	2026	2025	2025	2026
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Aceh	21,57	21,81	18,44	12,44	16,19	13,12	14,22	11,53	13,42
Sumatera Utara	19,60	19,51	18,76	7,92	10,10	8,28	13,58	14,05	14,27
Sumatera Barat	19,64	22,11	21,00	10,74	11,56	11,53	14,84	13,33	15,08
Riau	19,68	20,84	20,22	10,82	12,23	11,24	11,37	9,96	11,39
Jambi	18,22	20,71	17,03	10,13	10,54	9,70	12,32	12,44	13,15
Sumatera Selatan	20,04	20,66	21,71	5,51	9,18	6,09	19,61	17,27	16,71
Bengkulu	18,88	19,43	17,98	10,56	11,31	11,44	15,60	16,41	15,93
Lampung	18,44	19,41	21,99	12,01	12,21	12,35	19,77	16,42	17,58
Kep. Bangka Belitung	25,02	27,88	23,45	5,56	5,35	7,11	10,52	9,31	8,88
Kepulauan Riau	16,82	16,50	16,56	4,26	1,85	4,02	5,36	7,77	5,75
DKI Jakarta	23,36	23,63	23,48	2,40	2,25	2,54	5,62	4,89	5,61
Jawa Barat	22,54	23,06	22,40	11,76	11,62	11,86	9,93	9,18	9,91
Jawa Tengah	21,25	21,63	21,18	10,51	10,21	10,21	12,20	12,55	12,91
DI Yogyakarta	18,37	20,65	18,22	5,75	5,17	5,48	12,34	12,47	12,91
Jawa Timur	20,77	20,74	20,27	9,34	11,27	9,54	14,82	14,24	15,14
Banten	14,70	17,74	16,67	12,05	8,56	12,30	9,37	9,25	8,31
Bali	16,96	21,13	18,32	7,90	7,84	8,58	11,40	10,38	10,17
Nusa Tenggara Barat	20,46	21,83	23,02	8,51	13,24	9,54	19,21	16,23	16,32
Nusa Tenggara Timur	17,87	21,76	18,31	3,59	4,35	4,28	27,38	21,64	26,20
Kalimantan Barat	19,57	20,77	19,05	8,97	8,02	9,43	14,03	13,69	14,50
Kalimantan Tengah	19,26	20,81	18,68	4,84	7,26	6,75	13,23	10,69	11,44
Kalimantan Selatan	25,94	25,56	22,62	4,35	4,68	5,58	12,47	11,07	13,78
Kalimantan Timur	21,73	19,41	18,67	3,85	5,09	4,56	10,41	8,99	11,62
Kalimantan Utara	16,80	19,02	13,82	6,76	6,44	6,72	14,28	10,24	14,06
Sulawesi Utara	24,85	24,68	21,81	9,43	10,11	11,11	9,22	8,40	9,29
Sulawesi Tengah	19,01	21,04	18,59	8,95	8,79	9,03	17,17	15,85	17,52
Sulawesi Selatan	19,54	20,94	20,06	5,88	6,86	5,86	17,87	16,05	18,05
Sulawesi Tenggara	21,73	22,05	21,28	4,68	4,96	4,58	17,93	17,37	17,26
Gorontalo	22,46	24,22	19,62	13,00	10,64	13,72	9,63	10,42	10,90
Sulawesi Barat	20,31	22,55	21,69	5,65	7,79	8,52	21,95	19,70	17,55
Maluku	26,19	30,21	23,61	4,61	3,97	4,68	20,48	16,15	17,72
Maluku Utara	22,04	26,70	26,50	3,35	4,19	4,78	16,26	16,41	14,87
Papua Barat	24,32	22,60	17,60	2,03	5,40	3,31	19,41	18,19	18,18
Papua Barat Daya	23,22	23,93	17,49	0,32	2,97	3,35	17,95	13,10	16,01
Papua	23,06	23,97	23,71	3,78	4,08	4,85	17,51	12,28	11,91
Papua Selatan	28,18	26,73	20,70	2,01	3,60	3,32	18,74	16,53	16,78
Papua Tengah	17,24	19,24	19,03	1,07	2,75	0,69	41,39	39,61	36,18
Papua Pegunungan	8,95	11,67	11,05	0,04	0,10	0,32	50,80	52,28	53,33
Indonesia	20,58	21,40	20,57	8,95	9,58	9,21	13,83	12,96	13,67

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

**Lampiran 11.a Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin (orang),
Februari 2025 dan Agustus 2025**

Lapangan Pekerjaan Utama	2025	
	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	41.609.136	41.247.117
Laki-Laki	26.398.887	26.463.807
Perempuan	15.210.249	14.783.310
B. Pertambangan dan Penggalian	1.644.392	1.728.814
Laki-Laki	1.508.828	1.612.373
Perempuan	135.564	116.441
C. Industri Pengolahan	19.602.200	20.308.685
Laki-Laki	10.987.898	11.204.721
Perempuan	8.614.302	9.103.964
D. Penyediaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin	358.781	363.987
Laki-Laki	278.304	296.194
Perempuan	80.477	67.793
E. <i>Treatment</i> Air, <i>Treatment</i> Air Limbah, <i>Treatment</i> dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi	626.518	596.565
Laki-Laki	480.454	460.447
Perempuan	146.064	136.118
F. Konstruksi	8.700.181	9.543.258
Laki-Laki	8.535.538	9.204.300
Perempuan	164.643	338.958
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	28.073.467	27.452.952
Laki-Laki	14.513.119	14.216.082
Perempuan	13.560.348	13.236.870
H. Pengangkutan dan Pergudangan	6.167.623	6.270.920
Laki-Laki	5.743.768	5.941.833
Perempuan	423.855	329.087
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	11.479.960	11.692.579
Laki-Laki	4.644.217	4.709.333
Perempuan	6.835.743	6.983.246
J. Informasi dan Komunikasi	1.248.445	1.064.357
Laki-Laki	866.187	708.193
Perempuan	382.258	356.164

Lanjutan Lampiran 11.a

Lapangan Pekerjaan Utama	2025	
	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	1.659.648	1.650.077
Laki-Laki	988.170	987.446
Perempuan	671.478	662.631
L. Real Estat	498.473	509.154
Laki-Laki	335.457	355.535
Perempuan	163.016	153.619
M, N. Aktivitas Profesional dan Perusahaan	2.532.979	2.581.616
Laki-Laki	1.926.703	1.939.799
Perempuan	606.276	641.817
O. Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib	5.323.636	5.130.470
Laki-Laki	3.768.081	3.549.034
Perempuan	1.555.555	1.581.436
P. Pendidikan	7.348.363	7.413.725
Laki-Laki	2.571.184	2.671.758
Perempuan	4.777.179	4.741.967
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	2.507.242	2.458.567
Laki-Laki	804.737	766.529
Perempuan	1.702.505	1.692.038
R, S, T, U. Aktivitas Jasa Lainnya	6.390.136	6.529.421
Laki-Laki	3.010.412	2.984.920
Perempuan	3.379.724	3.544.501
Total	145.771.180	146.542.264
Laki-Laki	87.361.944	88.072.304
Perempuan	58.409.236	58.469.960

Catatan: Kategori Lapangan Usaha pada Februari – Agustus 2025 menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025 dan Agustus 2025

**Lampiran 11.b Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin (orang),
Februari 2026**

Lapangan Pekerjaan Utama	2026
	Februari
(1)	(2)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	42.491.616
Laki-Laki	26.689.451
Perempuan	15.802.165
B. Pertambangan dan Penggalian	1.720.729
Laki-Laki	1.595.711
Perempuan	125.018
C. Industri	20.034.316
Laki-Laki	11.374.683
Perempuan	8.659.633
D. Penyediaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin	361.219
Laki-Laki	280.086
Perempuan	81.133
E. Penyediaan Air; Pengelolaan Air Limbah, Penanganan Limbah, dan Remediasi	630.034
Laki-Laki	473.384
Perempuan	156.650
F. Konstruksi	8.968.129
Laki-Laki	8.806.621
Perempuan	161.508
G. Perdagangan Besar dan Eceran	26.505.686
Laki-Laki	13.068.528
Perempuan	13.437.158
H. Transportasi dan Penyimpanan	6.196.271
Laki-Laki	5.864.869
Perempuan	331.402
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	11.661.902
Laki-Laki	4.614.559
Perempuan	7.047.343
J. K. Aktivitas Penerbitan dan Telekomunikasi	1.237.425
Laki-Laki	756.781
Perempuan	480.644
L. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	1.741.591
Laki-Laki	1.035.156
Perempuan	706.435
M. Aktivitas Real Estat	563.001
Laki-Laki	383.075
Perempuan	179.926

Lanjutan Lampiran 11.b

Lapangan Pekerjaan Utama	2026
	Februari
(1)	(2)
N, O. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis dan Aktivitas Administratif dan Penunjang Usaha	2.644.411
Laki-Laki	2.032.227
Perempuan	612.184
P. Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib	5.408.301
Laki-Laki	3.772.653
Perempuan	1.635.648
Q. Pendidikan	7.379.576
Laki-Laki	2.828.772
Perempuan	4.550.804
R. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	2.520.232
Laki-Laki	798.443
Perempuan	1.721.789
S, T, U, V. Kesenian, Aktivitas Jasa Lainnya, Aktivitas Rumah Tangga, dan Aktivitas Badan Internasional	7.603.191
Laki-Laki	4.373.280
Perempuan	3.229.911
Total	147.667.630
Laki-Laki	88.748.279
Perempuan	58.919.351

Catatan: Kategori Lapangan Usaha pada Februari 2026 menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

**Lampiran 12 Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut
Jenis Pekerjaan Utama, Jenis Kelamin, dan Daerah Tempat Tinggal
(orang), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026**

Jenis Pekerjaan Utama (1)	2025		2026
	Februari (2)	Agustus (3)	Februari (4)
0/1. Tenaga Profesional, Teknisi, dan yang Sejenis	10.709.245	10.989.243	11.229.747
Laki-Laki	4.425.482	4.621.057	5.131.439
Perempuan	6.283.763	6.368.186	6.098.308
Perkotaan	7.742.210	7.991.863	8.493.872
Perdesaan	2.967.035	2.997.380	2.735.875
2. Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	1.711.206	1.745.738	1.694.249
Laki-Laki	1.298.384	1.311.470	1.296.090
Perempuan	412.822	434.268	398.159
Perkotaan	1.294.195	1.319.455	1.326.245
Perdesaan	417.011	426.283	368.004
3. Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis	8.236.084	7.759.048	7.702.764
Laki-Laki	4.494.040	4.096.933	4.171.973
Perempuan	3.742.044	3.662.115	3.530.791
Perkotaan	6.445.636	6.096.342	6.054.570
Perdesaan	1.790.448	1.662.706	1.648.194
4. Tenaga Usaha Penjualan	30.802.132	30.227.852	31.167.255
Laki-Laki	13.632.102	13.316.453	14.020.695
Perempuan	17.170.030	16.911.399	17.146.560
Perkotaan	21.896.371	21.445.020	22.647.077
Perdesaan	8.905.761	8.782.832	8.520.178
5. Tenaga Usaha Jasa	8.221.183	9.434.860	8.715.761
Laki-Laki	3.323.890	4.060.718	3.637.128
Perempuan	4.897.293	5.374.142	5.078.633
Perkotaan	6.367.459	7.102.227	6.797.888
Perdesaan	1.853.724	2.332.633	1.917.873
6. Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	40.607.600	39.848.183	41.555.591
Laki-Laki	25.660.952	25.382.443	25.966.151
Perempuan	14.946.648	14.465.740	15.589.440
Perkotaan	9.813.658	11.414.797	11.740.438
Perdesaan	30.793.942	28.433.386	29.815.153
7/8/9. Tenaga Produksi, Operator Alat-Alat Angkutan, dan Pekerja Kasar	43.041.936	44.041.500	43.188.740
Laki-Laki	32.166.953	32.843.332	32.217.185
Perempuan	10.874.983	11.198.168	10.971.555
Perkotaan	30.365.498	30.296.506	31.135.968
Perdesaan	12.676.438	13.744.994	12.052.772
X/00. Lainnya	2.441.794	2.495.840	2.413.523
Laki-Laki	2.360.141	2.439.898	2.307.618
Perempuan	81.653	55.942	105.905
Perkotaan	1.984.131	2.018.210	2.011.837
Perdesaan	457.663	477.630	401.686

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

**Lampiran 13 Indikator Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang
Termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi,
Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026**

Provinsi	Pekerja Paruh Waktu (orang)			Tingkat Pekerja Paruh Waktu (persen)			Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu (persen)		
	Februari 2025	Agustus 2025	Februari 2026	Februari 2025	Agustus 2025	Februari 2026	Februari 2025	Agustus 2025	Februari 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	798.348	702.344	721.131	31,24	27,42	28,84	54,76	52,02	51,39
Sumatera Utara	1.862.916	1.919.059	1.957.507	24,20	24,06	25,33	55,83	54,81	54,01
Sumatera Barat	811.434	789.783	889.153	27,25	26,16	29,02	55,79	53,59	51,93
Riau	846.301	840.898	865.970	27,37	26,19	26,91	46,30	43,18	46,85
Jambi	545.070	500.657	543.239	30,28	27,04	30,23	46,88	48,18	48,87
Sumatera Selatan	1.367.302	1.310.564	1.219.439	30,44	29,17	26,56	53,67	51,19	55,32
Bengkulu	324.286	339.202	358.073	29,35	30,41	32,54	50,84	48,20	49,66
Lampung	1.521.196	1.471.348	1.545.409	31,18	30,32	31,45	52,25	51,47	53,30
Kep. Bangka Belitung	178.011	179.292	191.785	23,33	22,82	24,52	56,09	55,41	53,81
Kepulauan Riau	156.288	154.665	155.920	15,37	14,70	15,09	60,27	59,29	57,01
DKI Jakarta	760.249	684.377	665.103	14,80	13,34	12,79	68,12	71,42	62,23
Jawa Barat	5.219.860	4.796.143	5.200.261	20,88	19,57	20,71	59,99	55,12	56,74
Jawa Tengah	4.930.458	5.150.839	5.243.707	23,56	24,19	24,53	58,49	58,98	59,52
DI Yogyakarta	577.517	594.606	519.133	26,63	27,03	23,46	54,80	60,47	58,39
Jawa Timur	7.177.107	6.387.955	7.401.910	30,07	26,84	30,52	60,44	60,26	60,19
Banten	935.693	1.012.361	923.595	16,13	17,59	15,85	61,81	55,66	55,92
Bali	643.178	653.247	570.474	23,87	24,18	21,80	57,09	55,98	53,30
Nusa Tenggara Barat	786.427	827.261	1.127.561	25,47	26,63	35,92	52,93	59,20	53,48
Nusa Tenggara Timur	1.108.911	1.074.809	1.149.670	37,26	35,96	37,37	58,60	56,02	60,17
Kalimantan Barat	760.027	895.187	856.475	27,23	30,55	29,46	52,13	53,30	53,22
Kalimantan Tengah	393.807	361.600	368.409	27,23	25,51	25,36	53,21	48,08	51,14
Kalimantan Selatan	660.429	610.605	650.106	30,65	28,36	30,24	54,48	55,45	52,85
Kalimantan Timur	407.198	394.369	422.632	20,26	20,02	21,18	54,83	49,46	50,78
Kalimantan Utara	96.494	83.450	90.619	25,70	21,93	23,96	55,09	45,55	56,86
Sulawesi Utara	284.975	310.624	280.374	22,01	23,19	22,15	50,19	50,88	47,20
Sulawesi Tengah	430.993	475.628	450.858	27,01	28,78	27,78	56,44	55,66	56,55
Sulawesi Selatan	1.579.963	1.400.634	1.488.203	34,52	29,43	31,34	49,32	51,28	49,08
Sulawesi Tenggara	427.208	410.523	422.066	30,89	28,63	29,94	59,02	55,78	52,76
Gorontalo	128.751	146.276	193.511	20,93	23,10	29,82	58,16	50,32	50,33
Sulawesi Barat	275.269	279.143	282.904	36,00	34,87	35,31	48,39	50,68	46,62
Maluku	269.830	251.617	275.464	28,96	27,28	28,98	56,25	52,92	53,09
Maluku Utara	149.814	201.239	195.897	22,58	29,88	29,38	63,14	50,43	57,28
Papua Barat	73.138	93.258	65.704	24,78	32,34	21,96	54,74	49,89	52,90
Papua Barat Daya	94.081	63.937	83.671	31,26	21,18	27,20	48,11	52,95	48,47
Papua	121.502	107.987	107.988	25,57	24,88	23,93	52,53	48,16	50,09
Papua Selatan	57.820	58.103	65.133	26,67	26,69	30,95	50,59	53,43	50,83
Papua Tengah	369.566	292.098	323.760	43,95	36,96	36,87	57,18	49,98	61,85
Papua Pegunungan	487.294	470.279	474.655	48,33	45,22	48,11	50,58	49,00	48,35
Indonesia	37.618.711	36.295.967	38.347.469	25,81	24,77	25,97	56,92	55,68	55,97

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Lampiran 14 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal, dan Jumlah Jam Kerja, Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Karakteristik	2025		2026
	Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	100,00	100,00	100,00
0 Jam ¹⁾	1,40	1,42	1,24
1–34 Jam	33,81	32,68	33,23
35–48 Jam	38,93	40,43	39,46
49 Jam ke Atas	25,86	25,47	26,06
Laki-Laki	100,00	100,00	100,00
0 Jam ¹⁾	1,49	1,40	1,20
1–34 Jam	26,91	26,57	26,63
35–48 Jam	42,30	43,53	43,22
49 Jam ke Atas	29,30	28,50	28,96
Perempuan	100,00	100,00	100,00
0 Jam ¹⁾	1,28	1,45	1,30
1–34 Jam	44,13	41,89	43,19
35–48 Jam	33,89	35,75	33,81
49 Jam ke Atas	20,70	20,91	21,70
Perkotaan	100,00	100,00	100,00
0 Jam ¹⁾	1,37	1,39	1,25
1–34 Jam	27,32	26,08	26,93
35–48 Jam	43,43	45,02	43,73
49 Jam ke Atas	27,88	27,51	28,09
Perdesaan	100,00	100,00	100,00
0 Jam ¹⁾	1,44	1,46	1,23
1–34 Jam	43,13	42,52	43,13
35–48 Jam	32,47	33,59	32,76
49 Jam ke Atas	22,96	22,43	22,88

Catatan: ¹⁾ Sementara Tidak Bekerja

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

**Lampiran 15 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang
Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja (persen),
Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026**

Provinsi	0 jam ¹⁾			1–34 Jam		
	Februari 2025	Agustus 2025	Februari 2026	Februari 2025	Agustus 2025	Februari 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	1,42	1,31	1,22	43,68	41,25	39,53
Sumatera Utara	1,10	1,16	1,01	32,76	33,11	32,18
Sumatera Barat	1,30	1,68	0,98	38,49	36,86	40,07
Riau	1,56	1,57	1,20	37,52	35,17	37,68
Jambi	1,98	1,65	1,60	39,26	36,31	37,84
Sumatera Selatan	1,42	1,16	1,11	39,63	38,15	35,91
Bengkulu	1,18	1,87	1,73	38,06	40,12	42,36
Lampung	0,98	1,42	1,23	43,03	41,61	40,07
Kep. Bangka Belitung	1,53	1,69	1,18	29,26	30,20	30,17
Kepulauan Riau	1,24	1,29	1,46	19,67	19,71	18,81
DKI Jakarta	0,39	0,79	1,09	18,79	16,57	18,88
Jawa Barat	1,30	1,40	1,07	28,45	27,92	28,19
Jawa Tengah	2,04	1,68	1,28	30,30	31,19	31,08
DI Yogyakarta	0,95	1,64	1,32	32,83	32,59	28,25
Jawa Timur	1,04	1,21	1,07	37,05	33,40	37,19
Banten	0,80	1,17	1,36	22,68	24,25	21,60
Bali	1,08	1,13	0,78	26,13	26,98	23,53
Nusa Tenggara Barat	1,36	1,53	1,86	45,10	40,57	45,55
Nusa Tenggara Timur	2,10	1,69	1,40	49,94	47,39	46,66
Kalimantan Barat	1,15	1,43	1,12	37,08	38,94	38,53
Kalimantan Tengah	1,42	1,18	1,12	33,17	31,47	30,02
Kalimantan Selatan	1,79	1,37	1,31	39,23	35,75	38,98
Kalimantan Timur	1,45	1,18	1,21	25,94	25,69	26,04
Kalimantan Utara	2,57	1,63	1,58	32,13	26,64	32,33
Sulawesi Utara	2,53	1,93	2,00	31,12	30,96	29,74
Sulawesi Tengah	1,52	1,47	1,57	34,66	36,81	34,82
Sulawesi Selatan	2,55	1,76	2,37	42,56	37,36	37,51
Sulawesi Tenggara	1,89	1,83	0,94	38,93	36,57	37,69
Gorontalo	1,90	1,74	2,09	30,30	29,92	37,67
Sulawesi Barat	1,77	3,04	2,79	50,16	46,20	48,66
Maluku	1,87	3,61	2,90	39,34	38,77	38,00
Maluku Utara	3,50	2,62	1,70	29,62	40,44	37,11
Papua Barat	2,81	2,43	1,03	33,94	42,08	27,44
Papua Barat Daya	2,29	2,10	2,49	37,74	28,67	34,97
Papua	1,92	1,88	0,70	36,15	33,52	33,29
Papua Selatan	1,61	1,53	0,82	33,94	33,14	37,77
Papua Tengah	0,50	0,60	0,47	50,90	53,86	44,90
Papua Pegunungan	0,16	0,16	0,23	57,07	50,59	53,55
Indonesia	1,40	1,42	1,24	33,81	32,68	33,23

Lanjutan Lampiran 15

Provinsi	35–48 Jam			49 Jam ke Atas		
	Februari 2025	Agustus 2025	Februari 2026	Agustus 2024	Februari 2025	Februari 2026
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	33,85	35,73	35,85	21,05	21,71	23,40
Sumatera Utara	39,30	42,00	39,20	26,84	23,73	27,61
Sumatera Barat	33,26	37,18	34,69	26,95	24,28	24,26
Riau	35,09	36,89	33,08	25,83	26,37	28,04
Jambi	37,05	38,81	38,81	21,70	23,23	21,76
Sumatera Selatan	32,91	35,95	33,84	26,04	24,74	29,13
Bengkulu	38,34	35,80	33,28	22,42	22,21	22,63
Lampung	32,05	32,95	32,01	23,93	24,02	26,69
Kep. Bangka Belitung	41,01	44,67	45,34	28,20	23,44	23,32
Kepulauan Riau	50,73	48,82	46,99	28,36	30,18	32,74
DKI Jakarta	51,76	55,63	51,11	29,06	27,01	28,93
Jawa Barat	41,88	42,66	41,68	28,37	28,02	29,05
Jawa Tengah	40,10	41,06	41,01	27,56	26,07	26,62
DI Yogyakarta	39,30	41,23	41,15	26,92	24,54	29,29
Jawa Timur	37,58	38,70	37,96	24,33	26,69	23,78
Banten	51,35	48,83	50,41	25,17	25,75	26,63
Bali	47,09	46,01	50,06	25,70	25,88	25,62
Nusa Tenggara Barat	28,88	33,16	31,99	24,66	24,74	20,59
Nusa Tenggara Timur	31,10	33,62	32,99	16,86	17,30	18,94
Kalimantan Barat	40,04	38,87	39,93	21,73	20,76	20,42
Kalimantan Tengah	38,06	41,52	40,11	27,35	25,83	28,75
Kalimantan Selatan	34,45	37,81	34,86	24,53	25,07	24,85
Kalimantan Timur	37,09	41,55	38,62	35,52	31,58	34,13
Kalimantan Utara	34,77	38,86	36,30	30,53	32,87	29,80
Sulawesi Utara	41,35	45,38	43,11	25,00	21,73	25,15
Sulawesi Tengah	36,16	38,20	37,19	27,66	23,52	26,42
Sulawesi Selatan	29,94	36,27	33,22	24,95	24,61	26,90
Sulawesi Tenggara	34,02	34,77	35,06	25,17	26,83	26,30
Gorontalo	33,23	34,29	30,60	34,57	34,05	29,64
Sulawesi Barat	26,02	29,28	26,10	22,05	21,48	22,45
Maluku	32,32	34,73	33,99	26,47	22,89	25,11
Maluku Utara	36,59	30,72	36,60	30,29	26,22	24,59
Papua Barat	38,78	36,78	48,04	24,47	18,71	23,48
Papua Barat Daya	33,01	38,76	35,14	26,96	30,47	27,41
Papua	38,61	41,52	36,33	23,32	23,08	29,68
Papua Selatan	37,71	42,17	43,03	26,74	23,16	18,38
Papua Tengah	41,39	35,38	44,89	7,21	10,16	9,73
Papua Pegunungan	40,63	46,85	43,02	2,14	2,40	3,19
Indonesia	38,93	40,43	39,46	25,86	25,47	26,06

Catatan: ¹⁾ Sementara Tidak Bekerja

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Lampiran 16 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Kegiatan Formal/Informal (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Provinsi	Formal			Informal		
	Februari 2025	Agustus 2025	Februari 2026	Februari 2025	Agustus 2025	Februari 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	35,69	36,09	35,85	64,31	63,91	64,15
Sumatera Utara	41,93	42,74	42,09	58,07	57,26	57,91
Sumatera Barat	35,86	35,67	35,96	64,14	64,33	64,04
Riau	47,21	48,00	46,19	52,79	52,00	53,81
Jambi	45,43	42,73	46,21	54,57	57,27	53,79
Sumatera Selatan	36,74	36,87	37,14	63,26	63,13	62,86
Bengkulu	37,22	34,83	36,17	62,78	65,17	63,83
Lampung	29,40	35,28	31,09	70,60	64,72	68,91
Kep. Bangka Belitung	47,45	48,71	49,96	52,55	51,29	50,04
Kepulauan Riau	67,54	65,75	66,38	32,46	34,25	33,62
DKI Jakarta	62,05	63,37	61,87	37,95	36,63	38,13
Jawa Barat	44,11	45,05	44,20	55,89	54,95	55,80
Jawa Tengah	39,55	41,21	39,00	60,45	58,79	61,00
DI Yogyakarta	47,12	46,03	46,02	52,88	53,97	53,98
Jawa Timur	36,09	38,27	35,56	63,91	61,73	64,44
Banten	53,37	54,88	52,19	46,63	45,12	47,81
Bali	49,57	49,53	50,65	50,43	50,47	49,35
Nusa Tenggara Barat	28,20	31,58	29,51	71,80	68,42	70,49
Nusa Tenggara Timur	25,58	31,56	24,72	74,42	68,44	75,28
Kalimantan Barat	42,56	43,61	41,49	57,44	56,39	58,51
Kalimantan Tengah	48,11	49,85	49,33	51,89	50,15	50,67
Kalimantan Selatan	40,90	46,52	43,04	59,10	53,48	56,96
Kalimantan Timur	53,08	56,78	55,45	46,92	43,22	44,55
Kalimantan Utara	51,54	51,56	51,67	48,46	48,44	48,33
Sulawesi Utara	44,12	45,44	44,46	55,88	54,56	55,54
Sulawesi Tengah	33,35	35,43	34,36	66,65	64,57	65,64
Sulawesi Selatan	37,37	39,55	36,87	62,63	60,45	63,13
Sulawesi Tenggara	37,04	38,87	37,93	62,96	61,13	62,07
Gorontalo	37,05	38,86	39,56	62,95	61,14	60,44
Sulawesi Barat	28,17	29,37	28,23	71,83	70,63	71,77
Maluku	31,59	33,94	34,48	68,41	66,06	65,52
Maluku Utara	38,92	35,49	36,07	61,08	64,51	63,93
Papua Barat	34,82	36,81	39,65	65,18	63,19	60,35
Papua Barat Daya	40,83	44,34	43,06	59,17	55,66	56,94
Papua	38,29	47,12	43,58	61,71	52,88	56,42
Papua Selatan	31,20	34,12	38,57	68,80	65,88	61,43
Papua Tengah	11,49	15,28	13,84	88,51	84,72	86,16
Papua Pegunungan	5,29	4,70	4,63	94,71	95,30	95,37
Indonesia	40,60	42,20	40,58	59,40	57,80	59,42

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

**Lampiran 17 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi
dan Jenis Kelamin (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari
2026**

Provinsi	Februari 2025			Agustus 2025			Februari 2026		
	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	6,49	3,91	5,50	4,48	7,52	5,64	6,09	5,51	5,88
Sumatera Utara	4,86	5,32	5,05	5,05	5,70	5,32	4,87	5,23	5,01
Sumatera Barat	5,65	5,74	5,69	5,18	6,24	5,62	5,44	5,60	5,51
Riau	3,86	4,66	4,12	3,81	4,80	4,16	3,83	4,57	4,09
Jambi	4,98	3,58	4,48	4,04	4,63	4,26	4,24	3,50	3,99
Sumatera Selatan	3,93	3,83	3,89	3,56	3,91	3,69	3,81	3,25	3,59
Bengkulu	3,21	3,28	3,24	3,01	4,02	3,41	3,19	3,30	3,23
Lampung	3,47	5,07	4,07	3,72	5,03	4,21	3,46	4,79	3,95
Kep. Bangka Belitung	3,48	5,47	4,17	3,74	5,68	4,45	3,82	4,70	4,15
Kepulauan Riau	6,40	7,70	6,89	6,40	6,54	6,45	6,62	7,31	6,87
DKI Jakarta	6,77	5,29	6,18	6,21	5,79	6,05	6,54	5,28	6,03
Jawa Barat	7,11	6,14	6,74	6,92	6,51	6,77	6,98	6,08	6,64
Jawa Tengah	4,66	3,87	4,33	4,82	4,43	4,66	4,61	3,73	4,24
DI Yogyakarta	3,05	3,34	3,18	3,88	2,94	3,46	2,99	3,12	3,05
Jawa Timur	4,05	3,03	3,61	3,90	3,86	3,88	3,78	3,24	3,55
Banten	6,65	6,63	6,64	6,45	7,12	6,69	6,32	7,09	6,59
Bali	1,74	1,39	1,58	1,51	1,48	1,49	1,95	1,18	1,59
Nusa Tenggara Barat	3,37	3,02	3,22	3,31	2,72	3,06	3,37	2,49	2,99
Nusa Tenggara Timur	3,68	2,71	3,23	3,21	3,43	3,31	3,57	2,69	3,16
Kalimantan Barat	4,60	3,60	4,23	5,02	4,48	4,82	4,69	4,37	4,57
Kalimantan Tengah	3,47	3,48	3,47	3,71	4,43	3,97	3,38	3,54	3,44
Kalimantan Selatan	4,03	3,81	3,94	4,44	3,72	4,16	4,22	3,11	3,80
Kalimantan Timur	4,88	6,17	5,33	5,21	5,13	5,18	5,59	4,65	5,27
Kalimantan Utara	4,88	2,26	3,90	3,54	4,41	3,85	4,61	2,63	3,90
Sulawesi Utara	5,11	7,68	6,03	5,23	7,31	5,99	4,79	7,57	5,75
Sulawesi Tengah	2,34	4,14	3,02	2,69	3,29	2,92	2,29	4,04	2,95
Sulawesi Selatan	5,40	4,26	4,96	4,39	3,92	4,21	5,55	4,02	4,95
Sulawesi Tenggara	2,81	3,96	3,27	2,85	3,98	3,31	2,98	3,66	3,25
Gorontalo	2,92	3,44	3,12	3,30	3,61	3,42	2,75	3,86	3,17
Sulawesi Barat	2,15	4,73	3,17	2,40	3,56	2,86	2,92	2,95	2,93
Maluku	5,52	6,54	5,95	5,90	6,80	6,27	5,37	6,41	5,80
Maluku Utara	3,79	5,03	4,26	4,19	5,15	4,55	4,33	4,66	4,46
Papua Barat	4,18	4,25	4,21	4,94	3,96	4,55	4,34	3,75	4,10
Papua Barat Daya	6,57	6,68	6,61	5,87	8,44	6,85	5,69	7,56	6,41
Papua	7,32	6,28	6,92	6,51	7,72	6,96	6,85	7,32	7,02
Papua Selatan	4,28	5,91	4,90	4,59	3,17	4,04	5,00	5,68	5,25
Papua Tengah	4,14	2,71	3,55	3,69	3,54	3,62	4,20	3,33	3,83
Papua Pegunungan	1,94	1,36	1,68	1,55	1,84	1,68	1,80	1,58	1,70
Indonesia	4,98	4,41	4,76	4,85	4,84	4,85	4,88	4,36	4,68

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

**Lampiran 18 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi
dan Tingkat Pendidikan (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan
Februari 2026**

Provinsi	Pendidikan Dasar ke Bawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Februari 2025	Agustus 2025	Februari 2026	Februari 2025	Agustus 2025	Februari 2026	Februari 2025	Agustus 2025	Februari 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	2,32	3,56	1,73	8,35	7,63	8,85	6,87	5,87	8,16
Sumatera Utara	2,51	2,95	2,57	6,45	6,97	6,59	7,90	6,69	6,97
Sumatera Barat	3,01	3,48	3,29	7,02	7,18	6,85	9,71	7,86	8,77
Riau	3,00	2,16	2,56	5,64	6,49	4,61	3,58	3,66	7,49
Jambi	1,94	1,88	2,57	7,26	6,94	6,16	5,64	5,82	4,28
Sumatera Selatan	1,25	1,46	1,70	7,12	6,47	5,36	7,00	5,44	6,50
Bengkulu	1,82	1,95	2,34	4,48	4,70	4,66	4,70	4,88	2,97
Lampung	2,93	2,33	2,88	6,53	7,06	5,96	3,60	5,54	4,40
Kep. Bangka Belitung	3,05	2,85	3,00	5,31	5,47	5,68	5,87	7,60	4,33
Kepulauan Riau	5,76	3,17	3,82	7,85	8,95	8,67	6,33	4,69	7,93
DKI Jakarta	3,11	4,03	4,53	8,92	6,97	7,83	4,26	6,06	3,75
Jawa Barat	3,78	3,91	4,57	10,73	11,31	9,65	8,69	5,19	6,60
Jawa Tengah	3,68	2,85	3,30	5,54	7,98	5,90	4,83	5,01	5,62
DI Yogyakarta	2,80	2,06	2,54	3,61	4,06	2,73	3,13	5,26	4,84
Jawa Timur	2,50	2,51	2,09	4,98	6,21	5,74	5,58	3,97	5,30
Banten	5,10	4,50	4,15	9,19	9,49	10,72	4,72	5,49	4,50
Bali	0,61	0,75	0,33	1,95	1,82	2,19	2,91	2,47	2,71
Nusa Tenggara Barat	2,46	2,15	1,80	4,09	4,24	4,94	4,11	3,91	3,16
Nusa Tenggara Timur	1,10	1,20	1,50	5,96	5,29	4,54	6,22	5,92	6,45
Kalimantan Barat	3,43	2,90	3,97	5,14	7,97	5,51	5,93	5,35	4,95
Kalimantan Tengah	2,01	2,80	2,25	5,72	5,49	4,79	3,67	4,48	4,31
Kalimantan Selatan	3,55	2,91	2,89	5,62	6,24	5,31	1,72	3,91	3,91
Kalimantan Timur	4,42	2,88	1,77	6,84	6,88	7,26	3,22	5,43	6,76
Kalimantan Utara	2,06	2,31	2,15	5,28	5,19	5,73	5,40	4,95	4,86
Sulawesi Utara	2,36	2,25	2,14	8,44	9,00	8,26	9,75	7,73	9,08
Sulawesi Tengah	1,47	1,39	1,32	5,30	4,84	4,07	3,29	3,61	5,96
Sulawesi Selatan	2,74	1,44	2,43	7,37	6,92	6,67	6,54	6,33	8,74
Sulawesi Tenggara	1,18	1,77	1,65	3,87	4,47	4,16	7,03	4,54	5,20
Gorontalo	1,59	1,28	1,73	5,29	6,63	5,14	4,96	4,87	4,79
Sulawesi Barat	2,81	1,46	2,58	3,27	4,79	2,99	4,21	4,16	4,05
Maluku	2,97	3,20	2,97	6,22	8,31	7,42	12,62	7,61	9,02
Maluku Utara	2,16	2,42	1,93	7,00	7,15	6,29	3,22	4,12	7,16
Papua Barat	1,20	2,95	1,43	9,28	7,00	6,40	2,94	3,45	7,60
Papua Barat Daya	1,09	3,75	2,74	10,91	9,50	9,03	8,57	6,04	8,97
Papua	4,36	4,26	2,46	9,88	9,31	9,85	5,97	5,92	7,17
Papua Selatan	3,82	3,02	5,45	7,01	5,14	4,91	5,81	5,67	5,12
Papua Tengah	1,89	2,99	2,02	10,12	6,46	7,75	8,90	2,74	8,44
Papua Pegunungan	1,75	1,67	1,49	1,37	1,64	2,54	0,93	1,99	3,33
Indonesia	3,00	2,81	2,95	6,99	7,58	6,82	5,97	5,21	5,89

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

**Lampiran 19 Persentase Pengangguran Menurut Provinsi
dan Tingkat Pendidikan (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan
Februari 2026**

Provinsi	Pendidikan Dasar ke Bawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Februari 2025	Agustus 2025	Februari 2026	Februari 2025	Agustus 2025	Februari 2026	Februari 2025	Agustus 2025	Februari 2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	18,03	25,83	11,74	58,73	55,13	63,64	23,24	19,04	24,61
Sumatera Utara	20,45	22,17	20,85	56,40	60,24	59,26	23,15	17,59	19,90
Sumatera Barat	24,23	28,18	28,20	43,53	47,15	43,60	32,25	24,67	28,20
Riau	32,90	22,95	29,20	53,39	63,85	43,38	13,71	13,20	27,42
Jambi	20,46	22,05	33,29	58,86	59,10	48,69	20,68	18,85	18,02
Sumatera Selatan	17,65	20,95	24,79	60,87	62,00	52,28	21,48	17,05	22,93
Bengkulu	27,13	27,53	36,18	45,25	46,17	48,96	27,62	26,30	14,86
Lampung	43,73	31,56	44,27	48,06	55,18	45,78	8,21	13,26	9,95
Kep. Bangka Belitung	38,97	32,17	35,06	43,88	44,00	46,67	17,15	23,83	18,27
Kepulauan Riau	25,10	14,69	19,50	54,62	72,23	63,63	20,28	13,08	16,86
DKI Jakarta	15,40	15,98	19,25	70,30	60,07	66,28	14,30	23,95	14,47
Jawa Barat	30,37	30,24	35,01	55,37	61,35	51,32	14,26	8,41	13,67
Jawa Tengah	52,15	36,20	48,89	37,58	53,47	39,66	10,27	10,33	11,46
DI Yogyakarta	37,06	24,54	33,17	44,10	48,14	37,17	18,84	27,32	29,65
Jawa Timur	39,97	36,56	34,69	42,78	52,54	50,71	17,25	10,90	14,60
Banten	38,04	31,45	32,53	53,68	58,77	59,48	8,28	9,78	7,99
Bali	16,00	20,88	7,85	48,62	48,46	55,09	35,38	30,66	37,06
Nusa Tenggara Barat	41,15	38,39	32,37	40,61	44,12	51,96	18,24	17,49	15,67
Nusa Tenggara Timur	19,55	18,59	26,80	51,47	47,23	38,02	28,98	34,18	35,18
Kalimantan Barat	47,46	33,83	49,90	34,88	52,89	38,79	17,66	13,28	11,31
Kalimantan Tengah	30,91	36,10	33,31	55,46	48,08	49,97	13,63	15,82	16,72
Kalimantan Selatan	50,31	36,73	41,39	43,92	49,95	43,70	5,77	13,32	14,91
Kalimantan Timur	30,54	19,77	11,59	59,11	60,58	64,83	10,35	19,65	23,58
Kalimantan Utara	23,08	27,10	25,62	47,64	48,70	50,11	29,28	24,20	24,26
Sulawesi Utara	16,97	15,56	16,08	55,17	63,72	57,29	27,86	20,72	26,63
Sulawesi Tengah	25,63	23,85	22,84	59,81	56,60	47,39	14,55	19,55	29,77
Sulawesi Selatan	27,13	16,25	24,23	49,88	56,34	44,63	22,99	27,41	31,14
Sulawesi Tenggara	16,42	23,07	22,44	41,10	48,31	46,28	42,48	28,62	31,28
Gorontalo	29,22	20,40	30,56	47,52	56,63	45,18	23,25	22,97	24,26
Sulawesi Barat	48,63	27,86	50,98	29,88	49,24	25,69	21,49	22,90	23,33
Maluku	21,51	18,98	21,76	40,82	57,08	51,20	37,66	23,94	27,04
Maluku Utara	22,45	23,68	19,71	65,71	61,52	51,76	11,84	14,80	28,53
Papua Barat	14,48	29,14	17,48	74,91	57,48	51,74	10,61	13,38	30,78
Papua Barat Daya	6,44	18,15	17,68	68,49	63,07	54,51	25,07	18,78	27,81
Papua	23,11	19,15	10,86	56,22	61,49	68,35	20,68	19,36	20,79
Papua Selatan	47,96	41,78	59,46	37,35	37,35	24,58	14,69	20,87	15,96
Papua Tengah	42,17	63,15	36,58	48,15	33,17	42,33	9,68	3,68	21,09
Papua Pegunungan	89,06	86,16	73,67	8,92	10,99	15,22	2,02	2,85	11,11
Indonesia	33,29	29,40	32,90	50,39	56,52	50,35	16,32	14,08	16,75

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

**Lampiran 20 Persentase Setengah Pengangguran Menurut Provinsi
dan Tingkat Pendidikan (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan
Februari 2026**

Provinsi	Pendidikan Dasar ke Bawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Februari 2025	Agustus 2025	Februari 2026	Februari 2025	Agustus 2025	Februari 2026	Februari 2025	Agustus 2025	Februari 2026
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	39,63	44,48	44,04	41,38	42,90	41,40	18,99	12,62	14,56
Sumatera Utara	40,97	41,50	41,63	49,40	48,27	48,59	9,63	10,23	9,78
Sumatera Barat	50,38	48,42	52,00	37,72	39,34	33,81	11,90	12,24	14,20
Riau	50,90	48,56	55,43	39,27	41,42	36,20	9,83	10,02	8,37
Jambi	53,32	58,71	50,98	35,94	33,20	37,70	10,74	8,09	11,33
Sumatera Selatan	51,64	53,63	51,60	37,61	40,22	38,85	10,75	6,15	9,55
Bengkulu	51,51	50,20	45,85	36,24	38,75	39,62	12,25	11,05	14,53
Lampung	63,65	61,48	59,72	31,85	31,87	34,07	4,50	6,65	6,20
Kep. Bangka Belitung	51,89	54,58	54,28	36,19	37,45	37,22	11,92	7,97	8,50
Kepulauan Riau	38,85	32,74	35,06	42,53	54,00	63,51	18,62	13,26	1,43
DKI Jakarta	31,75	23,37	33,52	61,07	58,81	51,67	7,18	17,82	14,80
Jawa Barat	62,71	61,39	62,89	32,21	31,63	29,44	5,08	6,98	7,66
Jawa Tengah	69,94	70,88	68,65	23,32	24,06	24,06	6,74	5,06	7,29
DI Yogyakarta	50,69	41,85	36,95	35,58	42,96	40,16	13,73	15,19	22,90
Jawa Timur	61,04	64,05	61,97	31,63	27,74	31,14	7,33	8,21	6,89
Banten	65,28	60,79	74,65	33,08	33,70	19,73	1,64	5,51	5,61
Bali	52,89	43,76	35,10	37,24	41,85	39,33	9,87	14,39	25,57
Nusa Tenggara Barat	63,06	57,49	53,13	27,58	33,31	36,70	9,36	9,20	10,18
Nusa Tenggara Timur	52,79	51,52	50,45	35,10	35,36	32,65	12,11	13,12	16,90
Kalimantan Barat	67,45	57,58	61,06	26,15	34,95	32,74	6,40	7,47	6,20
Kalimantan Tengah	57,24	60,82	47,28	37,75	33,70	43,71	5,01	5,48	9,01
Kalimantan Selatan	61,01	55,26	64,99	30,31	36,05	28,11	8,68	8,69	6,90
Kalimantan Timur	48,21	44,86	55,38	36,26	44,57	35,61	15,53	10,57	9,00
Kalimantan Utara	51,62	44,81	54,24	44,94	38,12	28,29	3,44	17,07	17,47
Sulawesi Utara	51,64	48,36	50,68	39,08	41,13	39,86	9,28	10,51	9,46
Sulawesi Tengah	50,26	54,55	51,54	41,28	37,63	40,32	8,46	7,82	8,13
Sulawesi Selatan	49,81	46,00	43,44	36,55	39,79	43,20	13,64	14,21	13,37
Sulawesi Tenggara	44,27	38,21	42,31	40,23	44,85	43,34	15,50	16,94	14,36
Gorontalo	57,63	55,89	71,21	32,54	35,39	23,55	9,83	8,72	5,23
Sulawesi Barat	54,56	52,90	57,63	33,59	35,68	32,84	11,85	11,42	9,52
Maluku	38,03	35,06	47,88	48,97	52,83	42,76	13,00	12,11	9,36
Maluku Utara	36,58	43,01	55,72	54,58	46,98	33,97	8,84	10,01	10,31
Papua Barat	62,10	52,22	49,56	31,02	41,69	38,74	6,88	6,09	11,70
Papua Barat Daya	35,41	41,19	47,94	53,51	42,06	41,20	11,08	16,75	10,86
Papua	40,65	38,49	40,48	44,86	53,32	53,19	14,49	8,19	6,33
Papua Selatan	64,86	77,06	57,83	26,25	20,97	37,28	8,89	1,97	4,88
Papua Tengah	75,99	86,58	77,64	21,95	11,81	16,16	2,06	1,61	6,20
Papua Pegunungan	88,73	84,65	87,50	7,81	13,81	9,76	3,46	1,54	2,74
Indonesia	57,93	57,21	57,62	33,79	34,27	33,32	8,28	8,52	9,06

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Lampiran 21 Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja Menurut Provinsi (orang), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Provinsi	Februari 2025	Agustus 2025	Februari 2026
(1)	(3)	(4)	(5)
Aceh	1.416.236	1.441.426	1.530.798
Sumatera Utara	3.452.818	3.228.835	3.606.527
Sumatera Barat	1.293.267	1.284.826	1.276.221
Riau	1.761.278	1.683.958	1.715.105
Jambi	923.641	894.789	977.570
Sumatera Selatan	1.950.469	2.010.824	1.955.970
Bengkulu	455.150	454.040	483.339
Lampung	2.061.133	2.125.987	2.125.121
Kep. Bangka Belitung	380.380	362.836	377.962
Kepulauan Riau	541.556	523.683	552.103
DKI Jakarta	2.897.460	2.971.824	2.916.859
Jawa Barat	12.092.105	12.950.911	12.579.566
Jawa Tengah	8.019.486	7.700.889	7.885.485
DI Yogyakarta	798.202	770.312	780.125
Jawa Timur	8.587.202	8.710.686	8.481.148
Banten	3.227.337	3.371.542	3.357.247
Bali	799.039	804.799	904.137
Nusa Tenggara Barat	980.121	1.005.921	1.011.586
Nusa Tenggara Timur	981.579	1.000.420	952.003
Kalimantan Barat	1.394.338	1.263.376	1.327.356
Kalimantan Tengah	645.253	681.956	669.618
Kalimantan Selatan	942.616	965.918	1.000.472
Kalimantan Timur	1.074.137	1.042.699	1.072.839
Kalimantan Utara	173.989	173.323	179.863
Sulawesi Utara	732.201	695.194	787.597
Sulawesi Tengah	687.949	648.919	694.974
Sulawesi Selatan	2.481.801	2.375.463	2.395.667
Sulawesi Tenggara	619.497	586.187	630.661
Gorontalo	305.450	290.618	282.754
Sulawesi Barat	309.967	285.727	293.779
Maluku	475.594	492.188	478.428
Maluku Utara	311.570	308.648	324.227
Papua Barat	123.150	132.261	126.691
Papua Barat Daya	150.630	151.814	150.615
Papua	214.863	262.581	253.445
Papua Selatan	106.574	109.876	120.473
Papua Tengah	232.191	289.758	203.946
Papua Pegunungan	136.281	109.029	165.116
Indonesia	63.736.510	64.164.043	64.627.393

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

**Lampiran 22 Tingkat Ketidaktifan Menurut Provinsi
dan Jenis Kelamin (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari
2026**

Provinsi	Februari 2025			Agustus 2025			Februari 2026		
	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	18,71	49,96	34,37	19,32	49,99	34,68	18,55	4,50	6,56
Sumatera Utara	16,22	43,43	29,87	15,15	40,20	27,71	16,04	45,31	30,72
Sumatera Barat	17,94	40,22	29,05	16,79	40,60	28,66	16,58	39,97	28,24
Riau	15,28	56,22	35,32	15,32	52,32	33,45	15,52	52,86	33,83
Jambi	14,57	51,78	32,89	14,40	49,37	31,63	14,79	54,39	34,31
Sumatera Selatan	15,15	44,21	29,44	15,18	45,54	30,12	14,06	44,65	29,11
Bengkulu	15,55	42,00	28,50	15,16	41,83	28,22	15,48	44,76	29,83
Lampung	12,62	45,72	28,84	13,60	46,15	29,56	12,89	46,45	29,35
Kep. Bangka Belitung	14,02	51,65	32,33	14,14	47,98	30,62	16,53	47,58	31,66
Kepulauan Riau	17,74	48,99	33,16	16,06	47,88	31,77	14,78	52,13	33,23
DKI Jakarta	21,52	47,67	34,60	20,34	50,06	35,25	21,17	47,74	34,52
Jawa Barat	14,93	47,55	31,09	15,59	50,73	33,01	15,31	48,70	31,87
Jawa Tengah	15,02	38,63	26,83	14,64	36,63	25,64	14,44	37,75	26,10
DI Yogyakarta	17,13	35,08	26,27	16,10	34,09	25,26	16,36	34,25	25,48
Jawa Timur	14,09	37,19	25,75	14,11	37,71	26,02	13,45	36,77	25,22
Banten	15,89	53,01	34,18	18,04	53,13	35,34	16,59	53,89	34,99
Bali	16,55	28,61	22,60	16,16	29,16	22,69	20,00	30,70	25,37
Nusa Tenggara Barat	13,59	33,37	23,50	13,45	34,31	23,89	13,97	33,65	23,82
Nusa Tenggara Timur	18,58	29,73	24,19	17,48	31,32	24,45	17,44	28,60	23,06
Kalimantan Barat	16,95	48,62	32,36	14,68	44,30	29,10	15,40	46,11	30,35
Kalimantan Tengah	14,11	47,26	30,10	14,74	49,66	31,60	13,68	49,11	30,80
Kalimantan Selatan	15,05	44,34	29,59	15,52	44,82	30,07	15,59	46,47	30,93
Kalimantan Timur	17,12	51,36	33,60	16,86	51,28	33,42	15,75	53,15	33,75
Kalimantan Utara	18,28	44,90	30,81	15,05	47,74	30,45	16,76	47,74	31,37
Sulawesi Utara	17,80	52,28	34,70	16,74	49,49	32,79	19,06	55,58	36,97
Sulawesi Tengah	14,35	45,45	29,49	13,98	41,95	27,60	14,15	45,37	29,36
Sulawesi Selatan	18,26	49,28	34,01	17,20	47,05	32,35	16,73	47,64	32,41
Sulawesi Tenggara	16,81	43,99	30,23	16,44	40,51	28,33	16,36	44,40	30,21
Gorontalo	17,34	47,77	32,48	14,70	46,88	30,71	13,08	46,42	29,67
Sulawesi Barat	14,25	42,50	28,19	12,53	39,32	25,75	13,71	39,13	26,25
Maluku	22,93	42,10	32,44	22,55	44,29	33,34	21,19	43,30	32,16
Maluku Utara	16,72	46,26	31,01	16,15	45,71	30,43	17,90	46,51	31,72
Papua Barat	20,75	37,38	28,55	19,97	42,27	30,45	19,61	39,32	28,88
Papua Barat Daya	17,31	47,89	31,86	19,65	45,37	31,90	19,36	44,68	31,42
Papua	18,61	42,00	29,62	24,03	49,46	36,02	20,91	49,29	34,30
Papua Selatan	19,88	45,14	31,85	21,76	44,68	32,63	22,47	49,18	35,17
Papua Tengah	14,00	29,24	21,03	19,42	33,91	26,11	12,14	25,37	18,26
Papua Pegunungan	9,01	14,90	11,73	7,13	11,92	9,34	12,54	15,97	14,13
Indonesia	15,66	43,30	29,40	15,60	43,37	29,41	15,43	43,59	29,44

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

**Lampiran 23 Persentase Angkatan Kerja Menurut Provinsi
dan Tingkat Pendidikan (persen), Februari 2025, Agustus 2025, dan
Februari 2026**

Provinsi	Pendidikan Rendah (Dasar ke Bawah)			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Februari	Agustus	Februari	Februari	Agustus	Februari	Februari	Agustus	Februari
	2025	2025	2026	2025	2025	2026	2025	2025	2026
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	42,68	40,91	39,99	38,71	40,77	42,27	18,62	18,32	17,74
Sumatera Utara	41,10	40,02	40,60	44,10	45,98	45,09	14,80	14,00	14,32
Sumatera Barat	45,81	45,49	47,24	35,29	36,87	35,05	18,90	17,64	17,71
Riau	45,16	44,17	46,59	39,04	40,85	38,45	15,80	14,98	14,96
Jambi	47,25	49,97	51,70	36,33	36,25	31,51	16,43	13,78	16,79
Sumatera Selatan	54,83	52,99	52,33	33,24	35,42	35,00	11,93	11,59	12,66
Bengkulu	48,30	48,13	49,88	32,69	33,50	33,95	19,02	18,37	16,17
Lampung	60,79	57,05	60,70	29,95	32,89	30,36	9,26	10,06	8,94
Kep. Bangka Belitung	53,33	50,28	48,40	34,48	35,77	34,09	12,19	13,95	17,51
Kepulauan Riau	30,00	29,95	35,04	47,92	52,12	50,37	22,08	18,01	14,60
DKI Jakarta	30,56	23,97	25,67	48,72	52,11	51,04	20,72	23,91	23,29
Jawa Barat	54,15	52,32	50,91	34,79	36,72	35,32	11,06	10,96	13,76
Jawa Tengah	61,40	59,19	62,88	29,40	31,21	28,49	9,21	9,60	8,63
DI Yogyakarta	42,00	41,07	39,87	38,87	40,98	41,46	19,13	17,95	18,67
Jawa Timur	57,77	56,54	58,86	31,05	32,81	31,37	11,18	10,65	9,77
Banten	49,56	46,69	51,71	38,78	41,40	36,58	11,66	11,91	11,71
Bali	41,63	41,58	38,25	39,20	39,84	39,98	19,17	18,58	21,76
Nusa Tenggara Barat	53,83	54,50	53,77	31,91	31,82	31,40	14,26	13,68	14,83
Nusa Tenggara Timur	57,10	51,29	56,32	27,85	29,58	26,44	15,05	19,13	17,24
Kalimantan Barat	58,66	56,08	57,39	28,74	31,95	32,17	12,61	11,97	10,44
Kalimantan Tengah	53,40	51,23	50,81	33,70	34,76	35,87	12,90	14,01	13,32
Kalimantan Selatan	55,95	52,53	54,29	30,83	33,31	31,25	13,22	14,16	14,46
Kalimantan Timur	36,80	35,62	34,52	46,07	45,63	47,07	17,13	18,75	18,41
Kalimantan Utara	43,71	45,12	46,42	35,16	36,08	34,11	21,13	18,80	19,47
Sulawesi Utara	43,32	41,50	43,24	39,45	42,44	39,89	17,24	16,06	16,87
Sulawesi Tengah	52,65	50,04	50,91	34,00	34,17	34,35	13,35	15,79	14,74
Sulawesi Selatan	49,01	47,52	49,30	33,57	34,26	33,08	17,42	18,22	17,63
Sulawesi Tenggara	45,52	43,29	44,31	34,74	35,82	36,13	19,73	20,89	19,56
Gorontalo	57,34	54,68	56,11	28,04	29,19	27,83	14,62	16,13	16,06
Sulawesi Barat	54,86	54,83	57,96	28,97	29,42	25,15	16,17	15,75	16,89
Maluku	43,17	37,15	42,57	39,07	43,12	40,04	17,76	19,73	17,39
Maluku Utara	44,35	44,50	45,55	39,97	39,14	36,69	15,68	16,36	17,76
Papua Barat	50,87	44,98	50,21	33,96	37,38	33,16	15,17	17,64	16,63
Papua Barat Daya	39,19	33,20	41,42	41,49	45,50	38,70	19,32	21,30	19,88
Papua	36,69	31,26	30,94	39,37	45,96	48,72	23,95	22,78	20,35
Papua Selatan	61,47	55,78	57,31	26,13	29,36	26,31	12,40	14,86	16,38
Papua Tengah	79,24	76,53	69,50	16,90	18,61	20,92	3,86	4,86	9,58
Papua Pegunungan	85,38	86,37	84,10	10,98	11,23	10,21	3,65	2,40	5,69
Indonesia	52,72	50,77	52,18	34,28	36,12	34,52	13,00	13,11	13,30

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

**Lampiran 24 Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai
Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (rupiah), Februari 2025, Agustus 2025,
dan Februari 2026**

Provinsi	Februari 2025			Agustus 2025			Februari 2026		
	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	3.305.886	2.255.295	2.884.151	3.112.620	2.433.968	2.837.520	2.881.730	2.439.394	2.708.851
Sumatera Utara	2.914.514	2.185.999	2.647.529	3.076.927	2.344.533	2.815.066	3.102.439	2.298.756	2.834.664
Sumatera Barat	3.039.808	2.561.524	2.831.404	3.079.380	2.678.446	2.911.450	3.070.650	2.702.523	2.925.552
Riau	3.288.075	2.625.959	3.083.274	3.423.937	2.598.906	3.144.261	3.456.633	2.652.503	3.204.627
Jambi	2.997.143	2.396.489	2.789.581	3.287.658	2.382.430	2.975.646	3.326.132	2.755.856	3.154.942
Sumatera Selatan	3.016.102	2.152.380	2.727.684	3.272.078	2.513.026	3.015.055	3.234.276	2.433.123	2.974.233
Bengkulu	2.876.880	2.162.773	2.566.215	3.133.254	2.657.569	2.935.681	3.021.367	2.377.575	2.773.023
Lampung	2.502.261	1.970.413	2.320.932	2.731.463	2.129.859	2.520.619	2.707.907	2.288.108	2.571.448
Kep. Bangka Belitung	3.549.185	2.400.693	3.155.887	3.514.222	2.617.620	3.202.690	3.556.935	2.716.839	3.257.460
Kepulauan Riau	5.085.735	4.116.308	4.741.492	5.103.744	4.106.063	4.768.990	5.140.314	3.844.366	4.740.135
DKI Jakarta	4.786.751	5.032.314	4.878.942	6.053.768	5.663.006	5.903.603	5.433.004	4.892.463	5.229.472
Jawa Barat	3.480.171	2.796.490	3.258.613	4.013.211	3.263.406	3.768.080	3.937.686	3.223.842	3.712.133
Jawa Tengah	2.701.202	2.028.991	2.441.045	2.765.421	2.153.034	2.528.470	2.695.789	2.070.755	2.462.759
DI Yogyakarta	2.994.180	2.808.424	2.914.645	3.100.764	2.649.731	2.924.613	3.068.957	2.749.143	2.940.990
Jawa Timur	2.946.451	2.082.429	2.625.050	3.191.937	2.380.508	2.899.074	3.053.498	2.119.359	2.715.212
Banten	4.611.869	3.325.040	4.168.622	4.256.479	3.654.256	4.062.488	4.345.139	3.887.503	4.197.367
Bali	4.115.466	2.964.431	3.617.339	4.084.855	2.973.875	3.639.413	4.432.256	3.621.422	4.064.938
Nusa Tenggara Barat	2.676.817	1.871.905	2.377.411	2.831.927	2.119.129	2.569.181	2.789.991	2.520.031	2.678.084
Nusa Tenggara Timur	2.419.258	2.243.829	2.341.352	2.718.217	2.609.130	2.674.136	2.749.907	2.318.123	2.563.541
Kalimantan Barat	3.031.662	2.381.839	2.829.690	3.195.756	2.469.814	2.972.111	3.212.076	2.370.337	2.962.374
Kalimantan Tengah	3.514.338	2.692.310	3.265.545	3.702.880	2.876.780	3.451.676	3.907.202	2.821.190	3.542.959
Kalimantan Selatan	3.622.703	2.525.848	3.269.734	3.499.340	2.474.152	3.164.480	3.746.733	2.723.111	3.393.313
Kalimantan Timur	4.857.724	3.457.796	4.439.658	4.873.036	3.587.114	4.475.944	4.981.662	3.483.064	4.561.415
Kalimantan Utara	4.756.338	3.553.929	4.355.707	3.917.087	3.145.729	3.675.921	4.303.751	3.232.025	3.963.394
Sulawesi Utara	3.399.894	3.218.117	3.332.950	3.592.613	3.108.561	3.420.935	3.701.484	3.092.474	3.486.792
Sulawesi Tengah	3.383.832	2.619.194	3.077.492	3.313.280	2.647.038	3.056.120	3.652.939	3.063.317	3.436.857
Sulawesi Selatan	3.372.253	2.317.411	2.956.256	3.329.378	2.615.502	3.060.385	3.540.752	2.422.413	3.095.285
Sulawesi Tenggara	3.239.556	2.424.671	2.928.215	3.463.352	2.748.755	3.189.724	3.492.834	2.714.503	3.201.344
Gorontalo	2.813.230	2.110.199	2.506.904	3.115.666	2.633.079	2.911.813	3.155.565	2.387.172	2.843.777
Sulawesi Barat	2.930.493	2.114.287	2.608.578	2.935.036	2.347.160	2.698.528	3.090.547	2.306.716	2.749.811
Maluku	3.172.579	2.401.315	2.866.807	3.294.034	2.809.255	3.100.805	3.001.422	2.692.284	2.885.206
Maluku Utara	4.112.136	2.873.380	3.666.126	3.891.141	3.145.107	3.620.219	3.990.249	2.850.129	3.566.838
Papua Barat	3.664.911	3.027.424	3.459.119	3.897.644	3.501.220	3.765.973	3.771.433	3.290.677	3.629.374
Papua Barat Daya	3.894.183	2.971.364	3.644.386	4.082.049	3.368.008	3.837.947	3.752.494	3.511.431	3.682.560
Papua	4.031.020	3.891.052	3.984.589	4.565.318	4.136.804	4.426.645	4.637.176	3.729.704	4.333.585
Papua Selatan	4.266.965	2.985.829	3.865.415	4.330.586	4.128.303	4.264.963	3.822.033	3.461.394	3.707.110
Papua Tengah	5.344.993	2.743.640	4.747.826	5.294.693	3.601.666	4.808.336	5.545.253	4.005.831	5.091.978
Papua Pegunungan	4.264.277	3.757.582	4.133.474	4.104.199	3.404.784	3.941.546	4.383.130	3.880.994	4.310.201
Indonesia	3.367.566	2.612.012	3.094.818	3.590.945	2.863.168	3.331.012	3.552.432	2.797.017	3.287.675

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

**Lampiran 25 Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai
Menurut Provinsi dan Daerah Tempat Tinggal (rupiah), Februari 2025, Agustus 2025,
dan Februari 2026**

Provinsi	Februari 2025			Agustus 2025			Februari 2026		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	3.001.315	2.759.256	2.884.151	3.131.770	2.514.597	2.837.520	2.959.421	2.415.951	2.708.851
Sumatera Utara	2.788.483	2.275.424	2.647.529	2.928.690	2.511.293	2.815.066	2.895.734	2.628.117	2.834.664
Sumatera Barat	3.054.803	2.447.581	2.831.404	3.130.619	2.493.640	2.911.450	3.082.881	2.627.230	2.925.552
Riau	3.387.219	2.751.556	3.083.274	3.501.676	2.716.462	3.144.261	3.502.025	2.880.433	3.204.627
Jambi	3.225.855	2.405.590	2.789.581	3.324.124	2.659.907	2.975.646	3.456.771	2.877.616	3.154.942
Sumatera Selatan	2.929.721	2.491.833	2.727.684	3.392.755	2.548.297	3.015.055	3.355.524	2.533.068	2.974.233
Bengkulu	2.646.963	2.474.003	2.566.215	3.261.154	2.586.521	2.935.681	3.200.787	2.289.629	2.773.023
Lampung	2.546.163	2.098.497	2.320.932	2.856.780	2.167.197	2.520.619	2.928.891	2.189.037	2.571.448
Kep. Bangka Belitung	3.312.505	2.788.872	3.155.887	3.375.753	2.777.007	3.202.690	3.488.354	2.527.596	3.257.460
Kepulauan Riau	4.832.775	2.991.733	4.741.492	4.890.545	2.955.778	4.768.990	4.827.736	3.024.517	4.740.135
DKI Jakarta	4.878.942	-	4.878.942	5.903.603	-	5.903.603	5.229.472	-	5.229.472
Jawa Barat	3.370.123	2.377.165	3.258.613	3.919.211	2.637.431	3.768.080	3.825.760	2.638.627	3.712.133
Jawa Tengah	2.557.136	2.225.761	2.441.045	2.650.729	2.297.611	2.528.470	2.549.797	2.271.107	2.462.759
DI Yogyakarta	3.074.587	2.112.317	2.914.645	3.065.438	2.286.506	2.924.613	3.101.739	2.202.322	2.940.990
Jawa Timur	2.779.547	2.211.499	2.625.050	3.071.902	2.458.321	2.899.074	2.871.169	2.240.809	2.715.212
Banten	4.057.227	5.181.274	4.168.622	4.266.228	2.583.493	4.062.488	4.324.900	2.856.776	4.197.367
Bali	3.722.054	3.280.234	3.617.339	3.862.977	2.931.864	3.639.413	4.187.351	3.525.923	4.064.938
Nusa Tenggara Barat	2.474.632	2.189.094	2.377.411	2.591.180	2.523.974	2.569.181	2.820.676	2.373.804	2.678.084
Nusa Tenggara Timur	2.744.987	1.983.302	2.341.352	3.036.542	2.352.808	2.674.136	2.881.140	2.184.141	2.563.541
Kalimantan Barat	3.131.752	2.528.079	2.829.690	3.118.128	2.828.905	2.972.111	3.126.560	2.746.810	2.962.374
Kalimantan Tengah	3.430.089	3.082.600	3.265.545	3.615.201	3.270.414	3.451.676	3.700.187	3.382.202	3.542.959
Kalimantan Selatan	3.514.921	2.881.628	3.269.734	3.313.106	2.924.012	3.164.480	3.614.702	3.018.811	3.393.313
Kalimantan Timur	4.524.705	4.164.533	4.439.658	4.551.886	4.211.081	4.475.944	4.652.411	4.213.170	4.561.415
Kalimantan Utara	4.462.007	4.050.120	4.355.707	3.683.339	3.655.951	3.675.921	4.141.314	3.438.048	3.963.394
Sulawesi Utara	3.505.624	2.951.453	3.332.950	3.597.708	3.030.568	3.420.935	3.702.033	2.959.605	3.486.792
Sulawesi Tengah	3.594.576	2.542.905	3.077.492	3.316.385	2.763.255	3.056.120	3.970.732	2.785.614	3.436.857
Sulawesi Selatan	3.288.517	2.391.993	2.956.256	3.341.205	2.571.848	3.060.385	3.414.080	2.437.969	3.095.285
Sulawesi Tenggara	3.162.954	2.665.693	2.928.215	3.438.516	2.914.811	3.189.724	3.293.103	3.087.771	3.201.344
Gorontalo	2.601.439	2.325.321	2.506.904	3.125.913	2.594.559	2.911.813	3.095.306	2.416.910	2.843.777
Sulawesi Barat	2.930.119	2.424.540	2.608.578	3.167.983	2.408.602	2.698.528	3.313.093	2.421.617	2.749.811
Maluku	3.179.212	2.440.288	2.866.807	3.566.695	2.419.555	3.100.805	3.402.396	2.232.297	2.885.206
Maluku Utara	4.277.196	3.247.017	3.666.126	4.153.103	3.229.296	3.620.219	3.989.506	3.196.052	3.566.838
Papua Barat	3.558.174	3.362.759	3.459.119	3.932.240	3.615.592	3.765.973	3.784.891	3.499.864	3.629.374
Papua Barat Daya	3.926.787	3.288.848	3.644.386	3.877.749	3.771.769	3.837.947	3.704.320	3.635.174	3.682.560
Papua	4.181.614	3.215.237	3.984.589	4.645.958	3.558.138	4.426.645	4.548.253	3.399.693	4.333.585
Papua Selatan	4.072.129	3.321.631	3.865.415	4.597.088	3.747.812	4.264.963	4.092.964	2.842.258	3.707.110
Papua Tengah	4.737.779	4.770.819	4.747.826	5.333.686	3.868.321	4.808.336	5.769.409	3.291.193	5.091.978
Papua Pegunungan	4.900.630	3.457.864	4.133.474	4.924.714	3.153.308	3.941.546	4.230.538	4.555.513	4.310.201
Indonesia	3.315.199	2.506.508	3.094.818	3.616.734	2.582.957	3.331.012	3.528.262	2.566.734	3.287.675

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Agustus 2025, dan Februari 2026

Lampiran 26 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error–RSE*)

Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi, Februari 2026

Provinsi	Jumlah (orang)	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	4.187.508	81.940	1,96	4.026.880	4.348.136	1,43	1,20
Sumatera Utara	11.741.359	205.489	1,75	11.338.536	12.144.182	3,33	1,83
Sumatera Barat	4.518.832	86.831	1,92	4.348.615	4.689.049	1,49	1,22
Riau	5.070.520	122.252	2,41	4.830.868	5.310.172	2,65	1,63
Jambi	2.848.966	69.529	2,44	2.712.668	2.985.264	1,51	1,23
Sumatera Selatan	6.718.312	152.404	2,27	6.419.553	7.017.071	3,13	1,77
Bengkulu	1.620.437	31.506	1,94	1.558.676	1.682.198	0,54	0,74
Lampung	7.241.025	127.808	1,77	6.990.480	7.491.570	2,05	1,43
Kep. Bangka Belitung	1.193.915	32.474	2,72	1.130.256	1.257.574	0,78	0,88
Kepulauan Riau	1.661.247	60.034	3,61	1.543.561	1.778.933	1,92	1,38
DKI Jakarta	8.450.498	415.470	4,92	7.636.046	9.264.950	18,63	4,32
Jawa Barat	39.470.771	627.194	1,59	38.241.274	40.700.268	10,65	3,26
Jawa Tengah	30.211.239	323.580	1,07	29.576.921	30.845.557	3,52	1,88
DI Yogyakarta	3.062.246	104.657	3,42	2.857.085	3.267.407	3,18	1,78
Jawa Timur	33.626.534	409.339	1,22	32.824.101	34.428.967	5,16	2,27
Banten	9.595.752	306.177	3,19	8.995.550	10.195.954	8,96	2,99
Bali	3.563.436	144.348	4,05	3.280.469	3.846.403	5,21	2,28
Nusa Tenggara Barat	4.247.560	100.241	2,36	4.051.055	4.444.065	2,12	1,45
Nusa Tenggara Timur	4.128.784	80.644	1,95	3.970.697	4.286.871	1,41	1,19
Kalimantan Barat	4.373.745	89.891	2,06	4.197.531	4.549.959	1,65	1,29
Kalimantan Tengah	2.174.139	66.601	3,06	2.043.580	2.304.698	1,81	1,34
Kalimantan Selatan	3.235.031	64.698	2	3.108.202	3.361.860	1,15	1,07
Kalimantan Timur	3.179.145	153.158	4,82	2.878.908	3.479.382	6,56	2,56
Kalimantan Utara	573.408	30.060	5,24	514.480	632.336	1,39	1,18
Sulawesi Utara	2.130.423	54.574	2,56	2.023.441	2.237.405	1,24	1,11
Sulawesi Tengah	2.367.299	62.927	2,66	2.243.943	2.490.655	1,48	1,22
Sulawesi Selatan	7.391.278	116.370	1,57	7.163.156	7.619.400	1,66	1,29
Sulawesi Tenggara	2.087.886	40.253	1,93	2.008.978	2.166.794	0,69	0,83
Gorontalo	952.996	36.542	3,83	881.362	1.024.630	1,23	1,11
Sulawesi Barat	1.119.207	35.655	3,19	1.049.312	1.189.102	1,00	1,00
Maluku	1.487.538	44.881	3,02	1.399.556	1.575.520	1,20	1,09
Maluku Utara	1.022.132	31.349	3,07	960.677	1.083.587	0,85	0,92
Papua Barat	438.678	22.651	5,16	394.276	483.080	1,03	1,01
Papua Barat Daya	479.309	19.581	4,09	440.925	517.693	0,70	0,84
Papua	738.879	32.266	4,37	675.628	802.130	1,24	1,11
Papua Selatan	342.576	12.728	3,72	317.626	367.526	0,42	0,64
Papua Tengah	1.117.153	63.261	5,66	993.141	1.241.165	3,16	1,78
Papua Pegunungan	1.168.865	50.850	4,35	1.069.184	1.268.546	1,95	1,40
Indonesia	219.538.628	1.085.938	0,49	217.409.848	221.667.408	20,74	4,55

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026

**Lampiran 27 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error–RSE*)
Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur,
Februari 2026**

Kelompok Umur	Jumlah (orang)	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15 Tahun ke Atas	219.538.628	1.085.938	0,49	217.409.848	221.667.408	20,74	4,55
15–64 tahun	197.202.500	1.076.361	0,55	195.092.494	199.312.506	50,63	7,12
15–24 tahun	44.199.765	422.528	0,96	43.371.478	45.028.052	4,43	2,11
25 Tahun ke Atas	175.338.863	851.264	0,49	173.670.119	177.007.607	18,00	4,24
25–54 tahun	124.925.490	759.257	0,61	123.437.108	126.413.872	9,39	3,06
25–34 tahun	44.713.413	476.172	1,06	43.779.967	45.646.859	5,58	2,36
35–54 tahun	80.212.077	538.374	0,67	79.156.696	81.267.458	4,99	2,23
55–64 tahun	28.077.245	302.071	1,08	27.485.090	28.669.400	3,27	1,81
65 Tahun ke Atas	22.336.128	290.741	1,30	21.766.183	22.906.073	3,69	1,92

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026

**Lampiran 28 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error-RSE*)
Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut
Provinsi, Februari 2026**

Provinsi	Jumlah (orang)	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	2.656.710	64.819	2,44	2.529.644	2.783.776	1,41	1,19
Sumatera Utara	8.134.832	162.190	1,99	7.816.889	8.452.775	2,99	1,73
Sumatera Barat	3.242.611	70.038	2,16	3.105.315	3.379.907	1,35	1,16
Riau	3.355.415	95.316	2,84	3.168.566	3.542.264	2,42	1,56
Jambi	1.871.396	51.591	2,76	1.770.262	1.972.530	1,26	1,12
Sumatera Selatan	4.762.342	111.627	2,34	4.543.518	4.981.166	2,36	1,54
Bengkulu	1.137.098	23.288	2,05	1.091.447	1.182.749	0,42	0,65
Lampung	5.115.904	120.820	2,36	4.879.059	5.352.749	2,58	1,61
Kep. Bangka Belitung	815.953	28.506	3,49	760.072	871.834	0,88	0,94
Kepulauan Riau	1.109.144	45.016	4,06	1.020.898	1.197.390	1,61	1,27
DKI Jakarta	5.533.639	345.385	6,24	4.856.575	6.210.703	19,56	4,42
Jawa Barat	26.891.205	502.257	1,87	25.906.623	27.875.787	9,93	3,15
Jawa Tengah	22.325.754	284.774	1,28	21.767.507	22.884.001	3,71	1,93
DI Yogyakarta	2.282.121	76.759	3,36	2.131.649	2.432.593	2,29	1,51
Jawa Timur	25.145.386	352.611	1,4	24.454.158	25.836.614	5,17	2,27
Banten	6.238.505	229.157	3,67	5.789.286	6.687.724	7,67	2,77
Bali	2.659.299	114.691	4,31	2.434.469	2.884.129	4,40	2,10
Nusa Tenggara Barat	3.235.974	91.216	2,82	3.057.161	3.414.787	2,30	1,52
Nusa Tenggara Timur	3.176.781	68.799	2,17	3.041.914	3.311.648	1,33	1,15
Kalimantan Barat	3.046.389	77.084	2,53	2.895.281	3.197.497	1,74	1,32
Kalimantan Tengah	1.504.521	51.581	3,43	1.403.405	1.605.637	1,56	1,25
Kalimantan Selatan	2.234.559	57.508	2,57	2.121.826	2.347.292	1,31	1,15
Kalimantan Timur	2.106.306	106.170	5,04	1.898.179	2.314.433	4,75	2,18
Kalimantan Utara	393.545	20.295	5,16	353.761	433.329	0,92	0,96
Sulawesi Utara	1.342.826	36.571	2,72	1.271.135	1.414.517	0,88	0,94
Sulawesi Tengah	1.672.325	52.167	3,12	1.570.060	1.774.590	1,44	1,20
Sulawesi Selatan	4.995.611	95.707	1,92	4.807.995	5.183.227	1,66	1,29
Sulawesi Tenggara	1.457.225	34.409	2,36	1.389.772	1.524.678	0,72	0,85
Gorontalo	670.242	26.848	4,01	617.612	722.872	0,95	0,97
Sulawesi Barat	825.428	31.173	3,78	764.319	886.537	1,04	1,02
Maluku	1.009.110	32.658	3,24	945.089	1.073.131	0,93	0,96
Maluku Utara	697.905	25.467	3,65	647.981	747.829	0,82	0,90
Papua Barat	311.987	14.189	4,55	284.172	339.802	0,57	0,75
Papua Barat Daya	328.694	16.022	4,87	297.286	360.102	0,68	0,83
Papua	485.434	22.967	4,73	440.412	530.456	0,95	0,98
Papua Selatan	222.103	9.721	4,38	203.046	241.160	0,37	0,61
Papua Tengah	913.207	57.589	6,31	800.315	1.026.099	3,20	1,79
Papua Pegunungan	1.003.749	48.275	4,81	909.115	1.098.383	2,04	1,43
Indonesia	154.911.235	887.510	0,57	153.171.437	156.651.033	15,15	3,89

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026

**Lampiran 29 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error–RSE*)
Penduduk yang Bekerja Menurut Kelompok Umur, Februari 2026**

Kelompok Umur	Jumlah (orang)	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15 Tahun ke Atas	147.667.630	852.899	0,58	145.995.679	149.339.581	647,92	25,45
Umur Muda (15–24 tahun)	18.141.261	254.266	1,40	17.642.820	18.639.702	3,59	1,89
Umur Dewasa (25 tahun ke Atas)	129.526.369	755.274	0,58	128.045.795	131.006.943	31,66	5,63

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026

**Lampiran 30 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error–RSE*)
Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja
Menurut Kelompok Umur, Februari 2026**

Kelompok Umur	Jumlah (orang)	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15 Tahun ke Atas	154.911.235	887.314	0,57	153.171.821	156.650.649	694,49	26,35
15–64 tahun	143.333.880	870.571	0,61	141.627.287	145.040.473	61,91	7,87
15–24 tahun	21.690.568	279.195	1,29	21.143.259	22.237.877	3,66	1,91
25–54 tahun	101.107.825	693.489	0,69	99.748.369	102.467.281	11,98	3,46
25–34 tahun	35.377.836	417.376	1,18	34.559.648	36.196.024	5,58	2,36
35–54 tahun	65.729.989	488.022	0,74	64.773.312	66.686.666	5,51	2,35
55–64 tahun	20.535.487	241.387	1,18	20.062.292	21.008.682	2,86	1,69
65 Tahun ke Atas	11.577.355	201.044	1,74	11.183.246	11.971.464	3,30	1,82

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026

**Lampiran 31 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error–RSE*)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur (persen),
Februari 2026**

Kelompok Umur	TPAK	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15 Tahun ke Atas	70,56	0,20	0,28	70,17	70,95	3,68	1,92
15–64 tahun	72,68	0,20	0,27	72,3	73,07	3,40	1,84
15–24 tahun	49,07	0,43	0,88	48,23	49,92	2,88	1,70
25–54 tahun	80,93	0,21	0,26	80,52	81,35	3,22	1,79
25–34 tahun	79,12	0,34	0,43	78,46	79,78	2,32	1,52
35–54 tahun	81,95	0,24	0,30	81,47	82,42	3,05	1,75
55–64 tahun	73,14	0,47	0,64	72,22	74,06	2,91	1,70
65 Tahun ke Atas	51,83	0,65	1,25	50,56	53,11	3,02	1,74

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026

**Lampiran 32 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error–RSE*)
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi (persen), Februari
2026**

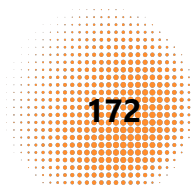
Provinsi	TPAK	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	63,44	0,88	1,39	61,71	65,18	1,24	1,11
Sumatera Utara	69,28	0,75	1,08	67,82	70,75	2,71	1,64
Sumatera Barat	71,76	0,84	1,17	70,12	73,40	1,37	1,17
Riau	66,17	0,93	1,40	64,36	67,99	1,70	1,30
Jambi	65,69	0,90	1,37	63,92	67,45	0,90	0,95
Sumatera Selatan	70,89	0,85	1,20	69,22	72,55	2,06	1,43
Bengkulu	70,17	0,99	1,41	68,23	72,12	0,67	0,82
Lampung	70,65	0,90	1,28	68,88	72,42	2,49	1,58
Kep. Bangka Belitung	68,34	1,16	1,69	66,07	70,61	0,65	0,81
Kepulauan Riau	66,77	1,31	1,96	64,20	69,33	1,12	1,06
DKI Jakarta	65,48	1,53	2,33	62,49	68,48	7,64	2,76
Jawa Barat	68,13	0,66	0,97	66,83	69,43	7,02	2,65
Jawa Tengah	73,90	0,48	0,65	72,96	74,84	3,15	1,78
DI Yogyakarta	74,52	1,35	1,81	71,88	77,17	2,58	1,61
Jawa Timur	74,78	0,55	0,73	73,71	75,85	4,66	2,16
Banten	65,01	1,22	1,87	62,63	67,40	5,47	2,34
Bali	74,63	1,15	1,54	72,37	76,88	2,18	1,48
Nusa Tenggara Barat	76,18	1,03	1,36	74,16	78,21	2,19	1,48
Nusa Tenggara Timur	76,94	0,66	0,86	75,64	78,24	0,90	0,95
Kalimantan Barat	69,65	0,88	1,27	67,92	71,38	1,42	1,19
Kalimantan Tengah	69,20	0,87	1,26	67,50	70,90	0,68	0,82
Kalimantan Selatan	69,07	0,83	1,20	67,44	70,70	0,92	0,96
Kalimantan Timur	66,25	1,22	1,85	63,85	68,65	1,87	1,37
Kalimantan Utara	68,63	1,68	2,45	65,34	71,93	0,66	0,81
Sulawesi Utara	63,03	0,92	1,45	61,24	64,82	0,67	0,82
Sulawesi Tengah	70,64	1,03	1,45	68,63	72,65	1,05	1,03
Sulawesi Selatan	67,59	0,71	1,05	66,20	68,98	1,48	1,22
Sulawesi Tenggara	69,79	0,91	1,31	68,01	71,58	0,72	0,85
Gorontalo	70,33	1,30	1,86	67,77	72,89	0,68	0,83
Sulawesi Barat	73,75	1,28	1,74	71,24	76,26	0,83	0,91
Maluku	67,84	1,22	1,80	65,45	70,23	0,89	0,94
Maluku Utara	68,28	1,72	2,53	64,90	71,66	1,23	1,11
Papua Barat	71,12	1,85	2,61	67,49	74,75	0,64	0,80
Papua Barat Daya	68,58	1,99	2,91	64,67	72,49	0,78	0,88
Papua	65,70	1,87	2,84	62,04	69,36	1,00	1,00
Papua Selatan	64,83	1,79	2,77	61,32	68,35	0,42	0,65
Papua Tengah	81,74	1,58	1,93	78,65	84,83	1,63	1,28
Papua Pegunungan	85,87	2,22	2,58	81,53	90,22	4,15	2,04
Indonesia	70,56	0,20	0,28	70,17	70,95	3,68	1,92

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026

**Lampiran 33 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error-RSE*)
Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi,
Februari 2026**

Provinsi	Jumlah (orang)	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	2.500.477	61.291	2,45	2.380.328	2.620.626	1,35	1,16
Sumatera Utara	7.727.186	147.571	1,91	7.437.900	8.016.472	2,63	1,62
Sumatera Barat	3.063.934	68.985	2,25	2.928.702	3.199.166	1,40	1,18
Riau	3.218.300	90.027	2,80	3.041.818	3.394.782	2,27	1,51
Jambi	1.796.779	51.378	2,86	1.696.062	1.897.496	1,31	1,15
Sumatera Selatan	4.591.310	109.243	2,38	4.377.159	4.805.461	2,37	1,54
Bengkulu	1.100.350	22.366	2,03	1.056.505	1.144.195	0,40	0,64
Lampung	4.913.587	119.128	2,42	4.680.059	5.147.115	2,64	1,62
Kep. Bangka Belitung	782.112	26.942	3,44	729.296	834.928	0,82	0,91
Kepulauan Riau	1.032.989	40.308	3,90	953.973	1.112.005	1,40	1,18
DKI Jakarta	5.199.783	309.617	5,95	4.592.836	5.806.730	16,88	4,11
Jawa Barat	25.104.780	487.326	1,94	24.149.467	26.060.093	10,07	3,17
Jawa Tengah	21.379.591	285.868	1,34	20.819.200	21.939.982	3,95	1,99
DI Yogyakarta	2.212.583	77.263	3,49	2.061.123	2.364.043	2,42	1,56
Jawa Timur	24.252.741	343.942	1,42	23.578.507	24.926.975	5,15	2,27
Banten	5.827.270	217.516	3,73	5.400.870	6.253.670	7,47	2,73
Bali	2.616.980	113.096	4,32	2.395.276	2.838.684	4,39	2,10
Nusa Tenggara Barat	3.139.311	87.323	2,78	2.968.130	3.310.492	2,19	1,48
Nusa Tenggara Timur	3.076.412	67.278	2,19	2.944.525	3.208.299	1,33	1,15
Kalimantan Barat	2.907.218	76.514	2,63	2.757.226	3.057.210	1,81	1,35
Kalimantan Tengah	1.452.816	51.358	3,54	1.352.138	1.553.494	1,62	1,27
Kalimantan Selatan	2.149.708	56.741	2,64	2.038.479	2.260.937	1,34	1,16
Kalimantan Timur	1.995.214	100.585	5,04	1.798.036	2.192.392	4,54	2,13
Kalimantan Utara	378.196	19.674	5,20	339.628	416.764	0,91	0,95
Sulawesi Utara	1.265.628	36.898	2,92	1.193.296	1.337.960	0,96	0,98
Sulawesi Tengah	1.622.946	51.937	3,20	1.521.133	1.724.759	1,48	1,22
Sulawesi Selatan	4.748.492	93.432	1,97	4.565.336	4.931.648	1,68	1,30
Sulawesi Tenggara	1.409.865	34.231	2,43	1.342.762	1.476.968	0,74	0,86
Gorontalo	649.006	26.598	4,10	596.865	701.147	0,97	0,98
Sulawesi Barat	801.226	29.431	3,67	743.531	858.921	0,96	0,98
Maluku	950.552	32.022	3,37	887.779	1.013.325	0,96	0,98
Maluku Utara	666.813	25.760	3,86	616.315	717.311	0,88	0,94
Papua Barat	299.187	13.912	4,65	271.916	326.458	0,57	0,76
Papua Barat Daya	307.627	14.482	4,71	279.237	336.017	0,60	0,78
Papua	451.356	21.278	4,71	409.644	493.068	0,89	0,94
Papua Selatan	210.435	9.396	4,47	192.015	228.855	0,37	0,61
Papua Tengah	878.217	55.594	6,33	769.234	987.200	3,13	1,77
Papua Pegunungan	986.653	48.562	4,92	891.456	1.081.850	2,13	1,46
Indonesia	147.667.630	853.132	0,58	145.995.224	149.340.036	13,20	3,63

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026



**Lampiran 34 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error-RSE*) Rasio
Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR)
Menurut Provinsi, Februari 2026**

Provinsi	EPR	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	59,71	0,92	1,54	57,91	61,51	1,28	1,13
Sumatera Utara	65,81	0,74	1,12	64,37	67,25	2,47	1,57
Sumatera Barat	67,80	0,91	1,33	66,03	69,58	1,49	1,22
Riau	63,47	0,93	1,46	61,66	65,29	1,64	1,28
Jambi	63,07	1,00	1,58	61,11	65,02	1,07	1,03
Sumatera Selatan	68,34	0,86	1,26	66,65	70,03	2,01	1,42
Bengkulu	67,90	0,97	1,43	66,00	69,81	0,62	0,79
Lampung	67,86	0,96	1,42	65,97	69,75	2,71	1,64
Kep. Bangka Belitung	65,51	1,16	1,78	63,23	67,79	0,63	0,79
Kepulauan Riau	62,18	1,41	2,27	59,41	64,95	1,24	1,11
DKI Jakarta	61,53	1,32	2,14	58,95	64,12	5,45	2,33
Jawa Barat	63,60	0,74	1,16	62,15	65,05	8,17	2,86
Jawa Tengah	70,77	0,52	0,73	69,75	71,78	3,44	1,86
DI Yogyakarta	72,25	1,53	2,11	69,26	75,25	3,13	1,77
Jawa Timur	72,12	0,60	0,83	70,95	73,29	5,23	2,29
Banten	60,73	1,28	2,10	58,22	63,23	5,76	2,40
Bali	73,44	1,13	1,54	71,22	75,66	2,06	1,43
Nusa Tenggara Barat	73,91	1,06	1,44	71,83	75,99	2,17	1,47
Nusa Tenggara Timur	74,51	0,67	0,90	73,20	75,83	0,86	0,93
Kalimantan Barat	66,47	1,06	1,60	64,38	68,56	1,95	1,40
Kalimantan Tengah	66,82	0,90	1,35	65,05	68,59	0,70	0,84
Kalimantan Selatan	66,45	0,87	1,31	64,74	68,16	0,97	0,98
Kalimantan Timur	62,76	1,31	2,09	60,19	65,33	2,04	1,43
Kalimantan Utara	65,96	1,77	2,69	62,48	69,43	0,70	0,84
Sulawesi Utara	59,41	0,95	1,60	57,54	61,28	0,70	0,84
Sulawesi Tengah	68,56	1,07	1,56	66,46	70,65	1,10	1,05
Sulawesi Selatan	64,24	0,74	1,16	62,79	65,70	1,56	1,25
Sulawesi Tenggara	67,53	0,99	1,47	65,58	69,47	0,82	0,91
Gorontalo	68,10	1,47	2,15	65,23	70,98	0,83	0,91
Sulawesi Barat	71,59	1,22	1,71	69,19	73,98	0,72	0,85
Maluku	63,90	1,18	1,85	61,59	66,21	0,79	0,89
Maluku Utara	65,24	1,86	2,86	61,58	68,89	1,37	1,17
Papua Barat	68,20	1,78	2,60	64,72	71,68	0,56	0,75
Papua Barat Daya	64,18	2,04	3,19	60,17	68,19	0,76	0,87
Papua	61,09	1,85	3,03	57,45	64,72	0,94	0,97
Papua Selatan	61,43	2,26	3,67	57,00	65,85	0,65	0,80
Papua Tengah	78,61	1,89	2,41	74,90	82,32	2,09	1,44
Papua Pegunungan	84,41	2,29	2,71	79,92	88,90	4,08	2,02
Indonesia	67,26	0,21	0,32	66,84	67,68	4,00	2,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026

Lampiran 35 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error-RSE*)
Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan
Utama, Februari 2026

Status Pekerjaan Utama	Persentase	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	Square Root Design Effect
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Berusaha Sendiri	20,57	0,21	1,04	20,15	20,99	3,64	1,91
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap	15,97	0,19	1,19	15,60	16,34	3,49	1,87
Berusaha Dibantu Buruh Tetap	3,60	0,09	2,60	3,41	3,78	3,30	1,82
Buruh/Karyawan/Pegawai	36,99	0,30	0,82	36,39	37,58	5,13	2,27
Pekerja Bebas	9,21	0,19	2,01	8,85	9,57	5,34	2,31
Pekerja Keluarga	13,67	0,19	1,37	13,31	14,04	3,90	1,97

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026

**Lampiran 36 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error–RSE*)
Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan,
Februari 2026**

Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah (orang)	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	42.491.616	487.237	1,15	41.536.478	43.446.754	6,93	2,63
B. Pertambangan dan Penggalian	1.720.729	77.379	4,50	1.569.042	1.872.416	3,11	1,76
C. Industri	20.034.316	376.760	1,88	19.295.747	20.772.885	7,24	2,69
D. Penyediaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin	361.219	32.566	9,02	297.379	425.059	2,60	1,61
E. Penyediaan Air; Pengelolaan Air Limbah, Penanganan Limbah, dan Remediasi	630.034	59.217	9,40	513.949	746.119	4,94	2,22
F. Konstruksi	8.968.129	200.998	2,24	8.574.109	9.362.149	4,24	2,06
G. Perdagangan Besar dan Eceran	26.505.686	391.379	1,48	25.738.461	27.272.911	6,22	2,49
H. Transportasi dan Penyimpanan	6.196.271	160.498	2,59	5.881.645	6.510.897	3,83	1,96
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	11.661.902	240.241	2,06	11.190.954	12.132.850	4,75	2,18
J, K. Aktivitas Penerbitan dan Telekomunikasi	1.237.425	77.711	6,28	1.085.087	1.389.763	4,35	2,08
L. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	1.741.591	88.530	5,08	1.568.045	1.915.137	4,02	2,01
M. Aktivitas Real Estat	563.001	50.419	8,96	464.164	661.838	4,00	2,00
N, O. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis dan Aktivitas Administratif dan Penunjang Usaha	2.644.411	117.945	4,46	2.413.201	2.875.621	4,73	2,18
P. Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, serta Jaminan Sosial Wajib	5.408.301	136.067	2,52	5.141.567	5.675.035	3,14	1,77
Q. Pendidikan	7.379.576	171.755	2,33	7.042.883	7.716.269	3,72	1,93
R. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	2.520.232	92.136	3,66	2.339.616	2.700.848	3,03	1,74
S,T,U,V. Kesenian, Aktivitas Jasa Lainnya, Aktivitas Rumah Tangga, dan Aktivitas Badan Internasional	7.603.191	187.738	2,47	7.235.165	7.971.217	4,32	2,08
Total	147.667.630	853.132	0,58	145.995.224	149.340.036	13,20	3,63

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026

**Lampiran 37 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error–RSE*)
Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis
Pekerjaan, Februari 2026**

Jenis Pekerjaan Utama	Jumlah (orang)	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0/1. Tenaga Profesional, Teknisi, dan yang Sejenis	11.229.747	251.003	2,24	10.737.703	11.721.791	5,36	2,32
2. Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	1.694.249	76.541	4,52	1.544.205	1.844.293	3,09	1,76
3. Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenis	7.702.764	172.977	2,25	7.363.675	8.041.853	3,62	1,90
4. Tenaga Usaha Penjualan	31.167.255	400.495	1,28	30.382.159	31.952.351	5,76	2,40
5. Tenaga Usaha Jasa	8.715.761	231.309	2,65	8.262.323	9.169.199	5,76	2,40
6. Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, & Perikanan	41.555.591	486.329	1,17	40.602.234	42.508.948	7,00	2,64
7/8/9. Tenaga Produksi, Operator Alat-Alat Angkutan, & Pekerja Kasar	43.188.740	494.143	1,14	42.220.063	44.157.417	7,06	2,66
X/00. Lainnya	2.413.523	91.935	3,81	2.233.302	2.593.744	3,14	1,77
Total	147.667.630	853.132	0,58	145.995.224	149.340.036	13,20	3,63

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026

**Lampiran 38 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error-RSE*)
Indikator Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Pekerja Paruh
Waktu Menurut Provinsi, Februari 2026**

Provinsi	Jumlah (orang)	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	721.131	35.946	4,98	650.664	791.598	1,85	1,36
Sumatera Utara	1.957.507	64.521	3,30	1.831.023	2.083.991	2,28	1,51
Sumatera Barat	889.153	38.937	4,38	812.823	965.483	1,77	1,33
Riau	865.970	49.073	5,67	769.770	962.170	2,89	1,70
Jambi	543.239	32.396	5,96	479.732	606.746	1,99	1,41
Sumatera Selatan	1.219.439	60.024	4,92	1.101.771	1.337.107	3,10	1,76
Bengkulu	358.073	16.112	4,50	326.487	389.659	0,74	0,86
Lampung	1.545.409	72.481	4,69	1.403.321	1.687.497	3,60	1,90
Kep. Bangka Belitung	191.785	12.705	6,62	166.879	216.691	0,86	0,93
Kepulauan Riau	155.920	17.261	11,07	122.083	189.757	1,95	1,40
DKI Jakarta	665.103	63.077	9,48	541.450	788.756	6,18	2,49
Jawa Barat	5.200.261	177.248	3,41	4.852.793	5.547.729	7,10	2,66
Jawa Tengah	5.243.707	148.032	2,82	4.953.514	5.533.900	4,91	2,22
DI Yogyakarta	519.133	34.568	6,66	451.368	586.898	2,37	1,54
Jawa Timur	7.401.910	209.234	2,83	6.991.739	7.812.081	7,44	2,73
Banten	923.595	65.993	7,15	794.226	1.052.964	4,91	2,21
Bali	570.474	45.919	8,05	480.458	660.490	3,81	1,95
Nusa Tenggara Barat	1.127.561	66.030	5,86	998.120	1.257.002	4,04	2,01
Nusa Tenggara Timur	1.149.670	39.700	3,45	1.071.844	1.227.496	1,43	1,20
Kalimantan Barat	856.475	51.392	6,00	755.729	957.221	3,20	1,79
Kalimantan Tengah	368.409	27.379	7,43	314.737	422.081	2,09	1,44
Kalimantan Selatan	650.106	27.777	4,27	595.653	704.559	1,23	1,11
Kalimantan Timur	422.632	29.775	7,05	364.263	481.001	2,15	1,47
Kalimantan Utara	90.619	7.739	8,54	75.449	105.789	0,67	0,82
Sulawesi Utara	280.374	14.229	5,08	252.480	308.268	0,74	0,86
Sulawesi Tengah	450.858	21.929	4,86	407.869	493.847	1,10	1,05
Sulawesi Selatan	1.488.203	55.163	3,71	1.380.065	1.596.341	2,16	1,47
Sulawesi Tenggara	422.066	21.461	5,08	379.995	464.137	1,12	1,06
Gorontalo	193.511	16.578	8,57	161.012	226.010	1,45	1,20
Sulawesi Barat	282.904	19.910	7,04	243.873	321.935	1,43	1,20
Maluku	275.464	17.871	6,49	240.431	310.497	1,19	1,09
Maluku Utara	195.897	12.882	6,58	170.643	221.151	0,86	0,93
Papua Barat	65.704	8.308	12,64	49.418	81.990	1,07	1,03
Papua Barat Daya	83.671	6.713	8,02	70.512	96.830	0,55	0,74
Papua	107.988	11.124	10,30	86.181	129.795	1,17	1,08
Papua Selatan	65.133	7.011	10,76	51.388	78.878	0,77	0,88
Papua Pegungh	323.760	24.585	7,59	275.565	371.955	1,91	1,38
Papua Pegunungan	474.655	32.611	6,87	410.727	538.583	2,30	1,52
Indonesia	38.347.469	406.783	1,06	37.550.047	39.144.891	19,61	4,43

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026

**Lampiran 39 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error–RSE*)
Indikator Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi (persen),
Februari 2026**

Provinsi	Tingkat Pekerja Paruh Waktu	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	28,84	1,39	4,82	26,12	31,56	2,08	1,44
Sumatera Utara	25,33	0,86	3,38	23,66	27,01	2,64	1,62
Sumatera Barat	29,02	1,14	3,93	26,78	31,26	1,71	1,31
Riau	26,91	1,39	5,16	24,19	29,63	2,78	1,67
Jambi	30,23	1,60	5,28	27,10	33,37	1,92	1,39
Sumatera Selatan	26,56	1,32	4,98	23,97	29,15	3,63	1,91
Bengkulu	32,54	1,41	4,32	29,79	35,30	0,87	0,93
Lampung	31,45	1,24	3,95	29,02	33,88	3,10	1,76
Kep. Bangka Belitung	24,52	1,56	6,38	21,46	27,59	0,91	0,96
Kepulauan Riau	15,09	1,79	11,85	11,59	18,60	2,28	1,51
DKI Jakarta	12,79	1,24	9,71	10,36	15,23	6,35	2,52
Jawa Barat	20,71	0,75	3,62	19,24	22,19	7,60	2,76
Jawa Tengah	24,53	0,64	2,62	23,27	25,79	4,21	2,05
DI Yogyakarta	23,46	1,61	6,87	20,30	26,62	2,83	1,68
Jawa Timur	30,52	0,79	2,60	28,97	32,07	6,35	2,52
Banten	15,85	1,13	7,13	13,63	18,07	4,93	2,22
Bali	21,80	1,68	7,70	18,51	25,09	3,82	1,96
Nusa Tenggara Barat	35,92	2,05	5,71	31,90	39,94	5,07	2,25
Nusa Tenggara Timur	37,37	1,20	3,22	35,01	39,73	1,68	1,30
Kalimantan Barat	29,46	1,66	5,63	26,21	32,71	3,40	1,84
Kalimantan Tengah	25,36	1,69	6,68	22,04	28,68	1,94	1,39
Kalimantan Selatan	30,24	1,12	3,72	28,04	32,45	1,14	1,07
Kalimantan Timur	21,18	1,27	5,98	18,70	23,67	1,70	1,30
Kalimantan Utara	23,96	2,20	9,19	19,64	28,28	0,89	0,94
Sulawesi Utara	22,15	1,20	5,40	19,81	24,50	0,93	0,96
Sulawesi Tengah	27,78	1,18	4,25	25,47	30,09	0,99	1,00
Sulawesi Selatan	31,34	1,05	3,34	29,29	33,39	2,14	1,46
Sulawesi Tenggara	29,94	1,33	4,44	27,33	32,54	1,05	1,02
Gorontalo	29,82	2,25	7,56	25,40	34,24	1,39	1,18
Sulawesi Barat	35,31	2,53	7,17	30,35	40,27	1,98	1,41
Maluku	28,98	1,83	6,31	25,40	32,56	1,36	1,17
Maluku Utara	29,38	1,68	5,72	26,08	32,67	0,80	0,90
Papua Barat	21,96	2,56	11,66	16,94	26,98	1,01	1,01
Papua Barat Daya	27,20	2,37	8,73	22,55	31,85	0,77	0,88
Papua	23,93	2,07	8,66	19,86	27,99	0,94	0,97
Papua Selatan	30,95	3,35	10,84	24,38	37,53	0,98	0,99
Papua Tengah	36,87	2,15	5,82	32,66	41,07	1,54	1,24
Papua Pegunungan	48,11	3,11	6,47	42,01	54,21	3,38	1,84
Indonesia	25,97	0,26	0,98	25,47	26,47	4,42	2,10

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026

**Lampiran 40 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error-RSE*)
Indikator Kontribusi (*Share*) Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu
Menurut Provinsi (persen), Februari 2026**

Provinsi	Kontribusi Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	51,39	1,80	3,50	47,87	54,92	0,95	0,97
Sumatera Utara	54,01	1,63	3,01	50,82	57,19	2,11	1,45
Sumatera Barat	51,93	1,73	3,34	48,53	55,33	1,09	1,04
Riau	46,85	2,16	4,62	42,61	51,08	1,65	1,28
Jambi	48,87	2,15	4,40	44,66	53,08	1,02	1,01
Sumatera Selatan	55,32	1,54	2,78	52,31	58,33	1,18	1,09
Bengkulu	49,66	1,86	3,75	46,01	53,31	0,50	0,71
Lampung	53,30	1,98	3,71	49,43	57,17	2,46	1,57
Kep. Bangka Belitung	53,81	2,89	5,36	48,16	59,47	0,65	0,81
Kepulauan Riau	57,01	4,29	7,53	48,59	65,42	1,19	1,09
DKI Jakarta	62,23	3,29	5,29	55,78	68,69	3,12	1,77
Jawa Barat	56,74	1,60	2,82	53,60	59,88	5,51	2,35
Jawa Tengah	59,52	1,04	1,75	57,48	61,56	2,39	1,55
DI Yogyakarta	58,39	3,71	6,35	51,12	65,66	2,99	1,73
Jawa Timur	60,19	1,04	1,73	58,16	62,23	3,39	1,84
Banten	55,92	3,10	5,54	49,85	61,98	3,64	1,91
Bali	53,30	2,18	4,09	49,03	57,58	1,11	1,05
Nusa Tenggara Barat	53,48	1,95	3,64	49,67	57,30	1,74	1,32
Nusa Tenggara Timur	60,17	1,27	2,12	57,67	62,67	0,79	0,89
Kalimantan Barat	53,22	1,87	3,51	49,56	56,88	1,22	1,10
Kalimantan Tengah	51,14	2,16	4,23	46,91	55,38	0,70	0,84
Kalimantan Selatan	52,85	1,67	3,17	49,56	56,13	0,74	0,86
Kalimantan Timur	50,78	3,09	6,08	44,73	56,84	1,64	1,28
Kalimantan Utara	56,86	3,30	5,81	50,39	63,33	0,41	0,64
Sulawesi Utara	47,20	2,26	4,79	42,76	51,63	0,58	0,76
Sulawesi Tengah	56,55	2,10	3,71	52,43	60,67	0,82	0,91
Sulawesi Selatan	49,08	1,58	3,23	45,97	52,19	1,52	1,23
Sulawesi Tenggara	52,76	1,77	3,36	49,28	56,24	0,54	0,74
Gorontalo	50,33	2,46	4,89	45,51	55,16	0,48	0,69
Sulawesi Barat	46,62	2,67	5,73	41,38	51,85	0,82	0,91
Maluku	53,09	2,24	4,21	48,70	57,47	0,56	0,75
Maluku Utara	57,28	2,85	4,97	51,70	62,86	0,66	0,81
Papua Barat	52,90	3,58	6,78	45,87	59,93	0,34	0,59
Papua Barat Daya	48,47	3,24	6,68	42,12	54,82	0,36	0,60
Papua	50,09	3,43	6,85	43,37	56,81	0,52	0,72
Papua Selatan	50,83	3,36	6,62	44,23	57,42	0,30	0,55
Papua Tengah	61,85	2,27	3,67	57,40	66,30	0,72	0,85
Papua Pegunungan	48,35	1,93	3,99	44,57	52,13	0,72	0,85
Indonesia	55,97	0,40	0,71	55,19	56,75	2,52	1,59

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026

**Lampiran 41 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error–RSE*)
Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Jumlah Jam Kerja, Februari 2026**

Kategori Jam Kerja	Persentase	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Interval Kepercayaan 95%		Efek Desain	Square Root Design Effect
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0 Jam ¹⁾	1,24	0,05	4,15	1,14	1,34	2,82	1,68
1–34 Jam	33,23	0,28	0,85	32,68	33,79	4,72	2,17
35–48 Jam	39,46	0,30	0,75	38,89	40,04	4,78	2,19
49 Jam ke Atas	26,06	0,28	1,07	25,51	26,61	5,26	2,29

Catatan: ¹⁾ Termasuk sementara tidak bekerja

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026

**Lampiran 42 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error-RSE*)
Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut
Provinsi dan Kegiatan Formal, Februari 2026**

Provinsi	Persentase Penduduk Bekerja di Kegiatan Formal	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	35,85	1,31	3,64	33,29	38,41	1,64	1,28
Sumatera Utara	42,09	1,04	2,46	40,05	44,12	3,01	1,74
Sumatera Barat	35,96	1,15	3,19	33,71	38,21	1,55	1,25
Riau	46,19	1,63	3,52	43,00	49,38	3,02	1,74
Jambi	46,21	1,70	3,68	42,88	49,55	1,85	1,36
Sumatera Selatan	37,14	1,21	3,27	34,76	39,51	2,56	1,60
Bengkulu	36,17	1,63	4,51	32,96	39,37	1,12	1,06
Lampung	31,09	1,27	4,09	28,60	33,59	3,28	1,81
Kep, Bangka Belitung	49,96	1,90	3,81	46,23	53,69	1,00	1,00
Kepulauan Riau	66,38	2,26	3,40	61,95	70,80	2,08	1,44
DKI Jakarta	61,87	1,90	3,07	58,15	65,58	7,00	2,65
Jawa Barat	44,20	1,01	2,29	42,22	46,18	9,18	3,03
Jawa Tengah	39,00	0,80	2,05	37,43	40,57	5,09	2,26
DI Yogyakarta	46,02	2,08	4,53	41,93	50,11	3,42	1,85
Jawa Timur	35,56	0,86	2,42	33,87	37,25	6,94	2,63
Banten	52,19	1,78	3,41	48,69	55,68	6,55	2,56
Bali	50,65	2,07	4,09	46,59	54,70	3,96	1,99
Nusa Tenggara Barat	29,51	1,72	5,83	26,13	32,88	3,95	1,99
Nusa Tenggara Timur	24,72	1,14	4,60	22,49	26,95	1,89	1,38
Kalimantan Barat	41,49	1,57	3,78	38,42	44,57	2,60	1,61
Kalimantan Tengah	49,33	2,00	4,05	45,41	53,24	2,05	1,43
Kalimantan Selatan	43,04	1,40	3,25	40,30	45,78	1,51	1,23
Kalimantan Timur	55,45	1,48	2,67	52,55	58,35	1,56	1,25
Kalimantan Utara	51,67	2,65	5,13	46,47	56,87	0,94	0,97
Sulawesi Utara	44,46	1,56	3,51	41,40	47,51	1,10	1,05
Sulawesi Tengah	34,36	1,60	4,67	31,21	37,50	1,64	1,28
Sulawesi Selatan	36,87	0,98	2,65	34,95	38,79	1,73	1,31
Sulawesi Tenggara	37,93	1,39	3,67	35,21	40,66	1,03	1,01
Gorontalo	39,56	2,22	5,61	35,21	43,92	1,18	1,09
Sulawesi Barat	28,23	1,85	6,56	24,60	31,86	1,20	1,09
Maluku	34,48	1,93	5,60	30,69	38,26	1,39	1,18
Maluku Utara	36,07	1,85	5,12	32,45	39,69	0,87	0,93
Papua Barat	39,65	2,38	6,00	34,98	44,31	0,63	0,79
Papua Barat Daya	43,06	2,26	5,26	38,63	47,50	0,57	0,75
Papua	43,58	2,46	5,65	38,75	48,41	0,98	0,99
Papua Selatan	38,57	2,13	5,53	34,39	42,75	0,36	0,60
Papua Tengah	13,84	1,66	11,99	10,59	17,10	1,79	1,34
Papua Pegunungan	4,63	0,85	18,36	2,96	6,29	1,42	1,19
Indonesia	40,58	0,31	0,76	39,98	41,18	5,08	2,25

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026

**Lampiran 43 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error–RSE*)
Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut
Provinsi dan Kegiatan Informal, Februari 2026**

Provinsi	Persentase Penduduk Bekerja di Kegiatan Informal	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	64,15	1,31	2,03	61,59	66,71	1,64	1,28
Sumatera Utara	57,91	1,04	1,79	55,88	59,95	3,01	1,74
Sumatera Barat	64,04	1,15	1,79	61,79	66,29	1,55	1,25
Riau	53,81	1,63	3,02	50,62	57,00	3,02	1,74
Jambi	53,79	1,70	3,16	50,45	57,12	1,85	1,36
Sumatera Selatan	62,86	1,21	1,93	60,49	65,24	2,56	1,60
Bengkulu	63,83	1,63	2,56	60,63	67,04	1,12	1,06
Lampung	68,91	1,27	1,85	66,41	71,40	3,28	1,81
Kep. Bangka Belitung	50,04	1,90	3,80	46,31	53,77	1,00	1,00
Kepulauan Riau	33,62	2,26	6,71	29,20	38,05	2,08	1,44
DKI Jakarta	38,13	1,90	4,97	34,42	41,85	7,00	2,65
Jawa Barat	55,80	1,01	1,81	53,82	57,78	9,18	3,03
Jawa Tengah	61,00	0,80	1,31	59,43	62,57	5,09	2,26
DI Yogyakarta	53,98	2,08	3,86	49,89	58,07	3,42	1,85
Jawa Timur	64,44	0,86	1,34	62,75	66,13	6,94	2,63
Banten	47,81	1,78	3,73	44,32	51,31	6,55	2,56
Bali	49,35	2,07	4,19	45,30	53,41	3,96	1,99
Nusa Tenggara Barat	70,49	1,72	2,44	67,12	73,87	3,95	1,99
Nusa Tenggara Timur	75,28	1,14	1,51	73,05	77,51	1,89	1,38
Kalimantan Barat	58,51	1,57	2,68	55,43	61,58	2,60	1,61
Kalimantan Tengah	50,67	2,00	3,94	46,76	54,59	2,05	1,43
Kalimantan Selatan	56,96	1,40	2,45	54,22	59,70	1,51	1,23
Kalimantan Timur	44,55	1,48	3,32	41,65	47,45	1,56	1,25
Kalimantan Utara	48,33	2,65	5,49	43,13	53,53	0,94	0,97
Sulawesi Utara	55,54	1,56	2,81	52,49	58,60	1,10	1,05
Sulawesi Tengah	65,64	1,60	2,44	62,50	68,79	1,64	1,28
Sulawesi Selatan	63,13	0,98	1,55	61,21	65,05	1,73	1,31
Sulawesi Tenggara	62,07	1,39	2,24	59,34	64,79	1,03	1,01
Gorontalo	60,44	2,22	3,68	56,08	64,79	1,18	1,09
Sulawesi Barat	71,77	1,85	2,58	68,14	75,40	1,20	1,09
Maluku	65,52	1,93	2,95	61,74	69,31	1,39	1,18
Maluku Utara	63,93	1,85	2,89	60,31	67,55	0,87	0,93
Papua Barat	60,35	2,38	3,94	55,69	65,02	0,63	0,79
Papua Barat Daya	56,94	2,26	3,98	52,50	61,37	0,57	0,75
Papua	56,42	2,46	4,37	51,59	61,25	0,98	0,99
Papua Selatan	61,43	2,13	3,47	57,25	65,61	0,36	0,60
Papua Tengah	86,16	1,66	1,93	82,90	89,41	1,79	1,34
Papua Pegunungan	95,37	0,85	0,89	93,71	97,04	1,42	1,19
Indonesia	59,42	0,31	0,52	58,82	60,02	5,08	2,25

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026

**Lampiran 44 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error-RSE*)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi (persen), Februari
2026**

Provinsi	TPT (%)	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	5,88	0,56	9,52	4,78	6,98	1,32	1,15
Sumatera Utara	5,01	0,42	8,43	4,18	5,84	2,67	1,63
Sumatera Barat	5,51	0,48	8,72	4,57	6,45	1,26	1,12
Riau	4,09	0,50	12,16	3,11	5,06	1,85	1,36
Jambi	3,99	0,60	15,02	2,81	5,16	1,53	1,24
Sumatera Selatan	3,59	0,41	11,37	2,79	4,39	2,01	1,42
Bengkulu	3,23	0,43	13,37	2,38	4,08	0,59	0,77
Lampung	3,95	0,46	11,53	3,06	4,85	2,45	1,57
Kep. Bangka Belitung	4,15	0,54	12,96	3,09	5,20	0,52	0,72
Kepulauan Riau	6,87	1,06	15,39	4,79	8,94	1,69	1,30
DKI Jakarta	6,03	0,79	13,12	4,48	7,58	5,35	2,31
Jawa Barat	6,64	0,50	7,53	5,66	7,62	9,49	3,08
Jawa Tengah	4,24	0,26	6,19	3,72	4,75	3,32	1,82
DI Yogyakarta	3,05	0,54	17,78	1,99	4,11	1,98	1,41
Jawa Timur	3,55	0,25	6,92	3,07	4,03	3,87	1,97
Banten	6,59	0,91	13,81	4,81	8,38	7,35	2,71
Bali	1,59	0,32	19,99	0,97	2,21	1,50	1,23
Nusa Tenggara Barat	2,99	0,52	17,26	1,98	4,00	2,60	1,61
Nusa Tenggara Timur	3,16	0,33	10,56	2,51	3,81	1,01	1,01
Kalimantan Barat	4,57	0,88	19,24	2,85	6,29	4,72	2,17
Kalimantan Tengah	3,44	0,47	13,67	2,52	4,36	0,88	0,94
Kalimantan Selatan	3,80	0,38	10,03	3,05	4,54	0,78	0,88
Kalimantan Timur	5,27	0,69	13,08	3,92	6,63	1,76	1,32
Kalimantan Utara	3,90	0,99	25,30	1,97	5,83	0,89	0,95
Sulawesi Utara	5,75	0,58	10,02	4,62	6,88	0,72	0,85
Sulawesi Tengah	2,95	0,38	12,74	2,22	3,69	0,72	0,85
Sulawesi Selatan	4,95	0,39	7,90	4,18	5,71	1,42	1,19
Sulawesi Tenggara	3,25	0,37	11,36	2,53	3,97	0,55	0,74
Gorontalo	3,17	0,57	18,14	2,04	4,30	0,63	0,79
Sulawesi Barat	2,93	0,58	19,90	1,79	4,08	0,86	0,93
Maluku	5,80	0,69	11,94	4,45	7,16	0,77	0,88
Maluku Utara	4,46	0,71	15,86	3,07	5,84	0,72	0,85
Papua Barat	4,10	0,64	15,49	2,86	5,35	0,28	0,53
Papua Barat Daya	6,41	1,29	20,06	3,89	8,93	0,79	0,89
Papua	7,02	1,00	14,21	5,06	8,98	0,65	0,80
Papua Selatan	5,25	1,37	25,99	2,58	7,93	0,73	0,85
Papua Tengah	3,83	0,91	23,67	2,05	5,61	1,78	1,34
Papua Pegunungan	1,70	0,43	25,11	0,86	2,54	0,96	0,98
Indonesia	4,68	0,12	2,64	4,43	4,92	4,62	2,15

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026

**Lampiran 45 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error–RSE*)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan
(persen), Februari 2026**

Kategori Tingkat Pendidikan	TPT (%)	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	Square Root Design Effect
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pendidikan Dasar Ke Bawah	2,95	0,14	4,63	2,68	3,22	4,69	2,17
Pendidikan Menengah	6,82	0,22	3,25	6,39	7,25	3,40	1,84
Pendidikan Tinggi	5,89	0,31	5,23	5,29	6,49	3,35	1,83
Total	4,68	0,12	2,64	4,43	4,92	4,62	2,15

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026

**Lampiran 46 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error–RSE*)
Persentase Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan, Februari 2026**

Kategori Tingkat Pendidikan	Persentase Pengangguran (%)	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	Square Root Design Effect
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pendidikan Dasar Ke Bawah	32,90	1,15	3,51	30,64	35,17	3,10	1,76
Pendidikan Menengah	50,35	1,09	2,17	48,21	52,49	2,45	1,56
Pendidikan Tinggi	16,75	0,82	4,91	15,13	18,36	2,50	1,58

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026

**Lampiran 47 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error–RSE*)
 Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan,
 Februari 2026**

Kategori Tingkat Pendidikan	Persentase Setengah Penganggur (%)	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pendidikan Dasar Ke Bawah	57,62	0,87	1,51	55,91	59,33	3,05	1,75
Pendidikan Menengah	33,32	0,78	2,33	31,80	34,85	2,67	1,63
Pendidikan Tinggi	9,06	0,47	5,17	8,14	9,97	2,62	1,62

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026

**Lampiran 48 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error-RSE*)
Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang
Termasuk Bukan Angkatan Kerja Menurut Provinsi, Februari 2026**

Provinsi	Jumlah (orang)	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	1.530.798	46.630	3,05	1.439.389	1.622.207	1,28	1,13
Sumatera Utara	3.606.527	110.831	3,07	3.389.263	3.823.791	3,18	1,78
Sumatera Barat	1.276.221	46.529	3,65	1.185.009	1.367.433	1,52	1,23
Riau	1.715.105	61.155	3,57	1.595.222	1.834.988	1,97	1,40
Jambi	977.570	35.232	3,60	908.503	1.046.637	1,14	1,07
Sumatera Selatan	1.955.970	76.726	3,92	1.805.561	2.106.379	2,73	1,65
Bengkulu	483.339	20.810	4,31	442.544	524.134	0,80	0,89
Lampung	2.125.121	68.890	3,24	1.990.074	2.260.168	2,03	1,43
Kep. Bangka Belitung	377.962	15.403	4,08	347.767	408.157	0,56	0,75
Kepulauan Riau	552.103	29.931	5,42	493.429	610.777	1,44	1,20
DKI Jakarta	2.916.859	148.708	5,10	2.625.344	3.208.374	7,00	2,64
Jawa Barat	12.579.566	326.253	2,59	11.940.004	13.219.128	9,26	3,04
Jawa Tengah	7.885.485	164.418	2,09	7.563.171	8.207.799	3,44	1,85
DI Yogyakarta	780.125	55.396	7,10	671.532	888.718	3,51	1,87
Jawa Timur	8.481.148	207.060	2,44	8.075.243	8.887.053	5,13	2,26
Banten	3.357.247	159.595	4,75	3.044.389	3.670.105	7,05	2,66
Bali	904.137	55.384	6,13	795.565	1.012.709	3,03	1,74
Nusa Tenggara Barat	1.011.586	44.917	4,44	923.535	1.099.637	1,79	1,34
Nusa Tenggara Timur	952.003	31.918	3,35	889.433	1.014.573	0,96	0,98
Kalimantan Barat	1.327.356	44.806	3,38	1.239.521	1.415.191	1,36	1,17
Kalimantan Tengah	669.618	26.239	3,92	618.180	721.056	0,92	0,96
Kalimantan Selatan	1.000.472	29.340	2,93	942.956	1.057.988	0,77	0,88
Kalimantan Timur	1.072.839	66.781	6,22	941.926	1.203.752	3,72	1,93
Kalimantan Utara	179.863	15.187	8,44	150.092	209.634	1,13	1,06
Sulawesi Utara	787.597	30.324	3,85	728.153	847.041	1,04	1,02
Sulawesi Tengah	694.974	28.712	4,13	638.689	751.259	1,06	1,03
Sulawesi Selatan	2.395.667	62.705	2,62	2.272.744	2.518.590	1,50	1,23
Sulawesi Tenggara	630.661	21.663	3,43	588.195	673.127	0,66	0,81
Gorontalo	282.754	17.663	6,25	248.128	317.380	0,98	0,99
Sulawesi Barat	293.779	16.214	5,52	261.995	325.563	0,79	0,89
Maluku	478.428	24.988	5,22	429.442	527.414	1,16	1,08
Maluku Utara	324.227	21.066	6,50	282.930	365.524	1,21	1,10
Papua Barat	126.691	12.584	9,93	102.023	151.359	1,10	1,05
Papua Barat Daya	150.615	11.645	7,73	127.787	173.443	0,80	0,89
Papua	253.445	19.267	7,60	215.675	291.215	1,30	1,14
Papua Selatan	120.473	7.864	6,53	105.057	135.889	0,45	0,67
Papua Tengah	203.946	18.295	8,97	168.081	239.811	1,45	1,20
Papua Pegunungan	165.116	25.763	15,60	114.612	215.620	3,55	1,88
Indonesia	64.627.393	538.525	0,83	63.571.715	65.683.071	5,58	2,36

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026

**Lampiran 49 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error–RSE*)
Tingkat Ketidakefektifan Menurut Provinsi (persen), Februari 2026**

Provinsi	Tingkat Ketidakefektifan	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	36,56	0,88	2,42	34,82	38,29	1,24	1,11
Sumatera Utara	30,72	0,75	2,43	29,25	32,18	2,71	1,64
Sumatera Barat	28,24	0,84	2,96	26,60	29,88	1,37	1,17
Riau	33,83	0,93	2,74	32,01	35,64	1,70	1,30
Jambi	34,31	0,90	2,63	32,55	36,08	0,90	0,95
Sumatera Selatan	29,11	0,85	2,92	27,45	30,78	2,06	1,43
Bengkulu	29,83	0,99	3,32	27,88	31,77	0,67	0,82
Lampung	29,35	0,90	3,07	27,58	31,12	2,49	1,58
Kep. Bangka Belitung	31,66	1,16	3,66	29,39	33,93	0,65	0,81
Kepulauan Riau	33,23	1,31	3,93	30,67	35,80	1,12	1,06
DKI Jakarta	34,52	1,53	4,42	31,52	37,51	7,64	2,76
Jawa Barat	31,87	0,66	2,08	30,57	33,17	7,02	2,65
Jawa Tengah	26,10	0,48	1,84	25,16	27,04	3,15	1,78
DI Yogyakarta	25,48	1,35	5,30	22,83	28,12	2,58	1,61
Jawa Timur	25,22	0,55	2,16	24,15	26,29	4,66	2,16
Banten	34,99	1,22	3,47	32,60	37,37	5,47	2,34
Bali	25,37	1,15	4,54	23,12	27,63	2,18	1,48
Nusa Tenggara Barat	23,82	1,03	4,34	21,79	25,84	2,19	1,48
Nusa Tenggara Timur	23,06	0,66	2,88	21,76	24,36	0,90	0,95
Kalimantan Barat	30,35	0,88	2,91	28,62	32,08	1,42	1,19
Kalimantan Tengah	30,80	0,87	2,82	29,10	32,50	0,68	0,82
Kalimantan Selatan	30,93	0,83	2,69	29,30	32,56	0,92	0,96
Kalimantan Timur	33,75	1,22	3,63	31,35	36,15	1,87	1,37
Kalimantan Utara	31,37	1,68	5,36	28,07	34,66	0,66	0,81
Sulawesi Utara	36,97	0,92	2,48	35,18	38,76	0,67	0,82
Sulawesi Tengah	29,36	1,03	3,50	27,35	31,37	1,05	1,03
Sulawesi Selatan	32,41	0,71	2,18	31,02	33,80	1,48	1,22
Sulawesi Tenggara	30,21	0,91	3,02	28,42	31,99	0,72	0,85
Gorontalo	29,67	1,30	4,40	27,11	32,23	0,68	0,83
Sulawesi Barat	26,25	1,28	4,88	23,74	28,76	0,83	0,91
Maluku	32,16	1,22	3,79	29,77	34,55	0,89	0,94
Maluku Utara	31,72	1,72	5,44	28,34	35,10	1,23	1,11
Papua Barat	28,88	1,85	6,42	25,25	32,51	0,64	0,80
Papua Barat Daya	31,42	1,99	6,35	27,51	35,33	0,78	0,88
Papua	34,30	1,87	5,44	30,64	37,96	1,00	1,00
Papua Selatan	35,17	1,79	5,10	31,65	38,68	0,42	0,65
Papua Tengah	18,26	1,58	8,63	15,17	21,35	1,63	1,28
Papua Pegunungan	14,13	2,22	15,68	9,78	18,47	4,15	2,04
Indonesia	29,44	0,20	0,68	29,05	29,83	3,68	1,92

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026

**Lampiran 50 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error-RSE*)
Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, Februari 2026**

Kategori Tingkat Pendidikan	Persentase	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pendidikan Dasar Ke Bawah	52,18	0,35	0,67	51,49	52,87	6,73	2,59
Pendidikan Menengah	34,52	0,26	0,76	34,01	35,03	4,11	2,03
Pendidikan Tinggi	13,30	0,25	1,91	12,80	13,80	7,58	2,75

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026

**Lampiran 51 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error-RSE*) Rata-Rata
Upah/Gaji Bersih Selama Sebulan Buruh/Karyawan/Pegawai
Menurut Lapangan Usaha (rupiah), Februari 2026**

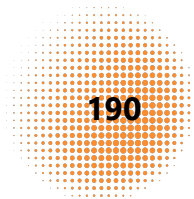
Lapangan Pekerjaan Utama	Rata-rata Upah/ Gaji Bersih Sebulan	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A, Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan	2.425.085	60.312	2,49	2.306.853	2.543.317	2,06	1,44
B, Pertambangan dan Penggalian	4.947.483	190.322	3,85	4.574.385	5.320.580	2,45	1,57
C, Industri Pengolahan	3.289.621	61.072	1,86	3.169.898	3.409.343	5,50	2,35
D, Pengadaan Listrik dan Gas	4.735.035	239.335	5,05	4.265.856	5.204.214	1,16	1,08
E, <i>Treatment</i> Air. <i>Treatment</i> Air Limbah. <i>Treatment</i> dan Pemulihan Material Sampah. dan Aktivitas Remediasi	2.803.273	226.357	8,07	2.359.534	3.247.012	2,28	1,51
F, Konstruksi	3.347.252	54.249	1,62	3.240.906	3.453.599	3,43	1,85
G, Perdagangan Besar dan Eceran. Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	2.850.124	59.080	2,07	2.734.307	2.965.942	3,29	1,81
H, Pengangkutan dan Pergudangan	3.977.182	125.270	3,15	3.731.609	4.222.755	2,43	1,56
I, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	2.588.787	59.979	2,32	2.471.207	2.706.366	3,52	1,88
J, Informasi dan Komunikasi	4.752.543	278.410	5,86	4.206.762	5.298.323	3,38	1,84
K, Aktivitas Keuangan dan Asuransi	5.053.928	261.648	5,18	4.541.007	5.566.850	3,50	1,87
L, Real Estat	4.046.989	523.128	12,93	3.021.477	5.072.502	4,28	2,07
M. N, Aktivitas Profesional dan Perusahaan	3.972.415	224.067	5,64	3.533.166	4.411.664	3,45	1,86
O, Administrasi Pemerintahan. Pertahanan. dan Jaminan Sosial	4.023.211	93.719	2,33	3.839.490	4.206.932	3,53	1,88
P, Pendidikan	2.924.306	61.303	2,10	2.804.131	3.044.481	3,08	1,76
Q, Aktivitas Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.751.936	149.172	3,98	3.459.508	4.044.365	2,87	1,70
R. S. T. U, Aktivitas Jasa Lainnya	2.002.938	49.526	2,47	1.905.849	2.100.026	2,55	1,60
Total	3.287.675	36.781	1,12	3.215.573	3.359.778	7,32	2,71

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026

**Lampiran 52 Kesalahan Baku Relatif (*Relative Standard Error-RSE*)
Rata-Rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi (rupiah),
Februari 2026**

Provinsi	Rata-rata Upah/ Gaji Bersih Sebulan	Kesalahan Baku	Kesalahan Baku Relatif (%)	Selang Kepercayaan 95%		Efek Desain	<i>Square Root Design Effect</i>
				Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	2.708.851	89.191	3,29	2.534.006	2.883.695	1,00	1,00
Sumatera Utara	2.834.664	66.654	2,35	2.703.998	2.965.330	2,91	1,71
Sumatera Barat	2.925.552	89.696	3,07	2.749.718	3.101.387	1,49	1,22
Riau	3.204.627	85.260	2,66	3.037.487	3.371.767	1,72	1,31
Jambi	3.154.942	100.101	3,17	2.958.709	3.351.175	1,36	1,17
Sumatera Selatan	2.974.233	94.171	3,17	2.789.626	3.158.840	1,78	1,34
Bengkulu	2.773.023	102.692	3,70	2.571.712	2.974.335	0,64	0,80
Lampung	2.571.448	93.073	3,62	2.388.993	2.753.903	2,15	1,47
Kep. Bangka Belitung	3.257.460	127.836	3,92	3.006.856	3.508.064	0,91	0,96
Kepulauan Riau	4.740.135	238.807	5,04	4.271.990	5.208.279	2,19	1,48
DKI Jakarta	5.229.472	242.527	4,64	4.754.036	5.704.909	6,89	2,62
Jawa Barat	3.712.133	124.483	3,35	3.468.102	3.956.163	14,13	3,76
Jawa Tengah	2.462.759	44.587	1,81	2.375.354	2.550.164	3,78	1,94
DI Yogyakarta	2.940.990	157.326	5,35	2.632.576	3.249.405	3,18	1,78
Jawa Timur	2.715.212	58.154	2,14	2.601.211	2.829.213	3,84	1,96
Banten	4.197.367	331.187	7,89	3.548.126	4.846.608	15,31	3,91
Bali	4.064.938	132.574	3,26	3.805.047	4.324.830	1,67	1,29
Nusa Tenggara Barat	2.678.084	125.139	4,67	2.432.769	2.923.399	2,35	1,53
Nusa Tenggara Timur	2.563.541	83.425	3,25	2.400.000	2.727.082	0,87	0,93
Kalimantan Barat	2.962.374	75.449	2,55	2.814.468	3.110.280	1,72	1,31
Kalimantan Tengah	3.542.959	97.398	2,75	3.352.025	3.733.892	1,10	1,05
Kalimantan Selatan	3.393.313	114.908	3,39	3.168.053	3.618.574	0,95	0,98
Kalimantan Timur	4.561.415	171.801	3,77	4.224.624	4.898.205	2,46	1,57
Kalimantan Utara	3.963.394	192.544	4,86	3.585.940	4.340.848	0,77	0,88
Sulawesi Utara	3.486.792	108.087	3,10	3.274.904	3.698.679	0,87	0,93
Sulawesi Tengah	3.436.857	186.775	5,43	3.070.713	3.803.001	1,42	1,19
Sulawesi Selatan	3.095.285	125.827	4,07	2.848.620	3.341.950	1,80	1,34
Sulawesi Tenggara	3.201.344	103.550	3,23	2.998.350	3.404.338	0,89	0,94
Gorontalo	2.843.777	144.850	5,09	2.559.820	3.127.734	0,86	0,93
Sulawesi Barat	2.749.811	180.948	6,58	2.395.090	3.104.533	1,05	1,02
Maluku	2.885.206	127.595	4,42	2.635.076	3.135.337	0,83	0,91
Maluku Utara	3.566.838	127.190	3,57	3.317.503	3.816.174	0,60	0,78
Papua Barat	3.629.374	162.160	4,47	3.311.483	3.947.264	0,40	0,63
Papua Barat Daya	3.682.560	142.278	3,86	3.403.645	3.961.475	0,66	0,81
Papua	4.333.585	152.032	3,51	4.035.550	4.631.620	0,32	0,57
Papua Selatan	3.707.110	125.569	3,39	3.460.950	3.953.269	0,25	0,50
Papua Tengah	5.091.978	387.816	7,62	4.331.724	5.852.232	1,09	1,04
Papua Pegunungan	4.310.201	304.056	7,05	3.714.146	4.906.256	0,30	0,55
Indonesia	3.287.675	36.781	1,12	3.215.573	3.359.778	7,32	2,71

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2026





SENSUS
EKONOMI
2026

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3863816

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsHQ@bps.go.id

